



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

LPPD
KOTA JAMBI
TAHUN 2019

**Bagian
Pemerintahan**
Setda Kota Jambi

LPPD
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2019

**ERA BARU
KOTA
JAMBI
TERKIN**



www.bagianpem.jambikota.go.id



DRS. H. SYARIF FASHA, ME
WALIKOTA KOTA JAMBI



DR. dr. H. MAULANA, MKM
WAKIL WALIKOTA KOTA JAMBI



Ir. H. BUDIDAYA, M.For, Sc
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Jambi Tahun 2019 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (3) dimana Bupati/Walikota Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana maksud Pasal 69 Ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Jambi Tahun 2019 merupakan laporan berkala setiap tahunnya yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Penyusunan LPPD merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Kota Jambi berdasarkan (RPJMD) Tahun 2019 dalam pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Jambi Tahun 2019. Semoga materi LPPD ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan panduan dan pembinaan Pemerintahan Daerah serta bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan lebih lanjut untuk tahun-tahun berikutnya.

Jambi, Maret 2020

WALIKOTA JAMBI



DR. H. SYARIF FASHA, ME

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. DASAR HUKUM	1
B. GAMBARAN UMUM DAERAH	3
1. Kondisi Geografis Daerah	5
2. Gambaran Umum Demografis	6
3. Kondisi Ekonomi	
a. Potensi Unggulan Kota Jambi	9
b. Pertumbuhan Ekonomi	10
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	
A. VISI DAN MISI	11
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH	
1. Strategi Pembangunan Daerah	12
2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	
C. PRIORITAS DAERAH	18
BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
A. URUSAN KONKUREN	19
a. Ringkasan Urusan Wajib	
1. Urusan Pendidikan	22
2. Urusan Kesehatan	36
3. Urusan Lingkungan Hidup	53
4. Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	59
5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	74
6. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	82
7. Urusan Penanaman Modal	85
8. Urusan Koperasi & UMKM	91
9. Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil	101
10. Urusan Ketenagkerjaan	108
11. Urusan Pangan	113
12. Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	119
13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	132
14. Urusan Perhubungan	141
15. Urusan Komunikasi dan Informatika	147
16. Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa	151
17. Urusan Sosial	159
18. Urusan Kebudayaan dan Pariwisata	184
19. Urusan Kerasipan dan Perpustakaan	192
20. Urusan Perpustakaan	196
b. Ringkasan Urusan Pilihan	
1. Urusan Pertanian	197
2. Urusan Perindustrian dan Perdagangan	203

B.	RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)	204
C.	RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (Kesbangpol).....	433
D.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	
1.	Tataran Pengambil Kebijakan	453
2.	Tataran Pelaksana Kebijakan	
1)	Administrasi Umum (8 aspek).....	456
2)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	458
3)	Urusan Pemerintahan Umum	
4)	Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Wajib dan Pilihan	
BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019		460
BAB V TUGAS PEMBANTUAN		
A.	TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN PERTANIAN	464
1.	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	
2.	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	
3.	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	
B.	TUGAS PEMBANTUAN DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA	467
C.	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI	468
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN		
A.	KERJASAMA ANTAR DAERAH	469
B.	KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA	486
C.	KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH	
D.	PEMBINAAN BATAS WILAYAH	506
E.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	507
F.	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.....	520
BAB VII PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL		
A.	URUSAN PEKERJAAN UMUM	523
B.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	525
C.	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM	
BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH		
A.	TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN	543
B.	PENGUKUARAN CAPAIAN KINERJA.....	
BAB IX P E N U T U P		

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi ;
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 16);
21. Peraturan Walikota Jambi Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 77)
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

B. Gambaran Umum Daerah

Kota Jambi merupakan Ibukota Provinsi Jambi yang mana wilayahnya dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi baik dari arah Utara, Selatan, Barat maupun Timur, Luas Kota Jambi 205,38 Km.

Kota Jambi terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dan terdiri dari 62 (Enam Puluh Dua) Kelurahan yaitu :

1. Kecamatan Kota Baru
 - 1) Kelurahan Suka Karya
 - 2) Kelurahan Simpang III Sipin
 - 3) Kelurahan Paal V (Lima)
 - 4) Kelurahan Kenali Asam Bawah
 - 5) Kelurahan Kenali Asam Atas
2. Kecamatan Telanaipura
 - 1) Kelurahan Simpang IV (Empat) Sipin
 - 2) Kelurahan Buluran Kenali
 - 3) Kelurahan Teluk Kenali
 - 4) Kelurahan Penyengat Rendah
 - 5) Kelurahan Pematang Sultur
3. Kecamatan Jelutung
 - 1) Kelurahan Jelutung
 - 2) Kelurahan Kebun Handil
 - 3) Kelurahan Cempaka Putih
 - 4) Kelurahan Talang Jauh
 - 5) Kelurahan Lebak Bandung
 - 6) Kelurahan Payo Lebar
 - 7) Kelurahan Handil Jaya
4. Kecamatan Pasar Jambi
 - 1) Kelurahan Pasar Jambi
 - 2) Kelurahan Beringin
 - 3) Kelurahan Sungai Asam
 - 4) Kelurahan Orang Kayo Hitam
5. Kecamatan Jambi Timur
 - 1) Kelurahan Sijenjang
 - 2) Kelurahan Kasang Jaya

- 3) Kelurahan Talang Banjar
 - 4) Kelurahan Budiman
 - 5) Kelurahan Sulanjana
 - 6) Kelurahan Kasang
 - 7) Kelurahan Tanjung Sari
 - 8) Kelurahan Rajawali
 - 9) Kelurahan Tanjung Pinang
6. Kecamatan Jambi Selatan
- 1) Kelurahan Pasir Putih
 - 2) Kelurahan Tambak Sari
 - 3) Kelurahan The Hok
 - 4) Kelurahan Wijaya Pura
 - 5) Kelurahan Pakuan Baru
7. Kecamatan Danau Teluk
- 1) Kelurahan Pasir Panjang
 - 2) Kelurahan Tanjung Raden
 - 3) Kelurahan Olak Kemang
 - 4) Kelurahan Tanjung Pasir
 - 5) Kelurahan Ulu Gedong
8. Kecamatan Pelayangan
- 1) Kelurahan Arab Melayu
 - 2) Kelurahan Mudung Laut
 - 3) Kelurahan Tengah
 - 4) Kelurahan Tahtul Yaman
 - 5) Kelurahan JelmU
 - 6) Kelurahan Tanjung Johor
9. Kecamatan Alam Barajo
- 1) Kelurahan Bagan Pete
 - 2) Kelurahan Kenali Besar
 - 3) Kelurahan Rawasari
 - 4) Kelurahan Beliung
 - 5) Kelurahan Mayang Mangurai
10. Kecamatan Danau Sipin
- 1) Kelurahan Legok

- 2) Kelurahan Sungai Putri
- 3) Kelurahan Murni
- 4) Kelurahan Solok Sipin
- 5) Kelurahan Selamat

11. Kecamatan Paal Merah

- 1) Kelurahan Talang Bakung
- 2) Kelurahan Payo Selincah
- 3) Kelurahan Eka Jaya
- 4) Kelurahan Lingkar Selatan
- 5) Kelurahan Paal Merah

1. Kondisi Geografis Daerah

Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak diantara 103°30'1,67" Bujur Timur sampai 103°40'0,22" Bujur Timur, 01°30'2,98" Lintang Selatan sampai 01°40'1,07" Lintang Selatan. Geografi wilayah Kota Jambi secara keseluruhan terdiri atas daratan dengan Luas 16.991 ha atau 169,91 Km². Topografi wilayah Kota Jambi terdiri dari sebagian besar datar, bergelombang dan sedikit curam dengan Luas kemiringan lahan masing-masing sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|-------------|
| a. Datar | = 11.326 ha |
| b. Bergelombang | = 8.081 ha |
| c. Curam | = 41 ha |

Wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kisaran 10-60 m dari permukaan laut. Berdasarkan Kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 1-10 meter dari Permukaan Laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Timur, dan Kota Baru sebagian besar berada pada ketinggian 10-40 meter dari permukaan laut.

Jarak Kota Jambi ke beberapa Kota dan Kabupaten dalam Provinsi Jambi adalah :

- | | | | | |
|----|------------|---|--------------|--------|
| 1. | Kota Jambi | ➔ | Muara Bulian | 60 Km |
| 2. | Kota Jambi | ➔ | Muara Bungo | 252 Km |
| 3. | Kota Jambi | ➔ | Bangko | 255 Km |
| 4. | Kota Jambi | ➔ | Sungai Penuh | 419 Km |

5.	Kota Jambi	➔	Kuala Tungkal	131 Km
6.	Kota Jambi	➔	Sarolangun	179 Km
7.	Kota Jambi	➔	Muara Sabak	129 Km
8.	Kota Jambi	➔	Muara Tebo	206 Km
9.	Kota Jambi	➔	Sengeti	29 Km

Dari sisi iklim, Kota Jambi termasuk beriklim tropis. Curah Hujan di Kota Jambi selama Tahun 2019 beragam antara 70,1 mm sampai 209 mm dengan jumlah hari hujan antara 6 hari sampai 26 hari per bulannya. Kecepatan angin di tiap bulan hampir merata antara 11 knots hingga 25 knots, sedangkan rata-rata kelembaban udara berkisar 98 % - 100 %.

Selama Tahun 2019 rata-rata suhu di Kota Jambi berkisar antara 26,8 °C sampai 27,8 °C dengan suhu maksimum 34,6 °C yang terjadi pada bulan Maret dan Agustus dan suhu minimum 21,2 °C terjadi pada bulan Mei.

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah Penduduk Kota Jambi sampai dengan Tahun 2019 berjumlah 616.355 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2019

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	TELANAIPURA	25,922	25,345	51,267
2.	JAMBI SELATAN	29,931	29,480	59,411
3.	JAMBI TIMUR	35,509	34,281	69,790
4.	PASAR JAMBI	6,643	6,664	13,307
5.	PELAYANGAN	7,043	6,811	13,854
6.	DANAU TELUK	6,635	6,454	13,089
7.	KOTA BARU	39,400	38,078	77,478
8.	JELUTUNG	31,229	31,154	62,383
9.	ALAM BARAJO	51,529	50,171	101,700
10.	DANAU SIPIN	24,055	23,539	47,594

11.	PAAL MERAH	52,340	50,490	102,830
JUMLAH		310,236	302,467	616.355

Sumber : gis.dukcapil.kemendagri 2019

Struktur Penduduk Kota Jambi Tahun 2019
JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK UMUR 16 - 18 TAHUN

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	TELANAIPURA	1.421	1.389	2.810
2.	JAMBI SELATAN	1.597	1.445	3.042
3.	JAMBI TIMUR	1.775	1.681	3.456
4.	PASAR JAMBI	332	289	621
5.	PELAYANGAN	351	345	696
6.	DANAU TELUK	333	322	655
7.	KOTA BARU	2.032	1.854	3.886
8.	JELUTUNG	1.581	1.587	3.168
9.	ALAM BARAJO	2.729	2.683	5.412
10.	DANAU SIPIN	1.228	1.268	2.496
11.	PAAL MERAH	2.818	2.623	5.441
	JUMLAH	16.197	15.486	615.675

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2019

Struktur Penduduk Kota Jambi Tahun 2019
JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK UMUR 13 - 15 TAHUN

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	TELANAIPURA	1.408	1.293	2.701
2.	JAMBI SELATAN	1.537	1.471	3.008
3.	JAMBI TIMUR	1.729	1.589	3.318
4.	PASAR JAMBI	293	287	580
5.	PELAYANGAN	323	349	672
6.	DANAU TELUK	334	307	641
7.	KOTA BARU	2.046	1.843	3.889
8.	JELUTUNG	1.585	1.444	3.029
9.	ALAM BARAJO	2.759	2.716	5.475
10.	DANAU SIPIN	1.301	1.156	2.457
11.	PAAL MERAH	2.839	2.593	5.432
	JUMLAH	16.154	15.048	31.202

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2019

**Struktur Penduduk Kota Jambi Tahun 2019
JUMLAH PENDUDUK YANG MEMILIKI KTP**

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	TELANAIPURA	26.969	27.675	54.644
2.	JAMBI SELATAN	37.308	37.609	74.917
3.	JAMBI TIMUR	28.454	28.510	56.964
4.	PASAR JAMBI	4.831	4.920	9.751
5.	PELAYANGAN	4.875	4.686	9.561
6.	DANAU TELUK	4.492	4.407	8.899
7.	KOTA BARU	42.685	42.849	85.534
8.	JELUTUNG	22.823	23.377	46.200
9.	ALAM BARAJO	15.670	15.057	30.727
10.	DANAU SIPIN	6.470	6.046	12.516
11.	PAAL MERAH	15.093	14.254	29.347
	JUMLAH	209.670	209.390	419.060

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2019

**Struktur Penduduk Kota Jambi Tahun 2019
JUMLAH PENDUDUK YANG WAJIB KTP**

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	TELANAIPURA	18.538	18.419	36.957
2.	JAMBI SELATAN	21.464	21.556	43.020
3.	JAMBI TIMUR	25.595	25.179	50.774
4.	PASAR JAMBI	4.917	5.028	9.945
5.	PELAYANGAN	4.988	4.833	9.821
6.	DANAU TELUK	4.720	4.637	9.357
7.	KOTA BARU	27.689	27.297	54.986
8.	JELUTUNG	22.381	22.856	45.237
9.	ALAM BARAJO	35.889	35.501	71.390
10.	DANAU SIPIN	17.143	17.161	34.304
11.	PAAL MERAH	36.566	35.694	72.260
	JUMLAH	219.890	218.161	438.051

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2019

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

- 1) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- 2) Pengangkutan dan Komunikasi
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Jasa-jasa

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir)

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada tahun 2019 mencapai 98,52 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Sektor perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 30,24 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 0,21 persen (*Data Kota Jambi dalam Angka 2017, PDRB Kota Jambi Seri 2010 Jambi atas Dasar Harga berlaku Tahun 2015-2017*).

Struktur Ekonomi

Dalam pembentukan struktur perekonomian di Kota Jambi berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2015-2017, Sektor perdagangan besar dan ecran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi tertinggi, yaitu sebesar 30,24 persen, selanjutnya Sektor Transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 12,66 persen dan kemudian diikuti oleh Sektor Industri Pengolahan sebesar 10,77 persen.

Sedangkan 3 sektor yang memberikan kontribusi terendah berturut-turut adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,21 persen, sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,25 dan Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,21 persen

Pendapatan per Kapita

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk Kota Jambi dapat dilihat melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Berdasarkan atas harga berlaku menurut lapangan usaha Tahun 2015-2017 (juta rupiah) :

- Pada Tahun 2015 sebesar 15.851.953,8
- Pada Tahun 2016 meningkat menjadi 16.936.442,1
- Pada Tahun 2017 meningkat menjadi 17.728.338,8

Tingkat Inflasi

Inflasi Kota Jambi menurut Kelompok Barang dan Jasa Tahun Kalender 2014-2016 (Persen).

No	Komoditi	2014	2015	2016
1	Bahan Makanan	12,10	-3,05	7,20
2	Mkn Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	5,56	8,29	7,02
3	Perum, Air, Listrik Gas & Bahan Bakar.	9,45	2,90	3,27
4	Sandang	0,66	0,39	1,72
5	Kesehatan	2,95	2,88	9,08
6	Pendidikan, Rekreasi, Olahraga	1,91	3,62	6,80
7	Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	13,11	-1,04	-0,37
	Umum	8,72	1,37	4,54

(Data Kota Jambi dalam Angka 2017)

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

A. VISI DAN MISI

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Jambi Tahun 2018-2023, memuat Visi dan Misi Kota Jambi, sebagai berikut :

Visi

“ TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA ”

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan kedalam 5 Misi yang menjadi pedoman bagi Pembangunan Kota Jambi, yaitu

1. Penguatan Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan Serta Penataan Lingkungan
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan
5. Meningkatkan Kualitas Masyarakat Perkotaan

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018–2023 adalah :

- a. Pemantapan peran dan fungsi kota
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta
- c. Penyediaan ruang yang nyaman dan berkelanjutan

- d. Peningkatan Pengurangan timbunan sampah dari sumbernya
- e. Pengembangan kewirausahaan dan penyediaan ruang yang representatif untuk kegiatan perdagangan dan jasa
- f. Peningkatan mutu dan akses pendidikan
- g. Peningkatan mutu dan akses kesehatan
- h. Peningkatan toleransi antar umat beragama
- i. Peningkatan Penyerapan tenaga kerja
- j. Penurunan angka kelahiran
- k. Peningkatan Peran perempuan di pemerintahan
- l. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan public
- m. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- n. Peningkatan penanganan dan pelayanan PMKS
- o. Penyediaan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pemuda, seni budaya dan olah raga
- p. Peningkatan jumlah dan kualitas tujuan wisata
- q. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota ditujukan untuk mendorong

2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan merupakan langkah-langkah konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap misi yang dijalankan guna pencapaian visi. Arah kebijakan pembangunan Kota Jambi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Penguatan Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi dan Informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan dan mewujudkan Permbangunan Infrastruktur	1. Terbangun dan terpeliharanya secara merata infrastruktur jalan, drainase,		Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar

Perkotaan yang berkualitas	prasarana dasar lingkungan perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan peran dan fungsi kota • Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta 	
	2. Terbangunnya jaringan penerangan dan air bersih sampai tingkat kelurahan secara merata dan berkualitas		
Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpadu dan Nyaman	3. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan		Meningkatkan dan menata sarana dan prasarana perhubungan
Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Hijau, Nyaman dan Berkelanjutan	4. Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, Penataan kawasan sepadan sungai dan danau serta perluasan RTH	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan ruang yang nyaman dan berkelanjutan • Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Menata, mengelola dan memantapkan ruang kota dan LH • Meningkatkan dan memperluas RTH
	5. Terwujudnya Kualitas pengelolaan LH dan Persampahan yang baik dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan timbulan sampah dari sumbernya • Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta 	Meningkatkan kinerja dan cakupan pengelolaan persampahan

Misi 2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Mewujudkan Peningkatan Kinerja Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan melalui Penerapan Kebijakan Ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, menyeluruh, konsisten potensi daerah	6. Terwujudnya peningkatan produktivitas UMKM, IKM dan aktivitas perekonomian	Pengembangan kewirausahaan dan penyediaan ruang yang representatif untuk kegiatan perdagangan dan jasa	Mendorong dan meningkatkan tumbuh kembangnya wirausaha baru
	7. Terbangun dan terpeliharanya pasar-pasar tradisional		
	8. Terciptanya ruang representatif bagi PKL		
	9. Terwujudnya Peningkatan IKM yang mampu mengakses pasar		

Misi 3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan Serta Penataan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi	10. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang unggul,	Peningkatan mutu dan akses pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan rasio populasi usia sekolah • Meningkatkan mutu tenaga

melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata	terjangkau dan Merata		pendidik <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan saran dan prasarana pendidikan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan revitalisasi infrastruktur kesehatan	11.Tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk semua	Peningkatan mutu dan akses kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan mutu tenaga medis dan paramedis • Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan • Meningkatkan pelayanan kesehatan
Peningkatan Ketentraman Kehidupan Beragama	12.Terwujudnya peningkatan kerukunan kehidupan beragama	Peningkatan toleransi antar umat beragama	Meredam potensi konflik antar umat beragama
Pengembangan Lapangan Usaha dan Penciptaan Kesempatan Kerja	13.Terciptanya lapangan pekerjaan 14.Tersedianya tenaga kerja lokal yang berdaya saing	Peningkatan Penyerapan tenaga kerja	Mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja
Peningkatan Kesejahteraan Gender di semua aspek pembangunan	15.terkendalinya angka kelahiran penduduk	Penurunan angka kelahiran	Mendorong partisipasi aktif Pasangan Usia Subur

	16. Terwujudnya peningkatan peran serta perempuan dalam pemerintahan	Peningkatan peran perempuan di Pemerintah	Meningkatkan porsi perempuan dalam jabatan pemerintahan
--	--	---	---

Misi 4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government)	17. Tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan publik	Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik	Menerapkan SOP dalam pelayanan publik
	18. Terciptanya peningkatan kinerja pemerintahan	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Menerapkan mekanisme penilaian kinerja aparatur dan Standar Pelayanan Minimal
	19. Terciptanya SDM aparatur yang berkualitas		

Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Masyarakat Perkotaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Peningkatan Peran serta Seluruh Lapisan Masyarakat dalam Meningkatkan	20. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan PMKS	Peningkatan penanganan dan pelayanan PMKS	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penyuluhan, pembinaan dan penanganan PMKS Meningkatkan kesejahteraan

Kesejahteraan Sosial Dengan Mengembangkan Seni, Budaya serta Memperhatikan Kearifan Lokal			masyarakat miskin
	21. Terwujudnya peran pemuda, kegiatan seni budaya dan olahraga	Penyediaan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pemuda, seni budaya dan olahraga	Membangun, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana kegiatan pemuda, seni budaya dan olahraga
	22. Terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisata	Peningkatan jumlah dan kualitas tujuan wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana tujuan wisata • Memberdayakan lembaga adat dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah • Meningkatkan promosi dan pelayanan kepariwisataan

C. PRIORITAS DAERAH

Program-program pembangunan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi jangka menengah yang telah ditetapkan diklasifikasikan berdasarkan prioritas dalam pembangunan Daerah Kota Jambi yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,
2. Peningkatan aktivitas perekonomian,
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar perkotaan,
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan,
5. Pemberdayaan Masyarakat & Peningkatan Kesejahteraan sosial,
6. Optimalisasi pranata pemerintahan (*good governance*)

BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Urusan Konkuren

a. Ringkasan Urusan Wajib

NO	URUSAN WAJIB	TOTAL ANGGARAN	REALISASI BELANJA	NAMA SKPD PELAKSANA
1.	Pendidikan	509.878.705.168,00	440.000.547.997,8	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan	184.391.747.360,00	165.988.369.202,13	Dinas Kesehatan
		128.323.611.179,00	119.147.147.421,00	RSUD H. Abd. Manap RSUD H. Abdurahman Sayoeti
3.	Lingkungan Hidup	58.468.881.540,00	52.655.517.517	Dinas Lingkungan Hidup
4.	PU & PR	285.341.621.558,00	277.513.901.307,00	Dinas Pekerjaan Umum
5.	PR & KP	40.804.586.730,00	38.868.773.354,00	Dinas Tata Ruang dan Perumahan
6.	Kepemudaan & Olah Raga	10.950.194.718,00	10.525.640.776,00	Dinas Pemuda & Olahraga
7.	Penanaman Modal	83.42.250.972,00	7.577.162.954,00	DPMPPT
8.	Koperasi & UKM	8.515.208.900,00	7.651.547.469,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM
9.	Kependudukan & Capil	11.971.870.548,00	11.233.973.677,00	Dinas Kependudukan & Capil
10.	Ketenagkerjaan	8.515.208.900,00	7.651.547.469,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM
11.	Pangan	25.810.690.152,00	22.867.400.591,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
12.	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	15.096.032.442,00	13.861.860.285,00	DPMPPA
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.517.135.007,00	10.403.694.755,00	DPPKB
14.	Perhubungan	27.264.001.685,00	25.504.272.474,9,00	Dinas Perhubungan
15.	Komunikasi & Informatika	9.588.229.195,00	8.579.531.603,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	15.096.032.442,00	13.861.860.285,00	DPMPPA
17.	Sosial	9.586.957.344,00	8.372.818.362,00	Dinas Sosial
18.	Kebudayaan	7.779.289.386,00	7.159.145.333,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
19.	Kearsipan	9.227.642.375,00	8.413.972.948,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
20.	Perpustakaan	9.227.642.375,00	8.413.972.948,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2. Ringkasan Urusan Pilihan.

NO	URUSAN PILIHAN	TOTAL ANGGARAN	RELISASI BELANJA	NAMA SKPD PELAKSANA
1.	Kelautan dan Perikanan	25.810.690.152,00	22.867.400.591,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Pertanian	25.810.690.152,00	22.867.400.591,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.	Pariwisata	7.779.289.386,00	7.159.145.333,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.	Perindustrian	21.734.535.405,00	19.621.035.373,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Perdagangan	21.734.535.405,00	19.621.035.373,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)

NO	URUSAN	TOTAL ANGGARAN	RELISASI BELANJA	NAMA SKPD PELAKSANA
1.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)	13.376.458.423,00	11.796.082.682,00	BAPPEDA
		19.329.664.188,00	14.892.960.939,00	BPKAD
		29.229.669.474,00	18.011.909.775,00	BKPSDMD
		81.088.864.522,00	67.855.391.920,00	SEKRETARIAT DPRD
				SEKRETARIAT DAERAH
		26.657.134.385,00	23.767.170.477,00	BPPRD
		15.909.756.628,00	13.381.801.250,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		14.924.404.203,00	13.627.041.587,00	KECAMATAN JELUTUNG
		12.562.562.490,00	12.095.420.950,00	KECAMATAN TELANAIPURA
		16.469.638.019,00	15.375.518.370,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
		12.563.180.537,00	11.707.025.800,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
		12.723.690.797,00	11.967.708.247,00	KECAMATAN KOTABARU
		8.934.163.647,00	8.097.832.688,00	KECAMATAN PASAR JAMBI
		10.219.074.198,00	9.092.463.574,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		10.977.395.605,00	10.176.456.196,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		14.964.000.222,00	14.103.514.576,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
11.966.903.366,00	11.263.705.265,00	KECAMATAN DANAU SIPIN		
12.653.245.455,00	11.838.261.431,00	KECAMATAN PAAL MERAH		

4. RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (Kesbangpol)

NO	URUSAN	TOTAL ANGGARAN	RELISASI BELANJA	NAMA SKPD PELAKSANA
1.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.316.755.457,00	4.940.181.635,00	BADAN KESBANG POL

A. URUSAN KONKUREN

a. Ringkasan Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi

1) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi, dengan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.1.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.01.1.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.1.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor
1.01.1.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01.1.01.01.01.12	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.1.01.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga
1.01.1.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman
1.01.1.01.01.01.19	Penyediaan jasa penunjang Adm/teknis Pemerintah
1.01.1.01.01.01.20	Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam
1.01.1.01.01.01.21	Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.1.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor
1.01.1.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN
1.01.1.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur
1.01.1.01.01.02.11	Pengadaan peralatan perkantoran
1.01.1.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.1.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.01.1.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.01.1.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
1.01.1.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.1.01.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01.1.01.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.01.1.01.01.05.04	Penilaian Angka Kredit
1.01.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.01.06.08	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.01.1.01.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
1.01.1.01.01.08	Program Perencanaan SKPD
1.01.1.01.01.08.01	Penyusunan Renstra SKPD
1.01.1.01.01.08.02	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
1.01.1.01.01.09	Program Pengembangan Data/Informasi
1.01.1.01.01.09.01	Pengembangan Data/Informasi
1.01.1.01.01.23	Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan
1.01.1.01.01.23.41	Penyelenggara akreditasi SD
1.01.1.01.01.23.47	Workshop Penguatan dan Implementasi Kurikulum PAUD dan DIKMAS serta penilaian pelaksanaan kurikulum

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN
1.01.1.01.01.23.48	Peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan DIKMAS
1.01.1.01.01.23.49	Pengelolaan Bantuan Operasional PAUD
1.01.1.01.01.23.50	Peningkatan Minat Bakat Peserta didik PAUD dan DIKMAS
1.01.1.01.01.23.51	Workshop Penguatan dan Implementasi Kurikulum SD serta penilaian pelaksanaan
1.01.1.01.01.23.52	Peningkatan sarana prasarana SD
1.01.1.01.01.23.53	Pengembangan Kelembagaan SD
1.01.1.01.01.23.54	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD
1.01.1.01.01.23.55	Peningkatan minat bakat, lomba kreatifitas, olahraga peserta didik SD
1.01.1.01.01.23.56	Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Sekolah SD
1.01.1.01.01.23.57	Perlindungan penghargaan dan apresiasi Peserta Didik SD berprestasi tingkat Nasional
1.01.1.01.01.23.58	Workshop Penguatan dan Implementasi Kurikulum SMP serta penilaian pelaksanaan kurikulum
1.01.1.01.01.23.59	Peningkatan sarana prasarana SMP
1.01.1.01.01.23.60	Pengembangan Kelembagaan SMP
1.01.1.01.01.23.61	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SMP
1.01.1.01.01.23.62	Peningkatan minat bakat, lomba kreatifitas, olahraga Peserta didik SMP
1.01.1.01.01.23.63	Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru
1.01.1.01.01.23.64	Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Nasional SMP
1.01.1.01.01.23.65	Penyelenggaran Akreditasi SMP
1.01.1.01.01.23.67	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan
1.01.1.01.01.23.68	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengelola dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS
1.01.1.01.01.23.69	Penyelenggaraan Akreditasi PAUD dan DIKMAS
1.01.1.01.01.23.70	Penyelenggaraan Pengembangan PAUD dan DIKMAS

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN
1.01.1.01.01.23.71	Orientasi calon kepala sekolah, peningkatan kompetensi kepala sekolah SD
1.01.1.01.01.23.72	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas SD, Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan SD
1.01.1.01.01.23.74	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan, tenaga laboratorium SMP
1.01.1.01.01.23.75	Rapat Koordinasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Publikasi Pendidikan
1.01.1.01.01.23.76	Perlindungan Penghargaan dan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP tingkat Nasional
1.01.1.01.01.23.77	Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru
1.01.1.01.01.23.78	Penguatan MGMP, KKG, MKKS, MKPS, KKPS
1.01.1.01.01.23.79	Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup

2) Jumlah Pegawai, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Jambi sampai dengan Desember 2019 adalah 8.228 orang terdiri dari 4.497 orang PNS (termasuk guru dan TU sekolah) dan 3.731 orang tenaga non PNS.

JUMLAH PEGAWAI			TINGKAT PENDIDIKAN					GOLONGAN			PEJABAT	
PNS	NON PNS	JML	SLTA	D II	D III	S1	S2	II	III	IV	STRL	FUNGSIONAL (PNS)
4.497	3.731	8.228	143	79	140	7.274	188	216	1.354	2.927	27	4.507

3) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Pendidikan Kota Kota Jambi untuk Tahun Anggaran 2019 yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi adalah sebesar Rp1.846.258.216,875,- terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 318.768.826.171,-
 - Belanja Langsung sebesar Rp. 112.996.190.652,-
- Jumlah Rp. 508.975.395.448,-**

Alokasi anggaran tahun 2019 terutama untuk anggaran belanja langsung mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Rp119.412.166.000,- menjadi Rp120.707.506.966,- hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 ini Kota Jambi

khususnya bidang pendidikan mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana BOS Pusat yang masuk ke dalam dokumen APBD Dinas Pendidikan Kota Jambi. Dari keseluruhan anggaran belanja langsung tersebut diperuntukkan untuk peningkatan akses, mutu dan tata kelola pendidikan.

Untuk lebih jelasnya, anggaran pembangunan pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi tahun anggaran 2019, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

RENCANA ANGGARAN 2019

No.	NAMA PROGRAM	PAGU (Rp)
BELANJA DAERAH		508.975.395.448
BELANJA TIDAK LANGSUNG		388.267.888.482
BELANJA LANGSUNG		120.707.506.966
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.845.731.250
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.119.580.000
3	Program peningkatan disiplin aparatur	223.895.000
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	270.237.500
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.700.000
6	Program Perencanaan SKPD	3.350.000
7	Program Pengembangan Data/Informasi	387.162.500
8	Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan	111.853.850.716

TABEL RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

NO.	KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
BELANJA DAERAH			508,975,395,448.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG			388,267,888,482.00
BELANJA LANGSUNG			120,707,506,966.00
<i>I</i>	<i>1.01.1.01.01.01</i>	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>5,845,731,250.00</i>
1	1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	-

NO.	KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
2	1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	375,000,000.00
3	1.01.1.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	49,500,000.00
4	1.01.1.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	994,660,000.00
5	1.01.1.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	217,800,000.00
6	1.01.1.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	71,631,250.00
7	1.01.1.01.01.01.12	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	25,000,000.00
8	1.01.1.01.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	35,000,000.00
9	1.01.1.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,200,000.00
10	1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	132,000,000.00
11	1.01.1.01.01.01.19	Penyediaan jasa penunjang Adm/teknis Pemerintah	2,852,700,000.00
12	1.01.1.01.01.01.20	Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	174,240,000.00
13	1.01.1.01.01.01.21	Perjalanan Dinas	913,000,000.00
II	1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,119,580,000.00
14	1.01.1.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	636,015,000.00
15	1.01.1.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	70,000,000.00
16	1.01.1.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	350,985,000.00
17	1.01.1.01.01.02.11	Pengadaan peralatan perkantoran	70,000,000.00
18	1.01.1.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	252,720,000.00
19	1.01.1.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	659,560,000.00
20	1.01.1.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	47,300,000.00

NO.	KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
21	1.01.1.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	33,000,000.00
III	1.01.1.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	223,895,000.00
22	1.01.1.01.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	223,895,000.00
IV	1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	270,237,500.00
23	1.01.1.01.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	149,687,500.00
24	1.01.1.01.01.05.04	Penilaian Angka Kredit	120,550,000.00
V	1.01.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,700,000.00
25	1.01.1.01.01.06.08	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1,850,000.00
26	1.01.1.01.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1,850,000.00
VI	1.01.1.01.01.08	Program Perencanaan SKPD	3,350,000.00
27	1.01.1.01.01.08.01	Penyusunan Renstra SKPD	1,500,000.00
28	1.01.1.01.01.08.02	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1,850,000.00
VII	1.01.1.01.01.09	Program Pengembangan Data/Informasi	387,162,500.00
29	1.01.1.01.01.09.01	Pengembangan Data/Informasi	387,162,500.00
VIII	1.01.1.01.01.23	Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan	111,853,850,716.00
30	1.01.1.01.01.23.41	Penyelenggara akreditasi SD	21,037,500.00
31	1.01.1.01.01.23.47	Workshop Penguatan dan Implementasi Kurikulum PAUD dan DIKMAS serta penilaian pelaksanaan kurikulum	500,087,500.00
32	1.01.1.01.01.23.48	Peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan DIKMAS	1,005,400,000.00

NO.	KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
33	1.01.1.01.01.23.49	Pengelolaan Bantuan Operasional PAUD	1,276,555,500.00
34	1.01.1.01.01.23.50	Peningkatan Minat Bakat Peserta didik PAUD dan DIKMAS	453,285,000.00
35	1.01.1.01.01.23.51	Workshop Penguatan dan Implementasi Kurikulum SD serta penilaian pelaksanaan	107,381,850.00
36	1.01.1.01.01.23.52	Peningkatan sarana prasarana SD	11,456,295,050.00
37	1.01.1.01.01.23.53	Pengembangan Kelembagaan SD	97,812,000.00
38	1.01.1.01.01.23.54	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD	53,816,246,061.00
39	1.01.1.01.01.23.55	Peningkatan minat bakat, lomba kreatifitas, olahraga peserta didik SD	415,007,500.00
40	1.01.1.01.01.23.56	Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Sekolah SD	228,145,500.00
41	1.01.1.01.01.23.57	Perlindungan penghargaan dan apresiasi Peserta Didik SD berprestasi tingkat Nasional	331,420,000.00
42	1.01.1.01.01.23.58	Workshop Penguatan dan Implementasi Kurikulum SMP serta penilaian pelaksanaan kurikulum	214,950,000.00
43	1.01.1.01.01.23.59	Peningkatan sarana prasarana SMP	11,778,855,600.00
44	1.01.1.01.01.23.60	Pengembangan Kelembagaan SMP	135,325,000.00
45	1.01.1.01.01.23.61	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SMP	26,214,285,905.00
46	1.01.1.01.01.23.62	Peningkatan minat bakat, lomba kreatifitas, olahraga Peserta didik SMP	571,332,500.00
47	1.01.1.01.01.23.63	Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru	206,493,750.00
48	1.01.1.01.01.23.64	Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Nasional SMP	32,535,000.00
49	1.01.1.01.01.23.65	Penyelenggaran Akreditasi SMP	56,150,000.00
50	1.01.1.01.01.23.67	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan	138,137,500.00

NO.	KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
51	1.01.1.01.01.23.68	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengelola dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS	189,620,000.00
52	1.01.1.01.01.23.69	Penyelenggaraan Akreditasi PAUD dan DIKMAS	39,952,500.00
53	1.01.1.01.01.23.70	Penyelenggaraan Pengembangan PAUD dan DIKMAS	242,064,500.00
54	1.01.1.01.01.23.71	Orientasi calon kepala sekolah, peningkatan kompetensi kepala sekolah SD	225,115,000.00
55	1.01.1.01.01.23.72	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas SD, Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan SD	43,475,000.00
56	1.01.1.01.01.23.74	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan, tenaga laboratarium SMP	520,500,000.00
57	1.01.1.01.01.23.75	Rapat Koordinasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Publikasi Pendidikan	236,250,000.00
58	1.01.1.01.01.23.76	Perlindungan Penghargaan dan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP tingkat Nasional	354,217,500.00
59	1.01.1.01.01.23.77	Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru	55,620,000.00
60	1.01.1.01.01.23.78	Penguatan MGMP, KKG, MKKS, MKPS, KKPS	80,310,000.00
61	1.01.1.01.01.23.79	Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup	809,987,500.00

4) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun proses perencanaan dimaksud didasarkan atas :

- a) Hasil rapat koordinasi Dinas Pendidikan dengan para kepala sekolah dan kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan se-Kota Jambi;
- b) Rapat Lengkap Dinas Pendidikan Kota Jambi, penjelasan tentang penyusunan kegiatan masing-masing Bidang/Seksi/Sub Bagian dan Kepala Sekolah dengan mempedomani RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Jambi.

- c) Masukan dari stakeholder, instansi terkait, serta masukan dari hasil kegiatan reses DPRD Kota Jambi;
- d) Masing-masing Kabid/Kasi/Kasubbag menyusun kegiatan dengan menetapkan skala prioritas, selanjutnya dibahas didalam rapat pimpinan.
- e) Setelah pembahasan didalam rapat pimpinan, masing-masing Kabid/Kasi/Kasubbag memperbaiki usulan rencana kegiatan dan selanjutnya disampaikan ke Kepala Dinas yang selanjutnya disampaikan kepada BAPPEDA untuk dibahas dalam forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kota Jambi.

5) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan prasana di Dinas Pendidikan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	JENIS BARANG	MERKEK / TYPE	TAHUN Beli/ Perolehan	HARGA	JML
1	KURSI PUTAR		< 2004		40
2	MEJA BIRO	LIGNA	< 2004		9
3	MEJA RAPAT		< 2004		2
4	LEMARI 2 PINTU		< 2004		5
5	BUPET KACA		< 2004		2
6	FILING KABINET	PRESIDEN	< 2004		7
7	AC	PANASONIK	< 2004		4
8	FEX		< 2004		1
9	TELPON		< 2004		2
10	MEJA 1/2 BIRO		< 2004		55
11	KURSI ROTAN		< 2004		2
12	MEJA KOMPUTER		< 2004		2
13	LEMARI BESI		< 2004		-
14	LEMARI KAYU		< 2004		-
15	DISPENSER		< 2004		1
16	RAK BESI		< 2004		3
17	KURSI KAYU		< 2004		-
18	MESIN TIK MANUAL		< 2004		9
19	KIPAS ANGIN		< 2004		-
20	KALKULATOR		< 2004		-
21	BEN KAS		< 2004		1
22	MESIN STENSEL		< 2004		-
23	MIXROPON		< 2004		-
24	LEMARI KACA TROPI		< 2004		1
25	KURSI TAMU		< 2004		1
26	KURSI JOK TANGAN		< 2004		6
27	KAROKE (DIKLUSEPORA)		< 2004		1
28	KURSI JOK KAYU		< 2004		30
29	PRINTER KOMPUTER		< 2004		-
30	GAMBAR PRESIDEN/WAKIL		< 2004		-
31	LAMBANG G.PANCASILA		< 2004		-
32	TIANG BENDERA		< 2004		-
33	SOUND SISTEM		< 2004		-
34	TELEVISI		< 2004		2
35	STOPWATCH		2004	3,000,000	4 bh
	Kendaraan Roda 2 (dua)	Suzuki & Honda	< 2004	-	42
36	MEJA SIDANG		2004	675,000	22 bh
37	MEJA 1/2 BIRO		2004		20 bh

				900,000	
38	PODIUM		2004	250,000	1 bh
39	KURSI RAPAT AULA		2004	2,125,000	111 bh
40	KURSI JOG TINGGI		2004	715,000	6 bh
41	RAK-RAK BUKU		2004	1,300,000	4 bh
42	HORDENG		2004	185,000	84 M2
43	MEJA TELEPHONE		2004	400,000	1 bh
44	PRINTER KOMPUTER	CANON PIXMA ip 1000	2004	950,000	1 bh
45	KOMPUTER P.IV	VISION	2004	6,500,000	1 unit
46	KOMPUTER LAPTOP	Toshiba	2004	10,500,000	1 bh
47	SOUND SYSTEM		2004	18,700,000	1 set
48	PODIUM		2004	2,125,000	1 bh
49	RAK-RAK BUKU		2004	5,200,000	-
50	HORDENG (biru)		2004	15,540,000	
51	KOMPUTER	RCCAL	2005	9,000,000	1 unit
52	AC	CHANGONG	2005	5,500,000	1 unit
53	KOMPUTER	SAMSUNG	2005	49,800,000	5 unit
54	M. FOKUS	TOSHIBA	2005	24,000,000	1 unit
55	CAMERA DIGITAL	CANON POWER	2005	4,595,000	1 bh
56	KOMPUTER PENTIUM 4	SAMSUNG	2005	9,000,000	1 unit
57	TELPON SAMBUNG	P. ABK	2005	7.500.000	6 bh
58	LAPTOP	THOSIBA	2005	15,000,000	1 unit
59	MEJA 1/2 BIRO		2006	28,039,000	3 bh
60	KURSI JOK PUTAR (ABU-ABU)		2006		33 bh
61	MEJA BIRO	GUHDO LIBERTY	2006	4,500,000	1 bh
62	MEJA RAPAT (KADIS)		2006	-	2 bh
63	LEMARI 2 PINTU		2006	15,000,000	1 bh
64	LEMARI BUKU KACA		2006		1 bh
65	AC-1/2 PK		2006	39,930,000	1 unit
66	AC-2 PK		2006		1 unit
67	AC-2 PK		2006		5 unit
68	WARLES		2006	10,900,000	1 unit
69	LAPTOP		2006	19,950,000	1 unit
70	FAXSIMILE		2006	15,000,000	1 unit
71	KOMPUTER P.IV	SAMSUNG	2006	19,900,000	2 unit
72	LAYAR MONITOR		2006	2,200,000	1 unit
73	HANDICAM	SONY	2006	14,500,000	1
74	LAPTOP	THOSIBA	2006	15,000,000	1 unit

75	SOUND SISTEM BAND		2006	99,976,000	
76	POWER YAMAHA P.7000 B		2006		2
77	SPEKER BOX YAMAHA R.115		2006		2
78	SUBWOUTER YAMAHA R.118		2006		2
79	NISER YAMAHA N6 24/ II FX.		2006		2
80	MIC WERLLES TS.3310		2006		1
81	EQUALISER YAMAHA GE.15		2006		1
82	FEHO YAMAHA R.FX-1100		2006		1
83	NIA CABLE SHURE SM. 58		2006		10
84	MIC CABLE SHURE 8700		2006		5
85	CABLE CANERE STANDAR		2006		2
86	KABEL SPEKER 2 X 80		2006		1
87	JEEK NEUTRIK		2006		50
88	JEEK SPEECON		2006		20
	ALAT MUSIK		2006	30,100,000	
89	ARRCODEON		2006		1
90	BIOLA		2006		1
91	GAMBUS		2006		1
92	GONG BESAR STANDAR		2006		1
93	GONG KECIL / TERATAK / STANDAR		2006		1
94	GENDANG MELAYU		2006		2
95	GENDANG PANJANG		2006		1
96	GENDANG DUMBO		2006		2
97	GENDANG MARAWIS		2006		6
98	BEDUG PERKUSI		2006		2
99	KULINTANG		2006		1
	PAKAIAN TARI		2006	20,130,000	
100	BAJU KURUNG RENDA		2006		10
101	KAIN SONGKET		2006		14
102	PESANGKON		2006		10
103	TERATAI		2006		10
104	SUNTING		2006		10
105	KALUNG BERTINGKAT 3		2006		10
106	GELANG KUNO		2006		20
107	GELANG LENGAN		2006		10
108	KEMBANG GOYANG		2006		40
109	PENDING		2006		10
110	BAJU TELUK BELANGO		2006		4
111	LACAK		2006		4
112	PAYUNG HIAS		2006		1
113	WHITE BOORD		2006	1,200,000	3
114	PRINTER CANON 1X 5000	CANON	2006	4,975,000	1
115	KAIN HORDENG TEBAL		2006	37,550,000	30 M
116	KAIN TILE		2006		12 M
117	BESI KUNING		2006		12 M
118	BESI ALMUNIU		2006		12 M
119	KAIN HORDENG TEBAL		2006		295 M
120	KAIN TILE		2006		147 M
121	BESI ALMUNIU		2006		147 M
	ALAT BEND (MUSIK LEKTRIK)		2006	81,900,000	
122	DRUM				1 set
123	GITAR IBANES				2 bh
124	GITAR ELEKTRIK				1 bh
125	GITAR BAS SAMIEK/KARA				1 bh
126	EFEK ZOOM, 6,21 Y				1 bh
127	AMPLI GITAR (H+C) RUSSEL				1 bh
128	AMPLI GITAR BAS (H+C)				2 bh
129	AMPLI KEYBOARD R. HOAP				1 bh
130	KEYBOARD YMH PSR 3000				1 bh
131	STAND MICROFONE				6 bh

132	STAND KEYBOARD				1 bh
133	STAND UP 5000 WATT				1 bh
134	REVOLTING BINNER		2006	19,800,000	4
135	ROLLER BINNER		2006	18,800,000	4
136	SOUND SISTEM LATIHAN		2006	4,900,000	1
137	TARI DPD. SPEKER AKTIF				
138	PRINTER CANON 1X 4000	CANON	2006	4,000,000	1
139	LAPTOP	THOSIBA	2006	15,000,000	1 unit
140	KOMPUTER NOT BOOK	THOSIBA	2007	39,500,000	1 UNIT
141	PRINTER	CANON	2007	-	8 UNIT
142	MONITOR DISPLAY	CANON	2007	14,000,000	1 UNIT
143	SCENER SIDIK JARI	-	2007	10,045,000	1 UNIT
144	KOMPUTER NOT BOOK		2007	95,000,000	5 UNIT
145	NOT BOOK	THOSIBA	2007	15,000,000	1 UNIT
146	NOT BOOK	THOSIBA	2007	15,000,000	1 UNIT
147	NOT BOOK	THOSIBA	2007	15,000,000	1 UNIT
148	NOT BOOK	THOSIBA	2007	15,000,000	1 UNIT
149	NOT BOOK	THOSIBA	2007	15,000,000	1 UNIT
150	KAMERA NIKON	NIKON	2007	8,850,000	1 UNIT
151	FILLING KABINET	PRESIDENT	2007	3,000,000	1 UNIT
152	Kendaraan Roda 4 (empat)	Innova & Senia	-	-	2 UNIT
153	-Kendaraan Roda 2 (dua)	Honda	2007		30
154	-Kendaraan Roda 2 (dua)	Honda	2008		32
155	Papan Tulis		2008	750,000	2
156	TV 21"		2008	1,800,000	1
157	- Mesin Tik	Olympia	2008	4,975,000	2
158	- Kipas angin	Maspion	2008	2,800,000	8
159	- Mesin pemotong rumput		2008	4,500,000	1
160	-Laptop		2008	30,000,000	2
161	- AC Kantor		2008	23,958,000	6
162	Printer Dot Matrik		2008	8,075,000	1
163	- Sofa + Meja Tamu		2008	27,532,000	2
164	- Kursi putar sedang biru		2008		18
165	- Lemari dinding		2008		4
166	Kursi putar Jok tinggi (biru)		2008	24,850,000	7
167	- Meja biro		2008		7
168	- Lemari gantung 8 pintu		2008	42,280,000	4
169	- Lemari kayu 2 pintu		2008		10
170	- Meja 1/2 biro		2008		18
171	Lemari	-	2009	57,800,000	5
172	Filling Kabinet	TOP	2009		18

				34,020,000	
173	Not Book	Accer	2009	62,930,000	7
174	Printer	Canon	2009	4,000,000	2
175	Kursi Putar	-	2009	-	2
	Laptop	Thosiba	2010	14,750,000	1
	Laptop	Thosiba	2010	9,000,000	1

6) Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan.

Yang menjadi permasalahan dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber-sumber penerimaan daerah terutama yang terkait dengan bidang pendidikan. Berdasarkan Perda Nomor: 34 Tahun 2002 pengaturannya hanya terbatas penyelenggara kursus-kursus dan lembaga pelatihan lainnya, sedangkan untuk penyelenggaraan sekolah swasta belum diatur. Sehingga Dinas Pendidikan tidak dapat mengintegrasikan penerimaan yang bersumber dari bidang pendidikan.

2) Solusi

Solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan membuat dan menetapkan peraturan daerah (Perda) yang lebih lengkap dan kongkrit mengenai redistribusi penerimaan daerah yang berasal dari sektor pendidikan. Mengingat ada beberapa sumber yang masih bisa digali guna meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari sektor pendidikan ini, antara lain; dari sektor perizinan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat; penerimaan pajak dari gaji/honor guru, pegawai, dan staf pengelola pendidikan yang ada di sekolah-sekolah swasta, dan lain sebagainya.

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan ini ditangani oleh 2 (dua) instansi, yaitu Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit H. Abdul Manap.

a. Dinas Kesehatan Kota Jambi

1) Program dan Kegiatan

Prioritas tahun 2019 dalam pembangunan Kota Jambi bidang kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan, melalui :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan disiplin aparatur.
4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Program Perencanaan SKPD
6. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,
7. Program Peningkatan Pengelolaan data dan informasi
8. Program Peningkatan Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

Kegiatan pokok pembangunan bidang kesehatan berdasarkan fungsi Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2017 adalah sebagai berikut

1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan perizinan kendaraan dinas dan perizinan kendaraan dinas
3. Penyediaan jasa administrasi Keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran
10. Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam
11. Perjalanan Dinas
12. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

14. Pengadaan Peralatan Perkantoran
15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional
16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
17. Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor alat-alat kantor
18. Rehabilitasi sedang berat gedung kantor
19. Pengadaan Pakian dinas beserta perlengkapannya
20. Pendidikan dan Pelatihan Formal
21. Perumusan Produk hukum
22. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian dan ketatausahaan
23. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
24. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
25. Pengembangan data/informasi
26. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
27. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
28. Peningkatan kesehatan masyarakat
29. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar
30. Peningkatan pelayanan kesehatan Rujukan
31. Penyuluhan dan pengembangan media promosi kesehatan
32. Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
33. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
34. Penyehatan lingkungan
35. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
36. Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
37. Peningkatan Surveilans Epidemiologi & Penanggulangan Wabah
38. Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung
39. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
40. Pembangunan /Rehabilitasi Puskesmas/Pustu
41. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat dan pasien kurang mampu
42. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan keluarga berencana
43. Peningkatan pelayanan kesehatan anak, remaja dan lansia
44. Pembinaan organisasi PMI Kota Jambi
45. Bantuan Operasional Kesehatan

46. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
47. Peningkatan Kesehatan Kerja dan kesehatan olah raga
48. Pengendalian Penyakit Tidak menular dan Pelayanan Kesehatan jiwa
49. Operasional BLUD Puskesmas

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat Pencapaian dalam indikator Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kota Jambi ada yang memenuhi target dan ada yang tidak memenuhi target. Hasil pencapaian SPM Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	TARGET SPM	TARGET	REALISASI	%
1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K 4	95%	11,677	11,118	95.21
2	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di tangani	80%	2,335	2,041	87.41
3	Cakupan pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	11,146	10,454	93.79
4	Cakupan Pelayanan Nifas	90%	11,146	10,463	93.87
5	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	80%	1,592	881	55.34
6	Cakupan Kunjungan Bayi	90%	10,615	9,623	90.65
7	Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	62	62	100.00
8	Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%	42,319	39,757	93.95
9	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miiskin	100%	235	235	100.00
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	5	5	100.00
11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	16,892	16,683	98.76
12	Cakupan peserta KB aktif	70%	134,356	84,404	62.82
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit				
	a. Acute flacid paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	≥ 2	1	-	0.00
	b. Penemuan penderita pneumonia balita	100%	1,535	1,535	100.00
	c. Penemuan pasien baru TB BTA positif	100%	498	498	100.00
	d. Penderita DBD yang ditangani	100%	567	567	100.00
	e. Penemuan Penderita Diare	100%	11,847	11,847	100.00
14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	100%	134,266	167,127	124.47
15	Cakupan Pelayanan kesehatan Rujukan pasien Masyarakat miskin	100%	9,491	14,292	150.58
16	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)di kota	100%	15	15	100.00
17	Cakupan desa /kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	7	7	100.00
18	Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	62	47	75.81

3) Jumlah Pegawai, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Jambi
Berdasarkan Kepangkatan dan Eselon Tahun 2019

NO	Uraian Kepegawaian	Jumlah (Orang)
	- Kantor Dinas Kesehatan	145
	- Puskesmas	971
	- Instalasi Farmasi	9
	Jumlah	1.125
I	Jenis kepegawaian	
	1. PNS	946
	2. PTT	
	a. Dokter	
	b. Dokter Gigi	
	c. Bidan	1
	3. Tenaga Kontrak SKPD	178
	4. Honor Daerah	1
II	Jenjang Kepangkatan	
	1. Golongan IV	71
	2. Golongan III	648
	3. Golongan II	226
	4. Golongan I	1
III	Jenjang Eselon	
	1. Eselon II	1
	2. Eselon III	5
	3. Eselon IV	56
IV	Jenjang Pendidikan	
	1. Strata 2	17
	2. Strata 1	
	a. Medis	227
	b. Non Medis	18
	3. Diploma 3	
	a. Medis	457
	b. Non Medis	1
	4. SLTA	
	a. Medis	176
	b. Non Medis	101
	5. SLTP	
	a. Pekarya Kesehatan	3
	b. Umum	15
	6. SD	10

Jumlah Pegawai Negeri dan PTT Dinas Kesehatan Kota Jambi
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

NO	Jenis Pendidikan	Jumlah	%
1.	Dokter Spesialis		
	a. Kandungan	0	0
	b. Anak	0	0
2.	Pasca Sarjana	17	1,51
3.	Dokter Umum	73	6,49
4.	Dokter Gigi	26	2,31
5.	Apoteker	7	0,62
6.	Sarjana Kesehatan Masyarakat	68	6,04
7.	Ners	6	0,53
8.	Sarjana Keperawatan	26	2,31
9.	Sarjana Farmasi	6	0,53
10.	Sarjana Gizi	5	0,44
11.	D-IV Bidan	5	0,44
12.	D-IV Gigi	5	0,44
13.	Sarjana Non Kesehatan	18	1,60
14.	Sarjana Muda Kesehatan		
	a. AKPER	116	10,31
	b. AKZI	9	0,80
	c. APK/AKL	32	2,84
	d. AKBID	202	17,96
	e. AKFAR	38	3,38
	f. AKG	33	2,93
	g. ATG	1	0,09
	h. AAK	26	2,31
15.	Sarjana Muda Non Kesehatan	1	0,09
16.	Bidan/D1	98	8,71
17.	Perawat/SPK	53	4,71
18.	SMF/SAA	25	2,22
19.	SPAG	10	0,89
20.	SMAK	28	2,49
21.	SPRG	20	1,78
22.	SPPH	24	2,13
23.	SMA	101	8,98
24.	SMK	0	0,00
25.	PCPPM Crass Program	3	0,27
26.	Pekarya Kesehatan (LCPK)	18	1,60
27.	SMP	15	1,33
28.	SD	10	0,89
	Jumlah	1.125	100

4) Alokasi dan Realisasi Anggaran

umlah kegiatan penunjang dan kegiatan urusan sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 49 items kegiatan . Realisasi dana Belanja langsung maupun Tidak langsung Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2018 adalah sebesar Rp.156.701.267.666,- (86,50%) atau turun sebesar 3,97 %. Dari tahun 2017.

NO	NAMA KEGIATAN	KEUANGAN			
		TARGET	REALISASI	%	Ket
		Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	965.413.500,00	827.489.641	85,71	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Ops	50.000.000,00	50.000.000	100,00	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	770.950.000,00	622.982.500	80,81	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	416.040.000,00	413.580.500	99,41	
5	Penyediaan alat tulis kantor	130.600.000,00	130.577.600	99,98	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	160.000.000,00	159.903.000	99,94	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000,00	15.000.000	100,00	
8	Penyediaan makanan dan minuman	70.000.000,00	63.910.000	91,30	
9	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	597.360.000,00	586.085.000	98,11	
10	Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	638.880.000,00	638.880.000	100,00	
11	Perjalanan Dinas	773.950.843,00	758.155.954	97,96	
12	Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	30.000.000,00	2.140.000	7,13	
13	Pengadaan peralatan perkantoran	858.000.000,00	834.174.320	97,22	
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Ops	400.000.000,00	311.000.000	77,75	
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	340.000.000,00	338.280.000	99,49	
16	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	150.000.000,00	149.831.000	99,89	
17	Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor	200.000.000,00	199.890.000	99,95	
18	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	500.000.000,00	88.893.200	17,78	
19	Pendidikan dan pelatihan formal	203.320.000,00	153.892.000	75,69	
20	Perumusan Produk Hukum	33.000,00	0	-	
21	Pengembangan Sistem Informasi kepegawaian dan ketatausahaan	34.110.000,00	26.998.300	79,15	
22	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.625.000,00	1.615.000	99,38	
23	Penyusunan Renstra SKPD	725.000,00	725.000	100,00	
24	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	5.050.000,00	5.048.000	99,96	
25	Pengembangan Data/Informasi	134.658.900,00	98.976.500	73,50	
26	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	2.776.768.000,00	2.473.265.195	89,07	
27	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	151.860.000,00	132.515.000	87,26	
28	Peningkatan kesehatan masyarakat	1.863.310.000,00	1.726.722.500	92,67	
29	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar	2.395.730.000,00	2.136.320.500	89,17	
30	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	1.528.640.000,00	1.235.973.881	80,85	
31	Penyuluhan dan pengembangan Medis Promosi Kesehatan	732.800.000,00	719.860.800	98,23	
32	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	485.370.000,00	415.060.650	85,51	
33	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	981.919.900,00	897.462.275	91,40	
34	Penyehatan Lingkungan	602.785.000,00	455.076.160	75,50	
35	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	492.680.000,00	463.076.650	93,99	
36	Pencegahan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3i) dan pengendalian penyakit tidak menular	1.395.725.000,00	1.043.646.192	74,77	
37	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	90.100.000,00	76.100.350	84,46	
38	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung	130.420.000,00	129.170.000	99,04	
39	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	17.727.206.931,00	14.163.891.228	79,90	
40	Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas/Pustu	3.642.325.600,00	3.637.768.350	99,87	
41	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat dan pasien kurang mampu	11.409.324.631,00	7.109.355.019	62,31	
42	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan keluarga berencana	1.696.207.000,00	1.599.887.000	94,32	
43	Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja dan lansia	322.660.000,00	302.185.000	93,65	
44	Pembinaan Organisasi PMI Kota Jambi	121.600.000,00	110.893.500	91,20	
45	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	10.877.792.000,00	8.156.658.000	74,98	
46	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	130.365.000,00	101.268.600	77,68	
47	Peningkatan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	147.840.000,00	137.440.000	92,97	
48	Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Pelayanan Kesehatan Jiwa	786.614.001,00	745.254.500	94,74	
49	Operasional BLUD Puskesmas	39.286.405.047,00	31.537.964.891	80,28	
	TOTAL	107.222.164.353,00	85.984.843.756	80,19	
	Belanja Tidak Langsung (Belanja Gaji Pegawai)	73.925.064.871,00	70.716.423.910	95,66	
1	TOTAL	181.147.229.224,00	156.701.267.666	86,50	

5) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun proses perencanaan pembangunan pada Dinas Kesehatan didasarkan atas:

- a) Rapat Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan/Puskesmas, dan Kota, meliputi penjelasan tentang penyusunan kegiatan masing-masing bidang program, Sekretariat, Kasi dan Kasubbag dengan mempedomani Renstra SKPD Dinas Kesehatan dan Kebijakan Umum Anggaran Kota Jambi.
- b) Masing-masing Bidang Program dan Sekretariat beserta Kepala Puskesmas menyusun kegiatan dengan menetapkan skala prioritas, selanjutnya dibahas didalam rapat pimpinan dengan Kepala Dinas Kesehatan.
- c) Setelah pembahasan didalam rapat pimpinan, masing-masing bidang memperbaiki usulan rencana kegiatan dan selanjutnya disampaikan ke Kepala Dinas yang selanjutnya disampaikan kepada Bappeda untuk dibahas dalam forum SKPD Tingkat Kota dan Propinsi Jambi.
- d) Selanjutnya dibahas dengan DPRD Kota.

6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Jambi menempati 3 (tiga) unit sarana gedung, diantaranya :

- a) Gedung Dinas Kesehatan Jalan H Agus Salim, yang ditempati untuk Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 3 Bidang (Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pemberdayaan Kesehatan, Bidang Jaminan Kesehatan, Sarana dan Informasi Kesehatan).
- b) Gedung Dinas Kesehatan Jalan Jendral Basuki Rakhmat yang ditempati untuk Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan dan Sarana Laboratorium.
- c) Instalasi Farmasi Jalan Zainir Havis Kotabaru.

Untuk menunjang kelancaran dari penyelenggaraan upaya kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Jambi dilengkapi oleh beberapa sarana, baik yang ada pada kantor Dinas kesehatan maupun pada Puskesmas.

7) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Desentralisasi membawa implikasi perubahan mendasar dalam tatanan Pemerintahan, sehingga terjadi juga perubahan peran dan fungsi birokrasi mulai dari tingkat Pusat sampai ke daerah. Perubahan yang mendasar itu memerlukan juga pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan desentralisasi dalam mewujudkan pembangunan Kesehatan Kota Jambi 2013-2018 sesuai kebutuhan daerah dan diselenggarakan secara efisien, efektif dan berkualitas.
- (2) Pembangunan Kesehatan Kota Jambi Tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat yang memberikan prioritas pada Upaya Kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Selain itu pembangunan bidang kesehatan Kota Jambi diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Jumlah kegiatan untuk urusan wajib pada Dinas Kesehatan Kota Jambi sebanyak 44 kegiatan
- (4) Realisasi anggaran untuk urusan wajib yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2018 adalah sebesar Rp 126.572.686.262,- (82,53 %)
- (5) Masih ada kegiatan yang masih belum mencapai target dari indikator kinerja kunci

b) Solusi

- (1) Penyusunan program/Kegiatan dan penganggaran Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2018, hendaknya mengacu pada penetapan indikator pencapaian Renstra Dinkes, Indikator Kinerja Kunci dan disesuaikan pula dengan visi Pemda Kota yaitu "Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa Berbasis Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya".

- (2) Rencana kegiatan program pembangunan kesehatan yang melalui anggaran keuangan tahunan daerah, diwajibkan pula mengacu pada SPM bidang kesehatan kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan Menkes RI Nomor 43/2016.
- (3) Hendaknya pelaksanaan kegiatan yang telah ada di DPA SKPD tidak Terlalu Lama.

b. Rumah Sakit Abdul Manap

1) Program dan Kegiatan

Program	Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /Teknis Perkantoran, Jasa Tenaga Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubakti dan Penjaga Malam
	Perjalanan Dinas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor
	Pengadaan Peralatan Gedung Perkantoran
	Pengadaan Mebeleur
	Penyediaan Peralatan Perkantoran
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan SK Menkes RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan Standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3) Jumlah Pegawai, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

RSUD H. Abdul Manap sampai akhir 2019 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 621 (Enam ratus dua puluh satu) orang. Klasifikasi dan jumlah tenaga dapat digambarkan pada table :

**DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN KLASIFIKASI
RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI TAHUN 2019**

No.	Jenis Ketenagaan	2018			2019		
		PNS	Kontrak	Titipan	PNS	Kontrak	Titipan
	Medis :						
1	Dokter Spesialis Bedah	2			4		
2	Dokter Spesialis Obgyn	3			3		
3	Dokter Spesialis Anak	2		1	2		1
4	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2			5		
5	Dokter Spesialis Mata	2			3		
6	Dokter Spesialis Syaraf	2		1	1		
7	Dokter Spesialis Kulit & Kelamin	1			3		
8	Dokter Spesialis Anaeshtesi	1			2		
9	Dokter Spesialis Urologi	1			1		
10	Dokter Spesialis Kardiologi	1			1		
11	Dokter Spesialis THT	1			1		

12	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1			1		
13	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	1		1	1	
14	Dokter Spesialis Ortopedi	1			1		
15	Dokter Spesialis Radiologi	1	1			1	
16	Dokter Gigi Spesialis Ortodontik	1			1		
17	Dokter Gigi Spesialis Periodonsia	1					
18	Dokter Gigi Spesialis Konservasi	1			1		
19	Dokter Spesialis Paru	-			1		
20	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehab Medik	-			1		
21	Dokter Spesilais Forensik	-			1		
22	Dokter Umum	3	15	1			
	<i>Jumlah :</i>	26	19	3	33	3	1
	Paramedis Keperawatan :						
1	S2 Keperawatan	-			-		
2	S1 Keperawatan	10	19		10	12	
3	D3 Keperawatan	35	74		39	80	
4	D4 Kebidanan	8			6	1	
5	D3 Kebidanan	16	50		19	71	
6	D3 Anestesi	-	-		-	1	
7	D3 Kesehatan Gigi	-			6	-	
8	D1 Kebidanan	1			1		
9	SPK	9	2		9	2	
10	SPRG	1			4		
	Jumlah :	80	145		94	167	

	Paramedis Non Keperawatan						
1	Magister Kesehatan	4			4		
2	S1 Farmasi	8			8		
3	S1 Kesehatan Masyarakat	2			2		
4	D3 Gizi	4	2		4	2	

5	D3 Fisioterapi	2	1	1	2	1	1
6	D3 Analisis Kesehatan	12	8		12	8	
7	D3 Elektromedik	1			1		
8	D3 Radiologi	4	4		4	4	
9	D3 Rekam Medik	3			3		
10	D3 Kesling	3			3		
	<i>Jumlah :</i>	44	15	1	44	15	1
	Non Medis						
1	S2 Ekonomi	1			1		
2	S1 Ekonomi	8	2		8	2	
3	S1 Hukum	1			1		
4	S1 Teknik	1			1		
5	S1 Komputer		4			4	
6	D3 Manajemen	51	58		51	58	
7	SMA		1			1	
	<i>Jumlah :</i>	62	65		62	65	

4) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran APBD RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi tahun 2019 sebesar Rp. 110.159.924.704,- yang terbagi dalam Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Belanja Modal. Realisasi anggaran RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi tahun 2019 yang tercapai pada akhir Desember 2018 adalah sebesar Rp.100.733.993.032,- dengan serapan dana rata-rata sebesar 91,44%.

TABEL. III.A.1
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI TAHUN 2018

Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Total Belanja	Realisasi Belanja	Perse ntasi
Kesehatan	18.087.192.679	21.285.378.016	29.915.313.759	40.872.040.250	110.159.924.704	100.733.993.032	91,44%

Adapun alokasi dan realisasi anggaran pada program dan kegiatan RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi tahun 2019 dapat terlihat pada table dibawah ini :

No	Program/Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	Capaian Target
1	2	3	4	5
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,600,000	5,400,000	71,05%
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	460,350,000	436,064,000	94,72%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,028,352,000	1,000,049,000	97,25%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	375,000,000	363,363,357	96,90%
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	374,348,000	339,278,115	90,63%
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	198,000,000	197,839,774	99,92%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000	2,415,000	80,50%
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,000,000	99,971,394	99,97%
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	36,000,000	34,268,000	95,19%
10	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /Teknis Perkantoran, Jasa Tenaga Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubakti dan Penjaga Malam	964,920,000	910,580,000	94,37%
11	Perjalanan Dinas	301,500,000	299,136,797	99,22%

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
12	Pembangunan Gedung Kantor	125,000,000	125,000,000	100%
13	Pengadaan Perlengkapan Gedung Perkantoran	455,450,000	451,404,550	99,11%
14	Pengadaan Mebeleur	362,500,000	356,690,000	98,40%
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	811,000,000	744,113,418	91,75%
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	201,025,000	182,556,614	90,81%
17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	35,000,000	34,752,300	99,29%
18	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1,037,090,000	1,003,230,000	96,74%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
19	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	93,000,000	92,011,700	98,94%
20	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	145,413,000	144,830,400	99,60%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
21	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	184,000,000	180,900,000	98,32%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
22	Penyusunan Lakip	5,500,000	5,500,000	100%
	Program Perencanaan SKPD			
23	Penyusunan Renstra SKPD	6,675,000	6,674,200	99,99%
24	Penyusunan Renja SKPD	3,500,000	3,500,000	99%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	Capaian Target
1	2	3	4	5
25	Pengendalian Mutu Pelayanan Rumah Sakit	3,808,785,000	3,390,690,925	89,02%
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan			
26	Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit	487,000,000	341,890,900	70,20%

27	Pengadaan alat-alat rumah sakit dan alat kesehatan lainnya	32,152,114,000	31,431,554,972	97,76%
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan				
28	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	535,800,000	491,721,800	91,77%
29	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	432,000,000	279,000,000	64,58%
30	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi rumah sakit/puskesmas, tenaga teknis rumah sakit/puskesmas	3,4999,005,000	2,453,239750	70,11%
31	Dukungan Pelayanan BLUD	43,847,230,025	37,758,092,540	86,11%
Jumlah :		92,072,732,025	83,162,294,506	90,32%

5) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses penyusunan perencanaan pembangunan RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Strategis Rumah Sakit. Daerah. RKPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sedangkan Rencana Strategis RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bidang kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RKPD memiliki peranan penting dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan (Renja) dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD.

Tahapan – tahapan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD pada tahun bersangkutan. ;
 2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan wajib/pilihan SKPD sesuai skala prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD maupun RPJMD.;
 3. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang bersifat lintas SKPD dan memerlukan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan.;
 4. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD ke dalam rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota.
 5. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan SKPD yang tertulis dalam RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
 6. Menyiapkan kegiatan usulan masyarakat yang mendesak dan tidak atau belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang maka kepala SKPD menambahkan program dan kegiatan tambahan ke dalam Renja SKPD yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD.
 7. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan dalam bentuk rancangan Renja SKPD, dengan memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan SKPD serta pagu indikatif yang telah dicanangkan dalam rancangan awal RKPD.
 8. Rumusan Renja RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi dijabarkan dalam RKA-SKPD RSUD RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi. Alur Perencanaan dari RPJP sampai APBD
- 6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan**

Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi dengan kualifikasi rumah sakit kelas C terletak diatas tanah seluas 5 hektar dengan bangunan yang didirikan dan digunakan untuk operasional pelayanan sampai saat ini gedung pelayanan tunggal 4 lantai, dan mempunyai 201 tempat tidur dengan tingkat hunian rata-rata 40,25 per tahun.

Berdasarkan Pedoman Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kelas C, Sekjen Depkes RI tahun 2006, sarana dan prasarana RSUD H.

Abdul Manap Kota Jambi saat ini, secara umum sudah sesuai standar, akan tetapi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat, maka RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi terus melakukan pembenahan sarana dan prasarana rumah sakit dengan mengadakan rehab gedung, pembangunan gedung, serta melengkapi fasilitas pelayanan dengan alat-alat kesehyang atandan kedokteran yang lebih canggih.

7) **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan :

1. Masih
2. Pengembangan SIMRS tidak bisa dilakukan serentak, hal ini disebabkan belum terintegrasinya SIM RS pada unit-unit yang terkait dalam sistem.

Solusi :

1. Peninjauan kembali besar target pencapaian, khususnya target kematian pasien gawat darurat dan target pencapaian kelengkapan rekam medik 1x 24 jam.
2. Pengembangan SIMRS secara bertahap.

3. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

a. Dinas Lingkungan Hidup

1) Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam
10. Perjalanan Dinas

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3. Pengadaan Meubeleur
4. Pengadaan Peralatan Perkantoran
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6. Program Perencanaan SKPD

1. Penyusunan Renstra SKPD
2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
3. Penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM)

7. Program Pengembangan Data/Informasi.

1. Pengembangan data / informasi

8. Program Penurunan beban pencemaran

1. Pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan
2. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

9. Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang Publik dan Keanekaragaman Hayati

1. Pelaksanaan konservasi dan AMDAL
2. Penegakan hukum dan komunikasi lingkungan
3. Peningkatan kinerja pengelolaan RTH
4. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

10. Program Peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan

1. Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan
2. Peningkatan Pengelolaan Bank Sampah

11. Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang Publik dan Keanekaragaman Hayati

1. Pengembangan, penanaman dan pengadaan ruang terbuka hijau hutan kota

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut diatas, Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup terdiri dari:

a) Pelayanan pencegahan pencemaran air

Indikator SPM yang menunjukkan presentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.

b) Pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak.

Indikator SPM yang menunjukkan presentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara.

c) Pelayanan informasi kerusakan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

Indikator SPM yang menunjukkan presentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

d) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Indikator SPM yang menunjukkan presentase kasus yang akan difasilitasi dan/atau yang diselesaikan secara tuntas dibandingkan target.

3) Jumlah Pegawai, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terdiri dari :

a) Jumlah Pegawai dan Jenis Kelamin

Pegawai Negeri Sipil sebanyak 72 orang, Pegawai Honor sebanyak 24 orang dan cleaning servis 2 orang dengan Pegawai dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 60 orang, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 38 orang.

b) Tingkat Pendidikan

Pegawai dengan tingkat pendidikan strata tiga (S3) sebanyak 1 (satu) orang, pendidikan strata dua (S2) sebanyak 7 (tujuh) orang, pendidikan strata satu (S1) sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, pendidikan Diploma tiga (D3) sebanyak 8 (delapan) orang, pendidikan SLTA sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, pendidikan SLTP sebanyak 1 (satu) orang dan pendidikan SD sebanyak 2 (dua) orang.

c) Pangkat/Golongan

Pegawai golongan IV sebanyak 9 (sembilan) orang, golongan III sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, golongan II sebanyak 18 (delapan belas) orang serta golongan I sebanyak 4 (empat) orang.

4) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 pada Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	11.510.000	5.400.000	100
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	238.500.000	176.396.795	73.96
		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	352.891.000	352.891.000	100
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	41.405.000	40.005.000	96.62
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.000.000	18.000.000	100
		Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	13.550.000	13.550.000	100
		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.997.500	6.997.500	100

		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	35.000.000	26.767.984	76.48
		Kegiatan Perjalanan Dinas	627.000.000	625.408.339	99.75
		Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman kantor, Pramubhakti dan Penjaga Malam	62.400.000	62.400.000	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	77.000.000	68.120.000	88.47
		Kegiatan Pengadaan Mebeleur	32.675.000	29.675.000	90.82
		Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran	181.736.500	159.250.000	87.63
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	19.600.000	19.600.000	100
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	311.950.000	272.467.800	87.34
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	14.000.000	14.000.000	100
		Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	465.515.000	462.921.000	99.44
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	24.500.000	24.500.000	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000	33.500.000	67
		Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	0	0
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.894.000	8.894.000	100
6	Program Perencanaan	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD	13.942.000	13.942.000	100

	SKPD	Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	8.242.400	8.242.400	100
7	Program Pengembangan Data/Informasi	Kegiatan Pengembangan data/informasi	50.300.000	48.750.000	96.92
8	Program Penurunan Beban Pencemaran	Kegiatan Pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan	431.250.000	395.596.700	91.73
		Kegiatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	310.853.000	310.728.000	99.96
9	Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang Publik dan Keanekaragaman Hayati	Kegiatan Pelaksanaan konservasi dan AMDAL	689.917.283	640.583.481	92.85
		Kegiatan Penegakan hukum dan komunikasi lingkungan	201.911.700	178.629.754	88.47
		Kegiatan Peningkatan kinerja pengelola RTH	9.452.582.000 (APBD + DAK)	8.284.844.000	87.65
10	Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	12.769.727.500	12.229.411.570	95.77
		Kegiatan Pengendalian kerusakan lingkungan	638.839.617	547.554.127	85.71

5) Kesesuaian Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jambi didasarkan pada visi dan misi yang tertuang dalam RENSTRA BLH Kota Jambi 2013 – 2018.

Pelaksanaan proses tahapan perencanaannya adalah sebagai berikut :

- a) Rapat yang dipimpin oleh Kepala Badan, dimana Kepala Badan menjelaskan perencanaan pembangunan harus berpedoman pada RENSTRA yang telah disusun.
- b) Masing-masing Kepala Bidang dan Sub Bidang menyusun program dan kegiatan dengan menetapkan skala prioritas, yang selanjutnya dibahas dalam rapat lingkup yang dipimpin oleh Kepala Badan.
- c) Setelah pembahasan dalam rapat pimpinan selesai, usulan-usulan yang telah diperbaiki dan disetujui oleh Kepala Badan dari masing-masing Kepala Bidang disatukan oleh Sekretariat dalam hal ini Subbag Perencanaan menjadi program Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi.
- d) Selanjutnya perencanaan dan kegiatan BLH Kota Jambi yang telah disusun tersebut disampaikan kepada Bappeda untuk dibahas dalam forum SKPD dan Musrenbang Kota Jambi.

6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Aset Pemerintah Kota Jambi yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sampai akhir tahun 2019 terdiri dari :

1) Barang bergerak

Barang bergerak terdiri 8 (delapan) unit mobil, 14 (empat belas) unit sepeda motor, 8 (satu) unit gerobak motor dan 1 (satu) unit speedboat.

2) Barang tidak bergerak

Barang tidak bergerak terdiri dari 1 (satu) unit gedung kantor, Gedung laboratorium, Ruang pertemuan dan rumah penjaga kantor serta 205 unit peralatan kantor yang berkondisi baik.

7) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Upaya peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan juga harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup
- (2) Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga diperlukan sosialisasi dan pembinaan yang berkelanjutan akan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan
- (3) Masih kurangnya peningkatan kontribusi pihak swasta dalam upaya kerjasama pengembangan model investasi lingkungan, sehingga diperlukan adanya kerjasama dengan pihak swasta atau akademis dalam pengembangan model investasi lingkungan.



4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dilaksanakan oleh instansi yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1) Program dan Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi memiliki 13 Program yang terbagi atas Bidang Bina Program dan Penataan Ruang, Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Sekretariat. Berikut uraian dari kegiatan dan program dari masing-masing bidang.

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi

No	Program	Kegiatan
A.	Bidang Sekretariat	
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Perjalanan dinas Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 2. Pengadaan mebeleur 3. Pengadaan peralatan perkantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

		6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor 8. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3	Program peningkatan disiplin aparatur	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal
B. Bidang Bina Program dan Penataan Ruang		
5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyusunan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6	Program Perencanaan SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
7	Program Pengembangan Data/ Informasi	1. Pengembangan Data / Informasi
8	Program Peningkatan kualitas lingkungan permukiman berbasis kawasan	Perencanaan, Koordinasi dan Pengawasan Bidang Ke PU an Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
9	Program Pengendalian pemanfaatan ruang	1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang
10	Program Perencanaan tata ruang	Penataan Ruang Kota
C. Bidang Bina Marga		
11	Program Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	1. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan 2. Pembangunan Jembatan 3. Oprasional dan pemeliharaan Unit pengelolaan Campuran Aspal (UPCA)
D. Bidang Cipta Karya		
12	Program Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan	1. Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Pemukiman Penduduk

	utilitas perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan Sistim Distribusi Jaringan Air Bersih/Air Minum 3. Pembangunan Gedung / Utilitas Pemerintahan 4. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Angkutan 5. Peningkatan Operasional IPLT 6. Peningkatan Operasional TPA
E.	Bidang Sumber Daya Air	
13	Program Pembangunan, pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, / Pemeliharaan Jaringan Sungai, Saluran Drainase / Gorong - Gorong

1) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah diarahkan pada Peningkatan Kualitas dan Efektifitas dalam menyelenggarakan manajemen Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi termasuk peningkatan pelayanan, kemampuan, pengabdian, loyalitas, keteladanan dan kesejahteraan aparatur sehingga secara keseluruhan semakin mampu melakukan roda pemerintahan dan pembangunan secara baik dan tanggung jawab.

Disamping itu juga dilakukan pembinaan dan Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi baik kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian perlu secara terus menerus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Adapun aparatur sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas:

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Jasa Keamanan Kantor

a) Data Pegawai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari:

Tabel SDM Dinas PUPR Kota Jambi

Pegawai	Posisi per 01/04/2019	Tambah	Kurang	Posisi per 31/12/2019
Pejabat Struktural	29	-	2	27
Staf Pelaksana	76	-	1	75
Pegawai Honor	120	-	-	120
Jumlah	225	-	3	222

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari:

Tabel SDM Dinas PUPR Kota Jambi Berdasarkan pendidikan dan golongan

No	Golongan	SD	SLTP	SLTA	SARMUD	D-IV	S1	S2	Ket
1	IV	-	-	-	-	-	2	2	4
2	III	-	-	12	5	1	37	9	64
3	II	1	-	30	-	-	1	-	32
4	I	2	-	-	-	-	-	-	2

Tabel SDM Dinas PUPR Kota Jambi Berdasarkan status kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1	PNS	102	-
2	Pegawai Tidak Tetap	120	-
3	Pegawai Jasa Keamanan Kantor	10	-

2) Alokasi dan Realisasi Anggaran

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Alokasi dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dirinci sebagai berikut :

Tabel Alokasi Dana dan Realisasinya Capaian Kinerja Program

No.	Program	Anggaran (Rp.) APBD	Anggaran (Rp.) APBD-P	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persen (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Rp2.351.765.000	Rp2.636.605.000	Rp2.294.744.389	87,03

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Rp2.001.850.000	Rp2.460.100.000	Rp2.281.430.941	92,74
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Rp124.830.000	Rp124.830.000	-	0,00
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Rp98.900.000	39,56
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp5.000.000	Rp3.125.000	Rp3.125.000	100,00
6.	Program Perencanaan SKPD	Rp20.000.000	Rp4.025.000	Rp4.025.000	100,00
7.	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp534.524.000	Rp486.824.000	Rp320.832.000	65,90
8.	Program perencanaan tata ruang	Rp140.250.000	Rp64.250.000	-	0,00
9.	Program pengendalian	Rp258.097.000	Rp229.467.000	-	0,00

	pemanfaatan ruang				
10	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman Berbasis Kawasan.	Rp1.747.129.000	Rp6.710.274.000	Rp6.422.417.100	95,71
11	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp176.416.967.450	Rp180.348.859.950	Rp178.210.645.963	98,81
12	Program Pembangunan Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan	Rp89.662.292.600	Rp96.330.892.090	Rp89.981.413.901	93,41
13	Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Rp28.906.413.000	Rp31.463.553.000	Rp30.271.256.679	96,21
	Jumlah	Rp302.419.118.050	Rp321.112.805.040	Rp309.888.790.973	96,50

3) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa hasil dari perencanaan pembangunan terdiri dari; rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Kota Jambi dalam

melaksanakan unsur perencanaan, sebelumnya telah menetapkan dokumen perencanaan jangka menengah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013–2018.

Dalam rangka mendukung program pembangunan daerah di bidang sarana prasarana infastruktur perkotaan melalui, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi, untuk melaksanakan perencanaan pembangunan bidang ke-Pu-an, diperlukan program kerja yang ditetapkan secara selektif dalam subtransi strategis pencapaian tujuan dan sasaran. Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan tahun Anggaran 2019, terutama pekerjaan fisik dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan melalui perencanaan adalah sebagai :

Perencanaan Teknis Pembangunan Infastruktur ke PU an

- a) Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan
- b) Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase / gorong-gorong
- c) Perencanaan Drainase dan Profil Drainase
- d) Perencanaan Teknis, pembinaan dan bimbingan teknis penataan ruang
- e) Perencanaan, pengawasan dan pengendalian yang meliputi : angkutan sampah yang bersumber dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan perdagangan dan jalan-jalan umum
- f) Perencanaan dan penyusunan program, penataan ruang, dan pendataan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan sampai Musrenbang Provinsi dengan menentukan skala prioritas berdasarkan hasil survey lapangan. Dari hasil survey lapangan tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi dengan melakukan pemaketan perencanaan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya dilakukan dengan proses pelelangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pelaksanaan perencanaan Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi sebagian besar dilakukan dengan metode penunjukan langsung dan pemilihan langsung yang telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke-4 atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Proses Perencanaan Pembangunan telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut:

- a) Gedung/Ruang Kantor yang memadai.
- b) Fasilitas Kendaraan Roda dua dan Roda Empat.
- c) Alat-alat berat
- d) Fasilitas Mebeleur.
- e) Dan lain-lain

Berikut penjabarannya :

a) Gedung/kantor yang terdiri dari :

- (1) Ruang Kepala Dinas : 1 Unit
- (2) Ruang Sekretaris Dinas : 1 Unit
- (3) Ruang Kepala Bidang : 4 Unit
- (4) Ruang Subbag Umum : 1 Unit
- (5) Ruang Subbag Keuangan : 1 Unit
- (6) Ruang Subbag Kepegawaian
- (7) Ruang Aula
- (8) Gedung Mushola
- (9) Gedung Kantor
- (10) UPTD UPCA
- (11) Gedung Kantor TPA Talang Gulo
- (12) Gedung Kantor IPLT Talang Bakung.

b) Fasilitas kendaraan dinas operasional

Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional,

- (1) Kendaraan Roda 2 :
 - Honda : 9 Unit
 - Yamaha : 14 Unit
- (2) Kendaraan Roda 3 :

- APPKTM : 2 Unit
- (3) Kendaraan Mobil :
- Toyota Kijang Innova G : 1 Unit
 - Daihatsu Terios : 1 Unit
 - Toyota Rush : 1 Unit
 - Toyota New Avanza : 2 Unit.
 - Toyota Rush : 1 Unit
 - Toyota Innova E : 1 Unit
 - Daihatsu Xenia : 3 Unit
 - Suzuki Ertiga : 1 Unit
 - Jeep Feroza : 1 Unit
- (4) Kendaraan Mobil Pick Up :
- Toyota Hilux : 1 Unit
 - Toyota Kijang Standar : 2 Unit
 - Toyota KF 60 : 3 Unit
- (5) Kendaraan Mobil Dump Truck :
- Hino : 2 Unit
 - Mitsubishi : 2 Unit
 - Toyota : 3 Unit
 - Isuzu : 2 Unit
- (6) Kendaraan Mobil Tinja :
- Mitsubishi : 1 Unit
 - Isuzu : 1 Unit
 - Toyota : 3 Unit
- c) Peralatan Pekerjaan Pengaspalan :
- (1) Asphalt Mixing Plant : 1 Unit
 - (2) Asphal Sprayer : 1 Unit,
 - (3) Baby Roller : 1 Unit
 - (4) Tandem Roller (4 Ton) : 1 Unit
 - (5) Asphal Finisher Kecil : 1 Unit
 - (6) Tandem (6 Ton) : 1 Unit
 - (7) Wheel Loeder : 1 Unit
 - (8) Backhoe Loeder : 1 Unit

- (9) Vibro Soil Compactor : 1 Unit
- (10) Motor Grader : 1 Unit
- (11) Compactor (8 Ton) : 1 Unit
- (12) Generator Set : 1 Unit
- (13) Ketel Aspal : 1 Unit
- (14) Air Compressor : 1 Unit
- (15) Tandem Kombinasi : 1 Unit
- (16) Faver Finisher : 1 Unit
- (17) Rubber Tyred Roller : 1 Unit

d) Peralatan Kerja :

- (1) Komputer PC : 23 Unit
- (2) Laptop : 55 Unit
- (3) Kamera : 19 Unit
- (4) I Pad Komputer Tablet : 8 Unit
- (5) GPS : 7 Unit
- (6) Hammer Test : 1 Unit
- (7) Meteran Laser : 3 Unit,
- (8) Jack Hammer test : 1 Unit
- (9) Infocus : 3 Unit.
- (10) Sound System Informasi : 1 Set

Secara umum kondisi sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas pada setiap Bidang cukup memenuhi kebutuhan. Akan tetapi masih terdapat kekurangan pada beberapa bidang terutama sarana pendukung fasilitas kerja berupa komputer dan laptop, gps, pakaian kerja lapangan, minimnya Alat Berat. Kekurangan tersebut dapat diatasi oleh setiap bidang melalui pengadaan (belanja modal) dengan mengalokasikan anggaran pengadaan masing-masing bidang.

5) Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui arah kebijakan yang jelas sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi.

a) Secara garis besar permasalahan pokok Bidang Bina Program dan Penataan Ruang adalah

- (1) Konsultan Perencanaan yang tidak spesifik dan profesional
- (2) Daya dukung fasilitas kerja.

Solusinya :

- (1) Melihat permasalahan yang ada di dalam maka sangat dibutuhkan konsultan yang berkomitmen tinggi dan memumpuni
- (2) Melengkapi fasilitas kerja yang kurang memadai dengan pengadaan modal skpd.
- (3) Koordinasi antar bidang masih perlu ditingkatkan guna perencanaan bidang ke PU-an sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang selalu dibagi habis.

b) Adapun permasalahan pokok di bagian umum yaitu

- (1) Kurangnya Tempat Penyimpanan Arsip dan Barang untuk penyimpanan barang inventaris kantor yang tidak berguna sebelum dilakukannya penghapusan.
- (2) Rumah Jaga untuk penjagaan di saat malam hari dan hari libur kerja
- (3) Sumber Daya Manusia dalam urusan seperti ketatausahaan urusan keuangan dan pengeluaran serta membuat laporan bulanan dan tahunan agar terlaksananya ketatausahaan kepegawaian dengan baik dan tepat sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam hal apapun.

Solusinya :

- (1) Penambahan pengarsipan dan penyimpanan barang, maka sangat dibutuhkan ruangan khusus tempat penataan meletakkan arsip dan barang
- (2) Rumah jaga dan petugas jaganya
- (3) Penambahan ASN yang mempunyai potensi dalam hal ketatausahaan kepegawaian
- (4) Sarana prasarana perkantoran perlu ditingkatkan termasuk masih kurangnya alat-alat laboratorium ke PU-an
- (5) Peningkatan Kesejahteraan pegawai (Remonerasi) yang belum ada,

- c) Permasalahan pokok Bidang Bina Marga adalah
- (1) Kondisi jalan dan jembatan maupun infrastruktur lainnya masih banyak yang perlu ditingkatkan maupun direhabilitasi sebagai akibat kondisi geografis seperti Penanganan untuk Jalan Berlubang, Jalan Haus/Retak, Kemacetan, Jalan Tanah, Jalan Rusak Berat dan Sedang, Tanah Tergerus Air/Longsor
 - (2) Pembebasan Lahan Pelebaran Jalan.
 - (3) Kurang sadarnya pengguna jalan yang melewati dengan beban kendaraan diatas tonase yang diijinkan.
 - (4) Kondisi alat berat yang sudah berumur tua sehingga menyebabkan penggunaan yang kurang optimal.

Solusinya

- (1) Pembangunan jalan baru untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan aksesibilitas kawasan Pembangunan (peningkatan) ruas-ruas jalan strategis.
- (2) Rehabilitasi ruas – ruas jalan yang rusak paska genangan air (hujan).
- (3) Mengadakan inventarisasi kondisi jalan dan jembatan setiap 3 bulan/triwulan.
- (4) Mengadakan pemeliharaan jalan pada jalan yang berlubang/retak-retak guna mempertahankan kondisi jalan.
- (5) Mengadakan pemeliharaan jembatan pada konstruksi jembatan ataupun pengecatan pipa sandaran.
- (6) Mengadakan pemeliharaan berkala pada jalan dengan tingkat kerusakan diatas 11 %.
- (7) Perlu adanya pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang melarang setiap kendaraan yang melintas jalan tersebut dengan beban melebihi tonase yang diijinkan.
- (8) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar sering membersihkan saluran air yang terdapat dikiri kanan jalan tersebut sehingga pada waktu musim penghujan tidak menimbulkan genangan air di badan jalan.
- (9) Melakukan rekondisi atau perbaikan alat berat sehingga dapat menunjang kegiatan pemeliharaan berkala maupun rutin jalan.

d) Permasalahan pokok dalam bidang cipta karya

Khususnya air bersih yaitu

- (1) Belum meratanya wilayah pelayanan Air Bersih di Kota Jambi seperti Kotabaru, Jambi Selatan, Jambi Timur, selain itu belum tersedianya booster di setiap Kecamatan,
- (2) Ketersediaan Air Baku dari PDAM yang belum mencukupi kapasitas,
- (3) Kurangnya anggaran dan tenaga teknis lapangan.

Solusinya :

- (1) Penambahan Kebutuhan pipa distribusi Air Bersih, Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) sebesar 3000 SR, Kebutuhan SPAM (Booster Pump) sebesar 100 Lt/Det.

Permasalahan bidang permukiman penyehatan lingkungan yaitu

- (1) Masih kurang sarana dan prasarana lingkungan dalam Kota Jambi
- (2) Kurang sadarnya masyarakat perkotaan membuat WC yang tidak memenuhi standart kesehatan dan terbatasnya lahan untuk pembuatan jamban pada tiap rumah.

Solusinya :

- (1) Pembuatan IPAL Perkotaan, Pembuatan IPAL Komunal, Pembuatan IPAL Individu, Pembangunan MCK, Pembangunan Pedestrian, Pembangunan Jalan Lingkungan
- (2) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapatnya menggunakan dengan baik sarana sanitasi yang telah terbangun dan sekaligus menjaga kebersihannya.

Permasalahan di Bidang Angkutan Dan Alat Berat

- (1) Sampah Kabupaten Muara Jambi dibuangkan didalam Kota Jambi, diarea perbatasan
- (2) Masyarakat membuang sampah tidak masuk kedalam TPS
- (3) Sampah bangunan rumah, tanah dibuang tidak pada tempatnya
- (4) Tidak mengikuti jadwal/jam waktu untuk pembuangan

Solusinya :

- (1) Tegakkan perda No. 08 Tahun 2013 tentang Sampah
- (2) Perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat jadwal/jam pembuangan sampah

Permasalahan di UPTD IPLT

- (1) Pembuangan/drainase limbah belum ada sehingga apabila terjadi over limbah, limbah memasuki area kebun masyarakat
- (2) Pembangunan jalan desa oleh masyarakat sekitar area IPLT mengenai pagar IPLT
- (3) Bukti kepemilikan areal IPLT yang menjadi dasar penentuan kebijakan
- (4) Kurangnya personil pengelola IPLT

Solusinya :

- (1) Masih perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada tiap masing-masing bidang.
- (2) Lebih awal dalam menentukan/mencari lokasi pembuangan galian waled, sehingga hasil galian tidak mengganggu kebersihan dan kesehatan.
- (3) Perlu pengerukan beberapa kali untuk mencapai hasil yang optimal.
- (4) Perlu perencanaan yang lebih baik serta perbaikan / penertiban tata guna lahan dalam hal ini badan-badan saluran air. Hal tersebut memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Permasalahan di UPTD TPA

- (1) Masih adanya sampah yang masuk berasal dari luar kota jambi
- (2) Adanya sampah masuk yang bukan sampah rumah tangga seperti hasil tebangan kebun sawit, puing - puing bangunan rumah
- (3) Sampah perusahaan berupa barang - barang kemasan yang telah habis masa berlakunya.
- (4) Kurangnya personil pengolahan TPAS
- (5) Minim Alat Berat
- (6) Minimnya sarana pengolahan lindi
- (7) Kurangnya Anggaran Penutupan sampah dan Pemanfaatan Gas Methan

Solusinya :

- (1) Harus dilakukan tindakan MOU (Kerjasama) antar daerah
- (2) Tindakan / Pelaksanaan Sosialisasi terhadap masyarakat dan pihak terkait / pengembang
- (3) Perlu pembinaan dan sosialisasi serta pelaporan terkait limbah B3

- (4) Merekrut tenaga ahli dan mengirimkan tenaga yang ada untuk mengikuti diklat
 - (5) Mengusulkan sarana Alat Berat untuk perbaikan dan penggantian yang rusak berat
 - (6) Mengusulkan Labort TPAS untuk meneliti baku mutu hasil pengolahan lindi
 - (7) Mengusulkan Penambahan Penganggaran Penutupan dan Pemanfaatan Gas metan serta penghijauan.
 - (8) Mengusulkan Penambahan Penganggaran Penutupan dan Pemanfaatan Gas metan serta penghijauan.
- e) Permasalahan pokok dalam bidang sumber daya air yaitu
- (1) Belum tercukupinya swasembada pangan/Ketahanan Pangan,
 - (2) Infrastruktur DIR yang belum optimal, Penanggulangan banjir yang belum terintegrasi dengan baik,
 - (3) Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sungai, rawa dan danau demi kelangsungan hidup,
 - (4) Berkurangnya daerah resapan akibat alih fungsi lahan menjadi wilayah permukiman dan perindustrian,
 - (5) Belum optimalnya operasional dan pemeliharaan sistem jaringan drainase,
 - (6) Sistem Jaringan DAS dan Sistem Jaringan Daerah Irigasi,
 - (7) Belum tersedianya data jaringan drainase dan DIR yang terpetakan dengan baik
- Solusinya :
- (1) Peningkatan/Pembangunan/Rehabilitasi saluran drainase,
 - (2) Pengadaan tanah lokasi embung/retensi
 - (3) Operasional dan pemeliharaan saluran drainase, normalisasi saluran/sungai.
 - (4) Perencanaan Sistem Jaringan Drainase,
 - (5) Sosialisasi Sempadan Sungai/Saluran untuk pencegahan bahaya banjir, Pembinaan lembaga pengelola SDA,
 - (6) Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan,

5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ini dilaksanakan oleh 2 (dua) instansi, yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.

a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi

1) Program dan Kegiatan

a) PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Koordinasi penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
- (2) Pengelolaan penerimaan fasilitas umum (FASUM) dari pengembang perumahan.
- (3) Penyusunan peraturan daerah tentang perumahan & kawasan permukiman
- (4) Penyusunan dokumen rencana pembangunan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

b) PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Monitoring penataan rumah sehat
- (2) Penyuluhan rumah sehat

c) PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan
- (2) Pelatihan tim teknis perencanaan perumahan

2) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per Desember 2019 adalah sebanyak 84 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 42 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil 1 orang dan pegawai Kontrak 41 Orang.

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	2	3	4	5
JUMLAH		53	31	84
	Pegawai Negeri Sipil	30	12	42
	Calon Pegawai Negeri Sipil		1	1
	Pegawai Kontrak	23	18	41

3) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut :

4) No. K	Jenis Belanja	2019	
		Anggaran	Realisasi
o	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.122.154.214	4.072.592.175
n	Belanja Pegawai		
d	Jumlah Belanja Tidak Langsung		
i	BELANJA LANGSUNG	29.875.444.500	29.236.335.551
s	Belanja Pegawai/Personalia		
i	Belanja Barang dan Jasa		
3	Belanja Modal		
S	Jumlah Belanja Langsung	29.875.444.500	29.236.335.551
a	Jumlah Belanja Seluruhnya	34.997.598.714	33.308.927.726
r			

4) Sarana dan Prasarana yang digunakan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi didukung Sarana/ Prasarana atau aset yang relatif cukup. Baik berupa aset tetap maupun aset bergerak. Aset berupa kantor yang relative cukup baik dengan luasan yang cukup, terdiri dari ruang kepala, ruang sekretaris dan ruang staf sekretariat, ruang bidang-bidang dan staf bidang, selain itu juga dilengkapi dengan satu ruang rapat kapasitas 20 orang. Halaman yang cukup luas dan dapat dimanfaatkan sebagai ruang parkir. Mengingat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dibentuk sejak tanggal 31 Desember 2019, dengan penambahan 2 (dua) UPTD dari OPD sebelumnya.

Oleh Karena itu, untuk mengoptimalkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan, diperlukan ruang kerja yang memadai pada setiap UPTD, baik ruang-ruang Bidang maupun ruang staf.

Kendaraan Operasional

Mengingat beban tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi yang cukup berat terutama pada masa yang akan datang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam memberikan pelayanan, perkembangan pembangunan fisik kota secara keseluruhan sudah barang tentu fasilitas kendaraan operasional yang ada saat ini tentunya sangat dibutuhkan baik dari kondisi kendaraan maupun dari jumlah kendaraan. Berikut kebutuhan dan kendaraan yang ada pada Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun Anggaran 2019.

Keadaan dan Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi Tahun 2019.

NO	URAIAN	JML YG ADA	KEBUTUHAN	KEKURANGAN
1	Mobil Kepala Dinas	1 unit	1 unit	-
2	Mobil Operasional	2 unit	3 unit	1 unit
2.1	Sekretariat			
2.2	Roda 4	2 unit	2 unit	
	Roda 2	7 unit	7 unit	
3	Bidang Perumahan			
3.1	Roda 4	1 unit	1 unit	
3.2	Roda 2	3 unit	3 unit	
4	Bidang Kawasan Permukiman			
4.1	Roda 4	1 unit	1 unit	
4.2	Roda 2	3 unit	3 unit	
5	Bidang Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias			
5.1	Roda 4	2 unit	2 unit	
5.2	Roda 2	3 unit	3 unit	
6	UPTD Pemakaman			
6.1	Roda 4	1 unit	2 unit	1 unit
6.2	Roda 2	1 unit	3 unit	2 unit

NO	URAIAN	JML YG ADA	KEBUTUHAN	KEKURANGAN
7	UPTD Pengawasan			
7.1	Roda 4	1 unit	2 unit	1 unit
7.2	Roda 2	1 unit	3 unit	2 unit
	Jumlah			
	Roda 4	10 unit		7 unit
	Roda 2	18 unit		4 unit

Gedung Kantor

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kota Jambi, saat ini menempati kantor Eks. Gedung Pembantu Wilayah Timur Provinsi Jambi yang beralamat di Jl. H. Zainir Havis, BA No. 60 dengan luas lahan 4.265 M². dan luas bangunan 448 M². Aset berupa kantor yang relatif cukup baik dengan luasan yang cukup, terdiri dari ruang kepala, ruang sekretaris dan staf sekretariat, ruang bidang-bidang dan staf bidang, selain itu juga dilengkapi dengan satu ruang rapat kapasitas 20 orang. Halaman yang cukup luas dan dapat dimanfaatkan sebagai ruang parkir. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

NO	URAIAN	LUAS RUANGAN	STANDAR	KEBUTUHAN
1	R. Kadis	48 M ²	48 M ²	48
2	R. Sekretaris	96 M ²	96 M ²	6
3	R. Kepala Bidang Perumahan Rakyat	12 M ²	12 M ²	12
4	R. Loker	21 M ²	21 M ²	21
5	R. Kepala Bidang Kawasan Permukiman	48 M ²	120 M ²	72
6	R. Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias	32 M ²	72 M ²	40
7	R. Kepala UPTD PEMAKAMAN	120 M ²	84 M ²	36
8	R. Kepala UPTD PENGAWASAN BANGUNAN			
9	R. Kasubbag dan Staf Sekretariat			
10	R. Kasi dan Staf Bidang Perumahan			
11	R. Kasi dan staf Bidang Kawasan Permukiman			

NO	URAIAN	LUAS RUANGAN	STANDAR	KEBUTUHAN
12	R. Kasi dan Staf LPJU			
13	R. Kasubbag dan Staf UPTD Pemakaman			
14	R. Kasubbag dan Staf UPTD Pengawasan			
15	R. WC	54 M ²	108 M ²	64
16	R. Arsip	48 M ²	156 M ²	108
17	R. Penerima Tamu	21 M ²	21 M ²	-
18	R. Rapat	28 M ²	96 M ²	68
19	Dharma Wanita	120 M ²	120 M ²	-
20	Gudang	18 M ²	24 M ²	-
21	Mushollah	36 M ²	36 M ²	-
22	Garasi	150 M ²	150 M ²	-
23	R. Maket	90 M ²	90 M ²	-
24	Parkir Kendaraan Roda 4 dan Roda 2			

Perlengkapan Kantor

Perlengkapan kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Jika ditinjau dari fungsi dan peranannya sebagai lembaga dinas teknis yang melayani kebutuhan masyarakat dalam pembangunan fisik kota, yang bersifat kegiatan usaha masih kurang memadai. Disamping hal tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi belum dilengkapi dengan perlengkapan operasional yang bersifat elektronika maupun program dan pengendalian pelayanan bidang tata ruang dan Perumahan dan administrasi terutama dalam menghadapi kebutuhan mendatang dan era globalisasi, hal ini dapat dilihat pada table berikut:

NO	URAIAN	JML YANG ADA	KONDISI	STANDAR KEBUTUHAN	KURANGAN
1	Peralatan Bongkar Reklame/ Mesin Las	1	Baik	1	-
2	AC	8	Baik	8	-
3	Kamera Pengawas (CCTV) Dan Perlengkapannya	1	Baik	1	-
4	Filling cabinet	16	3 rusak	18	2
5	Tangga Lipat	1	Baik	1	-
6	Almari Es	1	Baik	1	-

7	Kamera Digital	5	Baik	5	-
8	Komputer	5	Baik	8	3
9	Note book/ Laptop	22	baik	22	-
10	Scanner	2	Baik	2	-
11	Router	3	1 rusak	3	-
12	Faximile	1	Baik	1	-
13	Sound System	3	Baik	3	-
14	Kursi	100	Baik	100	-
15	Meja	8	Baik	8	-
16	Proyektor	1	Baik	1	-
17	Printer	19	10 Baik, 9 rusak	15	-
18	Televisi	1	Baik	1	-
19	Meubelair	1	Baik	1	-
20	Almari Arsip	10	Baik	10	-
21	Almari Keuangan	1	Baik	1	-

5) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Sesuai dengan tupoksinya, Jenis pelayanan yang diberikan oleh dinas adalah pelayanan umum yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat, yaitu :

- (1) Memberikan keterangan rencana kota (KRK) untuk setiap berkas permohonan IMB.
- (2) Memberikan kajian/pertimbangan teknis untuk syarat terbitnya IMB.
- (3) Melakukan pertimbangan terhadap rencana perumahan (siteplan) dan mengesahkannya.
- (4) Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap setiap pembangunan agar sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan.
- (5) Melakukan Pembangunan Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias, pemeliharaan dan Operasional Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias.
- (6) Menyelenggarakan Pelayanan Pemakaman, dan melaksanakan Pemeliharaan Makam di areal pemakaman milik Pemerintah Kota Jambi.

Dari uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

- (1) Tim Ahli Bangunan Gedung belum bisa dibentuk dikarenakan Peraturan Walikota tentang TABG belum selesai dibahas. Tim Ahli Bangunan Gedung sangat diperlukan untuk proses pengkajian bangunan gedung dalam mengeluarkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
- (2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia khususnya yang berhubungan dengan pelayanan perijinan bangunan sehingga waktu dalam menyelesaikan berkas permohonan belum bisa optimal.
- (3) Dokumen RDTR yang dihasilkan dari kegiatan selama tahun 2016-2017 belum bisa dijadikan alat kendali perijinan dikarenakan belum sampai ke tahap pengesahan perda RDTR dan Peraturan Zonasi.
- (4) Belum ada tenaga fungsional yang khusus menangani data peta Kota, dan untuk membuat design serta analisa Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga data yang dimiliki belum lengkap.
- (5) Peralatan komputer dan printer dirasa masih kurang, padahal intensitas cetak sangat tinggi.
- (6) Ruang Kerja yang kurang memadai dan kurang representatif sehingga kurang nyaman dan kurang optimal dalam memberikan pelayanan.
- (7) Belum tersedianya Data Teknis Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman serta belum tertata rapi dalam pengarsipannya.

b) Solusi

- (1) Perlu dibentuk tim Pokja yang terdiri dari personil yang berkompeten dalam bidang bangunan gedung dan tetap fokus dalam proses penyelesaian perwal tersebut.
- (2) Penambahan tenaga teknis untuk menunjang kinerja dalam proses penerbitan ijin.
- (3) Segera mungkin dilakukan proses pembahasan ranperda RDTR dan Peraturan Zonasi dan diiringi dengan proses mendapatkan persetujuan substansi dari Propinsi dan Pusat terhadap semua dokumen RDTR yang telah disusun selama tahun 2016-2017.

- (4) Perlu dipikirkan serius untuk melakukan updating peta kota Jambi karena semua hal yang bersifat perencanaan wilayah tidak lepas dari peta yang dimiliki.
- (5) Pengadaan komputer/laptop sesuai dengan spesifikasi grafis dibarengi dengan penyediaan printer.
- (6) Penyediaan Ruang Asistensi dan konsultasi per bidang teknis Perumahan Rakyat maupun Kawasan Permukiman.
- (7) Diperlukan Penunjukkan Petugas Pengarsipan serta Peralatan dan Perlengkapannya/termasuk Pelatihan dan ruang khusus Arsip.
- (8) Perlu sinkronisasi dan koordinasi serta dukungan Dana Pemerintah Pusat dalam rangka Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di kawasan Perumahan yang sudah dibangun lama oleh Developer dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (9) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah membuat DED lengkap dengan RAB Rehab Gedung dan bangunan Dinas ini, kiranya dapat segera untuk disetujui dan direalisasikan.

6. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Urusan wajib yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi adalah Urusan Kepemudaan dan Olahraga dengan Program :

Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepememudaan dengan Kegiatan :

1. Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
2. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
3. Pembinaan Kepemudaan
4. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Olahraga

2) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)	Tahun
1	IV b	3	2019
2	IV a	3	2019
3	III/d	10	2019
4	III/c	5	2019
5	III/b	3	2019
6	III/a	4	2019
7	II/d	0	2019
8	II/c	3	2019
9	II/b	0	2019
10	II/a	1	2019
Total		32	2019

--	--

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

STATUS	JUMLAH (ORANG)
PNS	31
CPNS	1
Kontrak	16
JUMLAH	48

3) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Silva
TOTAL BELANJA	10.950.194.718	10.525.640.776	424.553.942
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.197.384.718	3.035.383.744	162.000.974
Belanja Pegawai	3.197.384.718	3.035.383.744	162.000.974
BELANJA LANGSUNG	7.752.810.000	7.490.257.032	262.552.968
URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	7.752.810.000	7.490.257.032	262.552.968
<u>Program pelayanan administrasi perkatoran</u>	<u>1.202.662.500</u>	<u>1.179.741.127</u>	<u>22.921.373</u>
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	86.000.000	76.469.535	9.530.465
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinass/operasional	9.500.000	6.711.900	2.788.100
Penyediaan jasa administrasi keuangan	373.836.000	366.552.000	7.284.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	43.362.500	43.350.000	12.500
Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.000.000	45.000.000	-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	105.000.000	104.142.500	857.500
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	10.000.000	-
Penyediaan peralatan rumah tangga	5.000.000	5.000.000	-
Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000	30.000.000	-
Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam	60.264.000	60.264.000	-
Perjalanan Dinas	434.700.000	432.251.192	2.448.808
<u>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</u>	<u>1.010.090.000</u>	<u>1.000.387.700</u>	<u>9.702.300</u>

Pengadaan perlengkapan gedung kantor	53.500.000	52.990.000	510.000
Pengadaan Mebeleur	79.318.020	78.657.200	660.820
Pengadaan peralatan perkantoran	135.000.000	131.334.000	3.666.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.000.000	11.941.000	59.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	192.500.000	188.728.500	3.771.500
Pemeliharaan rutin/berkala alat alat kantor	15.000.000	15.000.000	-
Rehabilitasi ringan/sedang gedung kantor	522.771.980	521.737.000	1.034.980
Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Silva
<u>Program peningkatan disiplin aparatur</u>	<u>37.500.000</u>	<u>29.250.000</u>	<u>8.250.000</u>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	37.500.000	29.250.000	8.250.000

4) Kondisi Sarana dan Praarana

Terlampir

5) Permasalahan dan Solusi

Dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, masih ditemukan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Adapun hambatan tersebut antara lain :

a) Bidang Pemuda

- Kurangnya Koordinasi Antar kota dengan provinsi.
- Kurangnya respon dari sekolah-sekolah terhadap pembinaan pelatihan tersebut.
- Kurangnya dana pelatihan keterampilan bagi pemuda.
- Banyaknya usul dan gagasan dari pemuda belum dapat dianggarkan di APBD dikarenakan keterbatasan anggaran.

b) Bidang Olahraga

Pelaksanaan kegiatan tidak banyak menemui kendala namun anggaran yang tidak begitu besar dapat menghambat pelaksanaan kegiatan.

7) Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal ini dilaksanakan oleh instansi yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi.

1) Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. program serta kegiatan – kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, Program dan Kegiatan tahun 2019 dikelompokkan sebagai berikut :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- (1) Penyediaan jasa surat menyurat
- (2) Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik.
- (3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- (4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- (5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- (6) Penyediaan alat tulis kantor
- (7) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- (8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- (9) Penyediaan makanan dan minuman
- (10) Perjalanan Dinas
- (11) Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam

b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

- (1) Pengadaan kendaraan dinas /operasional
- (2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- (3) Pengadaan Mebeler
- (4) Pengadaan peralatan perkantoran
- (5) Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor
- (6) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- (7) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- (1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- (1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

- (1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

f) Program Perencanaan SKPD

- (1) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
(2) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

g) Program Pengembangan Data/Informasi

- (1) Pengembangan Data/Informasi

h) Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik

- (1) Verifikasi, Penerbitan dan Identifikasi Dokumen Perizinan
(2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
(3) Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan
(4) Pengelola Data dan Penataan Arsip Perizinan

i) Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

- (1) Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
(2) Sosialisasi Penanaman Modal
(3) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

2) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Sumber daya manusia yang ada dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dapat diklasifikasikan dalam table-tabel sebagai berikut :

Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
	Pegawai Negeri Sipil	
1.	Laki-laki	11
2.	Perempuan	25
	JUMLAH	36
	Non Pegawai Negeri Sipil	
1.	Laki-laki	21
2.	Perempuan	17

JUMLAH		38
NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
Pegawai Negeri Sipil (PNS)		
1.	Doktoral (S-3)	-
2.	Pasca Sarjana (S-2)	3
3.	Sarjana (S-1)	28
4.	Diploma III (D-3)	1
5.	SLTA	4
JUMLAH		36
NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
Non Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS)		

3) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada anggaran tahun 2019 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi di alokasikan anggaran sebesar Rp. 8.342.250.972,- anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.348.815.972,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.993.435.000,- yang dijabarkan 9 (sembilan) Program dan 32 (Tiga puluh dua) Kegiatan, untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.348.815.972	3.957.185.601	90,99
	BELANJA LANGSUNG	3.993.435.000	3.619.977.353	90,65
	JUMLAH	8.342.250.972	7.577.162.954	90,83

Tahun 2019, terjadi penyerapan dana yang tidak maksimal pada beberapa kegiatan yang dirincikan sebagai berikut :

Kegiatan Bimbingan Teknis, Implementasi Peraturan Perundang-undangan, untuk efisiensi dan efektifitas pada kegiatan tersebut, dimana kegiatan yang bersifat bimbingan teknis maupun diklat cukup dilaksanakan dalam Kota Jambi saja.

Pada kegiatan Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE), tidak dapat dilaksanakan karena Surat Keputusan Pelimpahan kewenangan dalam penandatanganan Izin Prinsip Penanaman Modal baru diterima pada akhir Triwulan IV, sehingga pelaksanaan kegiatan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) tidak optimal, dan ini berpengaruh pada sosialisasi peraturan penanaman modal yang salah satunya berisi tentang kewajiban bagi para penanaman modal untuk memiliki izin prinsip penanaman modal, sebelum memulai kegiatan investasi ataupun dalam proses pelaksanaan pengembangan investasi, dan investor juga memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.

4) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dibiayai Dana APBD Kota Jambi Tahun 2019, dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.348.815.972	3.957.185.601	90,99
2.	BELANJA LANGSUNG	3.993.435.000	3.619.977.353	90,65
	JUMLAH	8.342.250.972	7.577.162.954	90,83

Untuk belanja tidak langsung capaian realisasi 90,99 % atau sebesar Rp. 3.957.185.601,- dari dana ditetapkan Rp. 4.348.815.972,- sedangkan belanja langsung capaian realisasi keuangan 90,65 % atau sebesar Rp. 3.619.977.353,- dari dana ditetapkan Rp. 3.993.435.000,- dari pelaksanaan 9 program dan 32 kegiatan dengan total anggaran

5) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sarana dan prasarana pada DPMPSTP Kota Jambi terdiri dari ruangan kepala dinas, ruangan sekretariat, ruangan bidang bidang pelayanan perizinan, ruangan pengaduan, ruangan menyusui dan lainnya.

Selain itu Untuk memperlancar dalam melaksanakan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sangat didukung dengan sarana dan prasarana yang merupakan aset-aset yang dirincikan dibawah ini :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bangunan Gedung	1 Unit	
2	Kendaraan Roda 4 (Empat)	6 Unit	
3	Kendaraan Roda 2 (Dua)	23 Unit	
4	Komputer (Laptop)	20 Unit	
5	Komputer (Personal Computer)	33 Unit	
6	Komputer (Note Book)	4 Unit	
7	Printer	42 Unit	
8	Proyektor Ruang Rapat	1 Paket	
9	Proyektor Ruang Aula	1 Paket	
10	Air Conditioning (AC)	12 Unit	
11.	AC Central Gedung Kantor	1 Paket	
12	UPS	24 Unit	
13	Camera	5 Unit	
14	Scanner	1 Unit	
15	TV LCD	4 Unit	
16	Dispenser	6 Unit	
17	Kipas Angin	6 Unit	
18	Jam Dinding	6 Unit	
19	Handycam	1 Unit	
20	Telpon PHBX	9 Unit	
21	Mesin Penghancur Kertas	5 Unit	
22	Kulkas	1 Unit	

6) Permasalahan dan Solusi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi merupakan lembaga penyelenggara pelayanan perijinan terpadu Kota Jambi, dituntut untuk dapat memberikan pelayanan perijinan yang cepat, akurat dan transparan kepada masyarakat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan kerana dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Perijinan dan Investasi dimasa datang. DPMPTSP Kota Jambi dituntut dapat memberikan pelayanan perizinan yang cepat, akurat dengan biaya sesuai ketentuan, secara transparan kepada masyarakat.

Ada beberapa isu strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dalam mewujudkan pelayanan prima antara lain :

- a) Peluang Investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kota Jambi.
- b) Regulasi yang ada ditingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi terkini.
- c) Belum optimalnya proses pelayanan perizinan yang di keluarkan DPMPTSP dikarenakan kewenangan perlengkapan pesyaratan perizinan masih ada pada perangkat daerah pemberi rekomendasi.
- d) Belum semua investor membuat laporan/LKPM melalui kepala DPMPTSP.
- e) Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi.
- f) Sebagian besar perijinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP, sangat tergantung pada rekomendasi teknis dari SKPD lain, Proses pemberian rekomendasi teknis ini masih menjadi kendala dalam pelayanan perijinan, terutama ketepatan waktu.
- g) Kurangnya Sumber daya manusia (SDM) yang membidangi perizinan.

8. Urusan Koperasi & UKM

Urusan Koperasi dan UKM ini dilaksanakan oleh instansi yaitu Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi

1) Program Dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi dalam RPJMD 2018-2023. Adapun program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Makanan dan Minuman;
9. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam;

Penyusunan Renstra SKPD;

Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri dari kegiatan:

Pengembangan Data/Informasi.

Program Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari kegiatan:

Pemberian Fasilitas dan Pengadaan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat;

Penyusunan dan Perluasan Informasi Tenaga Kerja;

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, terdiri dari kegiatan:

Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk UMKM dan Koperasi;

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

Penguatan Pemasaran Bagi Produk UMKM.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, terdiri dari kegiatan:

Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi;

Penguatan Struktur Permodalan Koperasi;

Pembinaan dan Pengawasan Koperasi;

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, maka dapat dilihat tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada pencapaian SPM Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang menjadi indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang meliputi :

1. Pelayanan Pelatihan Kerja

- Indikator SPM besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tahun anggaran 2018 sebesar 48,19 %, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sangat memuaskan melebihi 100% (803,17%), dimana jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dibandingkan jumlah yang mendaftar memiliki kesempatan cukup besar yaitu 48,19% melebihi target SPM 6 % sebesar 42,19%.
- Indikator SPM besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat tahun anggaran 2018 sebesar 100 %, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sangat memuaskan melebihi 100% (1.666,67%), dimana seluruh pendaftar dapat mengikuti pelatihan berbasis masyarakat, pencapaian sebesar 100% melebihi target SPM 6 % sebesar 94%. Pelatihan yang dilakukan tidak diadakan pendaftaran tapi menerima daftar (P2WKSS) yang harus dilatih oleh Pemda pada tahun anggaran 2018.
- Indikator SPM besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan tahun anggaran 2018 sebesar 50 %, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sangat memuaskan melebihi 100% (833,33%), dimana jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dibandingkan

jumlah yang mendaftar memiliki kesempatan cukup besar yaitu 50,00% melebihi target SPM 6 % sebesar 44,00%.

2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Indikator SPM besaran pencari kerja yang ditempatkan tahun anggaran 2018 sebesar 42,26 % dari jumlah pencari kerja terdaftar, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sangat memuaskan melebihi 100% (528,12%), dimana jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dibandingkan jumlah pencari kerja terdaftar sangat memuaskan yaitu 42,26% melebihi target SPM 8 % sebesar 34,25%.

3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Indikator SPM besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama tahun anggaran 2018 sebesar 55,12 % dari jumlah kasus yang dicatatkan, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sangat memuaskan melebihi 100% (110,24%), dimana jumlah kasus yang diselesaikan dibandingkan jumlah kasus yang dicatatkan yaitu 55,12% melebihi target SPM 50 % sebesar 5,12%.

4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

Indikator SPM besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek tahun anggaran 2018 sebesar 81,30% dari jumlah pekerja/buruh tercatat, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sangat memuaskan melebihi 100% (162,60%), dimana jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek (BPJS) dibandingkan jumlah pekerja/buruh tercatat yaitu 81,30% melebihi target SPM 50 % sebesar 31,30%.

3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah KotaJambi per 31 Desember 2019 memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 53 orang, terdiri dari ASN sebanyak 32 orang dan tenaga kontrak 21 orang. Kondisi pegawai Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi posisi per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada table berikut sesuai dengan perjenisnya:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasca Sarjana	3	

2.	Sarjana	28	
3.	Sarjana Muda	-	
4.	SLTA	1	
5.	SLTP	-	
6.	SD	-	
Jumlah		32	

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Madya	IV/c	-
2.	Pembina Utama Muda	IV/b	2
3.	Pembina	IV/a	7
4.	Penata Tk. I	III/d	13
5.	Penata	III/c	2
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	4
7.	Penata Muda	III/a	3
8.	Pengatur Tk. I	II/d	1
9.	Pengatur	II/c	-

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Ket.
1.	Eselon II	1	-	
2.	Eselon III	5	5	
3.	Eselon IV	15	15	
Jumlah		21	20	
Jumlah				32

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Ket.
1.	Fungsional	2	1	
Jumlah		2	1	

4) Alokasi dan Realisasi Anggaran

- a) Rencana kerja tahun anggaran 2019 OPD Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi melaksanakan 10 program dan 32. Total dana tahun anggaran 2019 sebesar Rp.4.209.282.900,-, dan pada APBD Perubahan hanya terdapat pergeseran dan perubahan rekening tanpa adanya perubahan jumlah anggaran.

No.	Program	Kegiatan	Anggaran 2019		%
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat	3.400.000	3.288.000	96,71%
		2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	160.140.000	126.996.081	79,30%
		3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	196.152.000	171.858.000	87,71%
		4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	56.060.000	53.928.000	96,20%
		5. Penyediaan ATK	53.804.000	53.804.000	100,00
		6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	51.245.000	48.070.000	93,80%
		7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.400.000	9.400.000	100,00
		8. Penyediaan makanan dan minuman	17.507.000	17.022.000	97,23%
		9. Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	246.444.000	243.144.000	98,66%
		10. Perjalanan Dinas	559.480.000	555.406.900	99,27%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	60.000.000	56.800.000	94,67%
		12. Pengadaan peralatan perkantoran	121.782.000	117.123.000	96,17%
		13. Pemeliharaan rutin/berkala	292.091.000	276.991.800	94,83%

		kendaraan Dinas/Operasional			
		14. Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor	20.000.000	18.265.000	91,33%
		15. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	10.000.000	10.000.000	100,00
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	43.400.000	38.500.000	88,71%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	113.000.000	110.825.000	98,08%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.588.000	2.213.000	85,51%
6.	Program Perencanaan SKPD	19. Penyusunan Renstra SKPD	7.500.000	7.284.000	97,12%
		20. Penyusunan rencana kerja SKPD	1.636.000	1.420.000	86,80%
7.	Program Pengembangan Data/Informasi	21. Pengembangan data/informasi	15.000.000	15.000.000	100,00
8.	Program Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja.	22. Pemberian fasilitas dan pengadaan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	430.225.250	397.148.000	92,31%
		23. Penyusunan dan perluasan informasi tenaga kerja	217.810.250	207.097.250	95,98%
		24. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	108.250.000	104.500.000	96,54%
		25. Fasilitasi penyelesaian prosedur perlindungan hukum dan jaminan sosial	40.446.000	35.860.000	88,66%

		ketenagakerjaan			
9.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	26. Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan koperasi	140.400.000	137.273.445	97,77%
		27. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	270.284.500	242.784.500	89,83%
		28. Penguatan pemasaran bagi produk UMKM	448.760.750	369.257.045	82,28%
10.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	29. Sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	101.380.000	89.622.000	88,40%
		30. Penguatan struktur permodalan koperasi	138.102.000	126.752.000	91,78%
		31. Pembinaan dan pengawasan koperasi	333.170.250	313.333.150	94,05%
		32. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	36.468.000	31.533.000	86,47%

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun proses perencanaan pembangunan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM didasarkan atas :

- a) Hasil rapat musrenbang tingkat kota, meliputi penjelasan tentang penyusunan kegiatan masing-masing bidang sesuai dengan jenjang tupoksi sesuai dengan Renstra OPD Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi;
- b) Masing-masing bagian menyusun kegiatan dengan menetapkan skala prioritas sehingga didapatkan Indikator Kerja Utama dan dilanjutkan dengan rapat pembahasan rencana anggaran dinas yang disatukan ke dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- c) Setelah pembahasan dalam rapat pimpinan, masing-masing bagian penanggung jawab memperbaiki usulan rencana kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Dinas, yang selanjutnya disampaikan kepada Bappeda untuk dibahas dalam forum SKPD Tingkat Kota dan Propinsi Jambi yang kemudian dibahas dengan DPRD.

Kesesuaian juga dapat dilihat dari strategi yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dimana **urusan Ketenagakerjaan** meningkatkan kualitas tenaga kerja sebagai upaya perluasan lapangan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru; mengembangkan sumber daya tenaga kerja agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain serta melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Urusan Perkoperasian meningkatkan kualitas SDM pengurus atau pengelola koperasi, termasuk penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi bagi Koperasi, meningkatkan akses permodalan dan pemasaran bagi koperasi.

Urusan UKM meningkatkan akses permodalan dan pemasaran bagi UMKM, meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi bagi UMKM sebagai upaya meningkatkan daya saing produk, khususnya berbasis potensi daerah, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan pelaku UMKM.

7) Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi menempati gedung yang beralamat di Jalan KH Agus Salim Kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi yang terdiri dari Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretaris, Ruang Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Ruang Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Pengawasan Koperasi, Ruang Bidang Usaha, Mikro Kecil dan Menengah dan Ruang Bidang Perkoperasian.

Untuk menunjang kelancaran dari penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi dilengkapi oleh beberapa sarana, antara lain :

- a) Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak : 7 Unit;
- b) Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak : 17 Unit;
- c) Komputer : 20 Unit.
- d) Lap Top dan tablet : 18 Unit;
- e) Note Book : 5 Unit;
- f) Printer : 29 Unit;
- g) Sound System : 3 Unit;
- h) TV : 9 Unit;
- i) Scanner : 1 Unit.

8) Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan :

a) Koperasi

- (1) Kompetensi SDM pengurus/pengelola yang relatif masih rendah dan belum memiliki jiwa kewirausahaan;
- (2) Rendahnya akses koperasi terhadap sumber-sumber permodalan;
- (3) Kurang optimalnya koperasi mewujudkan skala usaha yang ekonomis akibat belum optimalnya kerjasama antar koperasi dan kerjasasama koperasi dengan badan usaha lainnya;
- (4) Masih rendahnya kesadaran untuk melaksanakan RAT pada setiap akhir tahun;
- (5) Sistem administrasi keuangan koperasi sebagian masih menggunakan sistem manual sehingga menyulitkan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi;
- (6) Masih banyak Koperasi yang tidak aktif.

b. UKM

- (1) Masih banyak ditemukan adanya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang menyangkut profesionalisme bisnis;
- (2) Masih rendah semangat dan etos kerja, penguasaan teknis produksi dan penanganan aspek manajerial;
- (3) Masih rendahnya akses terhadap pasar dan permodalan.

Solusi

a) Koperasi

- (1) Melakukan penguatan kelembagaan koperasi melalui pelatihan, memfasilitasi koperasi mengakses sumber-sumber permodalan, pemasaran dsbnya;
- (2) Melakukan pembinaan kepada pengurus, anggota dan pengawas baik secara langsung maupun melalui RAT;
- (3) Melakukan sosialisasi perkoperasian melalui media elektronik;
- (4) Melakukan penyuluhan kepada anggota koperasi terutama kepada koperasi yang tidak aktif;

b) UKM

- (1) Melakukan penguatan manajerial UMKM melalui pendidikan dan pelatihan.

- (2) Memfasilitasi UMKM mengakses sumber-sumber permodalan, pemasaran melalui promosi produk dsbnya.
- (3) Melakukan pembinaan langsung kepada UMKM dan menyediakan sarana pemasaran bagi PKL.

9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ini dilaksanakan oleh instansi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

1) Program dan Kegiatan

Dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan, maka diaktualisasikan ke dalam program terpadu oleh masing-masing bidang dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e) Program Peningkatan Perkembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f) Program Perencanaan SKPD
- g) Program Pengembangan Data/ Informasi
- h) Program Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan.

2) Kegiatan

Berdasarkan program tersebut diatas maka kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Program Selama tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan :

- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- c) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- d) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- e) Penyediaan alat tulis kantor.
- f) Penyediaan barang cetak dan penggandaan.
- g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- h) Penyediaan makan dan minum
- i) Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis

- j) Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam
- k) Perjalanan Dinas.
- l) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- m) Pengadaan Meubeleur
- n) Pengadaan peralatan kantor
- o) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- p) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- q) Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
- r) Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor
- s) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- t) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- u) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan.
- v) Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- w) Penyusunan laopran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.
- x) Penyusunan Renstra OPD
- y) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
- z) Pengelolaam Informmasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal apabila mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Jambi yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada standar SPM Departemen Dalam Negeri adalah :

Dalam penerapannya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berhasil menerapkan Standar Pelayanan Minimal keberhasilan ini dapat dilihat dari table berikut :

Rincian Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90	85.28	94.75
		Rata-rata waktu pengurusan KTP,Kartu Keluarga,Akta Kelahiran dan Akta Kematian	Hari Kerja	5	2.5	200

		Persentase penyelesaian penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian tepat waktu	%	100	99.5	99.5
2.	Meningkatkan Tertib Admnistrasi Kependudukan	Capaian Penerbitan Kartu Keluarga	%	100	90	90
		Capaian Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	100	91	91
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	%	89.9	85	94.5
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	%	58.6	70	119
	Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan	Validitas Data Base Kependudukan	%	90	85	94.5

Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2017		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90	85.28	94.75
		Tercapainya peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	%	100	99.9	99.9
2.	Meningkatkan Tertib Admnistrasi Kependudukan	1. Tercapainya Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan (KK dan KTP el)	%	100	90.5	90.5
		2. Tercapainya Cakupan Penerbitan Akte Pencatatan Sipil (Akte kelahiran dan Akte Kematian)	%	74.25	77.5	104
	Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan	Validitas Data Base Kependudukan	%	90	85	94.5

Apabila dilihat berdasarkan table pencapaian kinerja Dinas Dukcapil Kota Jambi tahun 2018 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah berhasil meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan Sipil di Kota Jambi dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai 85.28 dengan Nilai A Kategori Sangat baik dan dibuktikan dengan diberikannya penghargaan dari kementerian Menpan RB Deputi Bidang Pelayanan Publik dengan kategori penghargaan adalah **Unit Penyelenggaran Publik Kategori Baik dengan Catatan.** Namun demikian peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil akan terus diupayakan peningkatannya seiring dengan tuntutan percepatan pelayanan menuju tertib adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan mengedapankan pelayana prima.

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tahun 2018 menurut golongan dan Pangkat sebagai berikut :

Golongan	IV	10	Orang
Golongan	III	39	Orang
Golongan	II	10	Orang
<u>Golongan</u>	<u>I</u>	<u>0</u>	<u>Orang</u>
Jumlah PNS		59	Orang

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan urusan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil ada beberapa program yang dilaksanakan pada tahun 2019 terdiri dari 2 (dua) program dengan 4 (empat) kegiatan bersumber dari APBD Kota Jambi dan 1 Kegiatan bersumber dari Dana DAK Tugas Pembantuan (TP) Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri . Jumlah anggaran belanja langsung yang dilokasikan untuk membiayai Program dan Kegiatan dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebesar Rp. 1.348.675.000.- dan dana DAK Rp. 1.328.012.000.- dengan Total anggaran sebesar Rp. 2.678.687.000.-

PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB

No	Program /Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi
1.	Program Pengembangan Data/Informasi Pengembangan data/informasi	181.921.500,-	177.021.000.-
2.	Program peningkatan tata kelola adm kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	85.530.000,-	85.530.000.-
	Pembinaan dan pengembangan pelayanan kependudukan	149.673.000,-	148.698.000.-
	Implementasi sistem administrasi kependudukan	1.584.185.750,-	1.469.480.750.-
	Jumlah	2.001.310.250.-	1.880.729.750

REALISASI ANGGARAN URUSAN PILIHAN

No.	Program /Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi
1.	Program Pelayanan Adm Perkantoran :		
	1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	302.400.000,-	180.419.357,-
	2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.000.000,-	9.238.000,-
	3) Penyediaan jasa administrasi keuangan	188.144.000,-	188.144.000,-
	4) Penyediaan jasa kebersihan kantor	45.340.000,-	45.340.000,-
	5) Penyediaan alat tulis kantor	148.243.750,-	148.243.750,-
	6) Penyediaan cetak dan penggandaan	52.622.000,-	52.622.000,-
	7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000000,-	5.995.000,-
	8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-

	9) Penyediaan makan dan minum rapat	20.000.000,-	12.356.000,-
	10) Perjalanan Dinas	200.000.000,-	199.262.961,-
	11) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/Teknis	568.200.000,-	553.250.000,-
	12) Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam	66.000.000,-	60.500.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :		
	13) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	34.000.000,-	31.958.000,-
	14) Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	287.490.000,-	285.500.000,-
	15) Pengadaan Meubeleur	49.600.000,-	49.600.000,-
	16) Pengadaan peralatan kantor	438.690.000,-	419.749.000,-
	17) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	49.000.000,-	48.950.000,-
	18) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	185.200.000,-	179.730.400,-
	19) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	52.000.000,-	37.203.500,-
	20) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	110.000.000,-	97.965.778,-
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
	21) Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	44.000.000,-	42.000.000,-
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	22) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10.000.000,-	10.000.000,-
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	23) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.880.000,-	5.880.000,-
6.	Program Perencanaan SKPD		
	24) Penyusunan rencana kerja SKPD	5.880.000,-	5.880.000,-

	Jumlah	4.096.882.750,-	3.750.473.453,-
--	--------	-----------------	-----------------

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun proses perencanaan pembangunan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil didasarkan atas:

- a) Rapat Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan/Puskesmas, dan Kota, meliputi penjelasan tentang penyusunan kegiatan masing-masing bidang program, Sekretariat, Kasi dan Kasubag dengan mempedomani Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
- b) Masing-masing Bidang Program dan Sekretariat beserta menyusun kegiatan dengan menetapkan skala prioritas, selanjutnya dibahas didalam rapat pimpinan dengan Kepala Dinas kependudukan Dan pencatatan Sipil .
- c) Setelah pembahasan didalam rapat pimpinan, masing-masing bidang memperbaiki usulan rencana kegiatan dan selanjutnya disampaikan ke Kepala Dinas yang selanjutnya disampaikan kepada Bappeda untuk dibahas dalam forum SKPD Tingkat Kota dan Propinsi Jambi. Selanjutnya dibahas dengan DPRD.

7) Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi menempati 1(satu) unit sarana gedung, yaitu Gedung Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jalan Selamat Riyadi PU 07, yang ditempati untuk Kepala Dinas, Sek.Dinas, 4 Bidang (Bidang Informasi Kependudukan, Bidang Perencanaan Perkembangan Kependudukanp, Bidang Pendaftaran penduduk dan Bidang Pencatatan Sipil).

Untuk menunjang kelancaran dari penyelenggaraan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dilengkapi oleh beberapa sarana, baik yang ada pada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil maupun pada UPTD Kecamatan diantaranya:

- (a) Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak : 16 Unit.
- (b) Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak : 4 Unit

10. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan ini dilaksanakan oleh instansi yaitu Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi

1) Program Dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM di Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing Bidang yang ada, meliputi : Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Pengawasan Koperasi, Bidang Perkoperasian dan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Program Tahun 2019 dalam pembangunan Kota Jambi Bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi diarahkan pada Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja, Koperasi Aktif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Mandiri melalui :

- a) Program Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - (1) Pemberian fasilitasi dan pengadaan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat;
 - (2) Penyusunan dan perluasan informasi tenaga kerja;
 - (3) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - (4) Fasilitasi penyelesaian prosedur perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, maka dapat dilihat tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada pencapaian SPM Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang menjadi indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang meliputi :

- a) Pelayanan Pelatihan Kerja
 - (1) Indikator SPM besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tahun anggaran 2019 sebesar 48,19 %, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sangat memuaskan melebihi 100% (803,17%), dimana

jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dibandingkan jumlah yang mendaftar memiliki kesempatan cukup besar yaitu 48,19% melebihi target SPM 6 % sebesar 42,19%.

(2) Indikator SPM besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat tahun anggaran 2019 sebesar 100 %, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sangat memuaskan melebihi 100% (1.666,67%), dimana seluruh pendaftar dapat mengikuti pelatihan berbasis masyarakat, pencapaian sebesar 100% melebihi target SPM 6 % sebesar 94%. Pelatihan yang dilakukan tidak diadakan pendaftaran tapi menerima daftar (P2WKSS) yang harus dilatih oleh Pemda pada tahun anggaran 2018.

b) Indikator SPM besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan tahun anggaran 2019 sebesar 50 %, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sangat memuaskan melebihi 100% (833,33%), dimana jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dibandingkan jumlah yang mendaftar memiliki kesempatan cukup besar yaitu 50,00% melebihi target SPM 6 % sebesar 44,00%.

(1) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Indikator SPM besaran pencari kerja yang ditempatkan tahun anggaran 2018 sebesar 42,26 % dari jumlah pencari kerja terdaftar, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sangat memuaskan melebihi 100% (528,12%), dimana jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dibandingkan jumlah pencari kerja terdaftar sangat memuaskan yaitu 42,26% melebihi target SPM 8 % sebesar 34,25%.

3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi per 31 Desember 2019 memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 57 orang, terdiri dari ASN sebanyak 35 orang dan tenaga kontrak 22 orang. ASN 35 orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 19 orang, staf fungsional umum sebanyak 16 orang.

Kondisi pegawai Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi posisi per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada table berikut sesuai dengan perjenisnya:

Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian dan Perubahan Selama Tahun 2019

Pegawai	Posisi Per 01 - 01- 2019	Tambah	Kurang	Posisi Per 31-12- 2019
PNS	37 Org	1	3	35 Org
Honorar	22 Org	-	-	22 Org
Jumlah	59 Org	-	-	57 Org

J

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Ket.
1.	Eselon II	1	1	
2.	Eselon III	5	4	
3.	Eselon IV	15	14	
Jumlah		21	19	

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Pegawai	Laki-laki	Wanita	Jumlah
PNS	16 Org	19 Org	35 Org
Honorar	13 Org	9 Org	22 Org
Jumlah	29 Org	28 Org	57 Org

Jumlah Pegawai Menurut Kepangkatan

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1.	IV/c	1	
2.	IV/b	2	
3.	IV/a	6	
4.	III/d	13	
5.	III/c	2	
6.	III/b	5	
7.	III/a	4	
8.	II/d	-	
9.	II/c	2	
Jumlah		35	

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasca Sarjana	2	
2.	Sarjana	30	
3.	Sarjana Muda	-	
4.	SLTA	3	
5.	SLTP	-	
6.	SD	-	
Jumlah		35	

4) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun proses perencanaan pembangunan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM didasarkan atas :

- a) Rapat Musrenbang tingkat Kota, meliputi penjelasan tentang penyusunan kegiatan masing-masing Bidang, Sekretariat, Kasi dan Kasubbag dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi.
- b) Masing-masing Bidang dan Sekretariat beserta Kasubbag Program menyusun kegiatan dengan menetapkan skala prioritas, selanjutnya dibahas didalam rapat pimpinan dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM.
- c) Setelah pembahasan didalam rapat pimpinan, masing-masing Bidang memperbaiki usulan rencana kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Dinas, yang selanjutnya disampaikan kepada Bappeda untuk dibahas dalam forum SKPD Tingkat Kota dan Propinsi Jambi yang kemudian dibahas dengan DPRD.

5) Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi menempati gedung yang beralamat di Jalan KH Agus Salim Kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi yang terdiri dari Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretaris, Ruang Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Ruang Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Pengawasan Koperasi, Ruang Bidang Usaha, Mikro Kecil dan Menengah dan Ruang Bidang Perkoperasian.

Untuk menunjang kelancaran dari penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi dilengkapi oleh beberapa sarana, antara lain :

- a) Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak : 7 Unit;
- b) Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak : 17 Unit;
- c) Komputer : 20 Unit.
- d) Lap Top dan tablet : 18 Unit;
- e) Note Book : 5 Unit;
- f) Printer : 29 Unit;
- g) Sound System : 3 Unit;
- h) TV: 9 Unit;
- i) Scanner : 1 Unit.

6) Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan Ketenagakerjaan :

- a) Belum optimalnya penyebarluasan informasi pasar kerja dari perusahaan-perusahaan pengguna tenaga kerja;
- b) Tidak seimbang angka pencari kerja dengan pasar kerja/lapangan kerja yang tersedia, sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran;
- c) Masih rendahnya tingkat produktivitas, kualitas dan kemampuan, serta keterampilan para pencari kerja di daerah;
- d) Masih rendahnya tingkat kemampuan daya saing pencari kerja / tenaga kerja di daerah, dibandingkan dengan pencari kerja / tenaga kerja dari luar daerah;
- e) Belum optimalnya kesadaran perusahaan yang mengikutsertakan tenaga kerjanya kedalam jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja;
- f) Belum optimalnya tingkat pengetahuan tenaga kerja ;
- g) Belum optimalnya perlindungan hukum dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban perusahaan dan tenaga kerja .

11. Urusan Pangan

Urusan Pangan ini dilaksanakan oleh instansi yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi

1) Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat dan Pemberdayaan Petani

a) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.

- (1) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.
- (2) Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah.
- (3) Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan.
- (4) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.
- (5) Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif.
- (6) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan Pertanian/perkebunan.
- (7) Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan.
- (8) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan.
- (9) Kegiatan Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Kota Jambi.

2) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	69	68	137
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	0	0	0
3	Pegawai Honor (Kontrak)	37	19	56
	Jumlah	106	87	193

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan dan jenis kelamin yang berstatus PNS disajikan dalam tabel 2 di bawah ini.

PNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	Jml
1	Pria	1	3	15	-	-	6	-	38	4	-	67
2	Wanita	-	-	14	-	-	1	1	53	1	-	70
	Jumlah	1	3	29	-	-	7	1	91	5	-	137

Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatannya dan menurut jenis kelamin disajikan dalam tabel 3. Di bawah ini.

Jumlah PNS Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan kehutanan Kota Jambi menurut Jenis kelamin dan Golongan Ruang

No	Golongan/Ruang	Pria	Wanita	Jumlah
1	I/a	-	-	1
2	I/b	-	-	-
3	I/c	1	-	1
4	I/d	-	-	-
5	II/a	3	-	3
6	II/b	4	-	4
7	II/c	10	2	12
8	II/d	3	1	4
9	III/a	4	1	5
10	III/b	6	8	14
11	III/c	9	16	25
12	III/d	20	23	43
No	Golongan/Ruang	Pria	Wanita	Jumlah
13	IV/a	4	6	10
14	IV/b	4	1	5
15	IV/c	1	-	1
	Jumlah	69	68	137

3) Alokasi dan Realisasi Anggaran

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN KETAHANAN PANGAN		1.139.047.000	1.092.941.436
Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan petani			
	Peningkatan kemampuan lembaga petani	184.450.000	152.447.500
	Pengembangan cadangan pangan pemerintah	104.371.000	99.866.672
	Pengembangan desa mandiri pangan	140.300.000	137.625.000
	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	102.300.000	102.258.364
	Penyuluhan sumber pangan alternative	163.275.000	159.275.000
	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan pertanian/perkebunan	81.285.000	80.085.000
	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	180.625.000	179.275.000
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	140.591.000	140.258.900
	Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Kota Jambi	41.850.000	41.850.000

4) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan proses tahapan perencanaannya adalah sebagai berikut :

- a) Rapat yang dipimpin oleh Kepala Badan, dimana Kepala Badan menjelaskan perencanaan pembangunan harus berpedoman pada RENSTRA yang telah disusun.
- b) Masing-masing Kepala Bidang dan Sub Bidang menyusun program dan kegiatan dengan menetapkan skala prioritas, yang selanjutnya dibahas dalam rapat lingkup yang dipimpin oleh Kepala Badan.

- c) Setelah pembahasan dalam rapat pimpinan selesai, usulan-usulan yang telah diperbaiki dan disetujui oleh Kepala Badan dari masing-masing Kepala Bidang disatukan oleh Sekretariat dalam hal ini Subbag Perencanaan menjadi program Badan Ketahanan Pangan Kota Jambi.
- d) Selanjutnya perencanaan dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Kota Jambi yang telah disusun tersebut disampaikan kepada Bappeda untuk dibahas dalam forum SKPD dan Musrenbang Kota Jambi.

5) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan adalah :

Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan adalah :

- a) Gedung kantor.
- b) Meja kerja.
- c) Kursi Kerja.
- d) Komputer.
- e) Lap Top.
- f) Printer.
- g) Kendaraan roda 2.
- h) Kendaraan roda 4.
- i) Alsintan prapanen : Hand traktor, Traktor roda 4, pompa air dll.
- j) Alsintas Pasca panen : Power thresher, RMU, Paddy Mower, terpal jemur dll.

6) Permasalahan dan Solusi

Rasionalisasi Anggaran Tahun 2018

Realisasi Pelaksanaan kegiatan rendah karena adanya Rasionalisasi Anggaran Tahun 2018 sehingga kegiatan pengembangan embung pertanian dan pengembangan irigasi perpipaan sebagian dibekukan sementara/kembali diluncurkan tahun 2018, sedangkan kegiatan kawasan aneka cabai dan kawasan sayuran lainnya batal dilaksanakan juga dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.

a) Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan/tugas Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk pencapaian sasaran SPM 2017 antara lain PPH adalah 97% maka sangat diperlukan penanganan secara lintas sektoral yang melibatkan dinas instansi lain.
- (2) Terbatasnya dana dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan praktek.
- (3) Belum kontinuitasnya produk olahan pangan lokal.
- (4) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.
- (5) Masih lemahnya pengawasan tentang peredaran bahan makanan terutama pangan segar.
- (6) Petugas Pendamping menyampaikan Laporan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Afinitas tidak sesuai jadwal
- (7) Terbatasnya modal yang dimiliki kelompok afinitas untuk mengembangkan usahanya
- (8) Masih kurangnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait.
- (9) Penyuluh pertanian dalam mengajukan angka kredit masih belum sesuai dengan petunjuk.
- (10) Jadwal pengajuan angka kredit yang telah disepakati tidak ditepati oleh penyuluh pertanian yang mengajukan angka kredit.
- (11) Dalam penilaian penyuluh pertanian teladan, penyuluh belum dapat melengkapi sepenuhnya administrasi yang diperlukan.
- (12) Pengurus kelompok tani masih belum disiplin dalam pengisian buku administrasi kelompok tani sehingga menjadi salah satu kelemahan kelompok.
- (13) Frekuensi pertemuan KTNA tidak sesuai dengan rencana kerja yang disusun.
- (14) Petani yang diusulkan sebagai petani teladan belum memenuhi kriteria yang diharapkan sesuai dengan petunjuk.
- (15) Belum semua kelompok tani menyelenggarakan pertemuan secara teratur
- (16) Adanya alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain

b) Solusi

- (1) Mengefektifkan peran Dewan Ketahanan Pangan Kota Jambi
- (2) Adanya peningkatan dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan dan mengusulkan program melalui dana APBN.

- (3) Mengusahakan kelompok-kelompok untuk bersama-sama mengenalkan olahan pangan lokal.
- (4) Bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kota Jambi untuk mensosialisasikan tentang pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.
- (5) Bekerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan Balai POM dalam pengawasan tentang peredaran bahan makanan (pangan segar dan olahan).
- (6) Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait
- (7) Meningkatkan pembinaan terhadap kelompok afinitas secara terencana
- (8) Memberikan pelatihan kepada kelompok-kelompok yang disesuaikan dengan potensi yang ada
- (9) Pengajuan angka kredit poin oleh penyuluh hendaknya berpedoman kepada petunjuk teknis yang disampaikan.
- (10) Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diajukan oleh para penyuluh hendaknya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.
- (11) Dalam memberikan penyuluhan, penyuluh pertanian dapat menekankan pentingnya administrasi kelompok tani untuk dilengkapi dan diisi dengan tertib.
- (12) Pengurus KTNA diharapkan lebih aktif dalam mengelola organisasi kelompok KTNA sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.
- (13) Usulan petani teladan yang disampaikan oleh kepala BPP sebaiknya kelompok tani yang memenuhi kriteria untuk dinilai menjadi petani teladan.
- (14) Melakukan pembinaan

12. Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak ini dilaksanakan oleh instansi yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

1) Program dan Kegiatan

a) Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perempuan dan Perlindungan Anak

- (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (2) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
- (3) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
- (4) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

b) Program Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Bersih Aman dan Pintar (BANTAR)
- (2) Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- (3) Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
- (4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

2) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Integritas dan kompetensi sumber daya manusia merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.

Sumber Daya Personil OPD yang merupakan Faktor pendukung utama dalam melaksanakan Program Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelayanan di Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sangat di dukung oleh Kuantitas dan Kualitas Jumlah Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

Hal ini dari dilihat dari Tabel Jumlah Pegawai menurut Jabatan, Eselon, Pangkat, Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Diklat Penjenjangan

Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi tersebut dibawah ini yang terdiri dari :

**Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2019**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	2	3	4
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
1.	Pembina Tk.I	IV/b	2 orang
2.	Pembina	IV/a	6 orang
3.	Penata Tk. I	III/d	10 orang
4.	Penata	III/c	7 orang
5.	Penata Muda Tk.I	III/b	4 orang
6.	Penata Muda	III/a	2 orang
7.	Pengatur Tk.I	II/d	1 orang
8.	Pengatur	II/c	1 orang
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	- orang
10.	Pengatur Muda	II/a	- orang
11.	Juru	I/d	- orang
12.	Juru Tk.I	I/c	- orang
13.	Juru Muda Tk.I	I/b	- orang
14.	Juru Muda	I/a	- orang
	Jumlah	-	34 orang

Sumber : Subbag Kepegawaian DPMPPA Kota Jambi Tahun 2019

**Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Eselon
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan**

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	II.b	1 orang
2.	Sekretaris	III.a	1 orang
3.	Kepala Bidang	III.b	4 orang
4.	Kepala Sub Bagian	IV.a	3 orang
5.	Kepala Seksi	IV.a	12 orang
6.	Kepala UPTD	IV.a	1 orang

7.	Kasubbag TU UPTD	IV.b	1 orang
	Jumlah		23 Orang

Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2019

Sumber : Subbag Kepegawaian DPMPPA Kota Jambi Tahun 2019

**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
dan Jenis Kelamin**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2019**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Doctor	- Orang	- Orang	- Orang
1.	Pasca Sarjana (S.2)	1 Orang	5 Orang	6 Orang
2.	Sarjana (S.1) / Diploma IV	6 Orang	19 Orang	25 Orang
3.	Diploma III	- Orang	- Orang	- Orang
4.	Tingkat SLTA	1 Orang	2 Orang	3 Orang
6.	Tingkat SLTP	-	-	-
7.	Tingkat SD	-	-	-
	Jumlah	8 Orang	26 Orang	34 Orang

Sumber : Subbag Kepegawaian DPMPPA Kota Jambi Tahun 2019

Jumlah Pegawai

**Menurut Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2019**

No	Jenis Diklat	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	DIKLATPIM II	-	1	1
2.	DIKLATPIM III	1	2	3
3.	DIKLATPIM IV	3	12	15

JUMLAH	4	15	19

3) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibiayai melalui APBD dan APBDP Tahun 2019 dengan rincian Pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Rincian Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kota Jambi Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	Jumlah (RP)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.843.217.170	3.342.517.573	499.300.403	18
1	BELANJA PEGAWAI	2.843.217.170	3.342.517.573	499.300.403	18
01	Gaji dan Tunjangan	2.328.417.170	2.341.568.260	13.151.090	1
01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.766.475.956	1.766.475.956	0	0
01.02	Tunjangan Keluarga	142.596.118	147.596.118	5.000.000	4
01.03	Tunjangan Jabatan	212.911.300	212.911.300	0	0
01.05	Tunjangan Fungsional Umum	37.203.600	42.203.600	5.000.000	13
01.06	Tunjangan Beras	92.942.374	92.942.374	0	0
01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.037.238	2.037.238	0	0
01.08	Pembulatan Gaji	20.246	25.246	5.000	25
01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS	57.272.166	57.272.166	0	0
01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.239.552	4.239.552	0	0
01.23	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	12.718.620	15.864.710	3.146.090	25
02	Tambahan Penghasilan PNS	514.800.000	1.000.949.313	486.149.313	94

02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	514.800.000	1.000.949.313	486.149.313	94
-------	--	-------------	---------------	-------------	----

Rincian Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah (RP)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
II	BELANJA LANGSUNG	8.683.800.000	9.065.320.000	381.520.000	4,00
II.1	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	69.320.000	69.320.000	0,00	0,00
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	287.000.000	287.000.000	0,00	0,00
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15.200.000	15.200.000	0,00	0,00
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	407.282.000	413.674.000	6.392.000	1,569
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	65.720.000	65.720.000	0,00	0,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.000.000	17.000.000	0,00	0,00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000	17.000.000	0,00	0,00
12	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	8.000.000	0,00	0,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000	30.000.000	0,00	0,00
20	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	58.080.000	58.080.000	0,00	0,00
21	Perjalanan Dinas	239.875.000	282.925.000	43.050.000	17,94
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				

03	Pembangunan Gedung Kantor	388.500.000	388.500.000	0,00	0,00
07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	199.000.000	199.000.000	0,00	0,00
11	Pengadaan Peralatan perkantoran	157.275.000	178.545.000	21.270.000	13,52
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	237.720.000	237.720.000	0,00	0,00
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000	15.000.000	0,00	0,00
42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	222.000.000	222.000.000	0,00	0,00
03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	35.700.000	61.200.000	25.500.000	71,42
04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				
01	Pendidikan & Pelatihan Formal	16.000.000	16.000.000	0,00	0,00
05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00

08	PROGRAM PERENCANAAN SKPD				
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	4.000.000	4.000.000	0,00	0,00
09	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI				
01	Pengembangan Data/Informasi	100.000.000	118.725.000	18.725.000	18,725
08	PROGRAM PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
04	Pemberdayaan dan	941.000.000	919.730.000	21.270.000	2,260

	Perlindungan Perempuan				
05	Pemenuhan Hak dan perlindungan Anak	327.000.000	427.135.000	100.135.000	30,622
06	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	273.660.000	282.160.000	8.500.000	3,106
07	Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK)	2.040.725.000	2.142.365.000	101.640.000	4,981
09	PEMBERDAYAAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT				
01	Bersih Aman dan Pintar (BANTAR)	1.865.435.000	1.903.535.000	38.100.000	2,042
04	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	155.000.000	155.000.000	0,00	0,00

07	Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2.124.058.000	2.484.514.550	360.456.550	16,970
08	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan TTG	207.000.000	207.000.000	0,00	0,00

Adapun Rekapitulasi Jumlah anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Rekapitulasi Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi
Tahun 2019**

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.689.484.956	3.850.983.892	161.498.936	4,37
II	BELANJA LANGSUNG	10.542.550.000	11.245.048.550	702.498.550	6,66
III	TOTAL ANGGARAN BELANJA DAERAH	14.232.034.956	15.096.032.442	863.997.486	6,07

Dari Alokasi Anggaran yang tersedia pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari Anggaran APBD dan APBDP Kota Jambi Tahun 2019, telah dilakukan prosedur dan proses realisasi Anggaran sesuai dengan Program kegiatan, dengan target indikator rincian Realisasi Anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

**Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Jambi
Per Desember 2019**

NO	URAIAN	ANGGARAN DPPA (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (RP)	SILPA (RP)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.552.974.089	2.271.201.443	88,96 %	281.772.646
2.	Tambahan Penghasilan	1.298.009.803	1.182.763.261	91,12 %	115.246.542
	TOTAL JUMLAH	3.850.983.892	3.453.964.704	89,69 %	397.019.188

--	--	--	--	--	--

**Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Jambi
Per. 31 Desember 2019**

NO	URAIAN	ANGGARAN DPPA (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)	SILPA (RP)
1.	Belanja Pegawai	3.850.983.892	3.453.954.704	89,69	397.029.188
2.	Belanja Barang Jasa	9.986.055.550	9.194.266.781	92,07	791.788.769
3.	Belanja Modal	988.045.000	974.200.800	98,60	13.844.200
	TOTAL JUMLAH	15.096.032.442	13.861.860.285	91,82	1.234.172.157

**Realisasi SILPA dan Sisa Penggunaan Dana SP2D
Yang disetorkan ke KAS BUD Kota Jambi
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi
Per 31 Desember 2019**

NO	URAIAN	ANGGARAN DPPA (RP)	REALISASI (RP)	SILPA (RP)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.850.983.892	3.453.964.704	397.019.188
1	Belanja Pegawai	3.850.983.892	3.453.954.704	397.019.188
		11.245.048.550	10.407.895.581	837.152.969

II	BELANJA LANGSUNG			
1	Belanja Pegawai	270.948.000	239.428.000	31.520.000
2	Belanja Barang dan Jasa	9.986.055.550	9.194.266.781	791.788.769
3	Belanja Modal	988.045.000	974.200.800	13.844.200
	JUMLAH	15.096.032.442	13.861.860.285	1.234.172.157

Rincian Jumlah Sisa Penggunaan Dana SP2D yang disetorkan ke KAS Daerah Kota Jambi per 31 Desember 2019 adalah :

- a. Sisa Penggunaan Dana GU : Rp. -
- b. Sisa Penggunaan Dana TU : Rp. 480.571.307,-
- JUMLAH : Rp. 480.571.307,-**

4) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan selalu melalui proses perencanaan antara lain :

- a) Pembahasan program dan kegiatan dalam Forum SKPD
- b) Pembahasan program dan kegiatan dalam Forum Musrenbang Kota
- c) Sarana pendukung kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempaun dan Pengajuan program dan kegiatan dalam Renja SKPD
- d) Penyusunan RKA program dan kegiatan SKPD
- e) Penyusunan DPA SKPD
- f) Penertiban DPA SKPD

5) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana pendukung kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi berupa sarana dan peralatan kantor serta kendaraan bermotor roda empat dan dua. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja
Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2019**

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1	Roda Dua	16	16	-	-
2	Roda Empat	8	8	-	-
3	Komputer PC	15	8	-	7
4	Lap Top	43	31	-	12
5	Printer	47	28	-	19
6	Mesin Tik	2	1	-	1
7	Kamera Digital	7	5	-	2
8	Handycam	5	4	-	1
9	Telepon PABX system 4 line	1	1	-	-
10	Kursi kerja sandaran tinggi	38	38	-	-
11	Kursi kerja sandaran rendah	13	13	-	-
12	Kursi komputer	6	6	-	-
13	Kursi lipat	100	96	-	4
14	Meja komputer	9	9	-	-
15	Meja ½ biro	34	34	-	-
16	Meja Biro	13	13	-	-
17	Meja Rapat	4	4	-	-
18	Lemari Arsip	16	16	-	-
19	Kursi Lipat	70	70	-	-
20	Kursi Tamu	8	8	-	-
21	TV	1	1	-	-
22	Kulkas	1	1	-	-
23	Faxsimile	1	1	-	-
24	Mesin Genset	1	1	-	-

25	Meja Rapat	7	7	-	-
26	AC	6	6	-	-
27	Dispenser	10	10	-	-
28	Mesin Potong Rumput	1	1	-	-
29	Papan Data	4	4	-	-
30	Lambang Negara	2	2	-	-
31	Bendera Merah Putih	1	1	-	-
32	Magic Jar	1	1	-	-
33	Brankas	1	1	-	-
34	Jam Dinding	6	6	-	-
35	Papan Pengumuman	3	3	-	-
36	Rak gantung	1	1	-	-
37	Hardisk External	11	8	-	3
38	Alat pemadam kebakaran	2	2	-	-
39	Teralis	1 Unit	1 Unit	-	-
40	Hordeng	2 Unit	2 Unit	-	-
41	Besi Rell	1 Unit	1 Unit	-	-
42	Lemari Pakaian	1 Set	1 Set	-	-
43	Lemari Cenderamata	1 Set	1 Set	-	-
44	Lemari galeri Sekretariat PKK	2 Set	2 Set	-	-

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Pada umumnya semua program kegiatan telah dapat terlaksana sebagaimana mestinya, walaupun ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi, hal ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Kota yang melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran pada Tahun 2019, sehingga alokasi anggaran untuk program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2019 sangat terbatas.

- (2) Optimalisasi dan presentase dari target sasaran Pemberdayaan terhadap Masyarakat miskin, pendataan tentang perempuan di berbagai sektor serta perlindungan anak khususnya anak berkebutuhan khusus yang sampai saat ini belum dilaksanakan pendataannya, hal ini disebabkan keterbatasan Anggaran dana APBD yang dialokasi dari Pemerintah Kota Jambi.
- (3) Kurangnya sarana dan prasarana dan sumber Daya Aparatur yang berkualitas, berdisiplin, profesional, handal, dan berdaya saing dalam rangka membantu dan mendukung pelaksanaan administrasi program kegiatan.

b) Solusi

- (1) Perlu adanya peningkatan dan penambahan alokasi anggaran program kegiatan yang sangat menyentuh kepada pelayanan kepada masyarakat, perempuan dan perlindungan anak terutama anak berkebutuhan khusus yang perlu kita beri perhatian lebih guna untuk menambah pengetahuan dan keterampilan anak berkebutuhan khusus tersebut agar dimasa mendatang anak-anak berkebutuhan khusus tersebut dapat mandiri. dengan tetap berpedoman pada efesiensi dan rasionalisasi kegiatan yang dilaksanakan, sehingga pencapaian target sasaran program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dapat tercapai semaksimal mungkin.
- (2) Perlu adanya peningkatan program kegiatan terhadap keterampilan Masyarakat, perempuan dan perlindungan anak serta dalam Pemberian bekal keterampilan kepada Masyarakat umumnya dan khususnya terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah mendapatkan layanan bantuan hukum serta telah dipulangkan dengan mendapatkan keterampilan dari pemerintah dan instansi terkait khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, perempuan dan perlindungan anak di Kota Jambi.

13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dilaksanakan oleh instansi yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi

1) Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	01.01
		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	01.02
		3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	01.06
		4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	01.07
		5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	01.08
		6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	01.10

		7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	01.11
		8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	01.12
		9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	01.15
		10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	01.17

		11.	Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakhti dan penjaga malam	01.20
		12.	Perjalanan Dinas	01.21
2.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	13.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	02.05
		14.	Pengadaan peralatan perkantoran	02.11
		15.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	02.22
		16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	02.24
		17.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	02.30
3.	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	18.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	03.05
4.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	19	Penilaian Angka Kredit	05.04

5.	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	06.01
		21	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	06.11
6.	PERENCANAAN SKPD	22	Penyusunan Renstra SKPD	08.01
		23	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	08.02

7.	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	24	Pengembangan Data/informasi	09.01
8.	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	25.	Pembinaan dan Operasional KB dan Kesehatan Reproduksi	25.01
		26.	Kegiatan institusi dan partisipasi masyarakat dan KIE	25.02
		27.	Bantuan Operasional KB	25.03
		28	Pembinaan dan operasional ketahanan dan kesejahteraan keluarga	25.04
		29	Pengadaan Konstruksi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	25.05

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi tergambar dalam tabel dibawah ini :

No	Standar Pelayanan Minimal	Target SPM	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
3.	Cakupan PUS yg istrinya dibawah usia 20 tahun	100 %	1.444	1.444	100
4.	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	100 %	74.544	74.544	100,00
5.	Cakupan PUS yg ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need) 5%	100 %	96249	8.426	8,75
6.	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB 70%	100 %	5.954	5.164	86,73
7.	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang berKB 87 %	100 %	590	532	90,17

8.	Ratio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas disetiap 2 (dua) desa/kelurahan	100 %	31	47	151,61
9.	Ratio pembantu Pembina KB (PPKBD) 1 (satu) petugas disetiap desa/kelurahan	100 %	62	62	100
10.	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 %	100 %	5.022	8.469	168,63
11.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan 100 %	100 %	62	62	100

3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya dan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Adapun sumberdaya manusia sebagai potensi/kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dapat dilihat di bawah ini :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
A.	TINGKAT PENDIDIKAN.		
	SD	0	
	SLTP	1	
	SLTA	4	
	D1	0	
	D3	1	
	S1	18	
	S2	7	

B	GOLONGAN GOLONGAN II GOLONGAN III GOLONGAN IV	1 20 9	
C	ESSELON ESSELON II ESSELON III ESSELON IV	1 5 14	
D	PEGAWAI STRUKTURAL PEGAWAI FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI FUNGSIONAL TERTENTU/PLKB	20 10 44	
E	TENAGA TIDAK TETAP KANTOR TENAGA TIDAK TETAP MOTIVATOR	22 26	
	J U M L A H	78	

4) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Adapun jumlah Anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	4	5	6	7
1.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75.014.000	75.014.000	100.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	138.400.000	99.330.072	71.77
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	18.390.000	16.929.400	92.05
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	247.080.000	207.180.000	83.85
		Penyediaan Jasa	23.167.850	22.992.850	99.24

		Kebersihan Kantor			
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.000.000	19.000.000	100.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.600.000	12.600.000	100.00

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.400.000	8.400.000	100.00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.035.000	-	-
		Penyediaan Makanan dan Minuman	15.600.000	15.600.000	100.00
		Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramu bakhti dan penjaga malam	43.560.000	43.560.000	100.00
		Perjalanan Dinas	330.000.000	330.000.000	100.00
2.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan peralatan perkantoran	1.497.000.000	1.404.608.450	93.82
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	241.600.000	240.761.000	99.65
		Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	444.400.000	415.061.093	93.39

		Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	15.000.000	15.000.000	100.00
3.	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	62.500.000	62.000.000	99.20
4.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penilaian Angka Kredit	26.059.000	20.969.000	80.46

5.	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	100.00
		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	3.600.000	3.600.000	100.00
6.	PERENCANAAN SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	4.960.000	4.960.000	100.00
		Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3.000.000	3.000.000	100.00
7.	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Pengembangan Data/informasi	307.000.000	265.969.250	86.63
8.	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Pembinaan dan Operasional KB dan Kesehatan Reproduksi	747.398.500	744.723.500	99.64

		Kegiatan institusi dan partisipasi masyarakat dan KIE	742.740.000	742.740.000	100.00
		Bantuan Operasional KB	2.214.650.000	1.927.802.518	87.04
		Pembinaan dan operasional ketahanan dan kesejahteraan keluarga	375.665.650	369.485.650	98.35
		Pengadaan Konstruksi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	150.000.000	149.945.000	99.96

5) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun proses perencanaan pembangunan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi didasarkan atas:

- a) Masing-masing bidang dan sekretariat menyusun kegiatan dengan menetapkan skala prioritas, selanjutnya dibahas didalam rapat pimpinan dengan kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- b) Setelah pembahasan didalam rapat pimpinan, masing-masing bidang memperbaiki usulan rencana kegiatan dan selanjutnya disampaikan ke Kepala Badan yang selanjutnya disampaikan kepada Bappeda untuk dibahas dalam forum SKPD Tingkat Kota dan Provinsi Jambi dan kemudian dibahas dengan DPRD.

6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi mempunyai 2 (dua) unit sarana gedung, yaitu:

- a) Gedung kantor Badan PPKB Jalan Jend Basuki Rahmat No.14 yang ditempati untuk Kepala Badan, Sekretaris, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Penggerakan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang data dan informasi, Gudang Alkon dan klinik KB.
- b) Gedung Rumah Pintar Jalan Kompol Zainal Abidin No.4 Kelurahan Budiman Kecamatan Jambi Timur
- c) Untuk menunjang kelancaran dari penyelenggaraan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kota jambi dilengkapi beberapa sarana

7) Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Rendahnya cakupan anggota BKB yang menjadi peserta KB
- b) Masih rendahnya cakupan perempuan dan anak korban KDRT yang melaporkan dan mendapatkan layanan bantuan hukum
- c) Sebagian besar 69.875 (87,28 %) peserta KB adalah pemakai alat kontrasepsi hormonal (Pil, suntik, Implant)

2) Solusi

- a) Perlunya pelatihan bagi kader-kader BKB untuk bersama-sama dengan PLKB mendukung penyuluhan KB
- b) Meningkatkan sosialisasi ditengah-tengah masyarakat akan kesadaran KDRT dan menuntaskan kasus-kasus KDRT.
- c) Meningkatkan penyuluhan-penyuluhan dan memotivasi agar terjadi ganti cara ke pemakai kontrasepsi non hormonal
- d) Meningkatkan kegiatan pelayanan KB gratis baik didalam klinik KB maupun diluar klinik KB dengan alat kontrasepsi yang bervariasi.

14. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan ini dilaksanakan oleh instansi yaitu Dinas Perhubungan Kota Jambi.

1) Program dan Kegiatan

Untuk Tahun 2019, sebagai implementasi rencana strategis Dinas perhubungan Kota Jambi dan dalam rangka penyesuaian program dan kegiatan, maka program tersebut diatas dijabarkan dan disesuaikan menjadi beberapa kegiatan yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - (1) Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat.
 - (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
 - (3) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
 - (4) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - (5) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - (6) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor.
 - (7) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - (8) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - (9) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman.
 - (10) Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran.
 - (11) Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam.
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - (1) Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
 - (2) Kegiatan Pengadaan Mebeleur.
 - (3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran.
 - (4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - (5) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - (6) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
 - (7) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor.
- c) Program Peningkatan Disiplin Apatur.
 - (1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

- (2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu.
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - (1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - (1) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- f) Program Perencanaan SKPD
 - (1) Penyusunan Renstra SKPD
 - (2) Penyusunan Rencana Kerja SKPD.
- g) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - (1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Norma, Kebijakan dan Standar Perhubungan.
 - (2) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- h) Program Peningkatan Pengelolaan dan Keselamatan Perhubungan.
 - (1) Kegiatan Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Perhubungan.
 - (2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Operasional Perhubungan.
- i) Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran.
 - (1) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Operasional Pemungutan.
 - (2) Kegiatan Penertiban Sarana Parkir.
 - (3) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Perparkiran.

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam melakukan Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat dilakukan sesuai alur mekanisme dan prosedur perizinan dan berdasarkan Perda retribusi maupun Aturan dari Kementrian. Adapun Tingkat Pencapaian SPM tidak dapat dilihat karena belum memiliki penetapan Perwal yang baku ditingkat Kota. Adapun jenis pelayanan dibidang perhubungan yang memiliki alur mekanisme dan prosedur yang jelas antara lain :

- a) Pengujian Kendaraan Bermotor
- b) Pemberian Izin Trayek

c) Pemberian SKK Nahkoda dan Motoris

3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun komposisi pegawai Dinas Perhubungan Kota Jambi berdasarkan kepangkatan dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

NO	DINAS	JUMLAH PER GOLONGAN																JL H
		I				II				III				IV				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Dinas Perhubungan Kota Jambi	0	1	0	0	6	34	8	5	15	26	3	10	1	4	0	0	113

Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	DINAS	PENDIDIKAN FORMAL							JML
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	Dinas Perhubungan Kota Jambi	2	3	66	4	38	0	0	113

Sedangkan pegawai yang mengabdikan diri selain PNS di Dinas Perhubungan Kota Jambi ada juga pegawai yang berstatus TKK (Tenaga Kerja Kontrak) sebanyak 112 (seratus dua belas) orang.

4) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan termasuk urusan wajib yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

a) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

(1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Norma, Kebijakan dan Standar Perhubungan

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 673.400.000,- dengan out put berupa tersedianya dokumen study Perhubungan dan Sistim Aplikasi Perhubungan.

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 97,04 %.

Permasalahan : tidak ada.

Solusi : tidak ada.

(2) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 3.788.630.000,- dengan out put berupa terlaksananya Pengadaan Cetakan, Pemeliharaan Peralatan PKB, Pembayaran Honor TTK, Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 97,09 %.

Permasalahan : tidak ada.

Solusi : tidak ada

b) Program Peningkatan Pengelolaan dan Keselamatan Perhubungan

(1) Kegiatan Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Perhubungan.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 4.568.390.000,- dengan out put berupa terlaksananya Forum LLAJ, Pemeliharaan Faskes sebanyak 11 paket dan Pengadaan pemasangan Faskes sebanyak 10 paket.

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 96,08 %.

Permasalahan : tidak ada

Solusi : tidak ada

(2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Operasional Perhubungan.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 775.500.000,- dengan out put berupa terlaksananya pengawasan, penertiban dan razia dalam wilayah Kota Jambi.

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 97,03 %.

Permasalahan : tidak ada

Solusi : tidak ada

c) Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran

(1) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Operasional Pemungutan Retribusi.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 1.806.964.000,- dengan out put berupa terlaksananya Asuransi Kesehatan TKK, Cetak dan Pembayaran Honor TKK.

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 94,82 %.

Permasalahan : tidak ada

Solusi : tidak ada

(2) Kegiatan Penertiban Sarana Parkir.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 353.000.000,- dengan out put berupa terlaksananya Razia Parkir Liar, dan Pengaturan Parkir di Luar Kawasan dalam wilayah Kota Jambi.

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 85,39 %.

Permasalahan : tidak ada

Solusi : tidak ada

(3) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perparkiran.

Alokasi dana untuk kegiatan ini Rp. 230.750.000,- dengan out put berupa terlaksananya Tim Berbinar, Pengadaan Palang Parkir untuk Barrier Gate dan Mesin Barrier Gate tanpa Pos, Pemeliharaan Rutin Pos/ Kantor Pasar.

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 96,07 %.

Permasalahan : tidak ada

Solusi : tidak ada

5) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Adapun Sarana dan Prasarana yang kami gunakan dalam melakukan tugas pokok dibidang Perhubungan antara lain :

a) Gedung Terminal sebanyak 6 buah

b) Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak 1 unit

- c) Kendaraan Roda empat sebanyak 9 unit
- d) Kendaraan Roda dua sebanyak 27 unit
- e) Speed Boat sebanyak 2 unit
- f) Senjata Api sebanyak 10 Unit

6) Permasalahan dan Solusi

Adapun dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2019 dirasa tidak menemui permasalahan yang sangat berarti hal ini dikarenakan hampir keseluruhan program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana kecuali dikarenakan permasalahan teknis.

15. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika ini dilaksanakan oleh instansi yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi.

1) Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
 - (3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - (4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - (5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - (6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
 - (8) Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - (9) Penyediaan makanan dan minuman
 - (10) Perjalanan Dinas
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - (1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional
 - (2) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - (1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - (1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - (1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- f) Program Perencanaan SKPD
 - (1) Penyusunan Rencana Kerja
- g) Program Pengembangan Data/Informasi
 - (1) Pengembangan Data/informasi
- h) Program Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Peningkatan Sarana Komunikasi dan Informasi
Pembangunan dan Pemanfaatan TI

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang standar Pelayanan Minimal bidang Komunikasi dan Informatika di Kab/Kota, Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika menurut Program Nasional :

- 1) Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Jambi didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari :

Berdasarkan Pangkat/Golongan ruang :

No.	Golongan	Jumlah
1.	Pengatur Muda (II/a)	- Orang
2.	Pengatur Muda Tk I .(II/b)	2 Orang
3.	Pengatur (II/c)	- Orang
4.	Pengatur Tk I (II/d)	- Orang
5.	Penata Muda (III/a)	1 Orang
6.	Penata Muda Tk I (III/b)	6 Orang
7.	Penata (III/c)	4 Orang
8.	Penata Tk I (III/d)	7 Orang
9.	Pembina (IV/a)	5 Orang
10.	Pembina Tk I (IV/b)	2 Orang
	JUMLAH	27 Orang

4) Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
1.	Peningkatan Sarana Komunikasi dan Informasi	985,820,000	985,820,000	964,158,250	97.80
2.	Pembangunan dan Pemanfaatan TI	462,311,000	462,311,000	339,451,000	73.42

5) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Jambi adalah dengan melibatkan seluruh Stokholder antara lain melalui Musrenbang. Selain itu SKPD dalam hal ini Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Jambi membuat Renja SKPD yang memuat Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6) Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut :

- a) Gedung/Ruang Kantor, yang terdiri dari 1 (satu) ruang Kepala Dinas, 1 (satu) ruang Sekretaris, 1 (satu) ruang Sekretariat , 4 (empat) ruang Kepala Bidang, dan 1 (satu) ruang server
- b) Fasilitas Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) sebanyak 6 (enam) unit dan roda 2 (dua) sebanyak 4 (empat) unit.
- c) Bantuan Dari Depkominfo RI yaitu 5 Unit Server dan 13 Aplikasi e-Government.

7) Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Sebagai media informasi komputer telah memberikan peranan penting dalam pembuatan sistem yang lebih mampu diandalkan, yaitu efisien dan efektif , pengaksesan terhadap data atau informasi yang tersedia dapat berlangsung dengan cepat, tepat dan akurat. Namun ditengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih masih ada SKPD yang dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan

sistem manual , sehingga dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala yang mengakibatkan kurang efisiennya kerja dalam pelaksanaan tugas.

- b) Masih kurangnya SDM yang mempunyai keahlian dibidang IT dan kurangnya pemetaan pegawai oleh BKD.
- c) Belum terlaksananya pemasangan jaringan internet ke SKPD se Kota Jambi termasuk kelurahan, hal ini disebabkan belum tersedianya dana APBD untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- d) Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian SKPD dalam mengatasi permasalahan usaha internet yang ada di Kota Jambi

2) Solusi

- a) Diharapkan semua SKPD dan PNS untuk menggunakan peralatan teknologi informasi .
- b) Diharapkan semua SDM menguasai dibidang Informasi dan Teknologi (IT)
- c) Diharapkan 2017 semua SKPD sudah terpasang jaringan internet
- d) SKPD supaya melakukan Koordinasi secara cepat untuk mengatasi permasalahan internet yang ada di Kota Jambi, agar pengusaha internet yang ada di Kota Jambi tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan .

16. Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa ini dilaksanakan oleh instansi yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

1) Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kegiatan sebagai berikut:

- a). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b). Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
- c). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- d). Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Kegiatan sebagai berikut:

- a). Bersih Aman dan Pintar (BANTAR)
- b). Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- c). Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
- d). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.

2) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

**Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2019**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	2	3	4
1.	Pembina Tk.I	IV/b	4 orang
2.	Pembina	IV/a	4 orang
3.	Penata Tk. I	III/d	11 orang
4.	Penata	III/c	7 orang
5.	Penata Muda Tk.I	III/b	6 orang
6.	Penata Muda	III/a	1 orang
7.	Pengatur Tk.I	II/d	- orang
8.	Pengatur	II/c	3 orang
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1 orang
10.	Pengatur Muda	II/a	- orang
11.	Juru	I/d	- orang
12.	Juru Tk.I	I/c	- orang
13.	Juru Muda Tk.I	I/b	- orang
14.	Juru Muda	I/a	- orang
	Jumlah		37 orang

**Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Eselon
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2019**

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	II.b	1 orang
2.	Sekretaris	III.a	1 orang
3.	Kepala Bidang	III.b	4 orang
4.	Kepala Sub Bagian	IV.a	3 orang
5.	Kepala Kasi	IV.a	12 orang
6.	Staf Pelaksana	-	16 orang
	Jumlah		37 orang

**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi Tahun 2019**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Doctor	1 Orang	- Orang	1 Orang
1.	Pasca Sarjana (S.2)	1 Orang	3 Orang	4 Orang
2.	Sarjana (S.1) / Diploma IV	9 Orang	15 Orang	24 Orang
3.	Diploma III	- Orang	1 Orang	1 Orang
4.	Tingkat SLTA	3 Orang	4 Orang	7 Orang
6.	Tingkat SLTP	-	-	-
7.	Tingkat SD	-	-	-
	Jumlah	14 Orang	23 Orang	37 Orang

**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Pelatihan
Penjenjangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2019**

No	Uraian	Jumlah (RP)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.843.217.170	3.342.517.573	499.300.403	18
1	BELANJA PEGAWAI	2.843.217.170	3.342.517.573	499.300.403	18
01	Gaji dan Tunjangan	2.328.417.170	2.341.568.260	13.151.090	1
01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.766.475.956	1.766.475.956	0	0

01.02	Tunjangan Keluarga	142.596.118	147.596.118	5.000.000	4
01.03	Tunjangan Jabatan	212.911.300	212.911.300	0	0
01.05	Tunjangan Fungsional Umum	37.203.600	42.203.600	5.000.000	13
01.06	Tunjangan Beras	92.942.374	92.942.374	0	0
01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.037.238	2.037.238	0	0
01.08	Pembulatan Gaji	20.246	25.246	5.000	25
01.09	Iuaran Asuransi Kesehatan/BPJS	57.272.166	57.272.166	0	0
01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.239.552	4.239.552	0	0
01.23	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	12.718.620	15.864.710	3.146.090	25
02	Tambahan Penghasilan PNS	514.800.000	1.000.949.313	486.149.313	94
02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	514.800.000	1.000.949.313	486.149.313	94

3) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibiayai melalui APBD dan APBDP Tahun 2019 dengan rincian Pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah (RP)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
II	BELANJA LANGSUNG	8.683.800.000	9.065.320.000	381.520.000	4,00
II.1	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63.200.000	69.320.000	6.120,000	9.68
02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	209.100.000	202.100.000		

	Sumber Daya Air dan Listrik			(7.000.000)	(3,35)
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10.000.000	10.000.000	0,00	0,00
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	425.082.000	376.644.000	(48.438.000)	(11,39)
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	49.600.000	43.880.000	(5.720.000)	0,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.000.000	17.000.000	0,00	0,00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000	13.000.000	0,00	0,00
12	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	8.000.000	0,00	0,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000	30.000.000	0,00	0,00
20	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	39.600.000	49.610.000	10.010.000	25,28
21	Perjalanan Dinas	215.000.000	315.540.396	100.540.396	46,76
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
03	Pembangunan Gedung Kantor	240.000.000	240.000.000	0,00	0,00
07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	79.500.000	129.500.000	50.000.000	62,89
11	Pengadaan Peralatan perkantoran	79.000.000	68.930.000	(10.070.000)	(12,75)
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	208.380.000	208.380.000	0,00	0,00
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	0,00	0,00
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor	10.000.000	10.000.000	0,00	0,00
42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	257.500.000	337.236.004	79.736.004	30,97
03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	33.600.000	33.600.000	0,00	0,00
04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				
01	Pendidikan & Pelatihan Formal	16.000.000	00	(16.000.000)	100,00
05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN				

KINERJA DAN KEUANGAN					
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.690.000	4.690.000	0,00	0,00
06	PROGRAM PERENCANAAN SKPD				
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	9.610.000	9.610.000	0,00	0,00
09	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI				
01	Pengembangan Data/Informasi	86.500.000	86.500.000	0,00	0,00
08	PROGRAM PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
04	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	608.820.000	640.010.000	31.190.000	5,12
05	Pemenuhan Hak dan perlindungan Anak	287.755.000	277.525.000	(10.230.000)	(3,56)
06	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	303.380.000	307.640.000	4.260.000	1,40
09	PEMBERDAYAAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT				
01	Bersih Aman dan Pintar (BANTAR)	811.920.000	1.075.350.000	263.430.000	32,45
04	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	155.475.000	152.580.000	(2.895.000)	(1,86)
07	Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2.124.058.000	2.152.179.600	28.121.600	1,32
08	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan TTG	207.205.000	200.215.000	(6.990.000)	(3,37)

**Rekapitulasi Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi
Tahun 2019**

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%

I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.843.217.170	3.342.517.573	499.300.403	17,56
II	BELANJA LANGSUNG	8.683.800.000	9.065.320.000	381.520.000	4,00
III	TOTAL ANGGARAN BELANJA DAERAH	11.527.017.170	12.407.837.573	880.820.403	8,00

4) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan selalu melalui proses perencanaan antara lain :

- a. Pembahasan program dan kegiatan dalam Forum SKPD
- b. Pembahasan program dan kegiatan dalam Forum Musrenbang Kota
- c. Pengajuan program dan kegiatan dalam Renja SKPD
- d. Penyusunan RKA program dan kegiatan SKPD
- e. Penyusunan DPA SKPD
- f. Penertiban DPA SKPD

5) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Sarana pendukung kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi berupa sarana dan peralatan kantor serta kendaraan bermotor roda empat dan dua. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja
Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2019**

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1	Roda Dua	16	16	-	-
2	Roda Empat	8	8	-	-
3	Komputer PC	15	8	-	7
4	Lap Top	43	31	-	12
5	Printer	47	28	-	19
6	Mesin Tik	2	1	-	1
7	Kamera Digital	7	5	-	2
8	Handycam	5	4	-	1
9	Telepon PABX system 4 line	1	1	-	-
10	Kursi kerja sandaran tinggi	38	38	-	-
11	Kursi kerja sandaran rendah	13	13	-	-

12	Kursi komputer	6	6	-	-
13	Kursi lipat	100	96	-	4
14	Meja komputer	9	9	-	-
15	Meja ½ biro	34	34	-	-
16	Meja Biro	13	13	-	-
17	Meja Rapat	4	4	-	-
18	Lemari Arsip	16	16	-	-
19	Kursi Lipat	70	70	-	-
20	Kursi Tamu	8	8	-	-
21	TV	1	1	-	-
22	Kulkas	1	1	-	-
23	Faxsimile	1	1	-	-
24	Mesin Genset	1	1	-	-
25	Meja Rapat	7	7	-	-
26	AC	6	6	-	-
27	Dispenser	10	10	-	-
28	Mesin Potong Rumput	1	1	-	-
29	Papan Data	4	4	-	-
30	Lambang Negara	2	2	-	-
31	Bendera Merah Putih	1	1	-	-
32	Magic Jar	1	1	-	-
33	Brankas	1	1	-	-
34	Jam Dinding	6	6	-	-
35	Papan Pengumuman	3	3	-	-
36	Rak gantung	1	1	-	-
37	Hardisk External	11	8	-	3
38	Alat pemadam kebakaran	2	2	-	-
39	Teralis	1 Unit	1 Unit	-	-
40	Hordeng	2 Unit	2 Unit	-	-
41	Besi Rell	1 Unit	1 Unit	-	-
42	Lemari Pakaian	1 Set	1 Set	-	-
43	Lemari Cenderamata	1 Set	1 Set	-	-
44	Lemari galeri Sekretariat PKK	2 Set	2 Set	-	-

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Pada umumnya semua program kegiatan telah dapat terlaksana sebagaimana mestinya, walaupun ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi, hal ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Kota yang melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran pada Tahun 2017, sehingga alokasi anggaran untuk program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2017 sangat terbatas.

- b. Optimalisasi dan presentase dari target sasaran Pemberdayaan terhadap Masyarakat miskin, pendataan tentang perempuan di berbagai sektor serta perlindungan anak khususnya anak berkebutuhan khusus yang sampai saat ini belum dilaksanakan pendataannya, hal ini disebabkan keterbatasan Anggaran dana APBD yang dialokasi dari Pemerintah Kota Jambi
- c. Kurangnya sarana dan prasarana dan sumber Daya Aparatur yang berkualitas, berdisiplin, profesional, handal, dan berdaya saing dalam rangka membantu dan mendukung pelaksanaan administrasi program kegiatan.

b) Solusi

- a. Perlu adanya peningkatan dan penambahan alokasi anggaran program kegiatan yang sangat menyentuh kepada pelayanan kepada masyarakat, perempuan dan perlindungan anak terutama anak berkebutuhan khusus yang perlu kita beri perhatian lebih guna untuk menambah pengetahuan dan keterampilan anak berkebutuhan khusus tersebut agar dimasa mendatang anak-anak berkebutuhan khusus tersebut dapat mandiri. dengan tetap berpedoman pada efesiensi dan rasionalisasi kegiatan yang dilaksanakan, sehingga pencapaian target sasaran program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dapat tercapai semaksimal mungkin.
- b. Perlu adanya peningkatan program kegiatan terhadap keterampilan Masyarakat, perempuan dan perlindungan anak serta dalam Pemberian bekal keterampilan kepada Masyarakat umumnya dan khususnya terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah mendapatkan layanan bantuan hukum serta telah dipulangkan dengan mendapatkan keterampilan dari pemerintah dan instansi terkait khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, perempuan dan perlindungan anak di Kota Jambi.

18. Urusan Sosial

Urusan Sosial ini dilaksanakan oleh instansi yaitu Dinas Sosial Kota Jambi

1) Program dan Kegiatan

Berdasarkan Visi yang akan dicapai dan misi yang harus dilaksanakan serta permasalahan-permasalahan yang diprediksi terjadi di tahun 2019 dalam bidang perencanaan maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Kota Jambi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
 9. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman
 10. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti Dan Penjaga Malam
 11. Kegiatan Perjalanan Dinas.
- b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
 12. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 13. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 14. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 15. Kegiatan Pengadaan Mebeleur
 16. Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran
 17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
 18. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 19. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
 20. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur
 21. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor

22. Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 23. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Dan Beserta Perlengkapannya
 24. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 25. Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 26. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
- f) Program Perencanaan Skpd
 27. Kegiatan Penyusunan Renstra Skpd
 28. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Skpd
- g) Program Pengembangan Data/Informasi
 29. Kegiatan Pengembangan Data/Informasi
- h) Program Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks).
 30. Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat.
 31. Kegiatan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)
 32. Kegiatan Pembinaan Dan Pelayanan Sosial Bagi Orang Terlantar.
 33. Kegiatan Pelayanan Dan Pembinaan Sosial Bagi Anak Yang Bermasalah Sosial Dan Lansia
 34. Kegiatan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial
- i) Pembinaan Hasil Penjaringan/Monitoring Gepeng Dan Anak Jalanan.
 35. Kegiatan Pelayanan Dan Rehabilitasi Disabilitas, Korban Napza
 36. Kegiatan Pemberdayaan Dan Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks)
 37. Kegiatan Pelayanan Dan Pembinaan Kepahlawanan, Kejuangan Dan Kesetiakwanan Sosial
 38. Kegiatan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Dana Bantuan Sosial

39. Kegiatan Pendataan Dan Informasi Fakir Miskin
40. Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan Dan Pemberdayaan Fakir Miskin
41. Kegiatan Pembinaan Dan Pelayanan Sosial Fakir Miskin

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 pada Dinas Sosial Kota Jambi, maka dapat dilihat tingkat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) yang mengacu pada pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Kementerian Sosial RI yang menjadi indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yaitu :

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Sosial Kota Jambi

Tahun Anggaran 2018

URUSAN : SOSIAL

NO	PELAYANAN DASAR	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	TARGET DAN REALISASI SASARAN SPM 2019				
			TARGET SPM 2017	CAPAIAN KINERJA	RINCIAN PERHITUNGAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN BIDANG SOSIAL						
	1.	Pemberian Bantuan Sosial bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PMKS) Skala Kota	Persentase (%) PMKS Skala Kota yang memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	50 %	84,37 %	$\frac{26751}{31707} \times 100\%$	Σ PMKS yang memperoleh bantuan Sosial x 100% Σ PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan Sosial
	2.	Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Sosial Skala Kota	Persentase (%) PMKS Skala Kota yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Lainnya	5 %	4,03 %	$\frac{5}{124} \times 100\%$	Σ PMKS yang menjadi Peserta KUBE x 100% Σ PMKS yang seharusnya menjadi Peserta KUBE
II.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL						
	3.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial	Persentase (%) Panti Sosial Skala Kota yang menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	50 %	66,67 %	$\frac{20}{30} \times 100\%$	Σ Panti Sosial yang menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesos x 100% Σ Panti Sosial yang seharusnya menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesos
	4.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Luar Panti Skala Kota	Persentase (%) Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	50 %	0 %	$\frac{0}{0} \times 100\%$	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

III.	PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA						
5.	Penanggulangan dan Bantuan Sosial Skala Kota bagi Korban Bencana Alam	Persentase (%) Korban Bencana Skala Kota yang menerima Bantuan Sosial	100 %	100 %	$\frac{2.640}{2.640} \times 100\%$	$\frac{\Sigma \text{ Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat}}{\Sigma \text{ Korban Bencana yang seharusnya menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat}} \times 100\%$	
IV.	PELAKSANAAN PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL						
6.	Pelaksanaan dan Pengembangan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik, Mental dan Lanjut Usia Tidak Potensial	Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik dan Mental,serta Lanjut Usia Tidak Pontensial yang menerima Pembinaan dan Bantuan Sosial	5 %	3,84 %	$\frac{384}{10.012} \times 100\%$	$\frac{\Sigma \text{ Paca Fisik dan Mental, Lansia Tidak Pontensial yang telah menerima Jaminan Sosial}}{\Sigma \text{ Paca Fisik dan Mental, Lansia Tidak Pontensial yang seharusnya menerima Jaminan Sosial}} \times 100\%$	

3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pada OPD Dinas Sosial Kota Jambi. Integritas dan kompetensi sumber daya manusia merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan kesejahteraan sosial.

Sumber Daya Personil OPD yang merupakan Faktor pendukung utama dalam melaksanakan Program Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelayanan di Bidang Sosial sangat di dukung oleh Kuantitas dan Kualitas Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial Kota Jambi.

Hal ini dari dilihat dari Tabel Jumlah Pegawai menurut Jabatan, Eselon, Pangkat, Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Diklat Penjenjangan Tahun 2018 Dinas Sosial Kota Jambi tersebut dibawah ini yang terdiri dari :

Tabel. 2

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan
Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2019

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	2	3	4
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	3 orang
2.	Pembina Tk.I	IV/b	3 orang
3.	Pembina	IV/a	3 orang
4.	Penata Tk. I	III/d	11 orang
5.	Penata	III/c	5 orang

6.	Penata Muda Tk.I	III/b	3 orang
7.	Penata Muda	III/a	1 orang
8.	Pengatur Tk.I	II/d	2 orang
9.	Pengatur	II/c	3 orang
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	- orang
11.	Pengatur Muda	II/a	1 orang
12.	Juru	I/d	1 orang
13.	Juru Tk.I	I/c	1 orang
14.	Juru Muda Tk.I	I/b	- orang
15.	Juru Muda	I/a	- orang
16.	Pegawai Kontrak	-	23 orang
	Jumlah		60 orang

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Eselon

Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2019

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	II.b	1 orang
2.	Sekretaris	III.a	1 orang
3.	Kepala Bidang	III.b	4 orang
4.	Kepala Sub Bagian	IV.a	3 orang
5.	Kepala Seksi	IV.a	11 orang
6.	Staf Pelaksana	-	17 orang
7.	Pegawai Honorer Kontrak	-	23 orang
	Jumlah		60 orang

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pasca Sarjana (S.2)	4 Orang	2 Orang	6 Orang

2.	Sarjana (S.1) / Diploma IV	14 Orang	17 Orang	31 Orang
3.	Diploma III	-	-	-
4.	Tingkat SLTA	16 Orang	6 Orang	22 Orang
6.	Tingkat SLTP	1 Orang	-	1 Orang
7.	Tingkat SD	-	-	-
	Jumlah	35 Orang	25 Orang	60 Orang

Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Struktural & Fungsional
Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2019

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	2	3
1.	Diklatpim II / Spati	3 orang
2.	Diklatpim III / Spama	4 orang
3.	Diklatpim IV / Adum / Adumla	12 orang
4.	Diklat Teknis Fungsional Bidang Sosial	4 orang
5.	Diklat Teknis Fungsional Bidang Lainnya	-
	Jumlah	23 orang

4) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam Tahun 2019 Dinas Sosial Kota Jambi dalam menetapkan Indikator Capaian Target Kinerja mendapat Alokasi Dana yang bersumber dari Dana APBD dan APBD.P Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, dengan rincian Alokasi dan Realisasi untuk Belanja Langsung yang termuat dalam Belanja Pegawai dapat dilihat pada Tabel.6 berikut ini :

Rincian Alokasi Anggaran Belanja Langsung
Dinas Sosial Kota Jambi Tahun Anggaran 2019

No	Program / Kegiatan	Alokasi Dana	Realisasi Capaian Dana	Target	Realisasi
1	2	3	4		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.069.620.000	1.039.172.521	100 %	97,40 %

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	753.400.000	746.008.224	100 %	99,40 %
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.000.000	24.923.800	100 %	87,50 %
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	15.000.000	100 %	100 %
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.800.000	5.800.000	100 %	100 %
6.	Program Perencanaan Kerja SKPD	17.575.000	17.575.000	100 %	100 %
7.	Program Pengembangan Data/Informasi	40.000.000	39.600.000	100 %	99 %
8.	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2.206.655.000	2.037.785.700	100 %	95,75 %
	TOTAL JUMLAH BELANJA LANGSUNG	4.133.050.000	3.925.865.245	100 %	94,98 %

Rincian Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial Kota Jambi

Tahun Anggaran 2019

KEGIATAN :

No	Program / Kegiatan	Jumlah (Rp)		Target Realisasi Anggaran (%)	
		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	4.200.000	100	100
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan listrik	185.000.000	165.170.460	100	89,28
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	187.000.000	179.208.000	100	95,83
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	73.960.000	73.610.000	100	99,52
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.000.000	40.000.000	100	100
6.	Penyediaan Barang dan Cetak	40.000.000	39.999.000	100	99,99

	Penggandaan				
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	100	100
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	9.350.000	100	93,50
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000	39.912.000	100	99,78
10	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti & Penjaga malam	132.360.000	130.680.000	100	98,73
11.	Perjalanan Dinas	347.100.000	347.043.061	100	99,98
12.	Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional	150.000.000	147.400.000	100	98,26
13.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	30.000.000	29.760.500	100	99,20
14.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12.000.000	11.979.000	100	99,82
15.	Pengadaan Mebeleur	10.000.000	9.872.500	100	99,82
16.	Pengadaan Peralatan Perkantoran	100.000.000	99.682.000	100	99,01
17.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	350.000.000	346.899.224	100	99,11
18.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.400.000	3.615.000	100	82,15
19.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	15.000.000	15.000.000	100	100
20.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubillier	12.000.000	12.000.000	100	100
21.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	20.000.000	20.000.000	100	100
22.	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung/ Kantor	50.000.000	49.800.000	100	99
23.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	2.600.000	2.563.000	100	98,57
24.	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	22.400.000	22.360.000	100	99,82

25.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	15.000.000	15.000.000	100	100
26.	Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.800.000	5.800.000	100	100
27.	Penyusunan Renstra SKPD	7.575.000	7.575.000	100	100
28.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	10.000.000	10.000.000	100	100
29.	Pengembangan Data/Informasi	40.000.000	39.600.000	100	99
30.	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat	386.420.000	381.880.000	100	99,82
31.	Perlindungan dan Jaminan social bagi penyandang Masalah Kesejahteraan sosial PMKS	226.380.000	224.315.900	100	99,08
32.	Pemberdayaan dan Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	195.820.000	183.670.000	100	93,79
33.	Pembinaan dan Pelayanan sosial bagi orang terlantar	119.200.000	119.123.000	100	99,92
34.	Pelayanan dan pembinaan sosial bagi anak yang bermasalah sosial dan lansia	57.490.900	57.490.900	100	100
35.	Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	389.370.000	376.389.300	100	96,66
36.	Pelayanan dan rehabilitasi disabilitas, korban napza	136.880.000	124.637.000	100	91,05
37.	Pelayanan dan pembinaan kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	78.860.000	77.860.000	100	98,73
38.	Pengelolaan dan pemanfaatan sumber dana bantuan sosial	72.605.000	61.105.000	100	84,16
39.	Pendataan dan informasi fakir miskin	234.180.000	159.916.000	100	68,28

40.	Penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan fakir miskin	218.560.000	201.705.000	100	92,28
41.	Pembinaan dan pelayanan sosial fakir miskin	90.880.000	69.694.500	100	76,68
	TOTAL JUMLAH BELANJA LANGSUNG	4.133.050.000	3.925.865.245	100 %	94,98 %

Sumber : Subbag Keuangan Dinsos Kota Jambi Tahun 2019

Dari hasil capaian Anggaran Belanja Langsung dan Anggaran Belanja Tidak Langsung dapat disimpulkan Rekapitulasi Capaian Anggaran Belanja Daerah pada OPD Dinas Sosial Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel. berikut ini yaitu

**Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Capaian ANGGARAN BELANJA DAERAH
Dinas Sosial Kota Jambi Tahun Anggaran 2019**

No	URAIAN	Alokasi Dana	Realisasi Capaian Dana	Target	Realisasi
1	2	3	4		
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.260.362.865	3.131.510.499	100 %	96.04%
II.	BELANJA LANGSUNG	4.133.050.000	3.925.865.245	100 %	94,98 %
	TOTAL BELANJA DAERAH (I + II)	7.393.412.865	7.057.375.744	100 %	95,45 %

5) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, sangat didukung oleh Sumber Daya Aset Tetap, Tetap sebagai Modalyang meliputi Urusan Sosial, serta dibantu oleh Sekretariat sebagaimana yang tertera pada Daftar Tabel Sumber Daya Aset Tetap yang terdiri dari :

- 1) Peralatan dan Mesin
- 2) Pengadaan Gedung dan Bangunan
- 3) Jalan dan Irigasi

DAFTAR ALAT-ALAT BESAR & ALAT-ALAT ANGKUTAN

Pada OPD Dinas Sosial Kota Jambi

Periode s/d 31 Desember Tahun 2019

No	URAIAN	JENIS	Merk / Tipe / Spesifikasi	Kuantitas	Satuan Ukuran	Sumber Dana	Tahun	Kondisi (Baik /
----	--------	-------	---------------------------	-----------	---------------	-------------	-------	-----------------

	ASET				(APBD / APBN)		Rusak / Rusak Berat)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	ALAT-ALAT BESAR	-	-	-	-	-	-
II. 1.	ALAT-ALAT ANGKUTAN Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	Toyota Calya Toyota Kijang Inova Toyota Kijang Avanza Truk Mitsubishi Suzuki Ertiga GX Toyota Kijang Avanza Toyota Kijang Inova E 1.988 CC	1 1 1 1 1 1 1	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD	2018 2016 2015 2013 2012 2012 2005	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
2.	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	Toyota Hilux 1.998 cc Toyota Kijang Kapsul Isuzu Turbo Diesel /Dapur Umum Lapangan	1 1 1	Unit Unit Unit	APBD APBD APBN	2013 2005 2016	Baik Baik Baik
3.	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor						
	1) Yamaha Byson	150 CC	1	Unit	APBD	2014	Baik
	2) Yamaha Vega R	115 CC	1	Unit	APBD	2014	Baik
	3) Yamaha Vino	110 CC	6	Unit	APBD	2013	Baik
	4) Yamaha Xeon	125 CC	4	Unit	APBD	2012	Baik
	5) Honda Supra X	125 CC	1	Unit	APBD	2011	Hilang
	6) Yamaha Soul GT	110 CC	1	Unit	APBD	2013	Baik
	7) Honda Revo CW	110 CC	4	Unit	APBD	2011	Baik
	8) Honda New Vario CW	110 CC	2	Unit	APBD	2011	Baik

	9)	Honda New Vario CBS	110 CC	2	Unit	APBD	2011	Baik
	10)	Honda Win Sport	97 CC	2	Unit	APBD	1997	Rusak
	11)	Suzuki A 100	100 CC	1	Unit	APBD	1996	Rusak
	12)	Suzuki R2	100 CC	2	Unit	APBD	1995	Rusak
	13)	Honda Beat	110 CC	2	Unit	APBD	2017	Baik
	14)	Kawasaki Trail	150 CC	1	Unit	APBDN	2016	Baik
4.	Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor		Speed Boad	1	Unit	APBN	2009	Rusak

DAFTAR ALAT-ALAT BENGKEL & UKUR DAN ALAT-ALAT PERTANIAN & PETERNAKAN

Pada OPD Dinas Sosial Kota Jambi

Periode s/d 31 Desember Tahun 2019

No	URAIAN JENIS ASET	Merk / Tipe / Spesifikasi	Kuantitas	Satuan Ukuran	Sumber Dana (APBD / APBN)	Tahun	Kondisi (Baik / Rusak / Rusak Berat)
1	2	3	4	5	6	7	8
III. 1.	ALAT-ALAT BENGKEL & ALAT-ALAT UKUR Mesin Genset		1	Unit	APBN	2009	Rusak
IV. 1.	ALAT-ALAT PERTANIAN & PETERNAKAN Mesin Pemetong Rumput	Tanaka	1	Unit	APBD	2013	Baik
2.	Pisau Mesin Potong Rumput	Cutter Blade	3	Buah	APBD	2011	Rusak
3.	Gerinda / Batu Asah	Cutter Blade	2	Buah	APBD	2011	Rusak
4.	Gerobak Dorong Roda Satu	-	1	Unit	APBD	2011	Rusak
5.	Mesin Penyemprot Air	Fujiyama	1	Unit	APBD	2014	Rusak
6.	Mesin Pemetong Rumput	Tagawa	1	Unit	APBD	2011	Baik
7.	Mesin Pemetong Rumput	Tanaka	2	Unit	APBD	2009	2 Rusak

DAFTAR ALAT-ALAT KANTOR DAN ALAT-ALAT RUMAH TANGGA

Menurut Jenis Golongan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Pada OPD Dinas Sosial Kota Jambi

Periode s/d 31 Desember Tahun 2019

No	URAIAN JENIS ASET	Merk / Tipe / Spesifikasi	Kuantitas	Satuan Ukuran	Sumber Dana (APBD / APBN)	Tahun	Kondisi (Baik / Rusak / Rusak Berat)
1	2	3	4	5	6	7	8
V.1	ALAT-ALAT KANTOR						
1.	KOMPUTER / PC						
	Komputer/ PC	-	1	Unit	APBD	2009	Rusak
	UPS	-	1	Unit	APBD	2009	Rusak
	UPS	-	1	Unit	APBD	2014	Rusak
	Stabillizer	-	1	Unit	APBD	2009	Rusak
	Hardisk Eksternal	Toshiba	5	Buah	APBD	2015	Baik
	Hardisk Eksternal	Canvio 500 Gb	3	Buah	APBD	2009	Rusak
		-					
	Komputer/ PC	-	1	Unit	APBD	2012	Baik
	Komputer/PC	Dell Inspiron	1	Unit	APBD	2014	Baik
	Komputer / PC	one	1	Unit	APBD	2015	Baik
	Komputer/PC	Acer	2	Unit	APBD	2016	Baik
	Komputer/PC All In One	Asus	5	Unit	APBD	2018	Baik
2.	MESIN PENGHANCUR KERTAS						
		Secure 10 set	1	Unit	APBD	2013	Rusak
3.	MESIN TIK						
	Mesin Tik uk. Sedang	Royal R13DLZ	1	Unit	APBD	2011	Rusak
	Mesin Tik uk. Sedang	Brothers	2	Unit	APBD	2009	Rusak
	Mesin Tik uk. Besar	Royal	1	Unit	APBD	2008	Rusak
	Mesin Tik uk. Sedang	Royal	2	Unit	APBD	2007	Rusak
4.	KOMPUTER / NOTEBOOK						
	- Notebook	Asus X200CA-KX184D	3	Unit	APBD	2014	2 Baik 1 Rusak
	- Notebook	Acer Aspire One	6	Unit	APBD	2013	4 Baik 2 Rusak
	- Tablet PC	Samsung Galaxy Tab.7	1	Unit	APBD	2012	Baik
	- Tablet PC	Samsung Galaxy Tab.2	1	Unit	APBD	2012	Baik

	- Notebook	Accer Aspire One A0725	2	Unit	APBD	2012	Baik
	- Laptop 14 inchi	Toshiba	2	Unit	APBD	2015	Baik
	- Laptop 14 inchi	Asus	2	Unit	APBD	2014	Baik
	- Laptop 14 inchi	Dell Inspiron 4050	1	Unit	APBD	2013	Baik
	- Laptop 14 inchi	Thosiba C640 – 1075U	1	Unit	APBD	2012	Baik
	- Laptop 14 inchi	Dell Inspiron 4050	1	Unit	APBD	2011	Baik
	- Laptop 14 inchi	Accer 4253-E351G32Mn	1	Unit	APBD	2011	Baik
	- Laptop 14 inchi	Thosiba SL645-1142XR	1	Unit	APBD	2011	Baik
	- Laptop 14 inchi	Thosiba PC W7Starter	4	Unit	APBD	2011	Baik
	- Note Book 11 inchi	Accer AO532h	1	Unit	APBD	2010	Baik
	- Note Book 10 inchi	Thosiba NB305	1	Unit	APBD	2010	Baik
	- Laptop 13 inchi	Accer	3	Unit	APBD	2010	Baik
	- Laptop 14 inchi	Thosiba	2	Unit	APBD	2009	Baik
	- Laptop 14 inchi	Thosiba	1	Unit	APBD	2008	Baik
	- Laptop 13 inchi	Thosiba	1	Unit	APBD	2008	Baik
	- Laptop 14 Inchi	Asus	3	Unit	APBD	2017	Baik
5.	PRINTER						
	- Printer Ink jet	Canon Fixma E 510	3	Unit	APBD	2015	Rusak
	- Printer besar	Brother MFC-J3720	1	Unit	APBD	2015	Rusak
	- Printer	Brother MFC-J3720	2	Unit	APBD	2014	Rusak
	- Printer	Epson L555	2	Unit	APBD	2014	Baik
	- Printer	Epson L120	4	Unit	APBD	2016	Baik
	- Printer Ink Jet	Epson L100	5	Unit	APBD	2013	Baik
	- Printer Ink Jet + + Infus	Canon Pixma i2770	4	Unit	APBD	2012	Rusak
	- Printer Ink Jet	Epson Stylus T13x	1	Unit	APBD	2012	Rusak
	- Printer Ink Jet	Epson L100	2	Unit	APBD	2011	Baik
	- Printer Ink Jet + Infus	Canon MP258	4	Unit	APBD	2011	Rusak
	- Printer Ink Jet + Infus	Canon Pixma i2770	4	Unit	APBD	2011	Rusak
	- Printer Ink Jet	Canon Pixma i2770	2	Unit	APBD	2011	Rusak
	- Printer	Epson LQ	1	Unit	APBD	2011	Rusak
	- Printer Ink Jet + Infus	Canon MP258	4	Unit	APBD	2010	Rusak
	- Printer Ink Jet	Canon iP2770	2	Unit	APBD	2010	Rusak

	+ Infus						
	- Printer Ink Jet + Infus	Canon iP2770	2	Unit	APBD	2010	Rusak
	- Printer Laser Jet	HP	2	Unit	APBD	2011	Rusak
	- Printer Laser Jet	HP	1	Unit	APBD	2013	Rusak
	- Printer Ink Jet	HP	1	Unit	APBD	2013	Rusak
	- Printer Ink Jet	HP	3	Unit	APBD	2011	Rusak
	- Printer	Epson LQ	2	Unit	APBD	2011	Rusak
	- Printer	Epson L360	5	Unit	APBD	2018	Baik
6.	MESIN FOTOCOPY	Brothers MFC-8380 DN	1	Unit	APBD	2013	Rusak
		Brothers MFC-8380 DN	1	Unit	APBD	2011	Rusak
7.	MESIN SCANNER	Accers	1	Unit	APBD	2007	Rusak
8. 9.	MESIN ABSENSI MEJA KERJA	Fingertec	1	Unit	APBD	2015	Baik
	- Meja Kerja 1/2 Biro	Warrior	5	Unit Set	APBD APBD	2015 2014	Baik Baik
	- Meja Kerja 1 set	-	1				
	- Meja Kerja ½ Biro + Kaca	Uk. 90 x 80 x 25 cm	9	Unit	APBD	2012	Baik
	- Meja Kerja ½ Biro 2 Laci	Uk. 90 x 80 x 25 cm	1	Unit	APBD	2012	Baik
	- Meja Kerja Staf	Uk. 80 x 60 x 25 cm	2	Unit	APBD	2008	Baik
	- Meja Kerja Biro	Uk. 120 x 80 x 40 cm	1	Unit	APBD	2013	Baik
	- Meja Kerja Biro	Uk. 120 x 80 x 40 cm	5	Unit	APBD	2010	Baik
	- Meja Kerja Biro	Uk. 120 x 80 x 40 cm	5	Unit	APBD	2007	Baik
	- Meja Kerja Biro + Kaca	Uk. 90 x 80 x 25 cm	2	Set	APBD	2010	Baik
	- Meja Kerja Biro	Uk. 90 x 80 x 25 cm	22	Unit	APBD	2009	Baik
	- Meja Kerja Staf	Uk. 80 x 60 x 25 cm	20	Unit	APBD	2008	Baik
	- Meja Absen	Uk. 80 x 60 x 40 cm	2	Unit	APBD	2008	Baik
	- Meja Komputer	-	1	Unit	APBD	2013	Baik
	- Meja Komputer	-	10	Unit	APBD	2007	Baik
	- Meja Telepon/PABX	Uk. 40 x 20 x 30 cm	1	Unit	APBD	2007	Baik
	- Meja Kerja	1 Biro	1	Unit	APBD	2018	Baik
10.	MEJA & KURSI SOFA						
	- Kursi Tamu Tinggi	Stenlish	6	Buah	APBD	2014	Baik

	- Kursi dan Meja Tamu	Bahan Kayu & Kaca	1	Set	APBD	2010	Baik
	- Kursi dan Meja Tamu	Bahan Kayu & Kaca	1	Set	APBD	2009	Baik
	- Kursi dan Meja Tamu	Bahan Kayu & Kaca	1	Set	APBD	2008	Baik
	- Kursi Panjang Tunggu	Futura	2	Set	APBD	2009	Baik
	- Kursi Panjang Tunggu	Bahan Kayu	3	Buah	APBD	2008	Rusak
11.	MEJA RAPAT & PODIUM						
	- Meja Rapat Panjang	Uk. 180 x 80 x 40 cm	2	Unit	APBD	2013	Baik
	- Meja Rapat Panjang	Uk. 180 x 80 x 40 cm	8	Unit	APBD	2007	Baik
	- Meja Rapat Bulat	Uk. 90 x 80 x 40 cm	2	Unit	APBD	2007	Baik
	- Podium Sambutan	Lambang Pemda	1	Unit	APBD	2010	Baik
	- Podium Sambutan	Non Lambang Pemda	1	Unit	APBD	2008	Baik
12.	KURSI KERJA						
	- Kursi Kerja	Phoenik	1	Buah	APBD	2016	Baik
	- Kursi Putar Sandaran Sedang	Phoenik	5	Buah	APBD	2015	Baik
	- Kursi Putar Sandaran Sedang	Brother	1	Buah	APBD	2013	
	- Kursi Putar Sandaran Sedang	Brother	9	Buah	APBD	2012	Baik
	- Kursi Putar Sandaran Tinggi	-	1	Buah	APBD	2013	Baik
	- Kursi Putar Sandaran Tinggi	Rakuda	1	Buah	APBD	2010	Baik
	- Kursi Putar Sandaran Tinggi	Babyku	5	Buah	APBD	2010	Baik
	- Kursi Putar Sandaran Tinggi	Futura	3	Buah	APBD	2010	Baik
	- Kursi Putar Sandaran Sedang	Eiectra	6	Buah	APBD	2009	Baik
	- Kursi Putar Sandaran Rendah	Eiectra	6	Buah	APBD	2009	Baik
	- Kursi Putar Sandaran	Tanpa sandaran	6	Buah	APBD	2008	Baik

	Rendah	tangan					
	- Kursi Kayu	Sandaran tangan	2	Buah	APBD	2008	Baik
	- Kursi Kayu	Tanpa sandaran tangan	8	Buah	APBD	2007	Baik
	- Kursi Kayu Panjang	Tanpa sandaran tangan	3	Buah	APBD	2007	Baik
	- Kursi Kerja		3	Buah	APBD	2018	Baik
13.	KURSI RAPAT						
	- Kursi Putar Sandaran Tinggi	-	1	Buah	APBD	2013	Baik
	- Kursi Stanlies	Matrix	95	Buah	APBD	2016	Baik
	- Kursi Putar Sandaran Tinggi	Rakuda	2	Buah	APBD	2012	Baik
	- Kursi Susun Stenllis	Rakuda	1	Buah	APBD	2013	Baik
	- Kursi Susun Stenllis	Rakuda	50	Buah	APBD	2011	Baik
	- Kursi Plastik	Warna Biru	40	Buah	APBD	2011	Baik
	- Kursi Plastik	Warna Putih	100	Buah	APBD	2008	Baik
	- Kursi Lipat Stenllis	Rakuda	14	Buah	APBD	2007	Baik
14.	ALMARI						
	▪ Lemari Arsip Dinding 4 tingkat	Warior	1	Buah	APBD	2015	Baik
	▪ Lemari Pakaian PMKS	-	2	Buah	APBD	2014	Baik
	▪ Lemari Arsip Dinding 4 Tingkat	240 x 240 cm	1	Buah	APBD	2012	Baik
	▪ Lemari Arsip Dinding 5 Tingkat	-	1	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Lemari Arsip 4 Tingkat	-	1	Buah	APBD	2010	Baik
	▪ Lemari Arsip 3 Tingkat	-	1	Buah	APBD	2011	Baik
	▪ Lemari Arsip 2 Tingkat	-	1	Buah	APBD	2011	Baik
	▪ Lemari Arsip Kaca 2 Pintu	-	1	Buah	APBD	2009	Baik
	▪ Lemari Pakaian 2 Pintu	-	2	Buah	APBD	2008	Baik
	▪ Lemari Arsip Gantung	3 pintu, bahan kayu	2	Buah	APBD	2009	Baik
	▪ Lemari Arsip Besi	2 pintu, 4 tingkat	10	Buah	APBD	2006	Baik

15.	FILLING KABINET							
	- Lemari Filling Kabinet	Lion	6	Unit	APBD	2016	Baik	
	- Lemari Filling Kabinet	Yamanaka	3	Unit	APBD	2015	Baik	
	- Lemari Filling Kabinet	Lion Sliding Door	4	Unit	APBD	2012	Baik	
	- Lemari Filling Kabinet	Lion Sliding Door	2	Unit	APBD	2011	Baik	
	- Lemari Filling Kabinet	Lion Sliding Door	2	Unit	APBD	2010	Baik	
	- Filling Kabinet 4 Tingkat	Lion	2	Unit	APBD	2009	Baik	
	- Filling Kabinet 4 Tingkat	Lion	2	Unit	APBD	2009	Baik	
	- Lemari Filling Kabinet	Lion buka tutup	2	Unit	APBD	2011	Baik	
	- Lemari Filling Kabinet	Lion	2	Unit	APBD	2018	Baik	
16.	RAK BUKU / TV / KEMBANG							
	- Rak arsip	Warrior	1	Unit	APBD	2015	Baik	
	- Rak TV	2 Tingkat	1	Buah	APBD	2012	Baik	
	- Rak Lemari Gudang Bansos	Kayu, 4 Tingkat	1	Buah	APBD	2012	Baik	
	- Rak Lemari Gudang Logistik Bencana	Kayu lapis triplek dan reng kayu	1	Buah	APBD	2014	Baik	
	- Rak Gudang Bansos	Kayu, 4 Tingkat	1	Buah	APBD	2011	Baik	
	- Rak Buku	Kaca, & Kayu	3	Buah	APBD	2009	Baik	
	- Rak TV	Kaca, & Kayu	3	Buah	APBD	2008	Baik	
	- Rak Etalase	Kaca, 3 Tingkat	1	Buah	APBD	2006	Baik	
17.	PAPAN INFORMASI / TRAFIC LIGHT / RAMBU-RAMBU							
	- Papan Pengumuman Pakai Roda	Kayu lapis triplek pakai roda	5	Buah	APBD	2014	Baik	
	- Umbul-umbul / bendera hias	Merah putih	-	Buah	APBD	2015	Baik	
	- Umbul-Umbul	-	50	Buah	APBD	2014	Baik	
	- Papan Data Informasi PKH	Kayu lapis triplek dan reng kayu	2	Buah	APBD	2014	Rusak	

	- Papan Informasi Data PMKS	-	1	Set	APBD	2013	Baik
	- Papan Data Bidang Kesos	Uk. 245 x 104 cm	1	Set	APBD	2012	Baik
	- Papan Merk Ruang	Uk. 32 x 8 cm	20	Buah	APBD	2010	Baik
	- Papan Data Kegiatan	Uk. 105 x 62 cm	4	Buah	APBD	2010	Baik
	- Papan Daftar Urut Kepangkatan	Uk. 245 x 104 cm	4	Buah	APBD	2010	Rusak Ringan
	- Papan Struktur Organisasi	Uk. 245 x 104 cm	1	Buah	APBD	2010	Baik
	- Papan Visi Misi & Tupoksi SKPD	Uk. 245 x 104 cm	1	Buah	APBD	2010	Baik
	- Papan Kegiatan Bergambar	Uk. 200 x 178 cm	1	Buah	APBD	2010	Baik
	- Papan Kehadiran Pejabat	Uk. 68 x 54 cm	4	Buah	APBD	2010	Baik
	- Papan Tulis White Board	Uk. 245 x 104 cm	1	Buah	APBD	2009	Rusak
	- Papan Tulis White Board	Uk. 105 x 62 cm	1	Buah	APBD	2008	Rusak
	- Papan Merk Sekretariat DWP	Uk. 105 x 62 cm	2	Unit	APBD	2007	Rusak Ringan
	- Papan Merk Sekretariat LK3	Uk. 105 x 62 cm	2	Unit	APBD	2007	Rusak Ringan
	- Papan Merk Sekr. TAGANA	Uk. 105 x 62 cm	2	Unit	APBD	2007	Rusak Ringan
V.2.	ALAT – ALAT RUMAH TANGGA						
18.	AIR CONDITIONER (AC)						
	AC 1 PK	LG	1	Unit	APBD	2016	Baik
	AC 1 PK	LG T09NL	3	Unit	APBD	2015	Baik
	AC 2 PK	Standar	2	Unit	APBD	2015	Baik
	AC 1 PK	LG S18NLAN51 GREE	2	Unit	APBD	2014	Baik
	AC 2 PK	GREE	1	Unit	APBD	2014	Baik
	AC 1 PK	GREE	2	Unit	APBD	2013	Baik
	AC 1 PK	GREE	3	Unit	APBD	2012	Baik
	AC 1 ½ PK	LG	2	Unit	APBD	2010	Baik
	AC 1 PK	Panasonic	3	Unit	APBD	2010	Baik
19.	KIPAS ANGIN						
	Kipas Angin Blower	Panasonic	2	Unit	APBD	2018	Baik
	Kipas Angin	Panasonic	2	Unit	APBD	2017	Baik

	Blower							
	Kipas Angin	Miyako	3	Unit	APBD	2016	Baik	
	Kipas Angin	Kirin	2	Unit	APBD	2014	Baik	
	Kipas Angin Gantung	GMC	4	Unit	APBD	2012	Baik	
	Kipas Angin Putar Dinding	Nasional	7	Unit	APBD	2008	Baik	
	Kipas Angin Putar Tegak	Panasonic	3	Unit	APBD	2007	Baik	
20.	EXHAUSFHANT							
	Exhausfant	Sekai	3	Unit	APBD	2014	Baik	
	Exhausfant	-	4	Unit	APBD	2013	Baik	
	Exhausfant Ukuran Sedang	Maspion	1	Unit	APBD	2010	Baik	
	Exhausfant Ukuran Kecil	Maspion	1	Unit	APBD	2008	Baik	
21.	TANGGA STENLLIS	Fortune, Tingkat	4	1	Unit	APBD	2010	Baik
22.	KARPET/AMBAL	Ambal Shalat	2	Buah	APBD	2012	Baik	
		Karpet Jumbo	4	Buah	APBD	2017	Baik	
		Karpet (18 meter)	1	Buah	APBD	2014	Baik	
		Sejahdah Shalat	1	Buah	APBD	2012	Baik	
		Samirah, 4 x 3 m	12	Meter	APBD	2007	Baik	
23.	KULKAS PINTU	Sanyo SR-D166SB	1	Unit	APBD	2011	Baik	
24.	LEMARI PIRING	Bahan Kaca Tingkat	2	1	Unit	APBD	2010	Baik
25.	DISPENSER							
	- Dispenser	Sharp	2	Unit	APBD	2015	1 Rusak	
	- Dispenser	Sanken	2	Buah	APBD	2014	Baik	
	- Dispenser	Mayaka	1	Buah	APBD	2014	Baik	
	- Dispenser Hot Cold	Maspion	2	Buah	APBD	2010	Baik	
	- Dispenser Standar	Nasional	2	Buah	APBD	2009	Baik	
	- Dispenser Standar	Maspion	3	Buah	APBD	2008	Baik	
	- Dispenser Standar	Modena	1	Buah	APBD	2018	Baik	
26.	PERALATAN DAPUR							
	- Gelas Makan	HS	1	Lusin	APBD	2011	Baik	
	- Gelas Makan	HS	1	Lusin	APBD	2013	Baik	
	- Gelas Polos	Indones	1	Lusin	APBD	2011	Baik	
	- Garpu Makan	Stenllis Doll	1	Lusin	APBD	2011	Baik	
	- Sendok Makan	Stenllis Doll	1	Lusin	APBD	2013	Baik	

	- Sendok Makan	Stenllis Doll	1	Lusin	APBD	2011	Baik
	- Sendok Gulai	Stenllis Doll	1	Lusin	APBD	2013	Baik
	- Piring Makan	-	1	Lusin	APBD	2013	Baik
	- Piring Tempat Lauk Prasmanan	-	-	-	APBD	2013	Baik
	- Piring Makan Besar	HS	1	Lusin	APBD	2011	Baik
	- Piring Makan Cekung	Sango	1	Lusin	APBD	2011	Baik
	- Kobokan Cuci Tangan	Indones	1	Lusin	APBD	2011	Baik
	- Toples Gula/Kopi/The	High Wire	1	Set	APBD	2011	Baik
	- Cangkir Minuman The	Vicenza	2	Set	APBD	2011	Baik
	- Cerek Stenllis	Maspion	1	Buah	APBD	2010	Baik
	- Kompor Gas	Rinai 2 Sumbu	1	Buah	APBD	2010	Baik
	- Mangkok Sedang	-	1	Lusin	APBD	2013	Baik
	- Tabung Gas	Elpiji Netto 12 Kg	1	Buah	APBD	2010	Baik
	- Tempat Sampah dari Besi	-	5	Buah	APBD	2014	Baik
27.	MEJA LAPANGAN OLAHRAGA TENIS MEJA		1	Buah	APBD	2008	APBD
28.	HORDENG, ALAS MEJA & ALAS/KASUR						
	Hordeng Hordeng	Sharp point vertikal blin Buka Tutup, Cream	1 122	Buah Meter	APBD APBD	2015 2011	Baik Baik
	Hordeng	-	4	Buah	APBD	2014	Baik
	Rimpel Alas Meja	Saten, Biru & Merah	5	Buah	APBD	2011	Baik
	Alas kasur ruang pembinaan PMKS	-	1	Set	APBD	2014	Baik
	Kasur + Bantal Ruang PMKS	-	1	Buah	APBD	2014	Baik
	Hordeng dan rimpel Meja	-	1	Paket	APBD	2017	Baik
29.	LAMBANG-LAMBANG NKRI						
	Bendera Merah Putih	-	1	Buah	APBD	2013	Baik
	Lambang Burung Garuda	Bahan Lilin, Perunggu	6	Buah	APBD	2010	Baik
	Gambar Presiden/Wapres RI	Bingkai Kaca	8	Set	APBD	2010	Baik

**DAFTAR ALAT-ALAT STUDIO DAN ALAT-ALAT KOMUNIKASI,
ALAT-ALAT KEDOKTERAN, ALAT-ALAT LABORATORIUM DAN ALAT-ALAT KEAMANAN**

Menurut Jenis Golongan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Pada OPD Dinas Sosial Kota Jambi

Periode s/d 31 Desember Tahun 2019

No	URAIAN JENIS ASET	Merk / Tipe / Spesifikasi	Kuantitas	Satuan Ukuran	Sumber Dana (APBD / APBN)	Tahun	Kondisi (Baik / Rusak / Rusak Berat)
1	2	3	4	5	6	7	8
VI.1	ALAT-ALAT STUDIO						
1.	TELEVISI (TV)						
	TV LCD	Sharp	3	Unit	APBD	2016	Baik
	Televisi 21 Inchi Layar Datar	LG 21SL1RD-T3	1	Unit	APBD	2011	Baik
	Televisi 21"	LG LN 5100	1	Unit	APBD	2014	Baik
	Televisi 21 Inchi Layar Datar	Panasonic	1	Unit	APBD	2009	Baik
	Televisi 21 Inchi Layar Cembung	Panasonic	1	Unit	APBD	2008	Baik
	Antena Boster	Tanaka	3	Buah	APBD	2011	Baik
	Antena	PF Goceng	1	Buah	APBD	2014	Baik
	Boster	PC Goceng	3	Buah	APBD	2011	Baik
	Boster	Tanaka	1	Buah	APBD	2014	Baik
2.	HANDYCAM						
	Handycam	Sony DCR-SX 40E	1	Unit	APBD	2010	Rusak
	Handycam	Sony	1	Unit	APBD	2009	Rusak
3.	CAMERA						
	Camera	Canon E 510	1	Unit	APBD	2018	Baik
	Camera Digital	Cannon EOS 60D	1	Unit	APBD	2015	Baik
	Camera Digital	Sony	1	Unit	APBD	2013	Rusak
	Camera 18 MP	Canon EOS 600 D Kit. I	1	Unit	APBD	2012	Baik
	Camera Digital 14 MP	Sony Cybershot W620	1	Unit	APBD	2012	Rusak
	Camera Digital 12 MP	Canon IXUS 115 HS	1	Unit	APBD	2012	Rusak
	Camera Digital 14 MP	Canon PowerShot A3200IS	2	Unit	APBD	2012	Rusak

	Camera Digital	Sony 10 MP	1	Unit	APBD	2012	Rusak
	Camera Digital	Sony 10 MP	1	Unit	APBD	2010	Rusak
	Camera Digital	Samsung 8 MP	2	Unit	APBD	2009	Rusak
	Camera Digital	Cybershot DSC-S930	1	Unit	APBD	2008	Rusak
	Camera Digital	Kodak	2	Unit	APBD	2007	Rusak
4.	INFOCUS / PROYEKTOR						
	Proyektor & Layar Infokus	BENQ MS504/G-Lite	1	Unit	APBD	2014	Baik
	Infocus / Proyektor	Samsung	1	Unit	APBD	2009	Baik
	Layar Infocus / Proyektor	-	1	Buah	APBD	2009	Baik
5.	ALAT-ALAT SOUND SYSTEM						
	Wireless Megaphone Tangan	HD T 2088 USB SW, SR-87 Transitor	1	Unit	APBD	2015	Rusak
			1	Unit	APBD	2010	Rusak
	DVD PLAYER	-	1	Unit	APBD	2013	Rusak
	Speaker System	BMB	1	Unit	APBD	2010	Rusak
	Speaker Aktif	-	1	Unit	APBD	2013	Rusak
	Amplifier System	BMB	1	Set	APBD	2010	Rusak
	Amplifier	TOA	1	Unit	APBD	2014	Rusak
	Microphone Wairlles	Aiwa	1	Unit	APBD	2010	Rusak
	Microphone Wairlles	-	1	Unit	APBD	2013	Rusak
	Microphone Kabel	-	1	Unit	APBD	2013	Rusak
	Microphone Kabel	Shure FGX8	2	Unit	APBD	2015	Rusak
	Microphone Kabel	Ahuja	3	Unit	APBD	2014	Rusak
	Microphone Kabel	TOA	1	Unit	APBD	2010	Rusak
	Microphone Stand	-	1	Unit	APBD	2013	Rusak
	Microphone Meja	Rexon Pro	2	Unit	APBD	2010	Rusak
	Tiang Speaker System	Recto Pro	2	Unit	APBD	2010	Rusak
	Tiang Speaker Aktif	-	1	Unit	APBD	2013	Rusak
	Tiang Microphone/stand mic	Crimson NB - 300	2	Unit	APBD	2015	Rusak
	Tiang Microphone Tegak	Rexon Pro	1	Set	APBD	2010	Rusak
	Kabel Monster	Endwell	2	Unit	APBD	2010	Rusak
	Kabel Microphone	Canare	1	Roll	APBD	2010	Rusak
	Bel Listrik	Hongkong	2	Buah	APBD	2010	Rusak

	Ruangan						
	Microphone Towa	Towa	1	Unit	APBD	2009	Rusak
	Tape Radio Speaker System	Politron	1	Unit	APBD	2008	Rusak
VI.2	ALAT-ALAT KOMUNIKASI						
1.	TELEPHONE PABX	Panasonic	4	Buah	APBD	2012	Baik
2.	TELEPHONE	Panasonic	1	Buah	APBD	2009	Baik
3.	TELEPHONE PABX	Panasonic	4	Buah	APBD	2009	Baik
4.	FAXIMILE	Panasonic	1	Buah	APBD	2008	Baik
5.	HANDLY TALKIE	-	1	Buah	APBD	2013	Baik
VII.	ALAT-ALAT KEDOKTERAN						
VIII.	ALAT-ALAT LABORATORIUM						
IX.	ALAT-ALAT KEAMANAN						
	• Tabung Pemadam Kebakaran	ABC Powder, Racun Api	4	Tabung	APBD	2012	Baik
	• Tabung Pemadam Kebakaran	-	1	Tabung	APBD	2013	Baik
	• Tabung Pemadam Kebakaran	ABC Powder, Racun Api	4	Tabung	APBD	2011	Baik
	• Brankas	Lion	1	Unit	APBD	2010	Baik

6) Permasalahan dan Solusi

Dari Penyelenggaraan Program Kegiatan Pemerintahan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2019 pada Dinas Sosial Kota Jambi khususnya dalam bidang Sosial, maka terdapat beberapa permasalahan pokok dan memerlukan Solusi pemecahan yang terjadi pada Urusan SOSIAL antara lain adalah :

1).PERMASALAHAN

URUSAN SOSIAL

1. Belum Optimalnya Penanganan dan Penertiban Razia Gepeng dan PSK.
2. Belum Optimalnya Penanganan tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, khususnya bantuan korban bencana.
3. Belum Optimalnya Penanganan dan pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal Tujuannya.
4. Belum Optimalnya Pelayanan dan Rehabilitasi bagi PMKS.
5. Belum Optimalnya Pemberian Bantuan Usaha kepada PMKS
6. Belum Optimalnya Peran serta Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan dan penanggulangan masalah-masalah Sosial

7. Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berasal dari Luar Daerah
8. Masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan PMKS.

2). SOLUSI

URUSAN SOSIAL

1. Menambah Tingkat Intensitas Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap perkembangan hasil penertiban dan penanganan PMKS.
2. Membangun Gudang Bantuan Sosial / Tanggap Cepat Darurat dan Kendaraan Dinas Operasional pendistribusian bantuan bencana.
3. Menambah Anggaran Distribusi Bantuan Sosial bagi korban bencana dan Anggaran Penanganan dan pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal Tujuannya ke dalam Anggaran APBD Kota Jambi.
4. Membangun Rumah Singgah, Sarana Prasarana Pusat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS.
5. Memberikan Pelatihan Ketrampilan dan Wirausaha Mandiri kepada PMKS.
6. Memberikan Bantuan Peralatan Ketrampilan Usaha Mandiri kepada PMKS
7. Memberdayakan dan meningkatkan Peran Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan dan penanggulangan masalah-masalah Sosial
8. Menyusun dan membuat rencana strategis secara terpadu, melakukan sinkronisasi dan koordinasi, serta memanfaatkan Forum Kerjasama antar daerah dalam rangka mengatasi masalah-masalah kesejahteraan social.

18. Urusan Pariwisata dan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan ini dilaksanakan oleh instansi yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi

1) Program dan Kegiatan

a) Program

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan.
- (6) Program Perencanaan SKPD
- (7) Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata

b) Kegiatan

- (1) Penyediaan jasa surat menyurat
- (2) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- (3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opr
- (4) Penyediaan jasa administrasi keuangan .
- (5) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- (6) Penyediaan alat tulis kantor.
- (7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- (8) Penyediaan Komponen listrik/Penerangan bangunan kantor
- (9) Penyediaan peralatan rumah tangga
- (10) Penyediaan makan dan minum
- (11) Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, Pramubakti
- (12) Perjalanan Dinas.
- (13) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- (14) Pengadaan mebel
- (15) Pengadaan Peralatan Perkantoran
- (16) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- (17) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
- (18) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- (19) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan

- (20) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- (21) Penyusunan rencana kerja SKPD
- (22) Pengembangan dan Promosi Kesenian dan Budaya Daerah
- (23) Pengembangan dan Promosi Pariwisata Daerah
- (24) Pembangunan Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar daerah

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, baik yang menyangkut pelayanan dan lain sebagainya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Selanjutnya dalam pelaksanaan tupoksi tersebut, jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi sampai akhir tahun 2019 sebanyak 30 orang dan ditambah dengan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 17 orang sebagaimana tabel berikut:

**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PERJABATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

GOL. RUANG	ESELON				Staf	PENDIDIKAN					JLH
	I	II	III	IV		S3	S2	S1	D3	SMA	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Golongan IV/b	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
Golongan IV/a	-	-	4	3	-	-	6	3	-	-	16
JUMLAH GOLONGAN IV	0	1	5	3	0	0	7	4	0	0	20
Golongan III/d	-	-	-	6	3	-	0	6	2	-	17
Golongan III/c	-	-	-	3	1	-	-	4	-	-	8
Golongan III/b	-	-	-	1	5	-	-	3	-	1	10
Golongan III/a	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	0	10	11	0	0	14	2	1	38
Golongan II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENAGA IDAK TETAP (PTT)	-	-	-	-	17	-	-	8	1	8	17
TOTAL	0	1	5	13	28	0	7	26	3	10	55

4) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Urusan wajib yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi pada tahun 2019 dengan program dan Kegiatan serta anggaran sebagai berikut :

Alokasi Anggaran Belanja langsung yang tertuang didalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) dan dikelola Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Jambi yaitu sebesar Rp..4.003.111.000 (Empat milyar tiga juta seratus sebelas ribu rupiah) yang diperuntukan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah disusun.

Adapun Realisasi belanja Tidak langsung diperuntukan untuk belanja Gaji Pegawai dan tunjangan Tambahan Penghasilan, sedangkan belanja langsung diperuntukan untuk belanja urusan dan non urusan sebagaimana tabel dibawah ini.

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	Penyediaan jasa surat menyurat		
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.405.500,-	1.380.000,-
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opr	67.900.000,-	54.491.398,-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan .	9.800.000	8.079.700,-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor.		
5	Penyediaan alat tulis kantor.	387.200.000,-	363.048.000,-
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	17.513.700,-	17.513.700,-
7	Penyediaan Komponen listrik/Penerangan bangunan	23.260.700,-	23.248.000,-
8	kantor	10.000.000,-	10.000.000,-
	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.500.000,-	2.496.500,-
9	Penyediaan makan dan minum	2.500.000,-	2.499.000,-

10	Penyediaan jasa pengamanan kantor,	16.040.000,-	16.030.000,-
11	pengemudi, Pramubakti	36.300.000,-	36.300.000,-
12	Perjalanan Dinas.	359.275.000,-	359.275.000,-
II.			
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		
3	Pengadaan mebel	25.000.000,-	21.500.000,-
4	Pengadaan Peralatan Perkantoran	40.000.000,-	40.000.000,-
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	43.951.000,-	40.567.420,-
6	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	192.340.000,-	191.449.617,-
III.	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	13.000.000,-	13.000.000,-
1		24.000.000,-	23.500.000,-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	15.750.000,-	15.741.000,-
IV.			
	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya		
1.	Aparatur		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	13.500.000,-	12.000.000,-
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		
1.	capaian Kinerja dan Keuangan	4.075.000,-	3.994.300,-
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi		
VI	kinerja SKPD	5.700.000,-	5.695.000,-
1.	Program Perencanaan SKPD	5.700.000,-	5.589.300,-
2	Penyusunan rencana kerja SKPD	152.500.000,-	143.884.500,-
3.	Penyusunan Renstra SKPD		
	Pengembangan Data / Informasi		
VII	Pembinaan, Peningkatan dan perluasan pengelolaan		
1.	Budaya dan Pariwisata		
2.	Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Seni dan Budaya	1.090.300.000,-	1.042.088.900,-
3.	Daerah	999.825.000,-	986.005.800,-
	Pengembangan, Promosi Kebudayaan Pariwisata Daerah	443.775.000,-	441.304.882,-
	Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Pariwisata Daerah		
	Jumlah	7.043.079.643,-	6.760.293.911,-

5) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan selalu melalui proses perencanaan antara lain :

- a) Pembahasan Program dan Kegiatan Dalam Forum RKPD
- b) Pembahasan Program dan Kegiatan Dalam Forum SKPD
- c) Pembahasan Program dan Kegiatan Dalam Forum Musrembang Kota
- d) Pengajuan Program dan Kegiatan Dalam Renja SKPD
- e) Penyusunan RKA Program dan Kegiatan SKPD
- f) Penyusunan DPA SKPD.
- g) Penerbitan DPA SKPD

6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

NO	SARANA & PRASARANA	JUMLAH	BAIK	SEDANG	RUSAK
	A. Barang Tidak Bergerak				
1	Gedung kantor	1	1	-	-
	B. Barang Bergerak				
1	Kendaraan Roda Empat	6	4	2	-
2	Kendaraan Roda 2	13	13	-	-
3	Meja Kerja 1 Biro	7	7	-	-
4	Meja Kerja ½ Biro	30	30	-	-
5	Kursi Putar	21	21	-	-
6	Kursi Jok Sandaran Tinggi	6	6	-	-
7	Kursi Stenlis	21	21	-	-
8	Komputer	4	4	-	-
9	Filing Kabinet	2	2	-	-
10	Lemari Arsip	5	5	-	-
11	TV	2	2	-	-
12	Kursi Kerja	29	-	-	-
13	Kursi Tamu	2 Set	1 Set	1 set	-
14	Papan Struktur	1	1	-	-
15	Papan DUK	1	1	-	-
16	AC	9	9	-	-
17	Spiker	2	2	-	-
18	Jam Dinding	2	2	-	-
19	CCTV	4	4	-	-
20	Printer	7	-	-	-
21	Laptop	10	10	-	-
22	Kipas Angin	6	6	-	-

23	Umbul-Umbul	-	-	-	-
24	Ambal Besar	1	1	-	-
25	Sound System	2	2	-	-
26	Kamera Digital	2	2	-	-
27	Lemari Pakaian	4	-	-	-
28	Papan Merk Kantor	1	1	-	-
29	Dispenser	5	5	-	-
30	Baju tari rompi hitam polos + celana	3	-	3	-
31	Baju tari hijau les kuning + rompi	5	-	5	-
32	Ambal Besar	1	1	-	-
33	Sound System	2	2	-	-
34	Kamera Digital	2	-	-	-
35	Drone	1	1	-	-
36	Lemari Pakaian	4	-	-	-
37	Baju tari rompi hitam polos + celana	3	-	3	-
38	Baju tari hijau les kuning + rompi	5	-	5	-
39	Baju tari cewek abu-abu	4	-	4	-
40	Baju tari abu-abu kembang merah	6	-	6	-
41	Baju tari laki-laki hijau bordir	4	-	4	-
42	Baju Kurung cewek orange pendek	6	-	6	-
43	Baju Kurung warna hijau	18	-	18	-
44	Baju Kurung warna orange	15	-	15	-
45	Baju Kurung warna merah	13	-	13	-
46	Baju Koko warna merah	19	-	19	-
47	Baju Tari Cewek Warna Merah	8	-	8	-
48	Baju Koko Warna Ungu	4	-	4	-
49	Baju Koko Warna Hijau Laki-laki	8	-	8	-
50	Baju Tari warna perak laki-laki	4	-	4	-
51	Baju Tari warna abu abu laki-laki	5	-	5	-
52	Baju tari warna merah laki-laki	4	-	4	-
53	Baju tari merah orde orde	4	-	4	-
54	Baju tari cewek hijau orde	5	-	5	-
55	Baju tari cewek biru orde manic	5	-	5	-
56	Baju rompi laki laki kembang	6	-	6	-
57	Baju rompi hitam order warna kuning	10	-	10	-
58	Baju penari warna hijau terang	6	-	6	-
59	Celana laki laki warna hijau border	5	-	5	-
60	Celana Hitam polos	6	-	6	-
61	Celana hitam order abu abu	4	-	4	-
62	Celana hitam order kuning	4	-	4	-
63	Celana warna putih	2	-	2	-
64	Rok warna putih	2	-	2	-

65	Rok tari cewek abu abu	5	-	5	-
66	Kain sarung warna hijau	5	--	5	-
67	Kain sarung warna putih kotak	4	-	4	-
68	Kain sarung warna coklat	3	-	3	-
69	Kain sarung warna biru kotak	2	-	2	-
70	Selendang warna kuning	35	-	35	-
71	Selendang warna pink campur	10	-	10	-
72	Selendang warna putih beras	8	-	8	-
73	Selendang warna hijau campur	15	-	15	-
74	Selendang warna merah	6	-	6	-
75	Selendang warna biru	3	-	3	-
76	Selendang warna Coklat	1	-	1	-
77	Selendang warna Orange	1	-	1	-
78	Sal Coklat	4	-	4	-
79	Lantorso warna putih	2	-	2	-
80	Lantorso warna merah	2	-	2	-
81	Peci warna hitam	5	-	5	-
82	Peci warna merah	1	-	1	-
83	Aksesories	1	-	1	-
84	Wig / rambut palsu	9	-	9	-
85	Baju tari Latihan warna biru	30	30	-	-
86	Baju pemusik Laki laki orange	8	-	8	-
87	Baju pemusik warna kuning	1	-	1	-
88	Baju pemusik Warna Kuning terang	4	-	4	-
89	Baju penari warna biru songket	4	-	4	-
90	Sarung warna biru kotak	2	-	2	-
91	Sarung warna merah kotak kotak	8	-	8	-
92	Sarung warna hijau	7	-	7	-
93	Songket warna orange	2	-	2	-
94	PHBX	1 Paket	1 Paket	-	-
95	Lensa Kamera	1	1	-	-
96	Handy Talkie	3	3	-	-
97	Verikal Blind	1 Paket	1 Paket	-	-
98	Drum Band	1 Set	1 Set	-	-
99	Lemari kaca	2 Buah	2 Buah	-	-
100	Hardisk	5 buah	5 buah	-	-
101	Scanner	1 buah	1 buah	-	-
102	Anti virus	2 buah	2 buah	-	-
103	Keyboard	1	1	-	-
104	Amlpy Keyboard	1	1	-	-
105	Akordion	1	1	-	-
106	Peralatan Musik Kompangan	23	23	-	-
107	Organ/keyboard	1	1	-	-
108	Organ/keyboard	1	1	-	-
109	Ampli Keyboard	1	1	-	-
110	Gitar Melodi Elektrik	2	2	-	-

111	Gitar Bass	1	1	-	-
112	Drum	1	1	-	-
113	Ampli Gitar	1	1	-	-
114	Ampli Bass	1	1	-	-
115	Percusi Conga	1	1	-	-
116	effect Guitar	1	1	-	-
117	Mic Wireles	1	1	-	-
118	Mixer Sound	1	1	-	-
119	Speaker Active	1	1	-	-
120	Stand Mic	3	3	-	-

7) Permasalahan dan Solusi

- a) Dalam pelaksanaan Tupoksi Tahun 2019 Disparbud Kota Jambi pada umumnya melaksanakan dengan baik, namun untuk mendukung pencapaian tujuan dan program masih mengalami kendala, yaitu masih kekurangan tenaga teknis yang memiliki latar belakang pariwisata dan kebudayaan.
- b) Disparbud Kota Jambi dalam pelaksanaan Tupoksi mengurus 4 (empat) urusan, yaitu : Bina Program, Pariwisata, Kebudayaan dan Kesenian, Promosi dan Pemasaran. Oleh sebab itu memerlukan pendanaan yang cukup besar.
- c) Sebagai Dinas yang relatif muda (kurang lebih 1bulan) dalam pelaksanaan tugasnya masih kurang sarana seperti : fasilitas teknologi IT, sarana prasarana pariwisata dan budaya.

Dalam peningkatan kinerja kerja Disparbud Kota Jambi kedepan memerlukan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Penambahan tenaga tekhnis yang memiliki latar belakang pendidikan IT, pariwisata dan kebudayaan.
- b) Penganggaran dana yang proposional dalam plafon anggaran APBD tahun berikutnya.
- c) Penambahan sarana pendukung untuk kegiatan di lapangan seperti sarana dan prasarana bidang pariwisata dan bidang budaya

Dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, masih ditemukan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Adapun hambatan tersebut antara lain :

- a) Banyaknya volume permintaan terhadap penampilan Tim Kesenian Kota Jambi untuk mengisi acara sementara dana yang tersedia kurang.
- b) Masih bnayak benda cagar budaya yang belum direnovasi.

19. Urusan Kearsipan dan Perpustakaan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dalam **RPJMD 2018-2023** yaitu pencapaian target Kinerja daerah maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi Pada Tahun 2019 Melaksanakan 6 Program 21 Kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan yang telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional
3. Penyediaan Jasa administrasi keuangan kantor.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantopr
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam
10. Perjalanan Dinas

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat – Alat Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu

4. **Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
5. **Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan**
 1. Pengembangan Koleksi Perpustakaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka
 2. Pembinaan Pengembangan Perpustakaan, Kerjasama dan Pembudayaan Gemar Membaca
6. **Program Pengolahan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah**
 1. Akuisisi, Pengolahan dan Layanan Kearsipan Kota Jambi
 2. Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

1) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi Sampai Saat Ini Belum Mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) hingga pengeluaran lapangan kinerja disesuaikan kepada pencapaian program dan kegiatan baik secara fisik maupun keuangan.

2) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2019 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi terdapat 83 orang terdiri dari sebagai berikut ::

Kondisi Pegawai DKP Kota Jambi Tahun 2019 PNS, NON PNS

Jumlah Pegawai Menurut										
Jenis Kelamin		Jenjang Pendidikan							Status Pegawai	
L	P	SMP Sederajat	SMA/K Sederajat	D ₂	D ₃	S ₁	S ₂	S ₃	PNS	NON PNS

37	46	-	21	-	4	51	6	1	47	36
83	83								83	

Kondisi PNS Berdasarkan Golongan

No	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan														Jml		
	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b		I/a	
1																	
2	1	3	8	14	9	6	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	47

3) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran Belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi yang bersumber dari dana APBD Kota Jambi Tahun 2019 sebesar Rp.8.687.482.375,- kemudian ada Penambahan di APBDP sebesar Rp 540.160.000,-, maka dari itu total Anggaran Keseluruhannya sebesar Rp. 9.227.642.375,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.413.972.948,- dengan persentasi sebesar 91.18%

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi sebagai lembaga Pelayanan Publik memiliki Fasilitas sarana dan Prasarana berupa :

- Mobil Perpustakaan Keliling 4 (Empat) Unit dan Gerobak Motor 2 (dua) unit.
- Ruang Baca anak
- Layanan Koleksi Buku Untuk Umum
- Layanan Internet
- Ruang Baca untuk Berkebutuhan Khusus (Tunanetra)
- Ruang Depo untuk kegiatan Penyimpanan Dokumen Arsip In Aktif
- Ruang Baca e-book

5) Permasalahan dan Solusi

Sebagai lembaga yang bergerak dalam jasa layanan informasi, sekaligus sebagai lembaga teknis Pemerintah Kota Jambi yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah dibidang Perpustakaan, dan Kearsipan Kota Jambi. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta mendiskripsikan permasalahan tersebut dengan tujuan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan Usulan Program dan Kegiatan pada masa berikutnya.

Sedangkan permasalahan yang mendasar di kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan belum bisa berfungsi dengan baik karena keterbatasan kesanggupan Anggaran Daerah, Untuk Bidang Pelayanan dan pengolahan arsip belum dapat berjalan secara maksimal karena tidak tersedianya tenaga Pustakawan dan Arsiparis solusinya memaksimalkan manajemen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengangkatan tenaga kontrak. Sedangkan permasalahan lain Yaitu :

Permasalahan	Solusi
Belum terpenuhinya jumlah rasio buku untuk peminjam	Membatasi Waktu Peminjaman
Belum Terpenuhi Pemberian Kartu Perpustakaan Yang standar, karena mesin pencetak kartu rusak	Mencetak kartu pustaka secara manual
Belum semua Arsip In Aktif OPD dapat terkumpul dan tersimpan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, karena belum ada PERDA dan Ruang yang layak/standar	Mengumpulkan Arsip In Aktif yang pokok dan utama yakni Arsip Aktif Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah, dan untuk OPD lainnya dikonsentrasikan pada pengumpulan Jadwal Retensi Aktif (JRA) dinamis

20. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian ini dilaksanakan oleh instansi yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi

1) Program dan Kegiatan

- a) Program Peningkatan produksi, mutu produk dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
 - (1) Kegiatan penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian.
 - (2) Kegiatan Pengembangan bibit unggul petanian/perkebunan.
 - (3) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
 - (4) Kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
 - (5) Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian.
 - (6) Kegiatan Agribisnis peternakan.
 - (7) Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
 - (8) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana peternakan dan pengelolaan informasi pasar atas hasil produk peternakan.
 - (9) Kegiatan pengembangan dan pelayanan pemotongan hewan.
 - (10) Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul.
 - (11) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan perikanan.
 - (12) Kegiatan Optimalisasi pengelola dan pemasaran produksi perikanan.
 - (13) Kegiatan pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
- b) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
 - (1) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.
 - (2) Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah.
 - (3) Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan.
 - (4) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.
 - (5) Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif.
 - (6) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan Pertanian/perkebunan.
 - (7) Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan.
 - (8) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan.
 - (9) Kegiatan Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Kota Jambi.

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi tahun 2019 belum mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga pengukuran kinerja didasarkan pada pencapaian program dan kegiatan.

3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	69	68	137
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	0	0	0
3	Pegawai Honor (Kontrak)	37	19	56
	Jumlah	106	87	193

PNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	Jml
1	Pria	1	3	15	-	-	6	-	38	4	-	67
2	Wanita	-	-	14	-	-	1	1	53	1	-	70
	Jumlah	1	3	29	-	-	7	1	91	5	-	137

Jumlah PNS Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan kehutanan Kota Jambi menurut Jenis kelamin dan Golongan Ruang

No	Golongan/Ruang	Pria	Wanita	Jumlah
1	I/a	-	-	1
2	I/b	-	-	-
3	I/c	1	-	1
4	I/d	-	-	-
5	II/a	3	-	3
6	II/b	4	-	4

7	II/c	10	2	12
8	II/d	3	1	4
9	III/a	4	1	5
10	III/b	6	8	14
11	III/c	9	16	25
12	III/d	20	23	43
No	Golongan/Ruang	Pria	Wanita	Jumlah
13	IV/a	4	6	10
14	IV/b	4	1	5
15	IV/c	1	-	1
	Jumlah	69	68	137

4) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
TOTAL BELANJA	21.072.713.184	19.605.774.866
BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.476.096.184	11.403.098.934
Belanja Pegawai	12.476.096.184	11.403.098.934
BELANJA LANGSUNG	8.596.617.000	8.202.675.932
URUSAN PERTANIAN	7.457.570.000	7.109.734.496
<i>Program pelayanan administrasi perkatoran</i>		
Penyediaan jasa surat menyurat	6.200.000	2.073.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	340.800.000	272.980.725
Penyediaan jasa administrasi keuangan	357.019.000	337.171.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.299.000	12.195.200
Penyediaan Alat Tulis Kantor	46.705.000	46.705.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	47.941.000	47.941.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.000.000	13.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-
Penyediaan makanan dan minuman	12.000.000	11.986.000

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis		
Perkantoran	465.300.000	462.770.000
Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam	348.480.000	348.480.000
Perjalanan Dinas	464.310.000	464.310.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
Pengadaan peralatan perkantoran	72.940.000	64.696.850
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	83.440.000	83.220.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	909.440.000	857.276.300
Pemeliharaan rutin/berkala alat alat kantor	32.719.000	32.719.000
Program Peningkatan disiplin aparatur		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	124.500.000	109.000.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10.000.000	9.150.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-
Program Perencanaan SKPD		
Renstra SKPD	2.540.000	2.540.000
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	2.150.000	2.150.000
Program Pengembangan Data/Informasi		
Pengembangan Data/informasi	2.100.000	2.100.000
Program peningkatan produksi, mutu produk dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan		
Penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian	94.540.000	73.894.500
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	317.360.000	316.737.000
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	844.021.000	794.954.029
Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	449.045.000	445.071.000
Penyediaan sarana produksi pertanian	152.327.000	141.914.786
Pengembangan agribisnis peternakan	178.806.000	160.501.200
Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	87.810.000	86.378.050
Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi

		Anggaran
Pengadaan sarana dan prasarana peternakan dan pengolahan informasi pasar atas hasil produk peternakan	107.125.000	79.928.000
Pengembangan dan pelayanan pemotongan hewan	184.940.000	179.340.000
Pengembangan bibit ikan unggul	1.328.737.000	1.298.025.056
Pembinaan dan pengembangan perikanan	90.400.000	86.424.000
Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	101.750.000	100.359.000
Pendampingan padaa kelompok tani pembudidaya ikan	166.826.000	163.743.800
URUSAN KETAHANAN PANGAN	1.139.047.000	1.092.941.436
Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan petani		
Peningkatan kemampuan lembaga petani	184.450.000	152.447.500
Pengembangan cadangan pangan pemerintah	104.371.000	99.866.672
Pengembangan desa mandiri pangan	140.300.000	137.625.000
Peningkatan mutu dan keamanan pangan	102.300.000	102.258.364
Penyuluhan sumber pangan alternative	163.275.000	159.275.000
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan pertanian/perkebunan	81.285.000	80.085.000
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	180.625.000	179.275.000
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	140.591.000	140.258.900
Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Kota Jambi	41.850.000	41.850.000

5) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan pembangunan pada Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi tahun 2019 mengacu pada system perencanaan dari bawah (bottom up planning) dan system perencanaan dari atas (top down planning) dilakukan melalui sebagai berikut :

- a) Rapat perencanaan bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan untuk menghimpun usulan Program dan Kegiatan dari kelompok tani di tingkat Kelurahan dan Kecamatan, hasilnya diusulkan dalam forum musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
- b) Rapat penyusunan rencana program dan kegiatan dengan mempedomani Renstra, IKU dan Restra/RKT dengan memadukan program Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Kementerian maupun lembaga/instansi

yang terkait dengan melibatkan Sekretaris, Kabid, Kasi dan UPTD yang langsung dipimpin oleh Kepala Dinas di kantor Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi.

- c) Penyampaian usulan program/kegiatan ke Bappeda Kota Jambi untuk dibahas dalam forum SKPD dan Musrengbang Kota Jambi.
- d) Pembahasan RKA (program dan kegiatan) di DPRD Kota Jambi
- e) Disetujui dan dituangkan dalam bentuk DPA

6) Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan adalah :

- Gedung kantor.
- Meja kerja.
- Kursi Kerja.
- Komputer.
- Lap Top.
- Printer.
- Kendaraan roda 2.
- Kendaraan roda 4.
- Alsintan prapanen : `Hand traktor, Traktor roda 4, pompa air dll.
- Alsintas Pasca panen : Power thresher, RMU, Paddy Mower, terpal jemur dll.

7) Permasalahan dan Solusi

Rasionalisasi Anggaran Tahun 2019.

Realisasi Pelaksanaan kegiatan rendah karena adanya Rasionalisasi Anggaran Tahun 2019 sehingga kegiatan pengembangan embung pertanian dan pengembangan irigasi perpipaan sebagian dibekukan sementara/kembali diluncurkan tahun 2019, sedangkan kegiatan kawasan aneka cabai dan kawasan sayuran lainnya batal dilaksanakan juga dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran..

21. Urusan Perindustrian Dan Perdagangan

Urusan Perindustrian ini dilaksanakan oleh instansi yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi

1) Program dan Kegiatan

Sesuai dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 dan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018, untuk program kerja pembangunan tahun 2019 di bidang perdagangan dan perindustrian diarahkan melalui :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- f) Program Penyusunan Perencanaan SKPD;
- g) Program Data/Informasi;
- h) Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Perpasaran;
- i) Program Pembinaan, Pengembangan Peningkatan dan Pengawasan Industri dan Perdagangan.

Program kerja yang ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembangunan di bidang perdagangan dan perindustrian berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- g) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- h) Kegiatan Peralatan Rumah Tangga;
- i) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- j) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

- k) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam
- l) Kegiatan Perjalanan Dinas;
- m) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;
- n) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- o) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- p) Kegiatan Pengadaan Meubeleur;
- q) Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran;
- r) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- s) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor;
- t) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
- u) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
- v) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
- w) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- x) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
- y) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaksana Operasional Perpasaran;
- z) Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Beduk;
- aa) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Operasional Perpasaran;
- bb) Kegiatan penertiban dan Pengawasan Pedagang Pasar Daerah dan PKL di Lingkungan Pasar Daerah;
- cc) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan;
- dd) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Kerajinan;
- ee) Kegiatan Ekspose Industri Kecil dan Menengah;
- ff) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kemasan IKM;
- gg) Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah;
- hh) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah;
- ii) Kegiatan Peningkatan, Pengembangan SDM Industri Kecil dan Menengah;
- jj) Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah;
- kk) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa;
- ll) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan;

- mm) Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Seminar dan Penyuluhan Perdagangan;
- nn) Kegiatan Promosi/Pameran Produk Jambi;
- oo) Kegiatan Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan;
- pp) Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian.

2) Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi belum ada SPM (Standar Pelayanan Minimal).

3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Sumber daya manusia pada instansi pemerintah harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun dasar pelaksanaannya telah diatur melalui Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun susunan kepegawaian terdiri dari :

- a) PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- b) PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Jumlah ASN pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi merupakan penggabungan pegawai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Dinas Pasar Kota Jambi dan Balai Pelayanan Kemetrolgian Propinsi Jambi, sebagai dampak dari perubahan organisasi perangkat daerah. Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019, jumlah ASN sebanyak 320 orang tetapi diakhir tahun berkurang menjadi 314 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Uraian	Jumlah Awal Tahun 2018	Jumlah Akhir Tahun 2018	Ket.
		3	4	5
1.	NS	93	87	Kurang 6 orang
2.	PPK	104	104	Tetap
3.	HL	123	123	Tetap
Total		320	314	

Jika dilihat dari data diatas maka diakhir tahun 2018 ada pengurangan pada tingkat Aparatur Sipil Negara khususnya pada PNS sebanyak 6 (enam) orang dengan rincian dimana yang dimutasi sebanyak 2 (dua) orang, yang memasuki usia pensiun

sebanyak 3 (tiga) orang dan meninggal dunia sebanyak 1 (satu) orang, tetapi pada tingkat PPPK dan PHL tidak mengalami perubahan sampai dengan akhir tahun 2019.

Apabila ditinjau dari sudut jenis kelamin Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Jenis Kelamin	PNS	PPPK	PHL	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Laki-laki	49	69	85	203
2.	Perempuan	38	35	38	111
Total		87	104	123	314

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2019 didukung dengan sumber daya manusia PNS-nya berupa pejabat struktural, pejabat fungsional dan stafnya sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

Pegawai	Posisi Per 01-01-2019	Tambah	Kurang	Posisi Per 31-12-2019
1	2	3	4	5
Pejabat Struktural	36	-	1	35
Pejabat Fungsional	14	-	1	13
Staf	43	-	4	39
Jumlah	93	-	6	87

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sedangkan untuk formasi jabatan (eselonisasi) yang terdapat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi berjumlah 37 jabatan, namun ada 2 jabatan yang belum terisi yaitu Kepala UPTD Pasar Wilayah III (pejabatnya pensiun di bulan Desember 2019) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) UPTD Rumah Kemasan yang sampai saat ini belum ditunjuk sehingga posisi eselon yang terisi sebanyak 35 jabatan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Jabatan	Jumlah		Ket.
	Formasi	Terisi	
Pejabat Eselon II	1	1	
Pejabat Eselon III	5	5	
Pejabat Eselon IV	31	29	
Jumlah	37	35	

Sementara Sumber Daya Manusia dari PNS dilihat dari sudut pangkat dan golongannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Pangkat/golongan	Awal Tahun 2019 (orang)	Akhir Tahun 2019 (orang)
1	2	3
Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1
Pembina Tk. I (IV/b)	3	3
Pembina (IV/a)	4	4
Penata Tk. I (III/d)	16	14
Penata (III/c)	12	12
Penata Muda Tk. I (III/b)	21	19
Penata Muda (III/a)	14	12
Pengatur Tk I (II/d)	1	1
Pengatur (II/c)	14	14
Pengatur Muda Tk I (II/b)	5	5
Pengatur Muda (II/a)	1	1
Juru Tk. I (I/d)	-	-
Juru (I/c)	-	-
Juru Muda Tk I (I/b)	1	1
Juru Muda (I/a)	-	-
Jumlah	93	87

Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi terutama PNS sebagai pemegang peran utama yang memiliki pengalaman, wawasan, keterampilan (skill) dan tingkat pendidikan yang memadai akan menunjang percepatan pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tingkat Pendidikan	Tahun	
	Awal 2019 (orang)	Akhir 2019 (orang)
1	2	3
Pasca Sarjana (S2)	7	7
Sarjana (S1)	44	41
D3/Sarjana Muda	2	2
SMA/Sederajat	39	36
SMP/Sederajat	-	-
SD/Sederajat	1	1
Jumlah	93	87

PPPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)

Dalam melaksanakan kinerjanya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi di bantu oleh pegawai PPPK/Non PNS dengan jumlahnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Uraian	Tahun	
	Awal 2019	Akhir 2019
1	2	3
PPPK	104 orang	104 orang

Untuk tingkat pendidikan PPPK/Non PNS yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tingkat Pendidikan	Tahun	
	Awal 2019 (orang)	Akhir 2019 (orang)
1	2	3
S-II	1	1
S-I	31	31
D3/Sarjana Muda	2	2
SMA/Sederajat	62	62
SMP/Sederajat	5	5
SD/Sederajat	3	3
Jumlah	104	104

PEGAWAI HARIAN LEPAS

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi khususnya untuk mengerjakan kebersihan pasar yang di kelola pemerintah maka dilakukan pengrekrutan pegawai harian lepas (PHL) dengan perjanjian kerja. Jumlah tenaga kerja PHL dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Uraian	Tahun	
	Awal 2019	Akhir 2019
PHL	123 orang	123 orang

Untuk tingkat pendidikan PHL yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi pada umumnya berpendidikan rendah dibawah SMA/ sederajat, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tingkat Pendidikan	Tahun	
	Awal 2019 (orang)	Akhir 2019 (orang)
1	2	3
D-III/Sederajat	3	3
SMA/Sederajat	30	29

SMP/Sederajat	36	34
SD/Sederajat	55	57
Jumlah	125	125

4) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Untuk alokasi dan realisasi anggaran belanja langsung baik per program dan per kegiatan serta nilai capaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Nama Program/Kegiatan	Alokasi Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Nilai Capaian
1	2	3	4	5	5
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.827.122.000	1.647.528.041	90,10	Tinggi
	1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.700.000	4.700.000	100	Sangat tinggi
	2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	363.000.000	245.256.320	67,56	Sedang
	3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	212.270.000	198.266.000	93,40	Sangat tinggi
	4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	123.000.000	105.945.700	86,13	Tinggi
	5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	66.390.000	66.344.300	99,93	Sangat tinggi
	6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.567.000	27.563.316	99,99	Sangat tinggi
	7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.840.000	9.838.700	99,99	Sangat tinggi
	8. Kegiatan Peralatan Rumah Tangga	5.965.000	5.659.500	99,88	Sangat tinggi
	9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	4.999.280	99,99	Sangat tinggi
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	19.040.000	18.919.600	99,37	Sangat tinggi
	11. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	287.600.000	276.140.000	96,02	Sangat tinggi
	12. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor,	106.000.000	92.800.000	87,55	Tinggi

	Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam 13. Kegiatan Perjalanan Dinas	596.750.000	590.431.243	99,05	Sangat tinggi
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 1. Pembangunan gedung kantor 2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 3. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4. Kegiatan Pengadaan Meubeleu 5. Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran 6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor 8. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	571.680.000 - - 48.200.000 9.000.000 15.500.000 412.200.000 37.280.000 49.500.000	538.140.047 - - 40.315.000 8.415.000 12.920.600 395.334.747 31.754.700 49.500.000	94,10 - - 83,64 93,50 83,36 95,91 85,18 100	Sangat tinggi - - Tinggi Sangat tinggi Tinggi Sangat tinggi Tinggi Sangat tinggi
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur : 1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	141.000.000 141.000.000	131.670.000 131.670.000	93,38 93,38	Sangat tinggi Sangat tinggi
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : 1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15.000.000 15.000.000	0 0	0 0	Sangat Rendah Sangat Rendah
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.100.000 20.100.000	20.074.000 20.074.000	99,87 99,87	Sangat tinggi Sangat tinggi
6.	Program Penyusunan	15.500.000	15.274.000	98,54	Sangat tinggi

	Perencanaan SKPD : 1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD	15.500.000	15.274.000	98,54	Sangat tinggi
7.	Program Data/Informasi 1. Kegiatan data/informasi	40.000.000	39.984.000	99,96	Sangat tinggi
		40.000.000	39.984.000	99,96	Sangat tinggi
8.	Program Peningkatan Pelayanan Kapasitas Perpasaran	5.218.609.000	4.884.051.644	93,50	Sangat tinggi
	1. Peningkatan Kapasitas Pelaksana Operasional perpasaran	381.300.000	380.866.650	99,89	Sangat tinggi
	2. Penyelenggaraan Pasar Beduk	29.115.000	28.400.500	97,55	Sangat tinggi
	3. Peningkatan Pelayanan Operasional Perpasaran	4.076.969.000	3.790.927.094	92,98	Sangat tinggi
	4. Penertiban dan Pengawasan Pedagang Pasar Daerah dan PKL di Lingkungan Pasar Daerah	731.225.000	683.857.400	93,52	Sangat tinggi
9.	Program Pembinaan, Pengembangan Peningkatan dan Pengawasan Industri dan Perdagangan :	4.528.373.800	4.447.631.976	98,20	Sangat tinggi
	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan	188.622.500	169.583.500	89,91	Tinggi
	2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Kerajinan	133.070.000	132.520.000	99,59	Sangat tinggi
	3. Kegiatan Ekspose Industri Kecil dan Menengah	1.020.410.000	1.007.505.076	98,74	Sangat tinggi
	4. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kemasan IKM	127.217.500	124.742.500	98,05	Sangat tinggi
	5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah	27.000.000	23.770.000	88,04	Tinggi
	6. Kegiatan Peningkatan, Pengembangan SDM Industri Kecil dan Menengah	25.560.000	25.650.000	100	Sangat tinggi
	7. Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Industri	23.140.000	23.140.000	100	Sangat tinggi

	Kecil dan Menengah				
8.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	287.490.000	287.440.000	99,98	Sangat tinggi
9.	Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	130.210.000	124.897.000	95,92	Sangat tinggi
10.	Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Seminar dan Penyuluhan Perdagangan	23.510.000	23.510.000	100	Sangat tinggi
11.	Kegiatan Promosi/Pameran Produk Jambi	480.000.000	468.345.800	97,57	Sangat tinggi
12.	Kegiatan Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan	1.770.664.800	1.748.650.800	98,76	Sangat tinggi
13.	Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian	291.389.000	287.877.300	98,79	Sangat tinggi
	Jumlah Anggaran	12.377.384.800	11.723.789.626	94,72	Sangat tinggi

Secara lengkap alokasi dan realisasi anggaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Alokasi	Realisasi	
			Keuangan	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.422.103.451,-	Rp. 6.374.786.078,-	85,89
2.	Belanja Langsung	Rp.12.377.384.800,-	Rp.11.723.789.626,-	94,72
	Jumlah	Rp.19.799.488.251,-	Rp.18.099.239.786,-	91,41

5) Kesesuaian Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam proses perencanaan pembangunan yang berasal dari SKPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi), pada prinsipnya menggunakan 2 (dua) cara yaitu :

1) Proses Perencanaan Pembangunan Secara Up Down

Rencana pembangunan secara up down yaitu proses perencanaan yang berasal dari internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi yang merupakan usulan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat. Kepada masing-

masing Bidang dan Sekretariat diwajibkan untuk menyusun rencana kegiatan dengan menetapkan skala prioritas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, RPJM Kota Jambi Tahun 2013-2018, Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2014-2018, Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2018. Selanjutnya usulan tersebut akan dibahas dalam rapat internal dengan melibatkan pengusul dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi. Setelah pembahasan di dalam rapat tersebut, masing-masing Bidang dan Sekretariat apabila ada usulan yang perlu perbaiki maka segera memperbaikinya dan selanjutnya usulan kegiatan yang telah disetujui secara bersama-sama dan ditanda tangani Kepala Dinas menjadi usulan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi (SKPD) untuk disampaikan ke Bappeda Kota Jambi guna dibahas dalam forum SKPD Tingkat Kota Jambi.

2) *Proses Perencanaan Pembangunan Secara Top Down*

Rencana pembangunan secara top down yaitu proses di mulai dari saran ataupun instruksi atasan agar suatu kegiatan direncanakan dan dianggarkan di SKPD, namun pada prinsipnya usulan tersebut tidak secara otomatis menjadi program/kegiatan tetapi akan dirapatkan terlebih dahulu di internal SKPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi) dan apabila memenuhi ketentuan mempedomani RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, RPJM Kota Jambi Tahun 2013-2018, Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2014-2018, Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2018 dan anggarannya mencukupi maka dapat dijadikan usulan rencana pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi.

6) **Kondisi sarana dan prasana yang digunakan**

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi antara lain :

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
1.	Toyota Kijang Inova	1 unit	1	-
2.	Daihatsu Xenia	1 unit	1	-
3.	Daihatsu Ertiga GL	3 unit	3	-
4.	Minibus UPT Kemetrologian	1 unit	1	-

5.	Pick up	1 unit	-	1
6.	Motor	15 unit	15	-

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
1.	Tanah	3,308 M2	-	-
2.	Gedung	200 M	-	-
3.	Meja 1 Biro	9 Buah	7	2
4.	Meja ½ Biro	31 Buah	12	19
5.	Meja Rapat	8 set	2	6
6.	Meja Kerja	43 Unit	14	29
7.	Kursi Kerja	140 Unit	140	-
8.	Kursi Rapat	8 Buah	8	-
9.	Kursi Tamu	1 Set	1	-
10.	Meja Komputer	6 Unit	6	-
11.	Komputer	9 Unit	9	-
12.	Laptop	9 Unit	9	-
13.	Note book	2 Unit	2	-
14.	Printer	9 Unit	9	-
15.	Warles	3 Unit	2	1
16.	AC	6 Unit	6	-
17.	Mesin Tik	8 Unit	4	4
18.	Kamera Digital	1 Unit	1	-
19.	Kulkas	1 Unit	1	-
20.	Filing Kabinet	16 Unit	14	2
21.	Brankas	3 Unit	1	2
22.	Cash Box	1 Unit	1	-
23.	Invocus	1 Unit	-	1
24.	Faximile	1 Unit	1	-
25.	Lemari Arsip	29 Unit	25	4
26.	Telepon	1 Unit	1	-
27.	Kipas Angin	4 Unit	4	-
28.	Layar OHP	1 Unit	1	-
29.	TV	2 Unit	2	-
30.	White Board	3 Buah	3	-
31.	VCD	1 Unit	1	-
32.	Stabilizer	1 Unit	1	-
33.	Alat Internet	-	-	-
34.	Power migxer	1 Unit	1	-
35.	Speaker Pasif	2 Unit	2	-
36.	Hand Spayer	1 Unit	1	-
37.	Rak Besi	73 Unit	5	68
38.	Racun Api	3 Unit	3	-
39.	Mesin Potong rumput	1 Unit	1	-
40.	Bendera Merah Putih	600 M	600 M	-
41.	Jam Dinding	6 Buah	4	2
42.	Papan Tulis	2 Buah	2	-

43.	Papan Data	3 Buah	3	-
44.	Lemari Besi	1 Unit	1	-
45.	Hiasan	2 Buah	2	-
46.	Cermin Kaca	1 Buah	1	-
47.	Gambar Pres/Wapres	2 Pasang	2	-
48.	Foto Lambang Garuda	2 Buah	2	-
49.	Piala/tropi	6 Buah	6	-
50.	Tiang Mic	2 Unit	2	-
51.	Vertikal	1 Unit	1	-
52.	Kain Hordeng Tebal	86 M	86	-
53.	Kain Hordeng tipis	153 M	153	-
54.	UPS	3 Unit	3	-
55.	Almari Buku	2 Unit	2	-
56.	Coffi Boiler	1 Unit	1	-
57.	Kursi Komputer	2 Unit	2	-
58.	Mic	4 Unit	4	-
59.	Tiang speaker	2 Unit	2	-
60.	Gordeng Kray	148 Buah	148	-
61.	Rael Besi	68 Buah	68	-
62.	Meja Kecil	1 Buah	1	-
63.	Papan white board	5 Buah	5	-
64.	Hard disk eksternal	1 Buah	1	-
65.	Hard disk internal	1 Buah	1	-
66.	Handycame	1 Buah	1	-
67.	Alat bordir	10 Buah	10	-
68.	Umbul-umbul	20 Buah	20	-
69.	Alat tera	1 Paket	1	-

7) Permasalahan dan solusi

a) Permasalahan

- (1) Penganggaran program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2019 baik yang berasal dari OPD maupun usulan masyarakat tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013-2018, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2018, belum sepenuhnya dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan sehingga terjadi sistem penganggaran yang berskala prioritas.
- (2) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan perdagangan khususnya yang menyangkut perpasaran, masih banyaknya

kekurangsadaran para pelaku usaha terutama pedagang pasar akan pentingnya menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan pasar dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga sering muncul ketidaksinkronisasian antara pedagang dengan pemerintah. Seharusnya pedagang atau pelaku usaha menyadari bahwa dalam melaksanakan usahanya tidak memakai fasilitas umum seperti jalan, trotoar, jalur hijau dan sebagainya sehingga tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat lainnya.

- (3) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan perindustrian belum semua IKM (industri kecil dan menengah) dapat mengikuti kegiatan/program yang dilaksanakan karena masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha IKM akan pentingnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti promosi, pelatihan, sosialisasi, seminar, pemagangan dan sebagainya guna menunjang usaha mereka

b) Solusi

- (1) Perencanaan penyusunan penganggaran program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi untuk lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang.
- (2) Perlu penganggaran yang lebih memadai terhadap urusan perdagangan dan perindustrian khususnya urusan perpasaran dan pengembangan IKM (industri kecil dan menengah) agar mampu mengakomodasi seluruh rencana pembangunan baik yang berasal dari OPD maupun yang berasal dari masyarakat.

B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)

1) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a) Program dan Kegiatan

Berdasarkan Visi yang akan dicapai dan misi yang harus dilaksanakan serta permasalahan-permasalahan yang diprediksi terjadi di tahun 2019 dalam bidang perencanaan maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Jambi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran yang ditargetkan program ini adalah : untuk mendukung operasional kantor sehari-hari dan pelaksanaan program-program lainnya dengan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman, Perjalanan dinas, dan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam.

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran yang ditargetkan program ini adalah : untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran operasional, melalui kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Mebeleur, Pengadaan Peralatan Perkantoran, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Sasaran yang ditargetkan program ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai di Bappeda Kota Jambi, melalui kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran yang ditargetkan program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur pegawai melalui keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi peraturan perundangan guna peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur Bappeda. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Sasaran program ini adalah untuk memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

(6) Program Perencanaan SKPD

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD untuk tersedianya dokumen Renja Bappeda Kota Jambi.

(7) Program Pengembangan data/informasi

Program ini ditargetkan untuk penyediaan data dasar yang lengkap, akurat, dan mudah diakses guna mendukung dalam penyusunan perencanaan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Data / Informasi.

(8) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Program ini terdiri atas Penyusunan dokumen Perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS), Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan, koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Ekonomi, Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosbud Dan Pemerintahan, Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Perencanaan, Koordinasi dan Survei Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

b) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat Golongan dan Ruang

No	Pangkat	Golongan	Ruang	Jumlah Pegawai
1	Juru Muda	I	A	-
2	Juru Muda Tingkat I	I	B	-
3	Juru	I	C	-
4	Juru Tingkat I	I	D	-
5	Pengatur Muda	II	A	1
6	Pengatur Muda	II	B	-
7	Pengatur	II	C	-
8	Pengatur Tingkat I	II	D	3
9	Penata Muda	III	A	1
10	Penata Muda	III	B	10
11	Penata	III	C	13
12	Penata Tingkat I	III	D	5
13	Pembina	IV	A	7
14	Pembina Tingkat I	IV	B	2
15	Pembina Utama	IV	C	-
16	Pembina Utama	IV	D	-
17	Pembina Utama	IV	E	-

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Sekolah Dasar (SD)	1
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	6
4	Diploma Tiga (D-3)	2
5	Strata Satu (S1)	21
6	Strata Dua (S2)	10
7	Starata Tiga (S3)	2
	JUMLAH	42

c) Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Urusan Wajib

No	PROGRAM	KEGIATAN	TRAGET KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)/ PERSEN (%)
1	Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun	6,300,000	6,300,000 (100%)
		Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	197,000,000	183,634,952 (93,2%)
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Tahun	326,820,000	311,720,000 (95,38%)
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Tahun	110,000,000	110,000,000 (100%)
		Penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	81,628,000	81,628,000 (100%)
		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	65,400,000	65,400,000 (100%)
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	70,000,000	70,000,000 (100%)
		Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	93,500,000	91,055,000 (97,39%)
		Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	1 Orang	13,200,000	- (0%)
		Perjalanan Dinas	1 Tahun	930,000,000	928,149,382 (99,80%)
2	Program Peningkatan	Pengadaan Kendaraan	1 unit kendaraan	295,000,000	275,400,000 (93,36%)

	Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas/Operasional	roda empat, 4 unit kendaraan roda dua		
		Pengadaan Mebeler	1 Tahun	100,000,000	94,750,000 (94,75%)
		Pengadaan peralatan kantor	100%	575,175,000	565,459,000 (98,31%)
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	65,000,000	50,000,000 (76,92%)
		Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	8 Mobil dan 16 Motor	252,720,000	241,559,900 (95,58%)
		Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	1 Tahun	174,500,000	172,205,000 (98,68%)
		Rehabilitasi sedang gedung kantor	100%	280,000,000	279,653,000 (99,88%)
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapan	65 Stel, 7 Stel dan 65 stel	72,700,000	62,250,000 (85,63%)
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	43 pegawai	40,000,000	14,825,000 (37,06%)
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	7,312,000	6,985,000 (95,53%)
6	Program Perencanaan SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	2 Dokumen	14,905,000	14,740,000 (98,89%)

7	Program Pengembangan Data / Informasi	Pengembangan data/Informasi	2 Aplikasi	347,735,000	327,135,000 (94,08%)
---	---------------------------------------	-----------------------------	------------	-------------	-------------------------

Urusan Pilihan

No	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (Rp) / PERSEN (%)
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	3 Dokumen	1,593,990,000	1,462,494,500 (91,75%)
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	2 Dokumen	406,640,000	348,760,000 (85,77%)
		Perencanaan, Koordinasi Dan Supervisi Pembangunan Bidang ekonomi	6 kali dan 3 dokumen	731,800,000	710,910,000 (97,15%)
		Perencanaan, Koordinasi Dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosbud Dan Pemerintahan	12 kali dan 2 dokumen	447,875,000	358,703,000 (80,09%)
		Perencanaan, Koordinasi Dan Supervisi Pembangunan Manusia dan Masyarakat	6 kali dan 3 dokumen	479,000,000	476,505,000 (99,48%)
		Perencanaan, koordinasi dan survei pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	1 tahun – 3 tahun – 3 kali - 4 dokumen – 1 tahun	707,800,000	563,107,500 (79,56%)

d) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa hasil dari perencanaan pembangunan terdiri dari; rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Kota Jambi dalam melaksanakan unsur perencanaan, sebelumnya telah menetapkan dokumen perencanaan jangka menengah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013–2018.

Perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan sampai Musrenbang Provinsi dengan menentukan skala prioritas berdasarkan hasil survey lapangan. Dari hasil survey lapangan tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi dengan melakukan pemaketan perencanaan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya dilakukan dengan proses pelelangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses Perencanaan Pembangunan telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD

e) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	AC Split ½ PK	42	25	12	5
2	AC Standing	5	5	-	-
3	AC Split 2 PK	45	31	8	6
4	Komputer Server	1	1	-	-
5	Komputer PC	44	40	-	4
6	Notebook	34	22	4	8
7	Printer	95	50	15	30
8	Proyektor	11	3	-	8
9	Lemari Arsip	37	30	7	-
10	Meja Kerja	125	75	30	20
11	Kursi Kerja Roda Putar	91	60	25	6
12	Gorden / Vertical Blind	19	15	2	1
13	Televisi	8	5	3	-
14	UPS	36	29	3	4
15	CPU	22	19	3	-
16	External Hardisk	18	10	8	-
17	Kamera Pengawas CCTV	1	1	-	-
18	Kamera Digital	20	8	7	5
19	Solar Panel	1	1	-	-
20	Conference System	3	3	-	-
21	Genset	2	1	-	1
22	LCD Touch Screen	4	4	-	-
23	Lemari Arsip	20	20	-	-
24	Meja Rapat	39	39	-	-
25	AC 1 PK	1	1	-	-
26	Teleprompter	1	1	-	-
27	Hardisk Server	5	5	-	-
28	Microtik	1	1	-	-
29	Kamera Foto Udara	1	1	-	-
30	Exhause Fan	14	14	-	-
31	Pompa Air	2	2	-	-
32	Kursi Tunggu	2	2	-	-
33	Lemari Kaca	1	1	-	-
34	Meja Podium	1	1	-	-
35	Seemless TV	1	1	-	-
36	Heather Water	2	2	-	-
37	Kursi Tamu	9	5	4	-
38	Locker	1	1	-	-
39	GPS	2	1	-	1

f) Permasalahan dan Solusi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bappeda Kota Jambi merupakan catatan Realisasi Program dan Kegiatan yang telah dicapai pada tahun 2017, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran Program

dansebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Jambi tahun 2013 - 2018 dapat dicapai dan dilaksanakan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2019 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

2) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

a) Program dan Kegiatan

Adapun program yang telah dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah kota Jambi Tahun Anggaran 2019 adalah 7 program yaitu 6 (enam) Program Non Urusan dan 1 (satu) Program Keuangan yaitu Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Administrasi Keuangan dan Aset Daerah, Keseluruhan Kegiatan BPKAD Tahun 2019 terdiri dari 52 (lima puluh dua) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut

Program Non Urusan

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:

- (a) Penyediaan jasa surat menyurat
- (b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- (c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
- (d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- (e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- (f) Penyediaan alat tulis kantor
- (g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- (h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- (i) Penyediaan makanan dan minuman
- (j) Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam
- (k) Perjalanan dinas

(2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:

- (a) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- (b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- (c) Pengadaan peralatan gedung kantor
- (d) Pengadaan mebeleur
- (e) Pengadaan peralatan perkantoran
- (f) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
- (g) Pemeliharaan rutin/berkala alat alat kantor

- (h) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- (3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (a) Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
- (4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- (5) Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - (b) Penyusunan laporan keuangan semesteran
- (6) Program perencanaan SKPD dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (a) Penyusunan Renstra SKPD
 - (b) Penyusunan Rencana kerja SKPD

Program Urusan –Keuangan

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
- (7) Penyusunan Analisa Standar Belanja
 - (a) Penyusunan Standar Satuan Harga
 - (b) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
 - (c) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
 - (d) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
 - (e) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - (f) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - (g) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - (h) Pengelolaan dan Pengendalian Pengeluaran Keuangan Daerah
 - (i) Operasional Majelis Pertimbangan TPTGR
 - (j) Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD
 - (k) Koordinasi Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 - (l) Pembinaan Administrasi Gaji PNSD
 - (m) Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - (n) Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
 - (o) Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan
 - (p) Penatausahaan barang milik daerah

- (q) Pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah
- (r) Pengamanan barang milik daerah
- (s) Kegiatan pengelolaan perbendaharaan dan kas umum daerah
- (t) Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- (u) Pembinaan pelaksanaan akuntansi aset SKPD

b) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan yang ada di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

(1) Gedung Kantor

Gedung kantor 2 lantai yang masih berstatus BMD milik sekretariat Daerah Kota Jambi yang menampung pegawai sebanyak 78 orang yang terdiri dari 46 Pegawai Negeri Sipil, 32 orang Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Perorangan.

(2) Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang ada di BPKAD Kota Jambi berjumlah 24 unit yang terdiri dari :

NO	KENDARAAN BADAN/OPERASIONAL	JUMLAH
1	Kendaraan Roda 4	6
2	Kendaraan Roda 2	18

(3) Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Untuk menunjang kelancaran proses pekerjaan kantor/administrasi, BPKAD Kota Jambi memiliki aset yang Perolehannya Pada APBD dan APBD Perubahan TA. 2014 sampai dengan TA. 2018

No	SPESIFIKASI BARANG	Satuan	Jumlah
	Nama/Jenis Barang		
I	PERLENGKAPAN /PERALATAN KANTOR		
1	GPS	Unit	1
2	Meteran	Unit	1
3	Brankas	Unit	3
4	Mebeleur (Rak Arsip Besi)	Unit	1
5	UPS/Stabilizer	Unit	8
6	UPS Network Management Card	Unit	2
7	Televisi	Unit	2
8	Filling Kabinet	Unit	5
9	Teralis Jendela	Unit	1
10	Mesin Absensi	Unit	1
11	AC	Unit	14

12	Papan Merk Kantor	Unit	1
13	Mesin Cetak Karcis (Perforator)	Unit	1
14	Air Conditioner (AC)	Unit	12
15	Meja Kerja Kasubbid	Unit	5
16	Meja Kerja Staf	Unit	16
17	Meja Komputer	Paket	1
18	Mesin Foto Copy	Unit	1
19	Hordeng Vertical Blind	Paket	1
20	Almari	Unit	4
21	Kulkas	Unit	3
22	Rak Piring	Unit	1
23	Mixer Power	Unit	1
24	Dual Vocal Wireless	Set	1
25	Stand Speaker Kaki 3 Sigma	Pasang	1
26	Speaker System Passive	Pasang	1
27	Speaker Portable	Set	1
28	Tripod Mic Stand	Unit	1
29	Televisi	Unit	4
30	Kursi Kerja Kaban	Unit	1
31	Kursi Kerja Sekretaris	Unit	1
32	Kursi Kerja Kabid	Unit	4
33	Kursi Kerja Kasi dan Kasubbag	Unit	13
34	Kursi Rapat	Unit	20
35	Kursi Tamu Kaban	Set	1
36	Kursi Tunggu Front Office	Unit	4
37	AC Standing	Unit	2
38	Mesin Penghancur Kertas	Unit	4
39	Tabung Pemadam Kebakaran + Kotak kaca	Unit	4
40	Layar Proyektor Otomatis LE TAEC Elektrik Screen	Set	1
41	Karpet Concorg Jumbo	Unit	2
42	Meja Kerja Staf	Unit	40
43	Meja Rapat Ruang Konsultasi	Unit	1
44	Meja Pimpinan DW	Unit	1
45	AC Split	Unit	7
46	Kamera	Unit	3
47	Handy Talky	Unit	4
48	Drone Kamera	Unit	1
49	Proyektor	Unit	1
50	UPS Rack Server	Unit	1
51	UPS Tower Server	Unit	2
52	Komputer Notebook	Unit	22

53	Printer	Unit	6
54	Komputer Tablet	Unit	7
55	Komputer PC	Unit	16
56	Hardisc Eksternal	Unit	11
57	Speaker Aktive	Unit	1
58	Printer	Unit	38
59	Komputer Server/Mainframe	Unit	5
60	Rack Server	Unit	1
61	Laptop	Unit	16
62	Scaner	Unit	1
63	Wifi Router	Unit	1
64	TP Link Wireless Coverage Up To 929 M2	Unit	1
65	Printer Dot Matrix	Unit	1
66	Scanner	Unit	2
II	BANGUNAN GEDUNG		
70	Pekerjaan Pembuatan Rumah Genset	Paket	1
71	Rehab Gedung Kantor BPKAD	Paket	1
III	INSTALASI		
72	Pekerjaan Panel ATS 60 KVA 100 A + Kabel NYY 4C X 35 mm (40 Meter)	Paket	1
VI	BAHAN PERPUSTAKAAN		
73	Buku Permendagri 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah	Buku	55
VII	ASET LAIN-LAIN		
74	Software	Unit	2
75	Kendaraan roda 4 (empat)	Unit	9
76	Kendaraan roda 2 (dua)	Unit	65

(a) Sistem Informasi

Untuk mempermudah komunikasi baik antar lembaga yang ada di Kota Jambi dengan BPKAD Kota Jambi maupun dengan pihak luar daerah, BPKAD Kota Jambi juga telah memiliki 1 (Satu) jaringan internet.

(b) Telepon

proses komunikasi dari dan menuju BPKAD Kota Jambi, BPKAD Kota Jambi tidak mempunyai jaringan telepon yang masih berstatus BMD milik sekretariat Daerah Kota Jambi.

c) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Spm)

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi bukan merupakan salah satu OPD yang menjalankan standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Pemerintah Pusat , sehingga pengukuran kinerja didasarkan pada pencapaian program dan kegiatan

d) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional.

Pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi, keadaan s/d 1 Januari 2019 berjumlah 77 (Tujuh Puluh Lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

Status Kepegawaian :

- Pegawai Negeri Sipil = 45 Orang
- Tenaga Kerja Kontrak Kontrak = 32 Orang
- Jumlah = 77 Orang**

Pegawai Menurut Jenis Kelamin

- Laki-laki= 40 Orang
- Perempuan.....= 37 Orang
- Jumlah = 77 Orang**

Pendidikan

- Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
 - S.2 / Strata 2 : 8 orang,
 - S.1 / Strata 1 : 26 orang
 - D.3 : 2 orang
 - SMA / SMEA : 9 orang
 - SMP : - orang
 - SD : - orang
- Pendidikan Tenaga Kerja Kontrak Perorangan (TKKP)
 - S.2 / Strata 2 : 1 orang
 - S.1 / Strata 1 : 16 orang
 - D.3 : 8 orang
 - SMA / SMEA : 7 orang
 - SMP : - orang
 - SD : - orang
- Jumlah serta jenjang eselon berdasarkan Struktur Organisasi adalah sebagai berikut :

• Eselon II.B	=	1 Orang
• Eselon III.A	=	1 Orang
• Eselon III.B	=	4 Orang
• Eselon IV.A	=	15 Orang
Jumlah	=	<u>21 Orang</u>

Pegawai Yang Mutasi Keluar dan Pensiun :

Selama Tahun 2019 Pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi yang pindah tugas keluar (Instansi lain) dan yang memasuki masa Pensiun / Meninggal adalah :

Pensiun / Meninggal	:	0 Orang
Mutasi keluar	:	
- Gol. IV/b	:	- Orang
- Gol. IV/a	:	- Orang
- Gol III/d	:	2 Orang
- Gol III/c	:	- Orang
- Gol III/b	:	- Orang
- Gol III/a	:	- Orang
Gol II/d	:	- Orang
- Gol II/c	:	- Orang
Jumlah	:	<u>- Orang</u>

Pegawai yang masuk :

Pegawai yang masuk / pindah tugas ke Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi selama tahun 2018 adalah :

- Gol .IV/b	:	- Orang
- Gol. IV/a	:	- Orang
- Gol. III/d	:	- Orang
- Gol. III/c	:	2 Orang
- Gol. III/b	:	- Orang
- Gol. III/a	:	- Orang
- Gol. II/c	:	1 Orang
- Gol. II / b	:	- Orang +
Jumlah	=	<u>3 Orang</u>

e) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Masih kurangnya tenaga teknis di tingkat pelaksana/staf;
- (b) Belum memadainya sarana dan prasarana kerja;
- (c) Belum optimalnya penerapan teknologi sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan,
- (d) Belum optimalnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

(2) Solusi

- (a) Tersedianya sumber daya manusia yang memadai salah satunya dengan mengikuti pelatihan dan Bimbingan Teknis sesuai dengan tupoksi masing-masing.
- (b) Adanya dukungan dana yang memadai.
- (c) Adanya dukungan Pemerintah Daerah.
- (d) Tersedianya peraturan perundang – undangan dibidang Pengelolaan dan aset daerah dan adanya koordinasi antar Instansi yang terjalin baik dalam mengefektifkan pengelolaan dan aset daerah

3) BKPSDMD

a) Program

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- (2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- (6) Program Perencanaan SKPD
- (7) Program Data/ Informasi
- (8) Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

b) Kegiatan

Untuk melaksanakan program tersebut di atas dan guna mencapai tujuan dan sasaran perlu ditetapkan kegiatan tahunan dan kegiatan tahun 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- (1) Penyediaan jasa surat menyurat
- (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

- (3) Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
- (4) Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
- (5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- (6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- (7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- (8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung Kantor
- (9) Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- (10) Penyediaan Makanan dan Minuman
- (11) Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti, Penjaga Malam dan Administrasi
- (12) Perjalanan Dinas
- (13) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- (14) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- (15) Pengadaan mebeleur
- (16) Pengadaan Peralatan Perkantoran
- (17) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
- (18) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- (19) Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat kantor
- (20) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- (21) Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya
- (22) Pengadaan khusus hari-hari tertentu
- (23) Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- (24) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- (25) Penyusunan Renstra SKPD
- (26) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
- (27) Pengembangan Data/ Informasi
- (28) Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Tugas dan Fungsi bagi Daerah
- (29) Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
- (30) Pendidikan dan Pelatihan Pengkaderan Formal
- (31) Pelayanan dan Pembinaan CPNS, PNS dan Tenaga Kontrak
- (32) Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat terhadap Kinerja Aparatur
- (33) Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Pemberian Penghargaan Satyalencana Karya Satya dan Masa Kerja Pegawai serta Pemantauan Evaluasi SKP
- (34) Penyusunan Laporan Pajak-pajak Pribadi PNS
- (35) Penyusunan Rencana PembinaanKarier PNS

(36) Pembinaan KORPRI dan Kesejahteraan Pegawai

c) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah Kota Jambi bukan merupakan salah satu OPD yang menjalankan standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Pemerintah Pusat , sehingga pengukuran kinerja didasarkan pada pencapaian program dan kegiatan

d) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Pegawai	Posisi per 1/1/2019	Tambah	Kurang	Posisi per 31/12/2019
Pejabat Struktural	21 orang	-	-	21 orang
Staf	29 orang	-	-	29 orang
Pegawai Administrasi	-	-	-	-
Jumlah	50 orang	-	-	50 orang

e) Alokasi Dan Realisasi Anggaran

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	BELANJA LANGSUNG			
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.			
1	Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat.	5,400,000	5,400,000	100%
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik.	203,500,000	111,447,732	55%
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Ops.	25,000,000	8,058,100	32%
4	Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi keuangan.	203,300,000	188,400,000	93%
5	Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantor.	82,600,000	80,180,000	97%
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	107,031,000	106,527,900	100%
7	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	30,000,000	29,725,000	99%
8	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Kantor.	6,000,000	6,000,000	100%
9	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-UU	5,000,000	1,851,500	37%
10	Kegiatan Makanan dan Minuman.	35,000,000	25,798,580	74%
11	Kegiatan Penyediaan Jasa pengamanan Kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam.	101,640,000	100,430,000	99%
12	Kegiatan Perjalanan Dinas.	689,045,000	686,068,760	100%
B	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	51,000,000	44,422,500	87%
2	Kegiatan Pengadaan perlengkapan Gedung kantor.	20,000,000	19,778,000	99%
3	Kegiatan Pengadaan Mebelur.	19,332,000	19,113,678	99%
4	Kegiatan Peralatan Perkantoran.	85,800,000	73,841,100	86%
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	32,000,000	31,955,000	100%
6	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	239,800,000	195,389,700	81%
7	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor.	50,000,000	20,599,624	41%
8	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.	41,000,000	40,800,000	100%
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.			
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta	10,000,000	6,000,000	60%
2	Pakaian Khusus hari hari tertentu	25,000,000	25,000,000	100%

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.			
1	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per UU.	30,000,000	9,650,000	32%
E	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.			
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	1,700,000	1,551,000	91%
F	Program Perencanaan SKPD			
1	Kegiatan Penyusunan Renstra Kerja SKPD.	4,425,000	900,000	20%
2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1,700,000	1,671,000	
G	Program Data / Informasi.			
1	Kegiatan Penembangan Data/Informasi.	275,768,000	243,866,500	88%
H	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.			
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi Daerah.	411,553,000	284,818,200	69%
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS	1,283,060,000	1,069,509,950	83%
3	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengkaderan Formal.	425,000,000	234,375,000	55%
4	Kegiatan Pelayanan dan Pembinaan CPNS, PNS dan Tenaga Kontrak.	90,490,000	89,850,000	99%
5	Kegiatan Pelayanan dan pengaduan masyarakat terhadap kinerja aparatur.	600,000	451,400	75%
6	Kegiatan Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS dan Pemberian penghargaan Satyalencana Karya Satya dan Masa Kerja Pegawai serta Pemantauan evaluasi SKP.	265,380,000	198,874,000	75%
7	Kegiatan Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS.			
8	Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS.	30,399,000	25,824,000	85%
9	Kegiatan Pembinaan Korpri dan Kesejahteraan Pegawai	174,842,500	141,854,000	81%
JUMLAH		5,062,365,500	4,129,982,224	81.58%

f) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa hasil dari perencanaan pembangunan terdiri dari; rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Kota Jambi dalam melaksanakan unsur perencanaan, sebelumnya telah menetapkan dokumen perencanaan jangka menengah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013–2018.

Perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan sampai Musrenbang Provinsi dengan menentukan skala prioritas berdasarkan hasil survey lapangan. Dari hasil survey lapangan tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi dengan melakukan pemaketan perencanaan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya dilakukan dengan proses pelelangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses Perencanaan Pembangunan telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD

g) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi Tahun 2019 ada mengalami penambahan Gedung, barang inventaris yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi, dan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi, sebagai berikut :

NO	Nama Barang	Merk/Type	Unit	Harga (Rp)
				Satuan
1	2	3	4	5
1.	Gedung Kantor	-	1	3.766.602.500
2.	Kendaraan Roda 4	Toyota, Avanza Veloz Luxury	1	198.650.000
3.	Almari Perpustakaan	-	5	1.960.000
4.	Lemari 4 Pintu	-	1	5.000.000
5.	Podium	-	1	2.157.450
6.	Meja kerja 1 biro	DONATI DOT 2	3	6.400.000
7.	Meja kerja 1 biro (L)	DONATI DOT 1	1	7.160.000
8.	Meja kerja 1 biro	ACTIVE	5	1.872.500
9.	Meja Rapat	UNO UOD 8078	12	1.800.000
10.	Kursi Lipat Nikel	Chitose	40	328.000
11.	Kursi Sandaran Tinggi	INDACHI D-960	7	1.054.955
12.	Kursi Sandaran Rendah	INDACHI D-990M	20	871.970
13.	Kursi Manager	DONATI DO 13	6	2.200.000
14.	Kursi Rapat Pakai Tangan	Wonderfull	36	1.144.000
15.	Kursi Rapat	Chitose Caesar	100	468.000
16.	Rak Arsip Besi	-	5	968.000
17.	Rak Sound System	-	1	6.950.000
18.	Rak Buku 2 sisi	-	2	3.343.000
19.	Kursi Tamu Ruang Kepala	IMPRESA	1	11.770.000
20.	Kursi Tamu Ruang Sekretaris	HORISON	1	7.999.200
21.	Kursi Tamu Ruang Kabid	CAMERON	4	6.649.500
22.	Almari Kaca	-	1	4.000.000
23.	Tabung Pemadam Kebakaran	GUNNEBO	4	1.910.920
24.	AC 2 PK	LG S18 LGS	4	7.499.800
25.	AC 1 PK	PANASONIC CS- KC9QKJ	19	5.199.700
26.	AC ½ PK	PANASONIC CS- XC5QKJ	2	4.799.300
27.	PC Komputer lengkap	-	1	9.800.000
28.	Laptop	ACER	2	9.199.960
29.	Printer	BROTHER MFC- J200	5	2.400.000
30.	Printer	BROTHER DJP- J100	5	1.800.000
31.	CD/DVD Room	SAMSUNG DVD-	1	475.000

32.	Hard Disk Eksternal	RW SE-208 TOSHIBA	5	730.000
33.	Kamera	CANON EOS 700D	1	9.867.000
34.	HandyCam	SONY HDR-PJ230	1	7.000.000
35.	Wireless	DAT 8900 ROCKY	1	4.048.000
36.	Speaker Pasif	JBL RM-101	1	8.100.000
37.	Mixer	YAMAHA MGP 16X	1	9.000.000
38.	Power Amplifier	PEAVEY CS 3000	1	6.120.000
39.	Mic Meja Wireless	KREZT MC-8U	1	4.620.000
40.	Tiang Mic	-	2	280.000
41.	Braket Speaker Gantung	BMB	2	220.000
42.	Kabel	-	1	1.339.000
43.	Tangga	KRISBOW	1	2.000.000
44.	AC 2 PK	PANASONIC	6	7.500.000
45.	PC Komputer lengkap	-	2	9.740.500

h) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Untuk mewujudkan good governance dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi, pada tahun 2019 telah diupayakan untuk dituangkan pada program kerja. Dalam pelaksanaan program kerja berdasarkan pengukuran, pencapaian sasaran berjalan baik. Sehingga hal ini dapat mendorong terwujudnya kinerja instansi yang akuntabel, efektif dan efisien..

Solusi :

Kegiatan-kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah di Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan seefektif, ekonomis dan seefisien mungkin untuk mencapai sasaran. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan kekuatan dalam perencanaan program pada tahun yang akan datang dan untuk kegiatan yang belum mencapai 100 % diupayakan untuk lebih ditingkatkan.

4) INSPEKTORAT

a) Program dan Kegiatan

Program Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan kebijakan strategis. Program Strategis merupakan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan Kebijakan Strategis.

Adapun Program Kerja Inspektorat Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- a) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c) Peningkatan Disiplin Aparatur;

- d) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan;
- f) Perencanaan SKPD;
- g) Pengembangan Data/Informasi
- h) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2019 untuk mewujudkan program-program kerja yang telah dirumuskan pada Inspektorat Kota Jambi dan telah terealisasi sebagai berikut :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- (3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- (4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- (5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- (6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- (7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- (8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- (9) Penyediaan Makanan dan Minuman
- (10) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam
- (11) Perjalanan Dinas

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- (1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- (2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- (3) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- (1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- (2) Penilaian Angka Kredit

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- (1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- (2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

f) Program Perencanaan SKPD

- (1) Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

g) Program Pengembangan Data/Informasi

- (1) Pengembangan Data/Informasi

h) Program Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- (1) Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Internal
 (2) Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemda
 (3) Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif
 (4) Evaluasi LAKIP dan Review Laporan Keuangan Pemerintah
 (5) Pengendalian Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
 (6) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
 (7) Evaluasi dan Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi

b) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Kondisi kepegawaian pada Inspektorat Kota Jambi dalam Tahun 2019 berdasarkan eselonering, kepangkatan dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut

No.	Jabatan	Jumlah	Ket.
1.	Eselon II	1	
2.	Eselon III	5	
3.	Eselon IV	3	
4.	Fungsional Auditor	16	
5.	Fungsional P2UPD	17	
6.	Pelaksana	14	
J u m l a h		56	

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (org)	Ket.
1	IV	21	
2	III	34	
3	II	1	
J u m l a h		56	

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket.
1.	Pasca Sarjana	8	
2.	Sarjana	43	
3.	Sarjana Muda	2	

4.	SLTA	2	
5.	SLTP	-	
6.	SD	1	
J u m l a h		56	

c) Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kota Jambi, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi. Total Anggaran Inspektorat Kota Jambi adalah sebesar Rp.11.962.639.323,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.11.156.638.229,00 dengan demikian terdapat silpa sebesar Rp.806.001.094,00. Hal ini merupakan penghematan penggunaan anggaran.

Struktur Belanja Inspektorat sebesar Rp 8.448.823.532,00 terdiri dari :

- 1) Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.569.339.323,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.108.371.445,00 (96,34%);
- 2) Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.5.393.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.048.266.784,00 (93,60%).

d) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa hasil dari perencanaan pembangunan terdiri dari; rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Kota Jambi dalam melaksanakan unsur perencanaan, sebelumnya telah menetapkan dokumen perencanaan jangka menengah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013–2018.

Perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan sampai Musrenbang Provinsi dengan menentukan skala prioritas berdasarkan hasil survey lapangan. Dari hasil survey lapangan tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi dengan melakukan pemaketan perencanaan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya dilakukan dengan proses pelelangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses Perencanaan Pembangunan telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD

e) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Pada tahun 2019, pengadaan sarana dan prasarana pada Kantor Inspektorat Kota Jambi sebesar Rp. 69.685.500,- yang merupakan peralatan Kantor. Secara keseluruhan nilai aset yang dikuasi oleh Inspektorat Kota Jambi sampai dengan 31 Desember 2017 adalah Rp. 8.364.209.950,-, sedangkan jumlah aset yang tidak digunakan adalah Rp. 324.729.016,-

5) SEKRETARIAT DPRD

a) Program dan Kegiatan

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kota Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hanya melaksanakan satu bidang urusan wajib yaitu bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, yang dimplementasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan, yaitu ;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan, yaitu ;
 - a. Penyediaan Jasa surat menyurat.
 - b. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - c. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
 - d. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional.
 - e. Penyediaan Jasa administrasi keuangan.
 - f. Penyediaan kebersihan kantor
 - g. Penyediaan alat tulis kantor.
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - k. Penyediaan makanan dan minuman.
 - l. Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam.
 - m. Perjalanan Dinas.

(1) Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur.

- (a) Pengadaan Perlengkapan gedung kantor.
- (b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- (c) Pengadaan Mebeleur.
- (d) Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor.

- (e) Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan,
- (f) Pemeliharaan rutin, Berkala kendaraan dinas/operasional,
- (g) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor,
- (h) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor,

(2) Program peningkatan Displin Aparatur.

(3) Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.

(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- (2) Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD,

(5) Program Perencanaan SKPD

- a) Penyusunan Rencana Strategis SKPD.
- b) Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

(6) Program Pengembangan Data Informasi

- (a) Penyusunan Rencana Kerja SKPD,

(7) Program Peningkatan kapasitas Lembaga perwakilan Rakyat Daerah.

- (a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (b) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.
- (c) Rapat-rapat Paripurna.
- (d) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan.
- (e) Kegiatan reses dan kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah.
- (f) Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

(8) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD

- (a) Pembahasan Rancangan peraturan daerah.
- (b) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.
- (c) Rapat-rapat paripurna.
- (d) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
- (e) Reses dan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah.
- (f) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyebarluasan informasi kegiatan DPRD.

b) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Organisasi Sekretariat DPRD Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi, nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD Kota Jambi, yang mempunyai tugas dan fungsinya adalah untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengorganisasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris DPRD Kota Jambi sebagaimana diatur didalam Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2016, adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dalam rangka mendukung DPRD menjalankan fungsi dan wewenang serta tugasnya.

Pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD adalah pelayanan berupa dukungan administratif kepada DPRD dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang dewan yang dijabarkan dalam 4 kegiatan, yaitu ;

- (1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- (2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- (3) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.

Kelompok sasaran yang akan diberikan pelayanan oleh Sekretariat DPRD adalah lembaga DPRD yang diwujudkan oleh seluruh anggota DPRD, dengan memfasilitasi semua kebutuhannya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari DPRD.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Jambi terdiri dari empat bagian dan masing-masing bagian ada tiga sub bagian;

- (a) Bagian Umum, terdiri dari ;
 - Sub. Bagian Tata Usaha.
 - Sub. Bagian Rumah Tangga.
 - Sub. Bagian Perlengkapan.
- (b) Bagian Hukum dan Persidangan, terdiri dari ;
 - Sub. Bagian Produk Hukum.
 - Sub. Bagian Persidangan dan Rapat-rapat.
 - Sub. Bagian Kehumasan dan Protokol.
- (c) Bagian Keuangan, terdiri dari ;
 - Sub. Bagian Perencanaan dan Anggaran.
 - Sub. Bagian Verifikasi.
 - Sub. Bagian Penatausahaan Keuangan.
- (d) Bagian Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari ;
 - Sub. Bagian Fasilitasi Fungsi Anggaran DPRD.
 - Sub. Bagian Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD.

- Sub. Bagian Fasilitas Aspirasi Masyarakat.

No	Tingkat Eselon	Jumlah	Nama Jabatan
1.	Eselon II/b	1 Orang	Sekretaris DPRD
2.	Eselon III/a	4 Orang	Kepala Bagian
3.	Eselon IV/a	12 Orang	Kepala Sub Bagian

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Pendidikan Strata 2	4 orang	
2.	Pendidikan Strata 1	25 orang	
3.	Pendidikan D3	1 orang	
4.	SLTA	11 orang	

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV/b	4 Orang	
2.	Golongan IV/a	3 Orang	
3.	Golongan III/d	6 Orang	
4.	Golongan III/c	9 Orang	
5.	Golongan III/b	9 Orang	
6.	Golongan III/a	4 Orang	
7.	Golongan II/d	1 Orang	
8.	Golongan II/c	2 Orang	
9.	Golongan II/b	3 Orang	
10.	Tenaga Kerja Kontrak	154 Orang	
	Jumlah	195 Orang	

c) Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Sekretariat DPRD Kota Jambi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 37.363.490.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.857.163.688,- atau 93.29 % dalam rangka untuk membiayai seluruh program dan kegiatan pada APBD tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

a) Program pelayanan Adminitrasi Perkantoran.

- (1) Penyediaan jasa surat-menyurat,
 - (a) Alokasi anggaran untuk kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat sebesar Rp. 175.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 166.050.000,- atau sebesar 94.67 % dan realisasi fisiknya 66.67 %.
 - (b) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik,
Alokasi anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, sebesar Rp. 676.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 559.591.751,- atau sebesar 82.87 % dan realisasi fisiknya 80 %.
- (2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
Alokasi anggaran untuk kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, sebesar Rp. 70.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.366.900,- atau sebesar 41.95 % dan realisasi fisiknya 100 %.
- (3) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
Alokasi anggaran untuk kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, sebesar Rp. 273.456.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 261.748.000,- atau sebesar 95.72 % dan realisasi fisiknya 50 %.
- (4) Penyediaan Jasa Kebersihan kantor,
Alokasi anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, sebesar Rp. 483.575.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 468.173.443,- atau sebesar 96.82 % dan realisasi fisiknya 66.67 %.
- (5) Penyediaan Alat Tulis Kantor,
Alokasi anggaran kegiatan penyediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 246.017.490,- atau sebesar 98.44 % dan realisasi fisiknya 100 %.
- (6) Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan,
Alokasi anggaran kegiatan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan adalah sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 194.553.400,- atau sebesar 97.28 % dan realisasi fisiknya 100 %.
- (7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
Alokasi anggaran kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor adalah sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.943.750,- atau sebesar 99.86 % dan realisasi fisiknya 100 %.
- (8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Alokasi anggaran penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp.

300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 299.928.400,- atau sebesar 99.98 % dan realisasi fisiknya 100 %.

(9) Penyediaan makanan dan minuman.

Alokasi anggaran kegiatan penyediaan makanan dan minuman harian anggota dewan, tamu dan lain-lain, dengan jumlah dana sebesar Rp. 295.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 162.875.845,- atau sebesar 55.21 % dan realisasi fisiknya 100 %.

(10) Penyediaan Jasa Pengamanan kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam ;

Alokasi dana untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam dengan jumlah dana sebesar Rp. 536.600.000,- dan realisasi keuangannya Rp.524.924.506,- atau sebesar 97.82 % dan realisasi fisiknya 60 %.

(11) Perjalanan Dinas,

Alokasi anggaran kegiatan perjalanan dinas, dengan dana sebesar Rp. 2.975.969.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.962.410.000,- atau sebesar 99.54 % dan realisasi fisiknya 100 %.

b) Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur.

Pencapaian masing-masing kegiatan, adalah sebagai berikut ;

(1) Pengadaan Kendaraan dinas /operasional,

Alokasi anggaran kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional, yaitu sebesar Rp. 467.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 454.216.050,- atau sebesar 97.26 % dan realisasi fisiknya 100 %.

(2) Pengadaan Perlengkapan gedung kantor.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, yaitu sebesar Rp. 280.984.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 277.268.000,- atau sebesar 98.68 % dan realisasi fisiknya 94 %.

(3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, yaitu sebesar Rp. 225.025.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 202.969.520,- atau sebesar 90.20 % dan realisasi fisiknya 88 %.

(4) Pembangunan Gudang Kantor,

Alokasi anggaran untuk kegiatan Pembangunan Gudang Kantor, yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 199.612.000,- atau sebesar 97.23 % dan realisasi fisiknya 100 %.

- (5) Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor.
Alokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 58.005.000,- atau sebesar 58.01 % dan realisasi fisiknya 75 %.
- (6) Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan,
lokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan pimpinan DPRD, yaitu sebesar Rp. 258.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 251.539.245,- atau sebesar 97.23 % dan realisasi fisiknya 80 %.
- (7) Pemeliharaan rutin, Berkala kendaraan dinas/operasional,
Alokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional DPRD, yaitu sebesar Rp. 407.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 355.355.151,- atau sebesar 87.27 % dan realisasi fisiknya 100 %.
- (8) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor,
Alokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, yaitu sebesar Rp. 230.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 202.534.900,- atau sebesar 88.02 % dan realisasi fisiknya 100 %.
- (9) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor,
Alokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor, yaitu sebesar Rp. 21.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.885.000,- atau sebesar 80.40 % dan realisasi fisiknya 100 %.
- (10) Rehab sedang/berat gedung kantor,
Alokasi anggaran untuk kegiatan rehab sedang/berat gedung kantor, yaitu sebesar Rp. 245.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 244.144.190,- atau sebesar 99.65 % dan realisasi fisiknya 100 %.

c) Program peningkatan Displin Aparatur.

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya,
Alokasi anggaran untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya, yaitu sebesar Rp. 62.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.974.000,- atau sebesar 98.68 % dan realisasi fisiknya 100 %

d) Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- (1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan,
Alokasi anggaran untuk kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar Rp. 38.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.500.000,- atau sebesar 48.68 % dan realisasi fisiknya 66.67 %.

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- (1) Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD,
Alokasi anggaran untuk kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD, yaitu sebesar Rp. 33.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.800.000,- atau sebesar 96.36 % dan realisasi fisiknya 60 %.

f) Program Perencanaan SKPD.

- (1) Penyusunan Rencana Kerja SKPD,
Alokasi anggaran untuk kegiatan penyusunan Rencana Kerja SKPD, yaitu sebesar Rp. 50.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.250.000,- atau sebesar 97.33 % dan realisasi fisiknya 60 %.

(g) Program Peningkatan kapasitas Lembaga perwakilan Rakyat Daerah.

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
Alokasi anggaran untuk kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah, yaitu sebesar Rp. 4.550.950.00,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.985.268.912,- atau sebesar 87.57 % dan realisasi fisiknya 75.56 %.
- (2) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.
Alokasi anggaran untuk kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan, yaitu sebesar Rp. 3.735.271.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.361.309.227,- atau sebesar 89.99 % dan realisasi fisiknya 90 %
- (3) Rapat-rapat Paripurna.
Alokasi anggaran untuk kegiatan rapat-rapat paripurna, yaitu sebesar Rp. 2.594.175.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.404.461.373,- atau sebesar 92.69 % dan realisasi fisiknya 84.29 %.
- (4) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan.
anggota dewan, yaitu sebesar Rp. 15.069.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.589.527.181,- atau sebesar 96.81 % dan realisasi fisiknya 77.14 %.
- (5) Kegiatan reses dan kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah.
Alokasi anggaran untuk kegiatan reses dan kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah, yaitu sebesar Rp. 915.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 649.341.264,- atau sebesar 70.96 % dan realisasi fisiknya 80 %.
- (6) Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar Rp. 775.560.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 732.400.000,- atau sebesar 94.43 % dan realisasi fisiknya 84 %.

(h) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD

(1) Penerimaan kunjungan kerja pejabat luar negara/lembaga pemerintahan/non lembaga pemerintahan

Alokasi anggaran untuk kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat luar negara/lembaga pemerintahan/non lembaga pemerintahan, yaitu sebesar Rp. 243.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 216.059.190,- atau sebesar 88.77 % dan realisasi fisiknya 100 %.

(2) Pengadaan pakaian dinas Anggota Dewan beserta perlengkapan

Alokasi anggaran untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas Anggota Dewan beserta perlengkapan, yaitu sebesar Rp. 330.015.000,-

d) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa hasil dari perencanaan pembangunan terdiri dari; rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Kota Jambi dalam melaksanakan unsur perencanaan, sebelumnya telah menetapkan dokumen perencanaan jangka menengah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013–2018.

Perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan sampai Musrenbang Provinsi dengan menentukan sekala prioritas berdasarkan hasil survey lapangan. Dari hasil survey lapangan tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi dengan melakukan pemaketan perencanaan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya dilakukan dengan proses pelelangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses Perencanaan Pembangunan telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD

e) Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan rutin dan urusan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, pada Sekretariat DPRD Kota Jambi tahun 2018 dapat dilaksanakan sesuai dengan target output yang telah ditetapkan.

6) BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

a) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja BPPRD Kota Jambi dalam **RPJMD 2013-2018** yaitu pencapaian target pendapatan daerah maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- (a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- (b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- (c) Penyedi
- (d) aan Jasa Administrasi Keuangan
- (e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
- (f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- (g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- (h) Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan
- (i) Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
- (j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- (k) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran atau teknis
- (l) Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam
- (m) Perjalanan Dinas
- (n) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- (a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- (b) Pengadaan Meubelur
- (c) Pengadaan Peralatan Perkantoran
- (d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- (e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor
- (f) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- (g) Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
- (h) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- (a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- (b) Pengadaan mesin dan kartu absensi

- (4) Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur**
 - (a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan
- (5) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - (a) Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - (b) Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah
 - (c) Monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah
 - (d) Evaluasi penerimaan Pajak Daerah
- (6) Program Perencanaan SKPD**
 - (a) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
 - (b) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
- (7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - (a) Penyusunan rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi
 - (b) Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - (c) Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB
 - (d) Penataan data pajak dan retribusi daerah
 - (e) Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah
 - (f) Pengendalian pajak daerah
 - (g) Penyusunan sistem informasi pajak daerah
 - (h) Pelaksanaan pemungutan PBB dan BPHTB
 - (i) Validasi data pajak daerah.
- (8) Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.**
 - (1) Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - (2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB
 - (3) Penataan data pajak dan retribusi daerah
 - (4) Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah
 - (5) Pengendalian pajak daerah
 - (6) Pelaksanaan Pemungutan PBB dan BPHTB
 - (7) Penyusunan Sisten Informasi Pajak Daerah
 - (8) Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
 - (9) Penagihan Pajak Daerah
 - (10) Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah

b) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah Kota Jambi bukan merupakan salah satu OPD yang menjalankan standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Pemerintah Pusat , sehingga pengukuran kinerja didasarkan pada pencapaian program dan kegiatan

c) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

NO	Uraian Kepegawaian			Jumlah (Orang)	
I	Jenis kepegawaian				
		PNS		65	
		Tenaga Kontrak SKPD		53	
II	Jenis Kelamin				
		1. Laki-laki		69	
		2. Perempuan		49	
III	Jenjang Kepangkatan				
		Golongan IV/c		1	
		Golongan IV/b		1	
		Golongan IV/a		1	
		Golongan III/d		10	
		Golongan III/c		14	
		Golongan III/b		15	
		Golongan III/a		3	
		Golongan II/d		4	
		Golongan II/c		10	
		Golongan II/b		5	
		Golongan I/a		1	
	IV	Jenjang Eselon			
		Eselon II		1	
		Eselon III/a		1	
		Eselon III/b		4	
	Eselon IV		15		
V	Jenjang Pendidikan				
			PNS	Non PNS	Jumlah
		Strata 2	7	1	8
		Strata 1	33	17	50
		Diploma 3	7	11	18
		Diploma 1	2	-	2
		SLTA	15	24	39
	SD	1	-	1	

d) Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Target Capaian Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp Rp. 223.030.000.000,-** (Dua ratus dua puluh tiga milyar tiga

puluh juta rupiah), pada APBD Perubahan tahun 2019 menjadi sebesar **Rp. 242.120.000.000,-** (Dua ratus empat puluh dua milyar seratus dua puluh juta rupiah).

Sedangkan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada akhir tahun 2019 mencapai 105,76% yaitu sebesar **Rp 256.051.925.688,55** (Dua ratus lima puluh enam milyar lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh lima sen).

URAIAN	TARGET		REALISASI (Rp)	%
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
	(Rp)	(Rp)		
1. Pajak Daerah	223.000.000.000,00	242.090.000.000,00	256.028.625.688,55	105,76%
2. Retribusi Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	23.300.000,00	77,67%
3. Lain-lain PAD yang Sah	1.448.407.502,00	1.448.407.502,00	1.621.871.396,00	111,98%
JUMLAH	224.478.407.502,00	243.568.407.502,00	257.673.797.084,55	105,79%

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kota Jambi yang melaksanakan tugas sebagai Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi untuk TA. 2018 meliputi 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah dan 1 (satu) jenis Retribusi Daerah. Dari masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut terdiri dari beberapa kelompok penerimaan yang dapat dirinci dengan sebutan atau nama penerimaan masing-masing sebagai berikut :

NO	URAIAN PENERIMAAN	TARGET		REALISASI	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	PAJAK DAERAH				
01	Pajak Hotel	11.000.000.000,00	14.235.000.000,00	17.621.003.070,00	123,79%
	1. Bintang Lima	800.000.000,00	1.800.000.000,00	2.758.099.790,00	153,23%
	2. Bintang Empat	2.700.000.000,00	3.700.000.000,00	5.605.117.422,00	151,49%
	3. Bintang Tiga	2.750.000.000,00	3.050.000.000,00	3.268.801.606,00	107,17%
	4. Bintang Dua	2.200.000.000,00	2.850.000.000,00	3.070.531.935,00	107,74%
	5. Bintang Satu	400.000.000,00	400.000.000,00	444.496.293,00	111,12%
	6. Melati Tiga	1.400.000.000,00	1.500.000.000,00	1.619.629.034,00	107,98%
	7. Melati Dua	400.000.000,00	490.000.000,00	393.837.174,00	80,37%

	8. Melati Satu	200.000.000,00	215.000.000,00	204.972.526,00	95,34%
	9. Rumah Kost	150.000.000,00	230.000.000,00	255.517.290,00	111,09%
02	Pajak Restoran	31.500.000.000,00	43.910.000.000,00	54.912.667.777,00	125,06%
	1. Restoran	20.000.000.000,00	27.000.000.000,00	34.386.040.516,00	127,36%
	2. Rumah Makan	4.600.000.000,00	7.600.000.000,00	9.093.530.860,00	119,65%
	3. Cafe	2.900.000.000,00	3.750.000.000,00	4.109.365.430,00	109,58%
	4. Kantin/ Wr Kopi	3.300.000.000,00	4.800.000.000,00	6.400.882.547,00	133,35%
	5. Catering	500.000.000,00	500.000.000,00	691.992.060,00	138,40%
	6. Bar	200.000.000,00	260.000.000,00	230.856.364,00	88,79%
				-	
03	Pajak Hiburan	14.000.000.000,00	16.085.000.000,00	17.048.380.884,00	105,99%
	1. Tontonan Film/ Bioskop	8.000.000.000,00	8.500.000.000,00	8.463.326.671,00	99,57%
	2. Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/ Busana	36.000.000,00	36.000.000,00	36.980.500,00	102,72%
	3. Diskotik	160.000.000,00	160.000.000,00	202.602.933,00	126,63%
	4. Karaoke	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	1.870.881.317,00	73,37%
	5. Club Malam (Pub)	400.000.000,00	450.000.000,00	446.390.933,00	99,20%
	6. Sirkus / Akrobat/ Sulap	12.000.000,00	12.000.000,00	11.673.501,00	97,28%
	7. Permainan Bilyar	75.000.000,00	75.000.000,00	45.686.804,00	60,92%
	8. Balap Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00%
	9. Permainan Ketangkasan	1.450.000.000,00	2.950.000.000,00	4.347.979.531,00	147,39%
	10. Panti Pijat/ Refleksi	600.000.000,00	600.000.000,00	1.005.320.113,00	167,55%
	11. Mandi Uap / SPA	450.000.000,00	450.000.000,00	399.802.973,00	88,85%
	12. Pusat Kebugaran/ Fitnes	230.000.000,00	230.000.000,00	177.613.520,00	77,22%
	13. Pertandingan Olahraga	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00%
	14. Kolam Renang	-	25.000.000,00	40.122.088,00	0,00%
	15. Kolam Pemancingan	-	10.000.000,00	-	0,00%

04	Pajak Reklame	10.000.000.000,00	10.850.000.000,00	12.383.626.667,00	114,13%
	1. Papan/ Bill Board/ Videotron/ Megatron	7.250.000.000,00	7.750.000.000,00	9.284.971.651,00	119,81%
	2. Kain	900.000.000,00	900.000.000,00	813.142.760,00	90,35%
	3. Melekat/ Stiker	5.000.000,00	5.000.000,00	6.947.280,00	138,95%
	4. Selebaran	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00%
	5. Berjalan	200.000.000,00	200.000.000,00	106.848.315,00	53,42%
	6. Udara	10.000.000,00	10.000.000,00	7.086.960,00	70,87%
	7. Peragaan		10.000.000,00	20.411.943,00	204,12%
	8. Neon Box	1.630.000.000,00	1.970.000.000,00	2.144.217.758,00	108,84%
05	Pajak Penerangan Jalan	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	67.670.776.012,00	104,11%
	1. Pajak Penerangan Jalan	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	67.670.776.012,00	104,11%
06	Pajak Parkir	5.000.000.000,00	5.500.000.000,00	6.318.752.789,00	114,89%
	1. Pajak Parkir	5.000.000.000,00	5.500.000.000,00	6.318.752.789,00	114,89%
07	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00	173.908.868,00	69,56%
	1. Pajak Air Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00	173.908.868,00	69,56%
08	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	
	1. Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	
09	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	10.000.000,00	1.000.000,00	
	1. Tanah		10.000.000,00	1.000.000,00	
	2. Batu-Batuan		-	-	
	3. Pasir		-	-	
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	31.250.000.000,00	31.250.000.000,00	24.773.341.590,00	79,27%
	1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	31.250.000.000,00	31.250.000.000,00	24.773.341.590,00	79,27%
11	BPHTB	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	55.125.168.031,55	100,23%
	1. BPHTB	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	55.125.168.031,55	100,23%
	JUMLAH PAJAK DAERAH	223.000.000.000,00	242.090.000.000,00	256.028.625.688,55	105,76%
	Retribusi Pemak. Kekay. Milik Pemerintah Daerah				
	- Sewa Tanah	-	-	-	
	- Sewa Panggung Billboard	30.000.000,00	30.000.000,00	23.300.000,00	77,67%
	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	30.000.000,00	30.000.000,00	23.300.000,00	77,67%

	Pendapatan Denda Pajak	1.448.407.502,00	1.448.407.502,00	1.621.871.396,00	111,98%
01	- Hotel	58.141.438,00	58.141.438,00	133.501.260,00	229,61%
02	- Restoran	69.542.648,00	69.542.648,00	166.424.988,00	239,31%
03	- Hiburan	43.576.642,00	43.576.642,00	53.406.749,00	122,56%
04	- Reklame	263.562.367,00	263.562.367,00	84.157.732,00	31,93%
05	- Penerangan	-	-	-	-
06	- Mineral Bukan Logam	34.400,00	34.400,00	-	-
07	- Parkir	10.588.036,00	10.588.036,00	5.720.316,00	54,03%
08	- Air Tanah	2.961.971,00	2.961.971,00	1.363.331,00	46,03%
09	- PBB	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.177.297.020,00	117,73%
	JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH	1.448.407.502,00	1.448.407.502,00	1.621.871.396,00	111,98%
	JUMLAH SELURUH PENERIMAAN	224.478.407.502,00	243.568.407.502,00	257.673.797.084,55	105,79%

e) Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa hasil dari perencanaan pembangunan terdiri dari; rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Kota Jambi dalam melaksanakan unsur perencanaan, sebelumnya telah menetapkan dokumen perencanaan jangka menengah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013–2018.

Perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan sampai Musrenbang Provinsi dengan menentukan skala prioritas berdasarkan hasil survey lapangan. Dari hasil survey lapangan tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi dengan melakukan pemaketan perencanaan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya dilakukan dengan proses pelelangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses Perencanaan Pembangunan telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD

7) DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA JAMBI

1) Program dan Kegiatan

No.	Nama Program / Nama Kegiatan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ; Terdiri dari Kegiatan :
	01 Penyediaan jasa surat menyurat
	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

	04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
	05 Penyediaan jasa administrasi keuangan
	06 Penyediaan jasa kebersihan kantor
	07 Penyediaan alat tulis kantor
	08 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	09 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor
	10 Penyediaan peralatan rumah tangga
	11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	12 Penyediaan makanan dan minuman
	13 Kegiatan Perjalanan Dinas
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Terdiri dari Kegiatan :
	01 Pengadaan pembangunan gedung kantor
	02 Pengadaan kendaraan dinas
	03 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
	04 Pengadaan peralatan gedung kantor
	05 Pengadaan meubeleur
	06 Pengadaan peralatan perkantoran
	07 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	08 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
	09 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur ; Terdiri dari Kegiatan :
	01 Pengadaan mesin/kartu absensi
	02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
	03 Pengadaan pakaian kerja lapangan
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; Terdiri dari Kegiatan :
	01 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
5	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terdiri dari Kegiatan :
	01 Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6	Program Perencanaan SKPD

	01 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
7	Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan Bahaya Kebakaran; Terdiri dari Kegiatan :
	01 Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual kebencanaan
	02 Bimbingan teknis, diklat dan sosialisasi penanganan bencana
	03 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
	04 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
	05 Pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan
	06 Pengadaan logistik mitigasi bencana
	07 Pencegahan dan pengendalian kebencanaan
	08 Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana
	09 Peningkatan dan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran
	10 Kemitraan asuransi jiwa dan kesehatan satuan tugas kebencanaan
	11 Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela penanggulangan bencana
	12 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan kebencanaan
	13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Kinerja pelayanan BPB dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Indikator Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/kota yang sudah menjadi target nasional .

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU
		INDIKATOR	NILAI	
1	Penanggulangan Bencana Kebakaran	a) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	80%	2017
		2. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time)	75%	2017
		3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standart Kualifikasi	85%	2017
		4. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK (waktu manajemen kebakaran)	90%	2017

Dari table Standart Pelayanan Nasional yang merupakan target yang ditetapkan secara nasional dikembangkan dalam program kerja dan kegiatan

Kegiatan untuk Pencapaian Standart Pelayanan Nasional.

Jenis Pelayanan Dasar Skala Provinsi	Indikator SPM	Langkah Kegiatan	Kegiatan
Bencana Kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kota	a. Pemetaan potensi ancaman bencana bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipeologi kebakaran (mitigasi) b. Penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan kepada masyarakat dan dunia usaha c. Simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha d. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran e. Pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran f. Pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi g. Operasi administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran h. Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan dunia usaha i. Inspeksi peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran j. Investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1. Kegiatan penyuluhan 2. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan 3. Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung 4. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 5. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 6. Pengadaan pakaian kerja lapangan
	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate)	a. Melakukan inventarisasi potensi dari bahaya kebakaran b. Melakukan inventarisasi data kasus kebakaran yang terjadi dalam jangka WMK c. Melakukan identifikasi sarana dan prasarana pada daerah rawan kebakaran d. Melakukan pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK) e. Melakukan kesiapsiagaan satgas damkar f. Pengadaan alat-alat komunikasi g. Mengadakan pelatihan simulasi rutin teknis operasi bagi satgas pemadam h. Melakukan simulasi standar operasional prosedur koordinasi i. Penyediaan dana tak terduga siap pakai untuk tanggap darurat bencana	1. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 2. Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bahaya kebakaran 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pembangunan gedung kantor
	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	a. Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 1 b. Melakukan Pelatihan Pemadam kebakaran 2 c. Melakukan pelatihan pemadam kebakaran 3 d. Melakukan pelatihan inspektur muda, madya dan utama e. Melakukan pelatihan instruktur muda dan madya f. Melakukan pelatihan penyuluh muda dan	1. Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 3. Pendidikan dan

		<p>madya</p> <p>g. Melakukan pelatihan investigator muda dan madya</p> <p>h. Melakukan pelatihan operator mobil dan montir mobil</p> <p>i. Melakukan pelatihan caraka operator komunikasi</p>	pelatihan formal
	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	<p>a. Pengadaan mobil pemadam kebakaran, mesin pompa dan peralatan resque lainnya</p> <p>b. Penyediaan garasi dan bengkel mobil pemadam kebakaran, mesin pompa dan peralatan reque lainnya</p> <p>c. Pengadaan tenaga operator dan caraka mobil pemadam kebakaran</p>	<p>1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional</p> <p>2. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran</p>

3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah personil di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi sebanyak 222 orang yang terdiri 85 orang PNS dan 137 orang tenaga kerja kontrak. Dari jumlah personil sebanyak 222 orang tersebut, 16 orang adalah pejabat struktural, 40 orang pelaksana administrasi dan 29 orang anggota pemadam kebakaran. Selain pegawai juga terdapat relawan satuan tugas penanggulangan bencana yang berjumlah 137 orang.

Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	85	38,29 %
2.	Tenaga Kerja Kontrak	137	61,71 %
	JUMLAH	222	100 %

4) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Kegiatan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dibiayai melalui anggaran Belanja Langsung dan Anggaran Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari APBD Kota Jambi.

Distribusi dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

No.	Jenis Anggaran	Sumber Dana	Jumlah
1.	Belanja Langsung	APBD	Rp. 8.964.500.000,00

2.	Belanja Tidak Langsung	APBD	Rp. 6.414.653.462,00
JUMLAH			Rp. 15.376.153.462,00

Penggunaan dana-dana ini di implementasikan dalam kegiatan rutin Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Pengendalian terhadap program dan keuangan dilakukan sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya in efisiensi dan in efektifitas dalam penggunaan dana.

Realisasi penggunaan dana pada kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan pada TA. 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Realisasi Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2019
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

No	Jenis Anggaran	Sumber Dana	Jumlah Anggaran Rupiah,-	Realisasi		Sisa Rupiah,-	Ket
				Rupiah,-	%		
1.	Belanja Langsung	APBD	8.964.500.000,-	8.392.273.022,-	93,62	572.226.978,-	
2.	Belanja Tidak Langsung	APBD	6.414.653.462,-	5.634.066.907,-	87,83	780.586.555,-	

5) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi telah tersedia Sarana dan Prasarana seperti yang terlihat pada tabel-tabel berikut ini :

Sarana Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran, Fire Truck dan Jumlah Personil Satuan Tugas Siaga Tahun 2019

No.	Lokasi Posyankar	Fasilitas Pendukung			Ket.
		Armada	Total Satgas	Satgas Siaga	
1.	Markas Komando Damkar	8 unit	82 Orang	27 Orang/Hari	4 FT Baik, 1 Rusak, 1 Supply
2.	Posyankar Jambi Selatan	1 unit	20 Orang	6 Orang/Hari	1 FT Baik

3.	Posyankar Jambi Kota Seberang	1 unit	20 Orang	6 Orang/Hari	1 FT Baik
4.	Posyankar Jambi Timur	1 Unit	20 Orang	6 Orang/Hari	1 FT Baik
5.	Posyankar Kota Baru	1 unit	20 Orang	6 Orang/Hari	1 FT Baik
6.	Posyankar Pelayangan	- unit	- Orang	- Orang/Hari	Pondasi dan Lantai

Rasio Normal :

1 Posyankar = 2 Fire Truck 12 Personil Siaga

Mobil Operasional Utama Pemadaman Kebakaran Kota Jambi

Tahun 2019

No	Kendaraan Operasional	Merk	Jumlah		Keterangan
1	Mobil Tangga/Hydraulic	-	-	-	
2	Mobil Resque	Ford	1	Unit	Bantuan BNPB Tahun 2014
3	Mobil Pompa/ Fire Truck	ISUZU	1	Unit	Keluaran Tahun 1977
4	Fire Truck 10.000 Liter	FUSO	1	Unit	Keluaran Tahun 1978/ Rusak Berat
5	Fire Truck 10.000 Liter	ISUZU	1	Unit	Keluaran Tahun 1983/ Rusak Berat
6	Fire Truck 5.000 Liter	Mercy 1917	1	Unit	Keluaran Tahun 1995/ Rusak Berat
7	Fire Truck 5.000 Liter	Mercy	1	Unit	Keluaran Tahun 1996
8	Fire Truck 10.000 Liter	Mitsubishi FUSO 190/ PS	1	Unit	Keluaran Tahun 2003
9	Fire Truck 5.000 Liter	ISUZU	2	Unit	Keluaran Tahun 2004
10	Fire Truck 10.000 Liter	Mitsibisi Fuso	1	Unit	Keluaran Tahun 2006
11	Fire Truck 5000 Liter	Isuzu	1	Unit	Hibah Provinsi Tahun 20011
12	Fire Truck 3000 Liter	Hino Dutro	1	Unit	Keluaran Tahun 2012
13	Fire Truck 3000 Liter	Hino Dutro	2	Unit	Pengadaan Tahun 2014
14	Gerobak Motor Pemadam	VIAR	1	Unit	Pengadaan Tahun 2014
15	Fire Truck 4000 Liter	Hino Doble Kabin	1	Unit	Pengadaan 2016
16	Fire Truck 4000 Liter	Matra	1	Unit	APBD Pem. Prov. Jambi Tahun 2017
TOTAL			18	Unit	

endaraan Pendukung Operasional Pemadaman Kebakaran Tahun 2019

No	Kendaraan Pendukung Operasional	Merk	Jumlah		Keterangan
1	Mobil Komando	Isuzu Fanther	1	Unit	Keluaran Tahun 2006

2	Mobil Patroli	Toyota Kijang	1	Unit	Keluaran Tahun 2006
3	Sekretaris	Kijang Inova	1	Unit	Keluaran Tahun 2008
4	Mobil Angkut Pasukan	Isuzu ELF/Mini Bus	1	Unit	Keluaran Tahun 2007
5	Speed Boat	Jhonson	1	Unit	25 K/HP (Rusak)
6	Escortee / Motor Patroli	Happy Motor	2	Unit	Keluaran Tahun 2008
7	Mobil Kaban	Mitshubishi Strada Triton	1	Unit	Keluaran Tahun 2013
8	Mobil Dapur Umum	Isuzu	1	Unit	Bantuan BNPB 2014
9	Mobil Dalmas	Isuzu	1	Unit	Tahun 2012
10	Sepeda Motor Dinas	Honda Star	2	Unit	Keluaran Tahun 1994
11	Sepeda Motor Dinas	Yamaha MX	5	Unit	Keluaran Tahun 2013
12	Sepeda Motor Dinas	Yamaha MX	5	Unit	Pengadaan Tahun 2014
13	Perahu Karet	Colombus	1	Unit	Hibah Provinsi 2012
14	Perahu Karet	Colombus	2	Unit	Pengadaan 2014
15	Perahu Karet	Colombus	2	Unit	Bantuan BNPB 2014
16	Mesin Tempel Perahu	Suzuki	1	Unit	25 PK (Pengadaan 2014)
17	Mobil double cabin	Mitsubishi	1	Unit	Keluaran tahun 2013
18	Mobil Logistik	Mitsubishi PS	1	Unit	Keluaran Tahun 2013
19.	Chinsaw Kayu		2	Unit	Pengadaan Tahun 2013
20.	Pemecah Beton		2	Unit	Pengadaan Tahun 2013
21.	Pemotong Besi		2	Unit	Pengadaan Tahun 2013
22	Mobil Dapur Umum	Hino Dutro	1	Unit	Bantuan BNPB 2014
23	Motor Trill	Kawasaki	2	Unit	Bantuan BNPB 2014
24	Motor Trill	Kawasaki	2	Unit	Bantuan BNPB 2015
24	Chinsaw		2	Unit	Bantuan BNPB 2014
25	Gengset		1	Unit	Bantuan BNPB 2014
26	Senter		5	Unit	Bantuan BNPB 2014

Sarana Pompa Pemadaman Kebakaran Tahun 2019

No	Kendaraan Pendukung Operasional	Merk	Jumlah		Keterangan
1	Pompa Fortable	Tohatso	2	Unit	Tahun 2004
2	Ploto Pump	Waterous	3	Unit	Keluaran tahun 2007
3	Pompa Fortable	Waterrous	1	Unit	Pengadaan Tahun 2014
TOTAL			6	Unit	

Sarana Proteksi Diri Personil Pemadaman Kebakaran dan Pendukung Lainnya

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KET
1	Breathing apparatus	7 unit	
2	Baju tahan api	7 unit	
3	Baju tahan Panas	60 unit	
4	Helmet Pasukan	60 Buah	
5	Sepatu pengaman Boots	60 Buah	
6	Kapak Personil	15 pasang	
7	Peralatan Outbond	1 Set	
8	Tangga rool	2 buah	
9	Bimatic Protecta Resque	2 buah	
10	Jaket Tahan Panas	25 buah	
11	Pesawat Righ/HT	3 buah/42 buah	
12	Pesawat telepon No.113 dan 41171	2 buah	

Sarana Peralatan Perbengkelan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamata Kota Jambi 2019

NO	Jenis	Type	Banyaknya	Ket
1	Refilling Fire Extinguisher + termo		1 buah	
2	Rapper Ropes		1 rool	
3	APK jinjing		3 tabung	
4	Kunci pipa		1 buah	
5	Kunci Inggris		1 buah	
6	Kunci ring		1 set	
7	Kunci Pas		1 set	
8	Tool box 2 step		1 set	
9	Kompresor		1 Unit	
10	Mesin Las		1 Unit	
11	Dongkrak		3 Unit	
12	Stang stell		2 Unit	
13	Cas Aki		1 Unit	
14	Las Listrik		1 Unit	
15	Bor Mesin		1Unit	

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut secara umum adalah :

- (1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur serta sarana prasarana,
- (2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
Permasalahan ini dikarenakan : (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, (2) Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif. (3) Keterbatasan alokasi anggaran dari APBD.
- (3) Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar/instansi pemerintah pusat, antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota, dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi dinasi, kemasyarakatan, media massa dan masyarakat.

b) Solusi

Sebagai solusi atas berbagai permasalahan tersebut, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi perlu mengoptimalkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan sehingga upaya penanggulangan bencana secara komprehensif dan sistematis dapat terpadu dengan kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan RT/RW, Kota Jambi yang memiliki kawasan rawan bencana diantaranya kawasan rawan kebakaran. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi dalam menyelenggarakan proses pemadaman, terutama kegiatan dalam menyelenggarakan proses pemadaman, terutama kegiatan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan berupa pengurangan resiko bencana. Sehingga tantangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi untuk membuat secara lengkap dan detail analisis resiko bencana dan peta rawan bencana termasuk bencana alam, non alam dan sosial.

8) BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KOTA JAMBI

a) Program dan Kegiatan

a) Program dan Kegiatan

- peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan
- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Penilaian aparatur teladan/ berprestasi
- Pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan

- Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

b) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Jambi belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal

c) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Sampai dengan akhir Desember 2019 jumlah pegawai pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Jambi mempunyai personil sebanyak 8 orang yang seluruhnya adalah pegawai negeri sipil (PNS) dengan komposisi sebagai berikut :

- (1) 1 (satu) orang Kepala Bagian;
- (2) 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian;
- (3) 4 (empat) orang staf.

Dengan klasifikasi golongan :

Sedangkan untuk eselonering Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Jambi dengan komposisi sebagai berikut :

- (1) Eselon IIIa : 1 (satu) orang;
- (2) Eselon IVa : 3 (tiga) orang.

d) Alokasi Dan Realisasi Anggaran

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Alokasi Anggaran Rp. 201.000.000,-

Realisasi Rp. 177.485.700

- c) Penilaian aparatur teladan/ berprestasi

Alokasi Anggaran Rp. 166.714.000

Realisasi Rp. 160.168.500

- d) Pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan

Alokasi Anggaran Rp. 537.286.000

Realisasi Rp. 496.701.900

- e) Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan

Alokasi Anggaran Rp. 100.000.000

Realisasi Rp. 93.656.300

- f) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

Alokasi Anggaran Rp. 7.840.000.000

Realisasi Rp. 6.674.362.850

e) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa hasil dari perencanaan pembangunan terdiri dari; rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Kota Jambi dalam melaksanakan unsur perencanaan, sebelumnya telah menetapkan dokumen perencanaan jangka menengah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013–2018.

Perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan sampai Musrenbang Provinsi dengan menentukan skala prioritas berdasarkan hasil survey lapangan. Dari hasil survey lapangan tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi dengan melakukan pemaketan perencanaan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya dilakukan dengan proses pelelangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses Perencanaan Pembangunan telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD

f) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembangunan, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Jambi melaksanakan tugas-tugas rutin di salah satu ruangan pada Gedung Sekretariat Daerah Kota Jambi yang terdiri dari 4 (empat) bilik dengan luas keseluruhan $4 \times 16 \text{ m} = 64 \text{ m}^2$.

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2016, sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Jambi yaitu terdiri dari :

- (1) Komputer sebanyak 4 (empat) unit;
- (2) *Note Book* sebanyak 6 (enam) unit;
- (3) Meja 1 Biro 1 (satu) unit;
- (4) Meja $\frac{1}{2}$ Biro 4 (empat) unit;
- (5) Meja $\frac{1}{2}$ Biro 12 (dua belas) unit;
- (6) *Filling Cabinet* 5 (lima) unit;
- (7) Kamera 2 (satu) unit
- (8) Printer 2 (dua) unit;
- (9) Kendaraan Roda empat sebanyak 1 (satu) unit;
- (10) Kendaraan roda dua sebanyak 4 (empat) unit;

- (11) Lemari arsip 5 (lima) buah;
- (12) *Air Conditioner* sebanyak 4 (empat) buah

g) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan :

- (a) Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung kegiatan.
- (b) Kurangnya kualitas sumber daya manusia

(2) Solusi :

- (a) Perlu perbaikan ruang kerja Bagian Pemerintahan Umum agar representatif dalam melaksanakan tugas sehari-hari
- (b) Dengan mengikutsertakan pegawai pada kegiatan bimbingan teknis

9) BAGIAN KERJASAMA SETDA KOTA JAMBI

a) Program dan Kegiatan

Program Nasional Yang Dilaksanakan Sesuai APBD

Tahun 2019 Kota Jambi sebagai berikut ini:

NO	NAMA URUSAN	JUMLAH PROGRAM NASIONAL	PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL			
			NO	NAMA PROGRAM NASIONAL	NAMA PROGRAM KERJA SKPD	SKPD PELAKSANA
1.	Kerjasama	1		Program Peningkatan Kerjasama Daerah	1. Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Jambi

b) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal

c) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai yang ada di Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Jambi untuk tahun 2019 sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 (lima) orang Non Pegawai Negeri Sipil (PNS), adapun data pegawai Bagian Kerjasama Sekretariat Kota Jambi adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	PENDIDIKAN	NIP/PANGKAT	JABATAN	STATUS PEGA WAI
1	2	3	4	5	6
1.	MARIANI YANTI, Ph.D	S3	19730303 199803 2 006 Pembina TK.I	Kepala Bagian	PNS
2.	AHMAD NAZMI, SS., MM	S2	19720616 200003 1 006 Pembina	Kasubbag Kerjasama Dalam Negeri	PNS
3.	MAYA HERLINDA, SH	S1	19720212 200312 2 003 Penata Tk. I	Kasubbag Evaluasi dan Pengendalian	PNS
4.	RIO GABRIEL SIMAMORA, S.KOM	S1	19860426 201001 1 004 Penata Muda Tk. I	Kasubbag Kerjasama Luar Negeri	PNS
5.	DAHLAN KADIR, SE	S1	19620104 198101 1 001 Penata Tk. I	Staf Pelaksana	PNS
6.	INDAH SULISTYORINI, SH	S1	19790414 200501 2 014 Penata Tk. I	Staf Pelaksana	PNS
7.	YASNIDAR	SLTA	19670308 199002 2 002 Penata	Staf Pelaksana	PNS
8.	NENNY WINDA PUTR, SE	S1	19790825 200901 2 011 Penata Muda Tk. I	Staf Pelaksana	PNS
9.	YENI KURNIATI. H, SE	S1	19820329 200801 2 002 Penata Muda Tk. I	Staf Pelaksana	PNS
10.	ROSTIATI	SI	19750214 200312 2 004 Penata Muda	Staf Pelaksana	PNS

NO	NAMA	PENDIDIKAN	NIP/PANGKAT	JABATAN	STATUS PEGAWAI
1	2	3	4	5	6
1.	MOVENDRA KARIZAL, S.Pd	S1	-	Staf Pelaksana	Non PNS

DATA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS) BAGIAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI

2.	SENDI ANDRIANO, SH	S1	-	Staf Pelaksana	Non PNS
3.	GUSRIO VERMANA SAXTI, S.Kom	S1	-	Staf Pelaksana	Non PNS
4.	BAGUS IMAN SATRIO WIBOWO, S.Pd	S1	-	Staf Pelaksana	Non PNS
5.	RADEN ACHMADA YANFARAS	SLTA	-	Staf Pelaksana	Non PNS

a) Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran belanja untuk masing-masing urusan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

NO	URUSAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	Kerjasama	500.000.000,-	456.173.667,-

b) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa hasil dari perencanaan pembangunan terdiri dari; rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Kota Jambi dalam melaksanakan unsur perencanaan, sebelumnya telah menetapkan dokumen perencanaan jangka menengah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013–2018.

Perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan sampai Musrenbang Provinsi dengan menentukan skala prioritas berdasarkan hasil survey lapangan. Dari hasil survey lapangan tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi dengan melakukan pemaketan perencanaan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya dilakukan dengan proses pelelangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses Perencanaan Pembangunan telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD

c) Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran belanja untuk masing-masing urusan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

NO	URUSAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	Kerjasama	500.000.000,-	456.173.667,-

d) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa hasil dari perencanaan pembangunan terdiri dari; rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Kota Jambi dalam melaksanakan unsur perencanaan, sebelumnya telah menetapkan dokumen perencanaan jangka menengah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013–2018.

Perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan sampai Musrenbang Provinsi dengan menentukan skala prioritas berdasarkan hasil survey lapangan. Dari hasil survey lapangan tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi dengan melakukan pemaketan perencanaan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya dilakukan dengan proses pelelangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses Perencanaan Pembangunan telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD

e) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Prasarana kantor yang terdapat di Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Jambi, terdiri dari :

- a) Lemari Arsip
- b) Filling Cabinet

- c) Laptop
- d) Printer
- e) Note Book
- f) Projector
- g) Layar Proyektor
- h) Komputer
- i) Kamera
- j) Meja Kerja 1 ½ Biro
- k) Meja Kerja 1 Biro
- l) Meja Kerja ½ Biro
- m) Meja Rapat
- n) Kursi Rapat
- o) Kursi Kerja
- p) Kursi Futura
- q) AC
- r) Papan Tulis

Adapun sarana yang terdapat di Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Jambi adalah:

- a) Kendaraan Roda 4
- b) Kendaraan Roda 2

10) BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA JAMBI

a) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Setda Kota Jambi dalam RPJMD 2018-2023 yaitu pencapaian target pendapatan daerah maka program- program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
2. Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik
 - a. Penataan sistem ketatalaksanaan pemerintah daerah
 - b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

3. Program Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan
 - a. Roadmap reformasi birokrasi pemerintah daerah
 - b. Aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (AD-PPK)
 - c. Penataan kelembagaan perangkat daerah
 - d. Penataan instrumen analisis jabatan PNS
4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

b) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bagian Organisasi Setda Kota Jambi belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal

c) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi pada tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) orang dan Tenaga Kerja Kontrak sebanyak 2 (dua) yang terdiri dari :

- (1) Pegawai Negeri Sipil : 8 Orang
- (2) Pegawai Honorer : 2 Orang

Dilihat dari jumlah keangkatan dan golongan, pendidikan dan Eselonering sebagai berikut :

- (1) Menurut Pangkat
 - (a) 1 orang Pembina Tk.I (IV/b)
 - (b) 2 orang Penata (III/c)
 - (c) 3 orang Penata Muda Tk.I (III/b)
 - (d) 2 orang pengatur (II/c)
- (2) Menurut Pendidikan
 - (a) 2 orang berpendidikan terakhir Sarjana Strata 2 (S.2)
 - (b) 4 orang berpendidikan terakhir Sarjana Strata 1 (S.1)
 - (c) 2 orang berpendidikan terakhir SLTA
- (3) Menurut Eselonering
 - (a) 1 orang Eselon III.a
 - (b) 3 orang Eselon IV.a

(c) 4 orang Jabatan Fungsional Umum

d) Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan	Sisa Dana	REALISASI	
					KEUANGAN (%)	FISIK (%)
4.00.4.00.01.02.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	226.000.000,-	224.141.770,-	1.858.230,-	99,18 %	100 %
4.00.4.00.01.02.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	23.721.000,-	23.721.000,-	-	100 %	100 %
4.00.4.00.01.02.08.01	Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD	5.050.000,-	2.950.000,-	2.100.000	58,42 %	66,67 %
4.00.01.4.00.01.02.33.10	Penataan Sistem Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	228.241.000,-	223.755.425,-	4.485.575,-	98,03 %	100 %
4.00.01.4.00.01.02.33.11	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	182.900.000,-	170.955.500,-	11.944.500,-	93,47 %	93,75 %
4.00.01.4.00.01.02.34.04	Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	44.770.000,-	36.885.000,-	7.885.000,-	82,39 %	88,89 %
4.00.01.4.00.01.02.34.05	Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK)	24.085.000,-	19.084.000,-	5.001.000,-	79,24 %	85,71 %
4.00.01.4.00.01.02.34.06	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	36.078.000,-	31.078.000,-	5.000.000,-	86,14 %	87,93 %
4.00.01.4.00.01.02.34.07	Penataan Instrumen Analisis Jabatan PNS	281.500.000,-	176.043.250,-	105.456.750,-	62,54 %	100 %
J U M L A H		Rp 1.052.345.000,-	Rp 908.613.945,-	Rp 143.731.055,-		

e) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa hasil dari perencanaan pembangunan terdiri dari; rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Kota Jambi dalam melaksanakan unsur perencanaan, sebelumnya telah menetapkan dokumen perencanaan jangka menengah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013–2018.

Perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan sampai Musrenbang Provinsi dengan menentukan skala prioritas berdasarkan hasil survey lapangan. Dari hasil survey lapangan

tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi dengan melakukan pemaketan perencanaan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya dilakukan dengan proses pelelangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses Perencanaan Pembangunan telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD

f) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang ada di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi yaitu sebagai berikut :

- (1) Kendaraan dinas operasional yang terdiri dari:
 - (a) 1 (satu) unit kendaraan roda empat
 - (b) 5 (lima) unit kendaraan roda dua
- (2) 6 (enam) unit Komputer (PC)
- (3) 8 (delapan) unit Komputer *notebook*
- (4) 3 (tiga) buah external hard disk
- (5) 6 (enam) unit printer
- (6) 2 (dua) unit kamera digital
- (7) 1 (satu) unit faximili
- (8) 1 (satu) unit kulkas

(11) BAGIAN HUKUM SETDA KOTA JAMBI

a) Program dan Kegiatan

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- (1) Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
- (3) Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

b) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

NO	URAIAN	JENJANG PENDIDIKAN				
		SD	SMP	SMA	S1	S2
1.	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi	-	-	2	6	2
	Jumlah :	-	-	2	6	2

NO	URAIAN	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1.	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi	-	1	8	1
	Jumlah :	-	1	8	1

NO	URAIAN	ESELON						FUN GSIO NAL	STAF
		IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV A	IV B		
1	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi	-	-	1	-	3	-	-	4
	Jumlah :	-	-	1	-	3	-	-	4

Alokasi Dan Realisasi Anggaran

a) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- (1) Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan.

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 725.163.600,- (tujuh ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Dari alokasi dana tersebut realisasi fisik kegiatan ini tercapai sebesar 77,55% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 441.167.600,- (Empat ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau 76,01%.

(2) Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 329.600.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Dari alokasi dana tersebut realisasi fisik kegiatan ini tercapai sebesar 96,68% (sembilan puluh enam koma enam puluh delapan persen) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 280.331.000,- (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

(3) Kegiatan Fasilitas Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 734.536.400,- (Tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah). Dari alokasi dana tersebut realisasi fisik kegiatan ini tercapai sebesar 89,33 % (Delapan puluh sembilan koma tiga puluh tiga persen) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 577.446.400,- (Lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau 78,61 % (Tujuh puluh delapan koma enam puluh satu persen).

NO	URUSAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	Hukum	1.576.000.000	1.287.312.500

c) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

(1) Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD Di Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi terdapat 3 dokumen perencanaan pembangunan diantaranya yaitu Rencana Strategik (Renstra) Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2013 – 2018, Rencana Kerja Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Hukum Setda Kota Tahun 2017.

(2) Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD.

Program Renja Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 1 program yaitu Program program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah.

(3) Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD.

Mengenai program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi yaitu sebanyak 1 program dan program dalam RKA Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi juga sebanyak 1 program. Adapun Program tersebut adalah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- (1) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang- undangan
- (2) Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
- (3) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

(4) Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran.

Program Renja Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi yang diakomodir dalam DPA Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi yaitu sebanyak 1 program dan program dalam DPA Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi juga sebanyak 1 program. Adapun Program tersebut adalah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah. yang dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan, Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan, Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan.

d) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Adapun sarana kantor yang terdapat pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Jambi, terdiri dari :

Meja rapat oval	Kursi stenlis busa merah	Komputer
Meja tulis	Kursi tamu	Meja komputer
Meja rapat	Papan tulis	Printer Laser / Inkject
Kursi putar tangan	Pesawat telepon	Power bank/UPS
Kursi putar tanpa tangan	AC	Stavol
Laptop	LCD / Proyektor dan Layar	Kipas angin gantung
Filling cabinet	Lemari kaca	Lemari besi
Lemari kayu	Lemari arsip	

Adapun prasarana kantor yang terdapat pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Jambi, terdiri dari :

- (1) Kendaraan Roda Empat :1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia BH. 115 AZ
- (2) Kendaraan Roda Dua :5 (Lima) Unit Sepeda Motor

e) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan :

- (a) Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung kegiatan.
- (b) Kurangnya kualitas sumber daya manusia

(2) Solusi :

- (a) Dengan mengusulkan penganggaran pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Jambi
- (b) Dengan mengikutsertakan pegawai pada kegiatan bimbingan teknis

(12) BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KOTA JAMBI

a) Program dan Kegiatan

Program kegiatan Pada Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- (1) Pengendalian Produksi dan Distribusi.....Rp. 299.850.000.-

(2) Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan

Penanaman Modal, CSR dan BUD..... Rp. 250.000.000.-

(3) Pembinaan dan pemantauan Penyelenggaraan

KUPEM (Kredit Usaha Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat) Rp. 250.000.000.-

Jumlah Rp. 799.850.000,-

b) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal

c) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun susunan Pegawai di Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi yaitu sbb :

No	NAMA / NIP	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	EVRI DAL ASRI, S.Pi, ME NIP.19680912 198903 1 005	S2	PEMBINA IV/A	Kepala Bagian Perekonomian
2	DEWI, SE NIP. 19740818 199403 2 003	S1	PENATA TK.I III/d	Sarana dan Prasarana Ekonomi
3.	NURYADI AHMAD, SE NIP. 19830618 200604 1 006	S1	PENATA III/C	Kasubbag. Penanaman Modal dan BUD
4	LIA DWI APRIESTY, SE NIP. 19850409 201001 1 013	S1	PENATA III/c	Kasubbag Produksi dan Distribusi
5.	SRI WAHYUNI SYAMSU, SE NIP.19700416 199003 2 001	S1	PENATA TK.I III/d	Fungsional Umum
6	HERLIN NIP.19690216 199108 2 001	SLTA	PENATA MUDA Tk.I III/b	Fungsional Umum
7	ICHSAN BUANA POERBA,A.Md NIP.19791203 201001 1 003	D3	PENATA MUDA III/a	Fungsional Umum

8	PARIADI NIP.19620709 199203 1 008	SLTA	PENATA MUDA III/a	Fungsional Umum
9.	R. IBRAHIM ADASUKI NIP.19760531 200801 1 002	SLTA	PENGATUR II/c	Fungsional Umum
10.	KHERMAYANI NIP. 197704122009012004	SLTA	PENGATUR II/c	Fungsional Umum

d) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa hasil dari perencanaan pembangunan terdiri dari; rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Kota Jambi dalam melaksanakan unsur perencanaan, sebelumnya telah menetapkan dokumen perencanaan jangka menengah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013–2018.

Perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan sampai Musrenbang Provinsi dengan menentukan skala prioritas berdasarkan hasil survey lapangan. Dari hasil

survey lapangan tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi dengan melakukan pemaketan perencanaan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya dilakukan dengan proses pelelangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses Perencanaan Pembangunan telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD

e) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Peralatan Kantor yang dimiliki oleh Bagian Perekonomian dalam rangka menjalankan tugas rutin yaitu :

- (1) 5 (lima) unit Komputer
- (2) 7 (tujuh) unit Printer
- (3) 10 (sepuluh) unit Laptop

(4) 1 (satu) Telepon

(5) 4 (empat) buah kamera

Sarana penunjang lainnya dalam menjalankan tugas rutin yaitu:

1 Mobil yaitu :

Merk Ertiga No.Polisi BH 1017 A

5 (lima) Sepeda Motor yaitu :

(a) Merk Honda Star No. Polisi BH 3336 AZ

(b) Merk Honda Supra No. Polisi BH 3908 AZ

(c) Merk Honda Supra X No. Polisi BH 6229 HZ

(d) Merk Honda Astrea Star No. Polisi BH 2401 AZ

(e) Merk Honda Astrea Star No. Polisi 6211 HZ

(13) BAGIAN HUMAS SETDA KOTA JAMBI

a. Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2019 Bagian Hubungan Masyarakat melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- (1) Program Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi informasi.
 - (a) Kegiatan Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - (b) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi dan Komunikasi Sosial.

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pada Bagian Humas belum ditetapkan standar pelayanan minimal, namun pencapaian target kegiatan pada tahun 2019 telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan antara lain :

(1) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah terpublikasinya informasi pembangunan daerah Kota Jambi melalui melalui Media Cetak Harian 410 kali, Media Cetak Mingguan 309 kali, Media Elektronik (TV, Radio dan Online) 900 kali, dengan Liputan Khusus 12 kali dan Siaran

Langsung TV/Radio sebanyak 2 kali, serta Media Luar Ruang (Spanduk, Baliho, Backdrop dan Papan Ucapan) sebanyak 8110 buah.

(2) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini difokuskan pada tersebarluasnya data dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui tersedianya bahan cetakan berupa Majalah Kota Jambi (MKJ) sebanyak 1.500 eksemplar, Poster Selayang Pandang Kota Jambi sebanyak 2.000 lembar, Cetak Kalender Tahun 2014 sebanyak 1.800 set dan Kliping Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Jambi sebanyak 160 eksemplar serta terlaksananya Studi Pers .

(3) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Pada kegiatan ini telah dilaksanakan Siaran Keliling, Pameran pada MTQ Tingkat Propinsi dan Pameran Jambi Product Centre dan Sosialisasi (PPID) Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kota Jambi.

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam melaksanakan tugas dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016, Bagian Hubungan Masyarakat berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, dipimpin langsung oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris daerah melalui Asisten Pemerintahan bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan menyelenggarakan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh satu orang Kepala Bagian dan dibantu oleh 3 orang Kepala Sub Bagian yang terdiri dari :

(1) Sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi.

(2) Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi

(3) Sub Bagian Publikasi dan Kerjasama Pers.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hubungan Masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016. sebagai berikut fungsinya :

- (1) Pelaksanaan juru bicara Walikota dan pemerintah daerah;
- (2) Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang pengumpulan dan penyaringan informasi, media, dokumentasi;
- (4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengumpulan dan penyaringan informasi, media, dokumentasi;
- (5) Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya manusia aparatur di bidang hubungan masyarakat.
- (6) Penyiapan dan penyampaian bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja sekretariat daerah.
- (7) Penyusunan perjanjian kinerja bagian sebagai bagian dari perjanjian kinerja sekretariat daerah.
- (8) Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (9) Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran.
- (10) Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
- (11) Pelaksanaan system pengendalian intern.
- (12) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.
- (13) Pengelolaan pengaduan masyarakat.

- (14) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website dan media sosial humas pemerintah daerah.
- (15) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
- (16) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris daerah sesuai dengan tugasnya melalui asisten bidang pemerintahan.
- (18) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi bagian hubungan masyarakat dibantu oleh sub bagian yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Bagian yaitu :

d. Sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi dengan rincian tugas sebagaiberikut

- (1) Menyusun rencana kerja subbagian pengolahan data dan informasi.
- (2) Melaksanakan pemetaan dan monitoring isi strategis.
- (3) Menyiapkan bahan penyaringan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat umum dan organisasi non pemerintah.
- (4) Menyiapkan bahan kliping pemberitaan di surat kabar/majalah mengenai umpan balik masyarakat terhadap kebijakan pimpinan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
- (5) Menyiapkan bahan informasi tentang berita atau isu yang beredar dimasyarakat guna bahan tanggapan.
- (6) Menyiapkan dan menyusun rancangan Keputusan Walikota dan Keputusan Sekretaris daerah.
- (7) Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan pada bagian hubungan masyarakat.

- (8) Menyusun standar operasional prosedur pada bagian hubungan masyarakat.
 - (9) Melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah bagian.
 - (10) Menyiapkan bahan rapat kepala bagian.
 - (11) Menyiapkan bahan pemeliharaan dan pengkoordinasian arsip, laporan dan data lain pada bagian.
 - (12) Menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja sekretariat daerah.
 - (13) Menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat.
 - (14) Melaksanakan tata usaha bagian hubungan masyarakat.
 - (15) Membuat laporan bulanan dan tahunan.
 - (16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. **Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi** dengan rincian tugas sebagai berikut
- (1) Menyusun rencana kerja subbagian peliputan dan dokumentasi.
 - (2) Menginventarisasi jumlah media cetak, elektronik dan online.
 - (3) Menyiapkan rencana dan melaksanakan peliputan serta pendokumentasian kegiatan pemerintah daerah.
 - (4) Menyiapkan bahan untuk menyelenggarakan konferensi pers.
 - (5) Menyiapkan bahan dokumentasi untuk kegiatan pameran.
 - (6) Menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan pimpinan dan pemerintah daerah dalam bentuk foto maupun audio visual.
 - (7) Menyiapkan, menyimpan, dan memelihara peralatan dan hasil dokumentasi.
 - (8) Menyiapkan koordinasi pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penerbitan.
 - (9) Menghimpun berita aktual harian pemberitaan media massa.
 - (10) Pengadaan sarana dan sarana pendukung kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 - (11) Membuat siaran pers.

- (12) Membuat konsep dan menyusun materi informasi publik yang akan dipublikasikan melalui teknologi informasi tenaga kehumasan pemerintah.
 - (13) Merencanakan dan mengusulkan pengadaan infrastruktur penunjang tugas kehumasan.
 - (14) Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dibidang kehumasan.
 - (15) Melakukan klasifikasi, penyimpanan dan pemeliharaan informasi dan dokumentasi.
 - (16) Menyusun standar operasional prosedur subbagian peliputan dan dokumentasi.
 - (17) Membuat laporan bulanan dan tahunan.
 - (18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. **Sub Bagian Publikasi dan Kerjasama Pers** dengan rincian tugas sebagai berikut :
- (1) Menyusun rencana kerja subbagian publikasi dan kerjasama pers.
 - (2) Memberikan pelayanan informasi di lingkup sekretariat daerah.
 - (3) Menyiapkan bahan penyajian informasi melalui media massa.
 - (4) Menyiapkan bahan pelayanan informasi kepada masyarakat atau lembaga pemerintah/ non pemerintah.
 - (5) Menyiapkan bahan kerjasama dengan pengelola media massa.
 - (6) Menyiapkan dan menyebarluaskan dokumentasi foto untuk bahan pemberitaan.
 - (7) Menyiapkan bahan himpunan dan mendokumentasikan naskah pidato kepala daerah dan wakil kepala daerah.
 - (8) Menyiapkan bahan dan pendistribusian penyebarluasan informasi melalui penerbitan internal.
 - (9) Menjalin hubungan kerja dengan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah kota jambi.
 - (10) Menjalin hubungan kerja dan kordinasi dengan lembaga kehumasan lainnya.

- (11) Menjalin hubungan dengan media massa.
- (12) Melakukan komunikasi persuasive dan negosiasi.
- (13) Memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakat.
- (14) Melaksanakan konferensi atau jumpa pers.
- (15) Menulis, menyunting dan memproduksi informasi publik.
- (16) Membuat laporan bulanan dan tahunan.
- (17) Melaksanakan tugas lain yang diberika oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Jumlah pegawai pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Jambi sebanyak 21 (dua puluh satu) orang terdiri dari :

- (1) Menurut Pangkat
 - (a) 1 Orang Pembina (IV/a)
 - (b) 4 Orang Penata (III/c)
 - (c) 2 Orang Penata Muda Tk. I (III/b)
 - (d) 1 Orang Pengatur Tk. I (II/d)
 - (e) 4 Orang Pengatur (II/c)
 - (f) 2 Orang Pengatur Muda Tk.I (II/b)
 - (g) 7 Orang PTT
- (2) Menurut Pendidikan
 - (a) 1 Orang berpendidikan Sarjana Strata 2 (S2)
 - (b) 9 Orang berpendidikan Sarjana Strata 1 (S1)
 - (c) 11 Orang berpendidikan SLTA
- (3) Menurut Eselonering
 - (a) 1 Orang Eselon III.a
 - (b) 3 Orang Eselon IV.a
 - (c) 10 Orang Jabatan Fungsional Umum.
 - (d) 7 Orang PTT

h. Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sangat dipengaruhi oleh anggaran belanja,

berikut disajikan dalam bentuk tabel Target dan Realisasi anggaran tahun 2019 sebagai berikut :

Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Jambi merupakan sub satuan kerja dari OPD Sekretariat Daerah. Alokasi anggaran di kuasakan kepada Kepala Bagian untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Total anggaran belanja langsung daerah kota jambi yang dialokasikan untuk Bagian Humas Setda Kota Jambi untuk Tahun Anggaran 2019 yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi sebesar **Rp. 5.350.860.000,- (Lima juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh ribu rupiah),-** dibagi dalam program dan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp.
Program Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi informasi	5.350.860.000,-
1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4.380.120.000,-
2. Pengembangan Data Informasi dan Komunikasi Sosial	970.740.000

i. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun proses perencanaan dimaksud didasarkan atas :

- (1) Rapat lengkap Bagian Humas Setda Kota Jambi tentang penyusunan kegiatan masing-masing sub bagian dengan mempedomani tugas pokok dan fungsi dari Bagian Humas.
- (2) Masing-masing sub bagian menyusun kegiatan dengan menetapkan skala prioritas dan selanjutnya dibahas dalam rapat-pimpinan
- (3) Setelah pembahasan didalam rapat pimpinan, masing-masing bidang memperbaiki usulan rencana kegiatan dan selanjutnya disampaikan kepada Bappeda Kota Jambi untuk dibahas dalam forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kota Jambi
- (4) Setelah dibahas dalam Forum SKPD selanjutnya dibahas lagi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

- (5) Selanjutnya dibahas bersama DPRD Kota Jambi untuk disetujui

j. Permasalahan dan Solusi

Dalam Pelaksanaan kegiatan tahun 2019 Bagian Humas Setda Kota Jambi ada beberapa permasalahan yang dirasakan, sama seperti tahun tahun sebelumnya antara lain :

- (1) Kondisi ruangan kerja yang kurang memadai.
- (2) Perlu penambahan pegawai terutama dibidang ketatausahaan dan peliputan
- (3) Disiplin aparatur masih perlu ditingkatkan sejalan dengan tuntutan tugas pokok yang semakin meningkat.

Sementara itu untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dapat bekerjasama dengan pihak lain yaitu SKPD terkait. Kemudian penambahan ruangan kerja sehingga dalam melaksanakan kegiatan rutin sehari-hari dapat berjalan dengan lancar dan nyaman. Selain itu juga penambahan pegawai yang dapat menunjang kegiatan Humas dibidang peliputan dan pengeditan dan mengusulkan dana tambahan pada tahun yang akan datang terutama untuk memenuhi kekurangan dari peralatan yang diperlukan.

(14) BAGIAN PROTOKOL SETDA KOTA JAMBI

a) Program dan Kegiatan

Program Tahun 2019 dalam pembangunan Kota Jambi Bagian Protokol Setda Kota Jambi diarahkan pada peningkatan kualitas Kinerja Keprotokolan melalui :

- (1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Setda, Aparatur dan Keprotokolan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan Bagian Protokol Setda Kota Jambi berdasarkan fungsi Bagian Protokol Setda Kota Jambi tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 - (a) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah/Non Departemen/Luar Negeri
 - (b) Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

b) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bagian Protokol Setda Kota Jambi tergambar dalam tabel dibawah ini :

Realisasi Standar Pelayanan Minimal
Bagian Protokol Setda Kota Jambi

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	TARGET SPM	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
I	Bagian Protokol Setda Kota Jambi				
1	Pelayanan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah/Non Departemen/Luar Negeri	100%	100%	99.23%	99.23%
2	Pelaksanaan Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	100%	93.7%	93.7%

c) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah diarahkan pada Peningkatan Kualitas dan dan Efektifitas dalam penyelenggaraan manajemen Bagian Protokol Setda Kota Jambi termasuk peningkatan pelayanan, kemampuan, pengabdian, loyalitas, keteladanan dan kesejahteraan aparatur sehingga secara keseluruhan semakin mampu melakukan roda pemerintahan dan pembangunan secara baik dan bertanggung jawab. Disamping itu juga dilakukan Pembinaan dan Pendayagunaan Aparatur Bagian Protokol Setda Kota Jambi baik kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian perlu secara terus menerus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Jumlah Pegawai PNS pada Bagian Protokol Setda Kota Jambi per desember 2019 berjumlah 13 orang yang terdiri dari Laki-laki berjumlah 7 orang, Perempuan 6 orang dan PTT berjumlah 3 orang. Untuk mengetahui status kepegawaian pada Bagian Protokol Setda Kota Jambi dapat dilihat

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Laki- Laki	Perempuan		

1	2	3	4	5	6
1	Pegawai Negeri Sipil	3	4	7	PNS
2	Pegawai Tenaga Kontrak	4	8	12	Honoror PTT
Jumlah				19	

NO	Pangkat/Gol. Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	IV a	1	-	1
2	III d	-	1	1
3	III c	2	-	2
4	III a	-	1	1
5	II c	-	2	2
6	PTT	4	8	12
Jumlah				19

d) Alokasi Dan Realisasi Anggaran

(1) Anggaran

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bagian Protokol Setda Kota Jambi pada tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 3.114.920.000,- (Tiga milyar seratus empat belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang dibagi pada 2 (dua) Kegiatan Keprotokolan, yaitu :

- (a) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah/Non Departemen/Luar Negeri sebesar Rp. 330.600.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah)
- (b) Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 2.784.320.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

(2) Realisasi Anggaran

- (a) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah/Non Departemen/Luar Negeri

- Alokasi dana Untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 330.600.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan output Optimalnya Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah/Non Departemen/Luar Negeri

(b) Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- Alokasi dana Untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.784.320.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan output Optimalnya Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

e) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun proses perencanaan pembangunan pada Bagian Protokol Setda Kota Jambi didasarkan atas:

- (1) Rapat Musrenbang tingkat Sekretariat dan Kota, meliputi penjelasan tentang penyusunan kegiatan masing-masing bidang program, Bagian, Kasubag dengan mempedomani Renstra SKPD Bagian Protokol Setda Kota Jambi dan KUA Kota Jambi.
- (2) Masing-masing Sub. Bagian menyusun kegiatan dengan menetapkan skala prioritas, selanjutnya dibahas didalam rapat pimpinan dengan Kepala Bagian Protokol Setda Kota Jambi.
- (3) Setelah pembahasan didalam rapat pimpinan, masing-masing Bagian memperbaiki usulan rencana kegiatan dan selanjutnya disampaikan ke Setda Kota Jambi yang selanjutnya disampaikan kepada Bappeda untuk dibahas dalam forum SKPD Tingkat Kota dan Propinsi Jambi. Selanjutnya dibahas dengan DPRD.

f) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Bagian Protokol Setda Kota Jambi menempati 2 (dua) unit sarana Ruang yang belum cukup memadai, diantaranya :

- (1) Ruang Kepala Bagian Protokol dengan Ukuran 4 x 4 meter

(2) Ruangannya Kassubbag dan Staf dengan ukuran 4 x 7 meter

Untuk menunjang kelancaran dari penyelenggaraan Keprotokolan KDH/WKDH serta unsur pimpinan lainnya, Bagian Protokol Setda Kota Jambi dilengkapi oleh beberapa sarana yang ada diantaranya:

- (a) Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak : 2 unit.
- (b) Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak : 4 unit.
- (c) Komputer dan Printer sebanyak : 3 unit.

g) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan :

- (a) Penyusunan Kegiatan penganggaran pada Bagian Protokol Setda Kota Jambi Tahun 2018, belum sepenuhnya mengacu pada penetapan indikator pencapaian Sasaran Grand Strategi Bagian Protokol Setda Kota Jambi yang mana pada tahun 2018 merupakan pemecahan dua bagian dari bagian Humas dan Protokol menjadi 2 bagian yaitu Bagian Humas, dan Bagian Protokol.
- (b) Masih kurangnya Tenaga Keprotokolan dan Tenaga Administrasi dan Pada Bagian Protokol Setda Kota Jambi.

(2) Solusi :

- (a) Penyusunan program dan penganggaran, diwajibkan mengacu pada Grand Strategy Bagian Protokol Setda Kota Jambi, dengan menyesuaikan visi Pemda Kota yaitu **“TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, BERBASIS MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA”**.
- (b) Menambah tenaga Ahli bidang Keprotokolan dan Tenaga Administrasi Keprotokolan.
- (c) Mengikut sertakan pegawai / staf melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing – masing
- (d) Menganggarkan kembali kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi di tahun 2017 pada Tahun Berikutnya

15) BAGIAN KESRA SETDA KOTA JAMBI

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai Program dan Kegiatan pada Tahun 2019 sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Peran Serta dan Kualitas Umat Beragama

- (1) Terlaksananya MTQ Tingkat Kota Jambi.
- (2) Terlaksananya Festival Anak Shaleh Indonesia Tingkat Kota Jambi dan Tingkat Provinsi Jambi.
- (3) Terlaksananya Training Center (TC) Kafilah Kota Jambi (terpadu) untuk menghadapi MTQ Tingkat Provinsi Jambi.
- (4) Terlaksananya Kepesertaan pada MTQ Tingkat Provinsi Jambi.
- (5) Terlaksananya Safari Ramadhan 1438 H.
- (6) Terlaksananya pengiriman TPHD/TKHD Kota Jambi.
- (7) Terlaksananya pemberian Insentif Petugas Syara', Guru Ponpes Diniyah Takmilyah dan Tenaga Pengajar Pengajian Keagamaan (TPPK) dalam Kota Jambi.
- (8) Terlaksananya pengajian mingguan rutin di Rumah Dinas Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi.
- (9) Terlaksananya kegiatan-kegiatan keagamaan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).
- (10) Terlaksananya Kegiatan Festival Muharram 1439 H
- (11) Terlaksananya Kegiatan Semarak Dididkan Subuh

b) Program Kesejahteraan dan Jaminan Kesejahteraan Aparatur

- (1) Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Jambi
- (2) Pembinaan UKS Berprestasi dalam Kota Jambi
- (3) Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Jambi
- (4) Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional

c) Program Pembinaan Peran Fungsi Pemuda dan Masyarakat

- (1) Terlaksananya Penyuluhan Narkoba dan HIV & AIDS Dalam Kota Jambi
- (2) Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan dalam Kota Jambi

- (3) Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi

d) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jambi belum menetapkan Standar Pelayanan minimal.

e) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki personil ASN sebanyak 10 (Sepuluh) orang dan Pegawai Kontrak sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :

Kepala Bagian sebagai Pejabat Eselon III.a, Pangkat dan Golongan Pembina Tingkat I (IVb) dengan latar belakang Pendidikan Sarjana Strata Satu (S-2).

3 (tiga) orang Kasubbag sebagai Pejabat Eselon IV.a, Pangkat dan Golongan Penata (III/c) dengan latar belakang Pendidikan Sarjana Strata Satu (S-1).

10 (sepuluh) orang Pelaksana dengan Pangkat dan Golongan, dan latar belakang Pendidikan sebagai berikut :

NO	NAMA	PENDIDIKAN	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	Drs. Raden Jufri, ME	S-2	Pembina (IV/b)	Kepala Bagian Kesra
2.	Abdul Qudus, SH.I	S-1	Penata (III/c)	Kasubbag ADB
3.	Fahrizal Nover, S.Ag	S-1	Penata (III/c)	Kasubbag POR dan PM
4.	Zusrike Theresiawaty, SE	S-1	Penata (III/c)	Kasubbag Kesejahteraan
5.	Saturi, SE	S-2	Penata (III/c)	Fungsional Umum
6.	Ika Maryanti, S.Kom	S-1	Penata Muda Tk. I (III/b)	Fungsional Umum
7.	Herlina	S-1	Penata Muda (III/a)	Fungsional Umum
8.	Abidin	SMA	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Fungsional Umum
9.	Alpan	SMA	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Fungsional Umum
10.	Irwansyah	SMA	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Fungsional Umum

NO	NAMA	PENDIDIKAN
----	------	------------

1.	Miming Handoko, S.Sos.I	S-1
2.	Najmiah, MA	S-2
3.	Rahma Ummina, S.Pd.I	S-1
4.	Asas Muttaqin, S.Pd	S-1
5.	Mariyat Al Qibthiyah, S.Pd.I	S.1
6.	Lis Kurniawati, SE	S.1
7.	Dede Putra	SMA
8.	Eko Riyadi	SMA
9.	Maya Hardila	SMA

f) Alokasi Dan Realisasi Anggaran

1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kualitas Umat Beragama

Alokasi dana yang dianggarkan untuk Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.335.824.450.- (Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) dari Alokasi Dana tersebut Realisasi Fisik Kegiatan ini dapat dicapai 96 % dan Keuangan 96 %.

2. Program Kesejahteraan dan Jaminan Kesejahteraan Aparatur

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Dana sebesar Rp. 190.395.000.- (Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Alokasi dana tersebut realisasi Fisik kegiatan ini dapat dicapai 95% dan Realisasi Keuangan mencapai 95%.

3. Program Peningkatan Peran Fungsi Pemuda dan Masyarakat

Alokasi Dana yang dianggarkan untuk Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebesar 176.112.500.- (Seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan Alokasi Dana tersebut realisasi Fisik Kegiatan ini dapat dicapai 88% dan Realisasi Keuangan 88%.

g) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun proses perencanaan dimaksud didasarkan atas :

- (1) Rapat lengkap Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jambi tentang penyusunan kegiatan masing-masing Sub Bagian dengan mempedomani tugas
- (2) pokok dan fungsi dari Bagian Kesejahteraan Setda Kota Jambi.
- (3) Masing-masing Sub Bagian menyusun kegiatan dengan menetapkan skala
- (4) prioritas dan selanjutnya dibahas dalam rapat-rapat pimpinan.
Setelah pembahasan didalam rapat pimpinan, masing-masing bidang memperbaiki usulan rencana kegiatan dan selanjutnya disampaikan kepada Bappeda Kota Jambi untuk dibahas dalam forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kota Jambi.
- (5) Setelah dibahas dalam Forum SKPD selanjutnya dibahas lagi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Selanjutnya dibahas bersama DPRD Kota Jambi untuk di

16) BAGIAN UMUM SETDA KOTA JAMBI

1) Program dan Kegiatan

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
- (3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- (4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- (5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- (6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- (7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- (8) Penyediaan Makanan dan Minuman
- (9) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran / Teknis
- (10) Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- (1) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

- (2) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas
 - (3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - (4) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas
 - (5) Pengadaan Mebeleur
 - (6) Pengadaan Peralatan Perkantoran
 - (7) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan
 - (8) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - (9) Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
 - (10) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - (11) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - (12) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas
 - (13) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - (14) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
- (1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - (2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu
- d) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah , Aparatur dan Keprotokolan**
- (1) Pemberdayaan dan Kapasitas Staf Ahli Walikota Jambi
- e) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan KerumahTanggaan**
- (1) Belanja Pemeliharaan Kesehatan
 - (2) Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - (3) Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah
 - (4) Kegiatan Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Jambi belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal.

3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Jambi pada tahun 2019 sebanyak 56 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari :

- (1) Pegawai Negeri Sipil : 24 Orang
- (2) Pegawai Honorer : 32 Orang
- (3) PPPK : 56 Orang

4) Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Bagian Umum merupakan sub satuan kerja dari SKPD Sekretariat Daerah. Alokasi anggaran di kuasakan kepada Kepala Bagian untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Total anggaran belanja langsung daerah Kota Jambi yang dialokasikan untuk Bagian Umum Setda Kota Jambi untuk Tahun Anggaran 2016 yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi adalah sebesar **Rp. 16.645.000.000,-** (enam belas milyar enam ratus puluh lima juta rupiah) ,- dibagi dalam program dan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran
PROGRAM PELAYANAN ADMIISTRASI PERKANTORAN	7.471.914.300
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.157.274.800
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	650.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.031.912.500
Penyediaan Alat Tulis Kantor	197.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	369.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	196.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	2.630.527.000
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	97.000.000
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	121.700.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	7.114.939.450
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	842.750.000

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	591.927.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	458.460.000
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	444.955.200
Pengadaan Mebeleur	261.522.500
Pengadaan Peralatan Perkantoran	532.541.750
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	319.600.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	291.434.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	141.100.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.953.594.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	64.800.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	145.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	283.627.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	783.628.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	189.070.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	173.950.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	15.120.000
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, SEKDA, APARATUR DAN KEPROTOKOLAN	187.951.250
Pemberdayaan dan Kapasitas Staf Ahli Walikota Jambi	187.951.250
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN SETDA DAN KERUMAHTANGGAAN	1.681.125.000
Belanja Pemeliharaan Kesehatan	30.000.000
Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.140.000.000
Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	388.175.000
Kegiatan Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data	122.950.000
J U M L A H	16.645.000.000

5) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun proses perencanaan dimaksud didasarkan atas :

- (1) Rapat Lengkap Bagian Umum Setda Kota Jambi, penjelasan tentang penyusunan kegiatan masing-masing Sub.Bagian dengan mempedomani Renstra Sekretariat Daerah dan Rentra Kota Jambi.
- (2) Masing –masing Sub.Bagian menyusun kegiatan dengan menetapkan skala prioritas, selanjutnya dibahas didalam rapat pimpinan.
- (3) Setelah pembahasan didalam rapat pimpinan, masing-masing bidang memperbaiki usulan rencana kegiatan dan selanjutnya disampaikan ke

Kepala Bagian yang selanjutnya disampaikan kepada BAPPEDA untuk dibahas dalam forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kota Jambi.

(4) Hearing bersama DPRD untuk selanjutnya disetujui.

6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang ada di Bagian Umum Setda Kota Jambi untuk mendukung

kelancaran kerja yaitu :

- Air Conditioner (AC)
- Komputer PC
- Printer
- Televisi
- Dispenser
- Lemari Arsip Kaca 2 Pintu
- Lemari Arsip Kaca 3 Pintu
- Lemari Arsip Kayu
- Lemari Arsip Terbuka
- Lemari Arsip Sleding door
- Lemari Piring Kecil
- Filling Cabinet
- Lemari Arsip Besi
- Kulkas
- Kursi Putar Sandaran Tinggi
- Kursi Putar Sandaran Rendah
- Meja 1 Biro
- Meja ½ Biro
- Exhausfan
- Mobile Driwer
- Brangkas
- Kotak Bendera
- Kursi Tamu
- Kursi Rapat
- Mesin Fotocopy
- Mesin Penghitung Uang
- Meja Kerja
- Hordeng
- Lambang Burung Garuda
- Kursi Hadap
- Tong Sampah
- Lemari Kunci
- Kaca/Cermin

17) BAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH SETDA KOTA JAMBI

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota

Jambi Tahun 2019, yaitu Program Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi yang

meliputi:

- Pengendalian Pembangunan
- Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
- Pengelolaan Administrasi Pembangunan

b) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target/Capaian
Program Tata Kelola Organisasi Pemerintahan			
Pengendalian Pembangunan	Pemerintah Kota Jambi	ketersediaan bimtek dan pelatihan berkelanjutan bagi pengelola pengadaan	terlaksananya pengendalian dan pelaksanaan workshop/bimtek pengadaan barang/jasa
Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Pemerintah Kota Jambi	persentase penyerapan anggaran dan pelaksanaan secara akuntabel dan terukur	tersedianyalaporan administrasi kegiatan fisik setiap SKPD
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target/Capaian
Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Pemerintah Kota Jambi	persentase jumlah pengadaan barang /jasa yang dilaksanakan dalam 1 tahun, tertib administrasi surat-menyerurat	koordinasi pengadaan barang/jasa 40 SKPD, terlaksananya pemaketan RUP 40 SKPD, pelelangan paket pekerjaan, penyusunan SIM Layanan pengadaan.

c) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai di Bagian Pembangunan Setda Kota Jambi Seluruhnya berjumlah 19

(sembilan belas) orang yang terdiri dari:

- Pegawai ASN : 19 Orang
- Pegawai Non ASN : 6 Orang

Dilihat dari jumlah kepangkatan dan golongan sebagai berikut:

- Pangkat/Golongan IV : 1 Orang
 - Pangkat/Golongan III : 14 Orang
 - Pangkat Golongan II : 4 Orang
- Dilihat dari jumlah kepangkatan dan golongan sebagai berikut:
- Pangkat/Golongan IV : 2 Orang
 - Pangkat Golongan III : 10 Orang
 - Pangkat/Golongan II : 2 Orang

No	Tingkat Esselon	Jumlah	%
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA	4	21 %
4	D3	1	5 %
5	S1	11	57 %
6	S2	3	15 %
Jumlah	19	100 %	

No	Tingkat Esselon	Jumlah
1	II a	-
2	II b	-
3	III a	1
4	III b	-
5	IV a	3
Jumlah	4 Orang	

d) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa hasil dari perencanaan

pembangunan terdiri dari; rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Kota Jambi dalam melaksanakan unsur perencanaan, sebelumnya telah menetapkan dokumen perencanaan jangka menengah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013–2018.

Perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan sampai Musrenbang Provinsi dengan menentukan skala prioritas berdasarkan hasil survey lapangan. Dari hasil survey lapangan tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi dengan melakukan pemaketan perencanaan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya dilakukan dengan proses pelelangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses Perencanaan Pembangunan telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD

18) BAGIAN KEUANGAN SETDA KOTA JAMBI

a) Program dan Kegiatan

- (1) Program Pelayanan Administrasi Keuangan
 - (a) Kegiatan Perjalanan Dinas
 - (b) Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
- (2) Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - (a) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Jambi

b) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bagian Keuangan Setda Kota Jambi belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal

c) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Jambi pada tahun 2019 sebanyak 13 (lima belas) orang dan Tenaga Kerja Kontrak sebanyak 9 (sembilan) yang terdiri dari :

- (1) Pegawai Negeri Sipil : 15 Orang
- (2) Pegawai Honorer : 9 Orang

Dilihat dari jumlah kepangkatan dan golongan, pendidikan dan Eselonering sebagai berikut :

(1) Menurut Pangkat

- 1 orang Pembina Tk.I (IV/b)
- 3 orang Penata Tk. I (III/d)
- 1 orang Penata (III/c)
- 5 orang Penata Muda Tk.I (III/b)
- 4 orang Penata Muda (III/a)
- 1 orang pengatur (II/c)

(2) Menurut Pendidikan

- 2 orang berpendidikan terakhir Sarjana Strata 2 (S.2)
- 8 orang berpendidikan terakhir Sarjana Strata 1 (S.1)
- 2 orang berpendidikan terakhir Diploma 3 (D.3)
- 3 orang berpendidikan terakhir SLTA

(3) Menurut Eselonering

- 1 orang Eselon III.a
- 3 orang Eselon IV.a
- 11 orang Jabatan Fungsional Umum

d) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Jambi yaitu sebagai berikut :

- (1) Kendaraan dinas operasional yang terdiri dari:
 - (a) 2 (dua) unit kendaraan roda empat

- (b) 5 (lima) unit kendaraan roda dua
- (2) 10 (sepuluh) unit Komputer (PC)
- (3) 5 (lima) unit Komputer *notebook*
- (4) 3 (tiga) buah external hard disk
- (5) 15 (lima belas) unit printer
- (6) 2 (dua) unit kamera digital
- (7) 1 (satu) unit faximili
- (8) 1 (satu) unit kulkas
- (9) 1 (satu) unit TV

e) Alokasi Anggaran

Bagian Keuangan merupakan sub satuan kerja dari SKPD Sekretariat Daerah. Alokasi anggaran di kuasakan kepada Kepala Bagian untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Total anggaran belanja langsung daerah Kota Jambi yang dialokasikan untuk Bagian Keuangan Setda Kota Jambi untuk Tahun Anggaran 2019 yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi adalah sebesar **Rp. 4.902.180.000,-** (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ,- dibagi dalam program dan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.345.140.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.300.000.000
Perjalanan Dinas	3.045.140.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	557.040.000
Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Jambi	557.040.000
J U M L A H	4.902.180.000

19) KECAMATAN JAMBI TIMUR

a) Program dan Kegiatan

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- (a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- (b) Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- (c) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- (d) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- (e) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- (f) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- (g) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
- (h) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- (i) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- (j) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- (k) Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi Perkantoran / Teknis Perkantoran
- (l) Kegiatan perjalanan dinas

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- (a) Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
- (b) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
- (c) Kegiatan Pengadaan Mebeleur
- (d) Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran
- (e) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- (f) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- (g) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- (h) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
- (i) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- (a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- (a) Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang -

undangan

(5) **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.**

- (a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
- (b) Realisasi SKPD;

(6) **Program Perencanaan SKPD**

- (a) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

(7) **Program Pengembangan data/informasi**

- (e) Kegiatan Pengembangan data/informasi

(8) **Program Pemberdayaan Masyarakat**

- (1) Kegiatan Bangkit Berdaya
- (2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
- (3) Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

b) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Jambi Timur didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut seksi dan kesekretariatan. Pada akhir tahun 2019, jumlah pegawai kecamatan Jambi Timur adalah sebanyak 27 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut 50,00 % atau 15 orang diantaranya berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sedangkan 50,00 % atau 15 orang berstatus tenaga kerja kontrak (TKK). Sementara itu jumlah total pegawai yang bertugas pada kelurahan di kecamatan Jambi Timur mencapai 87 orang, yang didominasi oleh pegawai berstatus PNS yang jumlahnya mencapai 45 orang (78,95 %) dan 12 orang (21,05%) berstatus Tenaga kerja Kontrak (TKK). Untuk lebih jelasnya, jumlah dan komposisi pegawai menurut status dan golongan dapat dilihat pada table berikut ini :

NO.	UNIT PENEMPATAN	STATUS PEGAWAI				JUMLAH (ORANG)
		PNS DAN CPNS		NON PNS		
		PNS	CPNS	TKK	TKS	
A.	KECAMATAN					
1.	Camat	1	-	-	-	1

2.	Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	1
3.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	-	-	-	1
4.	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	1	-	-	-	1
5.	Seksi Tata Pemerintahan	1	-	-	-	1
6.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	-	-	1
7.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	-	-	1
8.	Seksi Kesejahteraan Sosial	1	-	-	-	1
9.	Seksi Pelayanan Umum	1	-	-	-	1
10.	Staf Pelaksana	6	-	15	-	21
JUMLAH (ORANG) A		15	-	15	-	30
		15		15		
PERSENTASE (%) A		50,00	-	50,00	-	
		50,00		50,00		
B.. KELURAHAN						
1.	Lurah	9	-	-	-	9
2.	Sekretaris Kelurahan	6	-	-	-	6
3.	Seksi Tata Pemerintahan dan Pelum	8	-	-	-	8
4.	Seksi PMK dan KESOS	9	-	-	-	9
5.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	-	-	-	6
6.	Staf Pelaksana	8	-	12		20
JUMLAH (ORANG) B		46	-	12		58
		45		12		
PERSENTASE (%) B		100	-	100	21,05	
		78,95		21,05		
Jumlah Total		61		27		88

Sumber: Kecamatan Jambi Timur, 2019

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, pada tahun 2019 aparat Kecamatan Jambi Timur berstatus PNS yang memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1, S2, dan S3) yaitu 16 orang atau sekitar 59,25 %. Sedangkan sisanya atau sebesar 7 orang (25,92 %) merupakan aparat dengan tingkat pendidikan D3 atau SLTA. Untuk pegawai berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang memiliki pendidikan terakhir (S1) yaitu 7 orang atau sekitar 25,92 % sedangkan sisanya sebesar 4 orang (14,83 %) memiliki tingkat pendidikan terakhir SLTA.

Demikian halnya dengan kondisi tingkat pendidikan aparat pada kelurahan di Kecamatan Jambi Timur. Komposisinya dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 28 orang sedangkan sisanya sebesar 3 orang dan 27 Orang SMA berpendidikan setingkat SLTA. Hal tersebut menunjukkan relatif belum memadainya kualitas sumber daya manusia aparat pada Kecamatan Jambi Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

NO.	UNIT PENEMPATAN	TINGKAJ PENDIDIKAN TERAKHIR				JUMLAH (ORANG)
		SARJANA		NON SARJANA		
		S3/S2	S1	D4/D3	D1/SLT A	
A. KECAMATAN						
1.	Camat	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	1	-	-	1
3.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1		-	1
4.	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	-	1	-	-	1
5.	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	-	-	1
6.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	-	-	1
7.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	1	1
8.	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	-	-	1
9.	Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	-	1
10.	Staf Pelaksana	-	7	-	14	21
JUMLAH (ORANG) A		1	15	-	14	30
		16		14		
PERSENTASE (%) A		-	59,25	-	40,75	
		59,25		40,75		
B.. KELURAHAN						
1.	Lurah	-	7	-	2	9
2.	Sekretaris Kelurahan	-	4		2	6
3.	Seksi Tata Pemerintahan dan Pelum	-	3	-	5	8
4.	Seksi PMK dan KESOS	-	5	1	3	9
5.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	5	-	1	5
6.	Staf Pelaksana	-	4	1	14	20
JUMLAH (ORANG) B		-	28	3	27	58
		28		30		58
PERSENTASE (%) B		-	100	8,57	55,18	
		48,28		51,72		

JUMLAH TOTAL	43	45	88
---------------------	-----------	-----------	-----------

Sumber: Kecamatan Jambi Timur, 2019

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

NO	PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH
1	Non Pangkat (PTT)	27
2	Pelaksana TK I/d	1
3	Pengatur Muda / IIa	2
4	Pengatur Muda TK I/ IIb	1
5	Pengatur / IIc	3
6	Pengatur TK dl / Iid	3
7	Penata Muda / III a	5
8	Penata Muda TK I/ IIIb	6
9	Penata / III C	23
10	Penata TK I / III d	14
11	Pembina /IV a	3
JUMLAH		88

3. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon

Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut :

NO	PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	1
3	Eselon IV/a	14
4	Eselon IV/b	31
5	Pegawai Non Eselon Honorar (PTT)	14 27
JUMLAH		88

c) **Alokasi Dan Realisasi Anggaran**

APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 terdiri dari anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Yang dituangkan dalam DPA-SKPD Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Nomor 5.00.5.00.01.06.5.2 Tanggal 02 Januari 2019.

Melalui Perubahan DPA yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018, maka anggaran Pendapatan dan seuai DPAP-SKPD Nomor 5.00.5.00.01.06.5.2 tanggal 17 Oktober 2019, Anggaran Belanja

mengalami perubahan, yaitu anggaran Belanja sebesar Rp. 11.241.523.774,00 menjadi sebesar Rp. 11.928.730.968,00.

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja	11.928.730.968,00	11.196.717.097,00	93,86
2.	Transfer	0	0	
	Surplus (Defisit)	(11.928.730.968,00)	(11.196.717.097,00)	93,86
3.	Pembiayaan			
	- Penerimaan	0	0	0
	- Pengeluaran	0	0	0
	Pembiayaan Netto	0	0	0

Berdasarkan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2019 di atas, kinerja keuangan OPD Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Target dan Realisasi Belanja

Pada Tahun 2019 Anggaran Belanja OPD Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi adalah sebesar Rp.11.928.730.968,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 11.155.758.979,00 dan belanja modal Rp.772.971.989,00.

Jika dibanding dengan jumlah anggaran Belanja tahun 2018 sebesar Rp.11.196.717.097,00 maka tahun 2019 ini Belanja mengalami Kenaikan sebesar 6,14 % atau Rp. 732.013.871,00

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	11.155.758.979,00	93,52 %
2.	Belanja Modal	772.971.989,00	6,48 %
3.	Belanja Tidak Terduga	-	-
4.	Transfer	-	-
Total		11.928.730.968,00	100 %

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.11.155.758.979,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.442.350.108,00 atau 93,61 % dengan rincian pada tabel berikut.

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	6.192.839.420,00	5.576.247.965,00	90,04
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.429.865.559,00	4.333.113.643,00	97,82
3.	Belanja Bunga	-	-	-
4.	Belanja Subsidi	-	-	-
5.	Belanja Hibah	533.000.000,00	532.988.500,00	100,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total		11.155.704.979,00	10.442.350.108,00	93,61

A Belanja Pegawai **Tahun 2018 (Rp)** **Tahun 2017 (Rp)**
6.192.893.420,00 5.350.713.062,00

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa menurut Kode dan Jenis TA 2018 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Kode.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2019
2.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	533.397.500,00	524.401.000,00	98,31	908.786.000,00
2.1.2.02	Belanja Bahan/Material	68.200.000,00	67.476.500,00	98,94	82.708.000,00
2.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	409.850.000,00	370.621.715,00	90,43	422.610.572,00
2.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	211.200.000,00	201.329.000,00	95,33	165.185.600,00
2.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.868.500,00	23.242.500,00	89,85	40.709.000,00
2.1.2.08	Belanja Sewa Sara Mobiltas	19.400.000,00	19.300.000,00	99,48	8.200.000,00
2.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	67.100.000,00	67.100.000,00	100,00	83.550.000,00
2.1.2.11	Belanja Makanan dan	327.592.500,00	324.049.500,00	98,92	345.520.000,00

	Minuman				
2.1.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	-	-	37.500.000,00
2.1.2.15	Belanja perjalanan dinas	176.597.059,00	176.413.428,00	99,90	169.744.600,00
2.1.2.25	Honorarium PNS	137.760.000,00	134.160.000,00	97,39	362.597.500,00
2.1.2.26	Honorarium Non PNS	96.300.000,00	94.500.000,00	98,13	91.635.000,00
2.1.2.34	Belanja Jasa Tenaga Perorangan	2.348.600.000,00	2.327.570.000,00	99,10	1.751.600.000,00
Total		4.429.865.559,-	4.333.113.643,-	97,82	4.470.346.272,-

Realisasi Belanja Hibah TA 2019 dianggarkan sebesar Rp.532.988.500,00 turun sebesar Rp.11.690.500,00 atau sebesar 0,98 % dari realisasi TA 2019 sebesar Rp.544.679.000,00

Rincian realisasi Belanja Hibah TA 2019 diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Belanja Hibah kepada badan/lembaga/organisasi	-	-	-	-
2.	Belanja Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat	-	-	-	-
3.	Belanja Hibah barang/jasa yg diserahkan kepada masyarakat /pihak ketiga	533.000.000,00	532.988.500,00	100,00	544.679.000,00
Total		533.000.000,00	532.988.500,00	100,00	544.679.000,00

2). Belanja Modal	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	772.971.989,00	572.413.000,00

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dianggarkan sebesar Rp.754.366.989,00 naik sebesar Rp.181.953.989,00 atau sebesar 0,76 % dari realisasi TA 2019 sebesar Rp.572.413.000,00 Belanja Modal dipergunakan untuk menambah aset daerah yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Output atas belanja Modal tersebut menambah nilai Aset Tetap serta Ekuitas yang tercatat dalam Neraca, Rincian realisasi Belanja Modal menurut Kode dan Jenis TA 2019 diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Kode.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	690.571.989,00	684.466.989,00	6.105.000,00
2.2.2.04	Belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor	-	-	-
2.2.2.05	Belanja modal pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	68.400.000,00	68.400.000,00	-
2.2.2.09	Belanja modal peengadaan alat bengkel bermesin	24.391.989,00	24.391.989,00	-
2.2.2.11	Belanja modal pengadaan alat ukur	30.600.000,00	30.600.000,00	-
2.2.2.14	Belanja modal pengadaan alat kantor	77.000.000,00	76.700.000,00	300.000,00
2.2.2.15	Belanja modal pengadaan alat rumah tangga	227.180.000,00	226.980.000,00	200.000,00
2.2.2.16	Belanja modal pengadaan computer	209.000.000,00	206.095.000,00	2.905.000,00

2.2.2.18	Belanja modal pengadaan alat studio	-	-	-
2.2.2.36	Belanja modal pengadaan peralatan industry kecil dan menengah	54.000.000,00	51.300.000,00	2.700.000,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.2.3.01	Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.400.000,00	19.900.000,00	12.500.000,00
2.2.4.08	Belanja modal pengadaan bangunan air bersih/baku	32.400.000,00	19.900.000,00	12.500.000,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
2.2.5.03	Belanja modal pengadaan	-	-	-
2.2.6.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud			
Total		11.928.730.968,	11.196.717.097,	732.013.871,

Pada Tahun Anggaran 2019, Sesuai dengan DPA yang dianggarkan terdapat surplus/(defisit) anggaran sebesar Rp. (11.938.730.968) dan dalam Realisasinya mengalami surplus/(defisit) sebesar Rp. (11.196.717.097) atau sebesar 93,86%.

a. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 772.971.989,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 754.366.989,00 atau 97,59 %. Adapun perincian Belanja Modal pada T.A. 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
----	--------	---------------	----------------	---

1.	Belanja Tanah	-	-	-
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	690.517.989,00	684.466.989,00	99,12
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	32,400.000,00	19.900.000,00	61,42
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6.	Belanja Aset Lainnya	-	-	-
7.	Belanja BOS	-	-	-
Total		772.971.989,00	754.366.989,00	97,59

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah Kecamatan Jambi Timur melaksanakan delapan Program yang dibagi menjadi 29 kegiatan. didukung dana anggaran dengan rincian sebagai berikut :

NO	URIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.192.893.420	5.576.247.965	90,04
1	Belanja Pegawai	6.192.893.420	5.576.247.965	90,04
II	BELANJA LANGSUNG	5.735.837548	5.620.469.132	97,99
1	Belanja Pegawai	234.060.000	228.660.000	97,69
2	Belanja Barang dan Jasa	4.728.805.559	4.637.442.143	98,07
3	Belanja Modal	772.971.989	754.366.989,00	97,59
	Jumlah	11.928.730.968	11.196.717.097	93,86

a. Program Kegiatan Fisik

Alokasi dana untuk kegiatan ini adalah Rp. 1.488.695.- dan realisasi sebesar Rp. 1.487.907.500. Dapat dilihat dari alokasi dana tersebut realisasi fisik 100 % dan keuangan 98,91 %, Adanya sisa realisasi merupakan kelebihan penganggaran harga BBM dan sisa belanja pada saat negosiasi dengan pihak ketiga.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGRAN	REALISASI	Persentase	
				Fisik	Keuangan
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	114.700.000	114.700.000	100	100
2	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	17.100.000	17.100.000	100	100
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.700.000	4.700.000	100	100
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.400.000	4.400.000	100	100
5	Penyediaan Makanan dan minuman	40.795.000	40.795.000	100	100
6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	17.000.000	16.900.00	100	99,41
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	30.000.00	29.700.000	100	99,00
8	Pengadaan Mebeleur	236.500.000	235.800.000	100	99,70
9	Pengadaan Peralatan Perkantoran	236.000.000	233.095.000	100	98,77
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	100	100
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	211.200.000	201.329.000	100	95,33
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5.100.000	5.100.000	100	100
13	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	6.600.000	6.600.000	100	100
14	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	50.000.000	50.000.000	100	99,76
17	Bangkit Berdaya	534.600.000	534.588.500	100	99,07
	JUMLAH	1.488.695	1.487.907.500	100	98,91

b. Program Kegiatan Non Fisik

Alokasi Dana untuk kegiatan ini adalah Rp.4.188.660.000 dengan realisasi Rp.

4.096.743.672 dari alokasi dana tersebut realisasi fisik 100% dan keuangan 88,43 %,

Pada Program Kegiatan Non Fisik ini realisasi anggaran menurun dari tahun sebelumnya (99,97%). Hal ini terjadi karena terdapatnya silva pada Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. (70,

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGRAN	REALISASI	Persentase	
				Fisik	Keuangan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	600.000	100	25,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	137.900.000	102.671.715	100	74,45
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	145.460.000	141.860.000	100	97,53
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	38.960.000	38.960.000	100	100,00
5	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/tnis adm	340.560.000	337.590.000	100	99,13
6	Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	93.720.000	93.720.000	100	100
7	Perjalanan Dinas	174.597.059	174.463.428	100	99,92
8	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.175.000	1.175.000	100	100
9	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1.373.500	1.373.500	100	100
10	Pengembangan data/informasi	13.840.000	13.840.000	100	100
11	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	1.431.459.000	1.415.774.000	100	98,90
12	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	63.000.000	63.000.000	100	100
13	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	1.772.016.989	1.735.588.989	100	97,94
	JUMLAH	4.188.660.000	4.089.116.548	100	97,98

Dalam Tahun 2019 realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi adalah Fisik sebesar 100 % & Keuangan sebesar 97,98 %.

i. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat 3 meliputi :

- a) Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk Jangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- c) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk Jangka waktu satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah. RPJP daerah dan RJKD ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Proses tersebut diatas dimulai dari tingkat Musrenbang Kelurahan, Dalam hal ini masyarakat Kelurahan dapat berpartisipasi langsung dengan memberikan masukan tentang berbagai permasalahan yang dihadapi mereka. Permasalahan tersebut juga harus disertai alternatif pemecahannya sehingga dapat dilakukan perbaikan. Di tingkat Kelurahan permasalahan dan Solusi dari Masyarakat di bahas serta didiskusikan bersama – sama, hasilnya diajukan ke tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang di masing – masing Kelurahan kemudian dibahas bersama – sama di tingkat Kecamatan dan dilakukan Musrenbang Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan selanjutnya dibawa ke Musrenbang Kabupaten dan juga Musrenbang Provinsi.

Ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat kemudian menjadi proses selanjutnya yaitu penyusunan Agenda/ Rencana Pemerintah kedepan, Didalam proses penyusunan inilah terjadi penyaringan usulan – usulan dan disesuaikan dengan kepentingan – kepentingan instansi – instansi Pemerintahan. Permasalahan pendidikan disesuaikan dengan instansi pendidikan, masalah pertanian disesuaikan dengan instansi pertanian dan seterusnya.

Setelah melalui tahapan agenda setting di instansi terkait, tahapan selanjutnya adalah mengusulkan rencana pembangunan terkait ke DPR/ DPRD guna dilakukan penetapan dan realisasi pembangunan

b) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jambi Timur dapat berjalan dengan baik tidak hanya apabila didukung oleh SDM yang terampil, tetapi juga apabila didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun kondisi aset sarana dan prasarana di Kecamatan Jambi Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	01	01	TANAH		989.345.000	
2	02		Peralatan dan Mesin			
		02	a. Alat –alat Besar			
		03	b. Alat-alat Angkutan		837.541.000	
		04	Alat-alat Bengkeldan alat ukur			
		05	Alat-alat Pertanian dan Peternakan		4.200.000	
		06	Alat-alat kantor dan rumah tangga		1.718.859.000	
		07	Alat-alat Studio dan telekomunikasi		77.534.8000	
		08	Alat-alat Kedokteran			

		09	Alat-alat Laboratorium		3.300.000	
		10	Alat-alat Kesenian			
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN		4.481.082.000	
		11	Bangunan Gedung			
		12	Bangunan Monumen			
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
		13	Jalan dan jembatan			
		14	Bangunan Air / Irigasi		205.122.000	
		15	Instalasi		58.126.000	
		16	Jaringan		12.000.000	
5	05		ASET TETAP LAINNYA			
		17	Buku Perpustakaan			
		18	Barang bercorak kesnian/kebudayaan			
		19	Hewternak dan tumbuhan			
6	06		KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN			
7	07		ASET TETAP LAINNYA			
			Jumlah		8.386.709.800	

Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini memuat semua program dan kegiatan Kecamatan Telanaipura selama Tahun 2019
- (2) laporan Tahunan ini juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019
- (3) Evaluasi atas Program dan kegiatan yang dilaksanakan sangat diperlukan demi tercapainya tujuan yang telah diprogramkan/direncanakan
- (4) Ketetapan waktu dalam menyusun suatu program/kegiatan sangat menentukan kebersihan dalam menjalankan Program/Kegiatan itu sendiri
- (5) Program kegiatan tidak bisa mencapai 100% dikarenakan silva dari proses pengadaan.

b) Solusi

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan roda Pemerintahan, Pembagunan dan Pembinaan Kemasyarakatan perlu adanya penambahan pegawai yang kompeten dibidangnya
- (2) Untuk menciptakan kelncaran tugas-tugas dan laporan kegiatan Kecamatan maupun kelurahan serta terdatanya data-data yang akurat perlu didukung oleh sarana dan Prasarana yang memadai
- (3) Perlunya Peningkatan pembinaan dan koordinasi dari atasan serta koordinasi antar instansi terkait.
- (4) Adapun solusinya agar program kegiatan fisik dan non fisik adalah dengan penempatan Sumber Daya Manusia yang berpotensi dan peningkatan sumberdaya aparatur.
- (5) Untuk kelancaran dalam menjalankan suatu Program/Kegiatan agar pelaksanaannya tepat waktu

20) KECAMATAN PASAR JAMBI

1) PROGRAM DAN KEGIATAN

b) PROGRAM

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Perencanaan SKPD
- Program Pengembangan Data/Informasi
- Program Pemberdayaan Masyarakat.

c) KEGIATAN

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran
- Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam
- Perjalanan dinas
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan mebel
- Pengadaan peralatan perkantoran
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
- Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- Pengadaan pakaian Khusus Hari-Hari tertentu
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan Renstra SKPD
- Penyusunan Rencana Kerja SKPD
- Pengembangan data / informasi
- Bangkit Berdaya
- Peningkatan Kualitas pelayanan kecamatan
- Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan

- Pembinaan administrasi pemerintah kelurahan

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :

1. Kegiatan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik realisasi telah mencapai 78.89%
2. Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan realisasi telah mencapai 83.02 %
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor telah mencapai 100 %
4. Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor realisasi telah mencapai 100%
5. Kegiatan Belanja Cetak dan Penggandaan realisasi telah mencapai 100 %
6. Kegiatan Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasi telah mencapai 98,84 %
7. Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman realisasi telah mencapai 99.99 %
8. Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran realisasi telah mencapai 100%
9. Kegiatan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam realisasi telah mencapai 100 %
10. Kegiatan Perjalanan Dinas realisasi telah mencapai 100 %

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :

1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional realisasi telah mencapai 99,41 %
2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor realisasi telah mencapai 99,13 %
3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor realisasi telah mencapai 99,81 %
4. Kegiatan Pengadaan Meubeler realisasi telah mencapai 99,51 %
5. Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran realisasi telah mencapai 99,23 %
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor realisasi telah mencapai 98,67 %
7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional realisasi telah mencapai 97.42 %

8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor realisasi telah mencapai 100 %
 9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler realisasi telah mencapai 100 % Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat kantor realisasi telah mencapai 100 %
 10. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor realisasi telah mencapai 89,83 %
- c. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan** terdiri dari :
1. Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan telah mencapai 100 %.
- d. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi** terdiri dari :
1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan realisasi telah mencapai 87,50 %
 2. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD realisasi telah mencapai 100 %
 3. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD realisasi telah mencapai 100 %
 4. Kegiatan Pengembangan Data/Informasi realisasi telah mencapai 99,48 %
- e. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat** terdiri dari :
1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan, dan telah terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari:
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan
 - Lembaga Adat Melayu (LAM) Kecamatan dan Kelurahan
 - Forum Rukun Tetangga Kelurahan (RT)
 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Dan Kegiatan tersebut telah terealisasi mencapai 100 %.
 2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Program Bangkit Berdaya dengan cara membangkitkan

jiwa Gotong royong di kelurahan. Untuk pelaksanaan Bangkit Berdaya di Kecamatan pada Tahun 2019 ada 6 Sarana dan Prasarana yang di bangun diantaranya :

NO	PEKERJAAN	KELURAHAN	RT
1	Rehab Drainase	Sungai Asam	12
2	Rehab Jalan Cor	Sungai Asam	19
3	Rehab Jalan Cor	Sungai Asam	20
4	Rehab MCK Umum	Beringin	7
5	Pembuatan Septictank rumah tangga	Beringin	11
6	Pembuatan Septictank rumah tangga	Beringin	14
7	Pembuatan Bak Sampah	Beringin	14
8	Pembuatan Poskamling	Orang Kayo Hitam	04
9	Pembuatan Septictank rumah tangga	Orang Kayo Hitam	04

4) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses Perencanaan yang dilakukan atas Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing urusan wajib melalui dan termuat dalam RPJMD, RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD.

a. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh SKPD Kantor Camat Pasar Jambi dalam melaksanakan masing-masing Program dan Kegiatan prioritas sudah cukup Lengkap.

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan prioritas, khususnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keingatannya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Kegiatan Pengadaan Mebeleur sangat kurangnya Aparatur yang lulus bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa solusinya Aparatur harus

mengikuti Pelatihan/Ujian Pengadaan Barang dan Jasa yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Jambi

21) KECAMATAN KOTA BARU

1) Program dan Kegiatan

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 urusan yang wajib dilaksanakan oleh Perintah Daerah meliputi 26 urusan yaitu urusan pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan; kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil menengah; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; pertanian; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; perhubungan; komunikasi dan informatika; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan dan perpustakaan.

Pada tahun 2019 Kecamatan Kotabaru Kota Jambi telah melaksanakan 1 urusan wajib yaitu otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian, yang di jabarkan sebagai berikut :

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran yang ditargetkan program ini adalah untuk mendukung operasional kantor sehari-hari dan pelaksanaan program-program lainnya dengan kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam
- Perjalanan Dinas

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apaatur

Sasaran yang ditargetkan program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran operasional, melalui kegiatan :

- Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pengadaan Peralatan Perkantoran
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

(3) Peningkatan Disiplin Aparatur

Sasaran yang ditargetkan program ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai di Kecamatan Kotabaru melalui kegiatan :

- (1) Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
- (2) Penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

(4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran yang ditargetkan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pegawai di Kecamatan Kotabaru melalui kegiatan :

- (1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan

(5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Sasaran program ini adalah untuk memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah melalui kegiatan :

- (1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

(6) Program Perencanaan SKPD

Sasaran Program ini adalah untuk memenuhi amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang program Perencanaan SKPD melalui kegiatan :

- Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang dituangkan dalam Laporan Buku Rencana Kerja Anggaran, Laporan Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Buku Rencana Kerja dan Laporan Buku Penetapan Kinerja

(7) Pengembangan Data / Informasi

- Pengembangan Data / Informasi

(8) Pemberdayaan Kecamatan

Sasaran yang ditargetkan program ini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan Kecamatan yang meliputi segala urusan sosial kemasyarakatan melalui kegiatan :

- (3) Bangkit Berdaya
- (4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
- (5) Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan
- (6) Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi belum mempunyai standar pelayanan minimal akan tetapi Standar Operasional Persedur sudah ada, akibatnya sulit untuk mengukur tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Kecamatan Kota Kotabaru Jambi memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 64 orang, 31 orang Pejabat Struktural, dan Sebanyak 22 orang merupakan staf pelaksana serta 11 Orang tenaga honorer

Berdasarkan analisis beban kerja, jumlah pegawai belum cukup memadai untuk kebutuhan, masih ada beberapa jabatan struktural pada Kantor Lurah yang belum terisi sedangkan ditinjau dari kualitas dan ketrampilan masih perlu adanya peningkatan pengembangan wawasan dan ketrampilan dengan mengikut sertakan staff dalam

pendidikan dan pelatihan-pelatihan di masa yang akan datang. Proporsi distribusi ketenagaan pada Kantor Camat Kotabaru Kota Jambi berdasarkan latar belakang pendidikan sebagaimana pada tabel , dan distribusi ketenagaan berdasarkan unit pelayanan sebagaimana pada tabel berikut :

NO	Uraian Kepegawaian	Jumlah (Orang)
I	Jenis kepegawaian	
	1. PNS	53
	2.Honorar	11
II	Jenjang Kepangkatan	
	1.Golongan IV a	1
	2.Golongan III d	13
	3.Golongan III c	13
	4.Golongan III b	14
	5.Golongan III a	6
	6.Golongan II d	1
	7.Golongan II c	2
	8.Golongan II b	2
	9.Golongan II a	-
	10.Golongan I d	-
	11.Golongan I c	1
	12.Golongan I b	-
	13.Golongan I a	-
III	Jenjang Eselon	
	1. Eselon III a	1
	2. Eselon III b	1
	3. Eselon IV.a	9
	4. Eselon IV b	20
IV	Jenjang Pendidikan	
	1. Strata 2	-
	2. Strata 1	32
	3. Diploma 3	3
	4. SLTA	28
	5. SLTP	-
	6. SD	1

4. Alokasi Dan Realisasi Anggaran

BELANJA DAERAH
Pagu 9.188.217.299,00
Realisasi 8.541.304.679,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Pagu 4.674.717.299,00
Realisasi 4.127.131.243,00
BELANJA PEGAWAI
Pagu 4.674.717.299,00
Realisasi 4.127.131.243,00
BELANJA LANGSUNG
Pagu 4.513.500.000,00
Realisasi 4.414.173.436,00
BELANJA PEGAWAI
Pagu 344.611.000,00
Realisasi 336.721.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Pagu 3.860.069.000,00
Realisasi 3.770.740.436,00
BELANJA MODAL
Pagu 308.820.000,00
Realisasi 306.712.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)
Pagu (9.188.217.299,00)
Realisasi (8.541.304.679,00)

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa hasil dari perencanaan pembangunan terdiri dari; rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Kota Jambi dalam melaksanakan unsur perencanaan, sebelumnya telah menetapkan dokumen perencanaan jangka menengah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013–2018.

Perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan sampai Musrenbang Provinsi dengan menentukan skala prioritas berdasarkan hasil survey lapangan. Dari hasil survey lapangan tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi dengan melakukan pemaketan perencanaan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya dilakukan dengan proses pelelangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses Perencanaan Pembangunan telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/ Type / Spesifikasi	Bahan	Tahun Pembelian
1	2	3	5	7	8
2	02.	PERALATAN DAN MESIN			
		1. Alat Besar			
		2. Alat Angkutan			
	1.3.2.02.01.04.001	Kendaraan Roda Dua / Motor Dinas.	Honda Vario 125.	Besi	2017
	1.3.2.02.01.04.001	Kendaraan Roda Dua / Motor Dinas.	Honda Vario 125.	Besi	2017
	1.3.2.02.01.04.001	Kendaraan Roda Dua / Motor Dinas.	Honda Vario 125.	Besi	2017
		3. Alat Bengkel dan alat ukur.			

4. Alat Pertanian					
5. Alat Kantor dan Rumah Tangga					
1.3.2.05.02.04.004	AC Split /AC Dinding.	Panasonic CS/CU- YN9SKJ	Fyber	2017	
1.3.2.05.02.04.005	AC.Portable.	AUX-AM 09A4/LR I	Fyber	2017	
1.3.2.05.02.04.005	AC.Portable.	AUX-AM 09A4/LR I	Fyber	2017	
1.3.2.05.02.06.012	Portable Warles.	Krezt.Was- 112B	Fyber	2017	
1.3.2.05.02.06.008	Speaker Box.	TOA.ZS- 1030B	Fyber	2017	
1.3.2.05.02.06.008	Trafo Speker Corong.	TOA.ZT.361.	Fyber	2017	
1.3.2.05.02.06.008	Tiang Mic.	Krezt NB-200.	Fyber	2017	
1.3.2.05.02.06.008	Mic Jepit.	TOA.	Fyber	2017	
1.3.2.05.03.04.005	Kursi Sandaran Tinggi		Fyber	2017	
1.3.2.05.03.04.005	Kursi Sandaran Tinggi		Fyber	2017	
1.3.2.05.03.04.006	Kursi Sandaran Rendah.		Fyber	2017	
1.3.2.05.03.04.006	Kursi Sandaran Rendah.		Fyber	2017	
1.3.2.05.03.04.006	Kursi Sandaran Rendah.		Fyber	2017	
1.3.2.05.03.04.006	Kursi Sandaran Rendah.		Fyber	2017	
1.3.2.05.03.04.006	Kursi Sandaran Rendah.		Fyber	2017	
1.3.2.05.03.04.006	Kursi Sandaran Rendah.		Fyber	2017	
1.3.2.05.03.04.006	Kursi Sandaran Rendah.		Fyber	2017	
1.3.2.05.03.04.006	Kursi Sandaran Rendah.		Fyber	2017	
1.3.2.05.03.04.006	Kursi Sandaran Rendah.		Fyber	2017	
1.3.2.05.03.04.006	Kursi Sandaran Rendah.		Fyber	2017	
1.3.2.05.01.04.027	Almari Kaca Stand Bazar.		Kaca	2017	
1.3.2.05.01.04.028	Almari Kaca Stand Bazar.		Kaca	2017	
1.3.2.05.01.04.027	Almari Kaca Mushola.		Kaca	2017	
1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu Lurah.		Kayu.	2017	
1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu Lurah.		Kayu.	2017	
1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu Lurah.		Kayu.	2017	
1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu Lurah.		Kayu.	2017	
1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu Lurah.		Kayu.	2017	
1.3.2.05.03.07.004	Lemari Arsip Gantung.		Kayu.	2017	
1.3.2.05.03.07.004	Lemari Arsip Gantung.		Kayu.	2017	
1.3.2.05.03.07.004	Lemari Arsip Gantung.		Kayu.	2017	
1.3.2.05.03.07.004	Lemari Arsip Gantung.		Kayu.	2017	
1.3.2.05.02.06.047	Coffee Maker.	AKEBONNO20 LT	Stanlist	2017	
1.3.2.05.01.04.018	Box Kontainer.		Plasatik	2017	
1.3.2.05.01.04.018	Box Kontainer.		Plasatik	2017	

1.3.2.05.01.04.018	Box Kontainer.		Plasatik	2017
1.3.2.05.01.04.018	Box Kontainer.		Plasatik	2017
1.3.2.05.01.04.018	Box Kontainer.		Plasatik	2017
1.3.2.05.01.04.018	Box Kontainer.		Plasatik	2017
1.3.2.05.01.04.018	Box Kontainer.		Plasatik	2017
1.3.2.05.01.04.018	Box Kontainer.		Plasatik	2017
1.3.2.05.01.04.018	Box Kontainer.		Plasatik	2017
1.3.2.05.01.04.018	Box Kontainer.		Plasatik	2017
1.3.2.05.02.04.013	Air Curtain.	Gree.FM-1.25 9K	Besi	2017
1.3.2.05.02.04.013	Air Curtain.	Gree.FM-1.25 9K	Besi	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Nama /Visual Ruangn>Nama dan Jabatan.	Lokal.	Acrilyc.	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Nama /Visual Ruangn>Nama dan Jabatan.	Lokal.	Acrilyc.	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Nama /Visual Ruangn>Nama dan Jabatan.	Lokal.	Acrilyc.	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Nama /Visual Ruangn>Nama dan Jabatan.	Lokal.	Acrilyc.	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Nama /Visual Ruangn>Nama dan Jabatan.	Lokal.	Acrilyc.	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Nama /Visual Ruangn>Nama dan Jabatan.	Lokal.	Acrilyc.	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Nama /Visual Ruangn>Nama dan Jabatan.	Lokal.	Acrilyc.	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Nama /Visual Ruangn>Nama dan Jabatan.	Lokal.	Acrilyc.	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Nama /Visual Ruangn>Nama dan Jabatan.	Lokal.	Acrilyc.	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Nama /Visual Ruangn>Nama dan Jabatan.	Lokal.	Acrilyc.	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Nama /Visual Ruangn>Nama dan Jabatan.	Lokal.	Acrilyc.	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Nama /Visual Ruangn>Nama dan Jabatan.	Lokal.	Acrilyc.	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/papan Informasi /papan data.	Lokal.	Multiplex	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/papan Informasi /papan data.	Lokal.	Multiplex	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/papan Informasi /papan data.	Lokal.	Multiplex	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/papan Informasi /papan data.	Lokal.	Multiplex	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/papan Informasi /papan data.	Lokal.	Multiplex	2017

1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/papan Informasi /papan data.	Lokal.	Multiplex	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/papan Informasi /papan data.	Lokal.	Multiplex	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/papan Informasi /papan data.	Lokal.	Multiplex	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/papan Informasi /papan data.	Lokal.	Multiplex	2017
1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/papan Informasi /papan data.	Lokal.	Multiplex	2017
1.3.2.05.01.05.076	Papan Nama Instasi.	Lokal.	Neon Box.	2017
	6. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
1.3.2.06.01.02.105	Projektor / In Focus.	BENQ MW329	Fyber	2017
1.3.2.06.01.02.105	Layar (Screen) Proyektor.			2017
1.3.2.06.01.01.090	Runing Text.			2017
	7. Alat Kedokteran dan Kesehatan			
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
1.3.2.07.01.01.010.	Timbangan bayi.	GEA	Sintetis	2017
	8. Alat Laboratorium			

		9. Alat Persenjataan			
		10. Komputer			
	1.3.2.10.01.02.001	Komputer	LenovoIc510s-08IS H i3-6100	Fyber	2017
	1.3.2.10.01.02.003	Notebook ASUS	ASUSA455LA-WX669D	Fyber	2017
	1.3.2.10.01.02.003	Notebook ASUS	ASUSA455LA-WX669D	Fyber	2017
	1.3.2.10.01.02.003	Notebook ASUS	ASUSA455LA-WX669D	Fyber	2017
	1.3.2.10.01.02.003	Notebook ASUS	ASUSA455LA-WX669D	Fyber	2017
	1.3.2.10.01.02.003	Notebook ASUS	ASUSA455LA-WX669D	Fyber	2017
	1.3.2.10.01.02.003	Notebook ASUS	ASUSA455LA-WX669D	Fyber	2017
	1.3.2.10.01.02.003	Notebook ASUS	ASUSA455LA-WX669D	Fyber	2017
	1.3.2.10.02.01.009	Printer.	Printer.	Fyber	2017
	1.3.2.10.02.01.009	Printer.	Printer.	Fyber	2017
	1.3.2.10.02.01.009	Printer.	Printer.	Fyber	2017
	1.3.2.10.02.01.009	Printer.	Printer.	Fyber	2017
	1.3.2.10.02.01.009	Printer.	Printer.	Fyber	2017
	1.3.2.10.02.01.009	Printer.	Printer.	Fyber	2017
	1.3.2.10.02.01.012	Hardisk External.	Hardisk External.	Fyber	2017
	1.3.2.10.02.01.012	Hardisk External.	Hardisk External.	Fyber	2017
	1.3.2.10.02.01.012	Hardisk External.	Hardisk External.	Fyber	2017
	1.3.2.10.02.01.012	Hardisk External.	Hardisk External.	Fyber	2017
	1.3.2.10.02.03.004	Scanner.	AVISION AD 215	Fyber	2017
		11. Alat Eksplorasi			
		12. Alat Pengeboran			
		13. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian			
as		14. Alat Bantu Eksplorasi			
		15. Alat Keselamatan Kerja			
	1.3.2.15.03.02.012	Tenda Pramuka.		Tarpal	2017

		16. Alat Peraga			
		17. Peralatan Proses/Produksi			
		18. Rambu - rambu			
		19. Peralatan Olah Raga			

22) KECAMATAN JELUTUNG

1) Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Jelutung Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran yang ditargetkan program ini adalah untuk mendukung operasional kantor sehari-hari dan pelaksanaan program-program lainnya dengan kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan 7 Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam
12. Perjalanan Dinas

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apaatur

Sasaran yang ditargetkan program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran operasional, melalui kegiatan :

- (1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- (2) Pengadaan Mebeleur
- (3) Pengadaan Peralatan Perkantoran
- (4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- (5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- (6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor
- (7) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- (8) Rehabilitasi Ringan/Sedang Gedung Kantor

c) Peningkatan Disiplin Aparatur

Sasaran yang ditargetkan program ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai di Kecamatan Jelutung melalui kegiatan :

- (7) Pengadaan Mesin / Kartu Absensi
- (8) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- (9) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

d) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran yang ditargetkan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pegawai di Kecamatan Jelutung melalui kegiatan :

- (1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan

e) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Sasaran program ini adalah untuk memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah melalui kegiatan :

- (1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dituangkan dalam penyusunan LAKIP dan Laporan Tahunan

f) Program Perencanaan SKPD

Sasaran Program ini adalah untk memenuhi amana dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang program Perencanaan SKPD melalui kegiatan :

- (1) Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang dituangkan dalam Laporan Buku Rencana Kerja Anggaran, Laporan Buku Dokumen Pelaksanaan

Anggaran, Laporan Buku Rencana Kerja dan Laporan Buku Penetapan Kinerja

g) Pengembangan Data/Informasi

Sasaran yang ditargetkan program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan satu pintu melalui kegiatan :

(1) Pengembangan Data/Informasi dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi surat menyurat

h) Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran yang ditargetkan program ini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan Kecamatan yang meliputi segala urusan sosial kemasyarakatan melalui kegiatan :

(1) Bangkit Berdaya

(2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

(3) Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan

(4) Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

(5) Peningkatan Pelayanan Administrasi kependudukan

2) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Secara Struktural Susunan Organisasi Kantor Camat Jelutung adalah sebagai berikut :

(1) Camat

(2) Sekretaris Camat

(3) Kepala Seksi Pemerintahan

(4) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

(5) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

(6) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

(7) Kepala Seksi Pelayanan Umum

Sampai dengan Desember 2019 jumlah pegawai yang ada di Kantor Camat Jelutung sebanyak 18 orang dan jumlah pegawai Kelurahan sebanyak 51 Orang.

Kondisi kepegawaian pada Kecamatan Camat Jelutung Kota Jambi dalam tahun 2019 menurut Eselonering, Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:

Data Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
	Eselon III	1
	Eselon IV/a	12
	Eselon IV/b	34
	Pelaksana	22
Jumlah		69

3) Alokasi Dan Realisasi Anggaran

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	502.832.000	484.898.232
	❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	3.600.000
	❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.500.000	47.228.432
	❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5.460.000	3.974.800
	❖ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	119.230.000	117.133.000
	❖ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	70.640.000	70.640.000
	❖ Penyediaan Alat Tulis Kantor	47.542.000	47.542.000
	❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.100.000	15.100.000
	❖ Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	11.400.000	11.400.000
	❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	11.160.000	8.520.000

	Undangan ❖ Penyediaan Makanan dan Minuman ❖ Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam ❖ Perjalanan Dinas	17.600.000 63.600.000 80.000.000	16.160.000 63.600.000 80.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ❖ Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ❖ Pengadaan Mebeleur ❖ Pengadaan Peralatan Perkantoran ❖ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ❖ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional ❖ Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor ❖ Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ❖ Rehabilitasi Ringan/Sedang Gedung Kantor	768.884.600 35.072.100 44.900.000 249.012.500 35.000.000 107.250.000 32.650.000 195.000.000 70.000.000	753.494.275 34.906.600 44.900.000 240.300.175 35.000.000 105.812.500 31.775.000 190.800.000 70.000.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur ❖ Pengadaan Mesin/Kartu Absensi ❖ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya ❖ Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	78.750.000 15.000.000 33.750.000 30.000.000	77.959.500 15.000.000 32.967.000 29.992.500
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ❖ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peraturan PerUndang-Undangan	50.000.000 50.000.000	38.154.600 38.154.600
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ❖ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4.245.000 4.245.000	4.245.000 4.245.000

Realisasi Kinerja SKPD			
6	Program Perencanaan SKPD	12.400.000	12.200.000
	❖ Penyusunan Rencana Kerja SKPD	12.400.000	12.200.000
7	Program Pengembangan Data/Informasi	129.628.500	107.887.750
	❖ Pengembangan Data/Informasi	129.628.500	107.887.750
8	Program Pemberdayaan Masyarakat	2.297.459.900	2.064.726.125
	❖ Bangkit Berdaya	700.000.000	567.016.625
	❖ Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	408.727.500	376.977.500
	❖ Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	250.242.400	213.077.000
	❖ Pembinaan Adminstrasi Pemerintahan Kelurahan	926.640.000	895.805.000
	❖ Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	11.850.000	11.850.000

4) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui empat tahapan yaitu :

- a) Penyusunan Rencana
- b) Pada tahap ini, Kecamatan Jelutung melaksanakan empat langkah terdiri dari
 - (1) Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat menyeluruh dan terukur
 - (2) Persiapan rancangan rencana kerja yang berpedoman pada rancangan rencana pembangunan
 - (3) Melibatkan masyarakat – masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dimulai dari musrenbang tingkat Kelurahan, musrenbang tingkat Kecamatan dan musrenbang tingkat Kota
- c) Penetapan Rencana
- d) Pengendalian Pelaksanaan
- e) Evaluasi Pelaksanaan Rencana

5) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kecamatan Jelutung dalam kegiatan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat ditunjang oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a) Gedung Kantor / Ruang Kantor yang memadai
- b) Fasilitas kendaraan roda empat dan dua
- c) Fasilitas Meubelair
- d) Fasilitas lainnya Terlampir

6) Permasalahan dan Solusi

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan Jelutung timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh edung internal dan eksternal. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan edung r dan horizontal.

a) Isu-isu internal dilingkungan Kecamatan Jelutung antara lain

- (1) SDM yang belum edung r n l
- (2) Prasarana belum lengkap
- (3) Sistem kerja yang belum optimal
- (4) Administrasi yang belum tertib

b) Isu-isu Strategis eksternal antara lain :

- (1) Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar golongan
- (2) Peningkatan Potensi pengembangan jasa Perdagangan
- (3) Akses Informasi dan system transportasi terpadu belum tersedia
- (4) Belum adanya peran aktif masyrakat dalam menciptakan rasa aman
- (5) Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali
- (6) Perkembangan/Penataan Pemukiman yang asri
- (7) Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative
- (8) Belum adanya sarana promosi yang representative

c) Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan sebagai solusi antara lain sebagai berikut :

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui edung r n dan pelatihan, kursus keahlian, seminar dan semacamnya.
- (2) Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan.
- (3) Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.

23) KECAMATAN JAMBI SELATAN

1) Program dan Kegiatan

Adapun program yang wajib dilaksanan untuk strategi pencapaian sasaran tersebut diatas untuk tahun anggaran 2019 yaitu:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan didukung kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Kegiatan Peyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - d) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - e) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - f) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - g) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - h) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - i) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - j) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - k)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - l) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor,Pengemudi,Pramubhakti, dan Penjaga Malam;
 - m) Kegiatan Perjalanan Dinas
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dengan didukung kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pengadaan Mebeleur;
 - b) Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran;
 - c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
6. Program Perencanaan SKPD
- a) Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD;
 - b) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD.
7. Program Pengembangan Data/Informasi Kegiatan Pengembangan Data/Informasi
8. Program Pemberdayaan Masyarakat
- a) Kegiatan Bangkit Berdaya
 - b) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan;
 - c) Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan;
 - d) Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan
- 2) **Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kegiatan Pemerintahan Kecamatan, Camat Jambi Selatan dibantu dan didukung oleh Perangkat Kecamatan dan Perangkat Kelurahan. Struktur Organisasi Kantor Camat Jambi Selatan berpedoman kepada Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Camat Jambi Selatan Kota Jambi

memiliki personil sebanyak 19 (edung r belas) orang ASN, 5 (lima) Kepala Kelurahan serta Kepala Seksi dan Staf di Kelurahan se-Kecamatan Jambi Selatan. Adapun keseluruhan pegawai yang ada pada SKPD Kecamatan Jambi Selatan keadaan sampai dengan Desember 2018 berjumlah 57 orang yang terdiri dari:

a) Pegawai menurut Kepangkatan/Golongan:

Golongan IV	:	1	orang
Golongan III	:	4	orang
Golongan II	:	11	orang
Golongan I	:	1	orang

b) Pegawai menurut Tingkat Pendidikan:

S2	:	0	orang
Sarjana (S1/DIII)	:	22	orang
SLTA	:	28	orang
SLTP	:	5	orang
SD	:	2	orang

c) Pegawai menurut Tingkat Eselon:

Eselon III/a	:	1	orang
Eselon III/b	:	1	orang
Eselon IV/a	:	10	orang
Eselon IV/b	:	22	orang

d) Pegawai Non Eselon:

Golongan IV	:	-	orang
Golongan III	:	11	orang
Golongan II	:	11	orang
Golongan I	:	1	orang

3) Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Alokasi kegiatan kegiatan Pemerintahan Kecamatan Jambi Selatan Tahun 2019, terdiri dari beberapa program dengan realisasi tertera sebagaimana edun berikut:

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :

No	Kegiatan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian
1	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; Input : Jumlah dana				

	Output : Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik Outcome : Terlaksananya pelayanan kantor	11 rekening	133.100.000	127.696.140	95,94%
No	Kegiatan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian
2	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional; Input : Jumlah dana Output : Tersedianya kebutuhan kendaraan Outcome : Tercapainya pemeliharaan Kendaraan	1 tahun	125.140.000	120.059.316	95,94%
3	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan; Input : Jumlah dana Output : Terpenuhi pengelolaan keuangan sesuai standar Outcome : Terwujudnya administrasi pengelolaan keuangan sesuai standar meningkatnya kinerja pegawai	1 tahun	133.428.000	128.010.823	95,94%
4	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor Input : Jumlah dana Output : Terepenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor	1 tahun	26.400.000	25.328.160	95,94%
5	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Input : Jumlah dana Output : Pembelian alat tulis kantor Outcome : Terwujudnya administrasi dan pelayanan yang baik	1 tahun	77.990.500	74.824.086	95,94%
6	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan Input : Jumlah dana Output : Tersedianya barang cetak dan pengadaan Outcome : Terwujudnya administrasi dan pelayanan yang baik	1 paket	26.000.000	24.944.400	95,94%
7	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Input : Jumlah dana Output : Tersedianya alat-alat listrik kantor Outcome : Terwujudnya suasana penerangan kantor yang baik	1 paket	20.000.000	19.188.000	95,94%
No	Kegiatan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian

8	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Input : Jumlah dana Output : Tersedianya camera				
	saku, edung r PC, printer, sound system, eabsensi, proyektor : Terwujudnya kondisi kerja yang baik Outcome	1 paket	158.933.900	152.481.184	95,94%
9	Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga Input : Jumlah dana Output : Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor Outcome : Meningkatkan kebersihan kantor	1 paket	26.995.000	25.899.003	95,94%
10	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Input : Jumlah dana Output : honorarium jasa Outcome : pengantar surat dan materai : terlaksananya administrasi perkantoran	1 tahun	4.400.000	4.221.360	95,94%
11	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Input : Jumlah dana Output : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat kantor Outcome : Meningkatkan kinerja yang optimal	1 tahun	45.000.000	43.173.000	95,94%
12	Kegiatan penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam Input : Jumlah dana Output : Terpenuhinya keamanan kantor Outcome : Terciptanya kantor yang aman dan terkendalinya	1 tahun	238.200.000	228.529.080	95,94%
13	Kegiatan Perjalanan Dinas Input : Jumlah dana Output : Perjalanan dinas luar daerah Outcome : Terlaksannya perjalanan dinas luar daerah	1 tahun	95.000.000	91.143.000	95,94%
Jumlah			1.110.587.400	1.065.497.552	95,94%

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian
----	--------------------------------	--------	--------	-----------	---------------

1	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/ operasional Input : Jumlah dana Output : tersedianya motor dinas 2 unit Outcome : meningkatnya kinerja pegawai	2 unit	32.000.000	30.700.800	95,94%
2	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor Input : Jumlah dana Output : Tersedianya karpet Outcome : Terwujudnya perlengkapan kantor yang baik	unit	1.500.000	1.439.100	95,94%
3	Kegiatan pengadaan mebeleur Input : Jumlah dana Output : Tersedianya papan merek kantor Kec. Pemekaran, umbul-umbul Kec. Pemekaran, lemari arsip, teralis, kursi kerja, dan kusi rapat Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai dalam pelayanan	Paket/ unit	48.714.250	46.736.451	95,94%
4	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor; Input : Jumlah dana Output : Terpeliharanya Outcome pemeliharaan alat-alat kantor : Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	Paket/ unit	13.250.000	12.712.050	95,94%
Jumlah			95.464.250	91.588.401	95,94%

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No	Kegiatan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian
1	Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Input : Jumlah dana Output : Tersedianya pakaian dinas harian aparaturnya Outcome : Terpenuhinya keseragaman pegawai	steel	32.400.000	30.909.600	95,40%
Jumlah			32.400.000	30.909.600	95,40%

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No	Kegiatan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian
1	Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan				

Input : Jumlah dana	1 Tahun	5.000.000	4.770.000	95,40%
Output : Meningkatnya SDM				
Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai				
Jumlah		5.000.000	4.770.000	95,40%

e) Program Pemberdayaan Masyarakat

No	Kegiatan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian
1	Kegiatan bangkit berdaya Input : Jumlah dana				
	Output : Tersedianya sarana dan prasarana masyarakat Outcome : Terciptanya sarana dan prasarana yang baik dilingkungan masyarakat	Rupiah	500.000.000	477.000.000	95,40%
2	Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Input : Jumlah dana Output : Tersediannya data statis kecamatan, program pengembangan kecamatan, dan terlaksananya MTQ tingkat Kota Jambi Outcome : Tersediannya data statis kecamatan, program pengembangan kecamatan, dan terlaksananya MTQ tingkat Kota Jambi, dan terlaksananya pelayanan yang baik melalui PATEN	Rupiah	1.519.678.350	1.449.773.146	95,40%
3	Kegiatan pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan Input : Jumlah dana Output : Insentif RT Outcome : Terciptanya administrasi pemerintah kelurahan yang baik	Rupiah	769.290.000	733.902.660	95,40%
	Jumlah		2.788.968.350	2.660.675.806	95,40%

4) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses Perencanaan yang dilakukan atas Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing urusan wajib melalui dan termuat dalam RPJMD, RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD.

5) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang dimiliki dan dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jambi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Tanah : Rp. 1.952.750.000,-
2. Peralatan dan Mesin : Rp. 2.092.529.500,-
3. Gedung dan Bangunan : Rp. 1.208.530.000,-
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 180.396.111,-
5. Aset Tetap Lainnya : Rp. 4.500.000,-

6) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan prioritas, khususnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keempatannya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Kegiatan Pengadaan Mebeleur sangat kurangnya Aparatur yang lulus bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa solusinya Aparatur harus mengikuti Pelatihan/Ujian Pengadaan Barang dan Jasa yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Jambi.

24) KECAMATAN TELANAIPURA

1) Program dan Kegiatan

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b) Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian KinerjaKeuangan.
- f) ProgramPerencanaan SKPD
- g) Program Pengembangan data/informasi
- h) ProgramPemberdayaan Masyarakat

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi belum mempunyai standar pelayanan minimal akan tetapi Standar Operasional Persedur sudah ada, akibatnya sulit untuk mengukur tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Sampai dengan keadaan Bulan desember 2019 jumlah pegawai yang ada di Kantor Camat Telanaipura sebanyak 17 orang dan jumlah Pegawai Kelurahan sebanyak 34 orang dan Pegawai Honorer sebanyak 12 orang.

a) Jumlah pegawai menurut Pendidikan yaitu:

- (1) SD sebanyak 0 orang
- (2) SMP sebanyak 1 orang
- (3) SMA sebanyak 20 orang

b) SARJANA MUDA sebanyak 2 orang

- (1) Strata 1 sebanyak 24 orang
- (2) Strata II sebanyak 4 orang

c) Jumlah Pegawai menurut Golongan yaitu:

- (1) Golongan IV sebanyak 4 orang
- (2) Golongan III sebanyak 42 orang dan
- (3) Golongan II sebanyak 4 orang
- (4) Golongan I sebanyak 1 orang

d) Jumlah Pegawai menurut pejabat struktural yaitu:

- (1) Eselon IIIa sebanyak 1 Orang
- (2) Eselon IIIb sebanyak 1 Orang
- (3) Eselon IVa sebanyak 11 orang
- (4) Eselon IVb sebanyak 25 orang

4) Alokasi Dan Realisasi Anggaran

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI %		DANA YANG TERPAKAI
			FISIK	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	100,00	100,00	2.400.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96.600.000	90,00	76,04	73.450.355
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	125.750.000	100,00	100,00	125.750.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	37.600.000	100,00	100,00	37.600.000
5	Penyediaan alat tulis kantor	77.698.800	100,00	100,00	77.698.800
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.000.000	100,00	100,00	33.999.000
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.845.000	100,00	100,00	5.845.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	31.680.000	100,00	100,00	31.680.000
9	Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	105.600.000	100,00	100,00	105.600.000
10	Penyediaan jasa pengaman kantor , pengemudi, pramubakti dan penjaga malam	52.800.000	100,00	100,00	52.800.000
11	Perjalanan dinas	199.700.000	100,00	100,00	199.693.071
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
12	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	48.000.000	99,99	98,29	47.179.000
13	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	153.100.000	100,00	99,71	152.650.000
14	Pengadaan Mebeleur	62.750.000	100,00	99,52	62.450.000
15	Pengadaan peralatan perkantoran	84.650.000	100,00	98,78	83.620.000

16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	145.000.000	99,00	95,72	138.787.900
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-alat Kantor	18.900.000	100,00	100,00	18.900.000
18	Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor	73.520.000	100,00	99,52	73.169.950
III	Program peningkatan disiplin aparatur				
19	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	30.000.000	100,00	93,33	28.000.000
IV	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				
20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
21	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.880.000	100,00	100,00	5.880.000
VI	Program Perencanaan SKPD				
22	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	6.235.000	100,00	99,52	6.205.000
VII	Program Pengembangan Data/informasi				
23	Pengembangan data/informasi	24.000.000	99,00	82,03	19.688.000
VIII	Program Pemberdayaan Masyarakat				
24	Bangkit Berdaya	600.000.000	100,00	100,00	599.994.878
25	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	2.099.274.250	99,99	99,38	2.086.270.250
26	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	71.700.000	99,99	95,19	68.250.000
27	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	1.049.666.950	85,00	80,54	845.391.950
28	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	36.400.000	100,00	99,98	36.391.950
	JUMLAH	5.278.750.000	95,46	95,09	5.019.345.104

5) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan dilakukan dengan empat tahapan :

a) Penyusunan Rencana

Pada tahap ini Kecamatan Telanaipura melaksanakan empat langkah terdiri dari :

- (1) Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur.
- (2) Persiapan rancangan rencana kerja yang berpedoman pada rancangan rencana pembangunan
- (3) Melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing – masing jenjang melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG), dimulai dari musrenbang tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan musrenbang tingkat Kota Jambi.
- (4) Penetapan Rencana
- (5) Pengendalian Pelaksanaan
- (6) Evaluasi Pelaksanaan Rencana

6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

- Gedung Kantor yang memadai
- Rumah dinas 1 buah
- Kendaraan Operasional : Mobil Dinas 2 buah dan Motor Dinas 5 buah
- Komputer 7 buah
- Laptop 6 buah
- Dan fasilitas lainnya.

7) Permasalahan dan Solusi

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan timbul balik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Factor – factor internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertical dan horizontal.

Isu – isu internal dilingkungan Kantor Camat Telanaipura antara lain

- SDM yang belum professional
- Prasarana belum lengkap
- System kerja yang belum optimal
- Administrasi yang belum tertib

Isu – isu strategis eksternal antara lain :

- a) Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar golongan
 - b) Perkembangan/penataan permukiman yang asri
 - c) Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan
 - d) Akses informasi dan system transportasi terpadu belum tersedia
 - e) Belum adanya peran aktif masyarakat dalam menciptakan rasa aman
 - f) Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali
 - g) Belum adanya fasilitas kesehatan yang representative
- Belum adanya sarana promosi yang representative.

25) KECAMATAN DANAU SIPIN

1) Program dan Kegiatan

Adapun program yang wajib dilaksanakan untuk strategi pencapaian sasaran tersebut diatas yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan didukung kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya , air dan listrik
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
 - e. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

- f. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
 - h. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - i. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan
 - j. Kegiatan Penyediaan makan dan minuman rapat
 - k. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pramubhakti, Pengemudi dan Penjaga Malam
 - l. Kegiatan Perjalanan Dinas
2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana dengan didukung kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Kegiatan pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - d. Kegiatan Pengadaan Meubeleur
 - e. Kegiatan Pemeliharaan rutin Berkala Gedung Kantor
 - f. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - g. Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Alat Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Mesin /Kartu Absensi
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. Program Perencanaan SKPD
Kegiatan penyusunan rencana kerja SKPD
6. Program Pemberdayaan Kecamatan
 - a. Kegiatan Bangkit Berdaya
 - b. Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
 - c. Kegiatan koordinasi kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan
 - d. Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan
Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan

2) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Camat Danau Sipin mempunyai tugas pokok membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan di tingkat Kecamatan dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi yang telah ditentukan

Dalam melaksanakan fungsinya, Struktur Organisasi Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dengan susunan pegawai sebagai berikut:

1. Camat : 1 Orang
2. Sekretaris Camat : 1 Orang
3. Kasi Pemerintahan : 1 Orang
4. Kasi PMK : 1 Orang
5. Kasi Pelayanan Umum : 1 Orang
6. Kasi Sosial : 1 Orang
7. Kasi Trantib : 1 Orang
8. Kasubag Umum dan Kepegawaian : 1 Orang
9. Kasubag Keuangan dan Perencanaan : 1 Orang
10. Pelaksana : 6 Orang

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Danau Sipin didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari :

Pegawai	Posisi per 1/1/2019	Tambah	Kurang	Posisi per 31/12/2019
Pejabat Struktural	9			9
Staf	5	1		6
Pegawai Administrasi				
Jumlah	14			

3) Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi sesuai dengan Rencana Kinerja 2019, Kecamatan Danau Sipin akan melaksanakan 37 kegiatan dalam 8 program untuk memenuhi 7 sasaran strategis. Untuk melaksanakan semua aktivitas ini disediakan anggaran sebesar **Rp. 6.991.999.000** (enam milyar sembilan ratus

sembilan Puluh satu Juta sembilan ratus sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 6.625.433.623** Enam milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 94.76 %

Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Danau Sipin Tahun 2019 dengan realisasi , permasalahan dan solusinya adalah sebagai berikut :

- I. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Anggaran	: APBD 2019 Rp. 130.000.000,-
Realisasi	: Rp. 125.276.331 (96,37%)
 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Anggaran	: APBD 2019 Rp. 8.000.000,-
Realisasi	: Rp. 5.078.500 (63,48 %)
 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Anggaran	: APBD 2019 Rp. 318.648.000,-
Realisasi	: Rp. 300.599.000,- (94,34 %)
 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Anggaran	: APBD 2019 Rp. 64.300.000
Realisasi	: Rp. 60.472.870 (94,05 %)
 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Anggaran	: APBD 2019 Rp.60.000.000
Realisasi	: Rp. 59.940.425,- (99,90 %)
 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Anggaran	: APBD 2019 Rp. 15.000.000
Realisasi	: Rp. 14.944.000,- (99,63 %)
 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan

Anggaran	: APBD 2019 Rp. 13.000.000
Realisasi	: Rp. 12.976.000 (99,82 %)
 8. Penyediaan makanan dan minuman

Anggaran	: APBD 2019 Rp. 35.000.000
Realisasi	: Rp. 34.993.250 (99,98%)

9. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran Teknis Perkantoran
 - Anggaran : APBD 2019 Rp. 119.425.500
 - Realisasi : Rp. 119.383.500 (99,96%)
10. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi , Pramubhakti dan Penjaga Malam
 - Anggaran : APBD 2019 Rp.82.932.000
 - Realisasi : Rp. 82.932.000 (100 %)
11. Perjalanan Dinas
 - Anggaran : APBD 2019 Rp. 165.600.000
 - Realisasi : Rp. 165.566.989,- (99,98 %)
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
 - Anggaran : APBD 2019 Rp. 150.000.000
 - Realisasi : Rp. 148.000.000,- (98,67 %)
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - Anggaran : APBD 2019 Rp. 107.500.000,-
 - Realisasi : Rp. 106.151.854,- (98,75 %)
3. Pengadaan Meubeleur
 - Anggaran : APBD 2019 Rp. 100.000.000
 - Realisasi : Rp. 95.211.500,- (95,21%)
4. Pengadaan Peralatan Perkantoran
 - Anggaran : APBD 2019 Rp. 194.102.000
 - Realisasi : Rp. 190.019.000 (97,90%)
5. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
 - Anggaran : APBD 2019 Rp. 83.960.000
 - Realisasi : Rp. 83.876.474 (99,90%)
6. Pemeliharaan Rutin Berkala alat-alat Kantor
 - Anggaran : APBD 2019 Rp. 15.000.000
 - Realisasi : Rp. 14.190.000,- (94,60%)
7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - Anggaran : APBD 2019 Rp. 20.000.000
 - Realisasi : Rp. 20.000.000,- (100%)

II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Anggaran : APBD 2019 Rp. 33.500.000

Realisasi : Rp. 31.000.000 (92,54 %)

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis

Anggaran : APBD 2019 Rp. 10.000.000,-

Realisasi : Rp. (%)

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan SKPD

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran : APBD 2019 Rp. 2.000.000,-

Realisasi : Rp. 1.986.000 (99,30 %)

VI. Program Perencanaan SKPD

Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD SKPD

Anggaran : APBD 2019 Rp. 2.000.000

Realisasi : Rp. 1.962.500,- (98,13 %)

VII. Program Pengembangan Data Informasi

Kegiatan :

1. Data Pengembangan Informasi

Anggaran : APBD 2019 Rp. 7.000.000

Realisasi : Rp. 6.984.500,- (99,78 %)

VIII. Program Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan :

1. Bangkit Berdaya

Anggaran : APBD 2019 Rp. 1.000.000.000,-

Realisasi : Rp. 978.598.788,- (97,86 %)

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
 - Anggaran : APBD 2019 Rp. 1.083.772.000,-
 - Realisasi : Rp. 1.073.633.400,- (99,06 %)
3. Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan
 - Anggaran : APBD 2019 Rp. 39.470.000
 - Realisasi : 39.350.000,- (99,70 %)
4. Pembinaan Administrasi pemerintahan Kelurahan
 - Anggaran : APBD 2019 Rp. 1.281.100.000
 - Realisasi : 1.202.100.000,- (93,83 %)
3. Pembangunan Sarana dan prasarana di Kelurahan Sungai Putri
 - Anggaran : APBD 2019 Rp. 256.096.600
 - Realisasi : 203.526.950,- (79,47 %)
4. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Sungai Putri
 - Anggaran : APBD 2019 Rp. 111.041.400
 - Realisasi : 109.942.375,- (99,01 %)
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Murni
 - Anggaran : APBD 2019 Rp. 256.096.600
 - Realisasi : 185.192.556,- (72,31 %)
6. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Murni
 - Anggaran : APBD 2019 Rp. 111.042.000
 - Realisasi : 109.443.250 ,- (98,56 %)
7. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Legok
 - Anggaran : APBD 2019 Rp. 256.096.600
 - Realisasi : 251.208.853,- (98,09 %)
8. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Legok
 - Anggaran : APBD 2019 Rp. 111.041.400
 - Realisasi : 106.396.400 ,- (95,82 %)
9. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Selamat
 - Anggaran : APBD 2019 Rp. 239.979.800
 - Realisasi : 209.930.654,- (87,48 %)
10. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Selamat

Anggaran : APBD 2019 Rp. 130.158.200

Realisasi : 123.853.304 ,- (95,16 %)

11. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Solok Sipin

Anggaran : APBD 2019 Rp. 259.096.600

Realisasi : 242.297.000,- (93,56 %)

12. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Solok Sipin

Anggaran : APBD 2019 Rp. 111.041.400

Realisasi : 108.415.400 ,- (97,64)

4) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa hasil dari perencanaan pembangunan terdiri dari; rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Kota Jambi dalam melaksanakan unsur perencanaan, sebelumnya telah menetapkan dokumen perencanaan jangka menengah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013–2018.

Perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan sampai Musrenbang Provinsi dengan menentukan skala prioritas berdasarkan hasil survey lapangan. Dari hasil survey lapangan tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi dengan melakukan pemaketan perencanaan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya dilakukan dengan proses pelelangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses Perencanaan Pembangunan telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD

26) KECAMATAN PELAYANGAN

1) Program dan Kegiatan

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b) Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f) Program Perencanaan SKPD
- g) Program Pengembangan data/informasi
- h) Program Pemberdayaan Masyarakat

2) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Struktur Organisasi Kecamatan Pelayangan adalah sebagai berikut :

- a) Camat :1 orang
- b) Sekretaris Kecamatan :1 orang
- c) Kasi Tata Pemerintahan :1 orang
- d) Kasi PMK :1 orang
- e) Kasi Trantibum :1 orang
- f) Kasi Kesejahteraan Sosial:1 orang
- g) Kasi Pelayanan Umum :1 orang
- h) Kasubbag Umum :1 orang
- i) Kasubbag Keuangan :1 orang
- j) Kasubbag Kepegawaian :1 orang
- k) Pelaksana :4 orang

3) Alokasi Dan Realisasi Anggaran

No.	Indikator Target	Tolak Ukur	Kinerja Tahun 2016		
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat yang bersifat kedinasan	5.100.000	5.100.000	100
2.	Penyediaan Jasa	Terpenuhinya	75.000.000	46.694.700	62,26

	Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	kebutuhan telpon, air listrik			
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya data admin keuangan yang valid dan akurat	75.962.000	74.462.000	98,03
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya barang kebersihan kantor dan upah/ jasa kebersihan	12.800.000	12.800.000	100
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	40.000.000	40.000.000	100
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan & penggandaan bagi administrasi perkantoran	30.000.000	28.626.150	95,42
7.	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya lampu untuk penerangan kantor	15.000.000	15.000.000	100
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar sebagai informasi	3.600.000	3.600.000	100
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya untuk makan dan minum rapat-rapat dinas	40.000.000	38.600.000	96,50
10.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	Terjaganya keamanan kantor kecamatan dan kelurahan	102.000.000	102.000.000	100
11.	Perjalanan Dinas	Terlaksananya rapat & konsultasi keluar daerah	130.000.000	127.950.100	98,43
12.	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	56.600.000	56.600.000	100
13.	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	89.250.000	84.300.000	94,46
14.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	163.800.000	139.954.300	85,45
15.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	10.000.000	10.000.000	100
16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor	Terpeliharanya alat-alat kantor	15.000.000	15.000.000	100
17.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Terwujudnya Kedisiplinan Pegawai Kecamatan.	15.000.000	15.000.000	100
18.	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Tersedianya PDH bagi pegawai kelurahan dan	30.000.000	30.000.000	100

		kecamatan			
19.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Teluk Belango bagi pegawai	30.000.000	30.000.000	100
20.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen & laporan yang valid & akurat	3.200.000	3.200.000	100
21.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya penyusunan Rencana Kerja (Renja) RKA dan DPA SKPD	8.400.000	8.400.000	100
22.	Bangkit Berdaya	Terciptanya jalan lingkungan yang baik dan bersih di lingkungan masyarakat kec.	700.000.000	443.588.350	63,37
23.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Terlaksananya pemberian pelayanan kepada masyarakat	742.288.000	703.653.000	94,80
24.	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pengawasan kebersihan di lingkungan kecamatan	93.310.000	93.310.000	100
25.	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Meningkatnya tertib administrasi kelurahan	226.700.000	201.560.000	88,92
26.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Peningkatan pelayanan administrasi Kecamatan	38.670.000	38.670.000	100

4) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

- a) Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat sebagaimana hasil pada review Rancangan Awal RKPD tahun 2015, Kecamatan Kota Baru (Kec. Alam Barajo) untuk menentukan dan menetapkan Usulan prioritas dari Hasil Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan Alam Barajo Tahun 2016.
- b) Musrenbang Kecamatan menghasilkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- c) RKPD ditetapkan dengan Keputusan Camat , yang antara lain ditetapkannya KUA (Kebijakan Umum APBD)
- d) KUA dilaksanakan pada Desember 2016 yang menghasilkan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara)
- e) KUA dan PPAS dibahas bersama-sama dengan pihak terkait pada Bulan Desember 2016.
- f) Nota Kesepakatan antara Walikota dan Pimpinan DPRD tentang KUA dan PPAS.
- g) Berdasarkan KUA dan PPAS selanjutnya dilakukan penelitian RKA oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Jambi.
- h) Kompilasi RKA yang telah dibahas oleh Tim Anggaran menjadi Rancangan APBD diajukan dan dibahas dengan DPRD pada Bulan 2015 dan selanjutnya diverifikasi oleh Gubernur Jambi
- i) Penetapan APBD dengan PERDA dilaksanakan setelah turunnya hasil verifikasi dari Gubernur Jambi
- j) Setelah APBD ditetapkan disusun DPA dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan prasarana Kantor Camat Pelayangan sebagai berikut :

- a) Gedung Kantor 1 buah (Jl. KH.A. Somad No.01 Kel. Arab Melayu).
- b) Rumah Dinas Camat 1 buah (Jl. KH.A. Somad No. 02 Kel. Arab Melayu).

Prasarana yang dimiliki Kantor Camat Pelayangan guna penunjang/pendukung pelaksanaan operasional adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1.	Pesawat Telepon	2	-	-	2
2.	Radio Telekomunikasi	1	-	-	1
3.	Mesin Tik	3	-	1	4
4.	Meja Kerja	21	-	-	21
5.	Kursi Rapat	170	-	-	170
6.	Lemari Kayu	11	-	3	14

7.	Kendaraan Roda Dua	9	7	-	16
8.	Kendaraan Roda Empat	2	-	-	2
9.	Filing Cabinet	7	-	2	9
10.	Kursi Lipat	30	-	-	30
11.	Kursi Tamu	5	1	2	8
12.	Meja Rapat	7	-	3	10
13.	Kursi Kerja	31	-	14	45
14.	Sound System	2	-	-	2
15.	TV Berwarna 21"	1	-	1	2
16.	Genset	1	-	1	2
17.	Komputer	8	-		8
18.	Printer	7	-	6	13
19.	Air Conditioner/AC	10	-	1	11
20.	Kipas Angin	6	-	5	11
21.	Mesin Penghancur Kertas	2	-	-	2

27) KECAMATAN ALAM BARAJO

1) Program dan Kegiatan

- a) Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c) Peningkatan Disiplin Aparatur
- d) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
- f) Perencanaan SKPD
- g) Pengembangan Data/Informasi
- h) Pemberdayaan Masyarakat

2) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- a) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Alam Barajo berjumlah 23 orang Kualifikasi Pendidikan terdiri dari :
 - (1) S-2 terdiri dari 1 Orang.
 - (2) S-1 terdiri dari 12 Orang
 - (3) D-III terdiri dari 1 Orang

- (4) SLTA terdiri dari 9 Orang
- b) **Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Alam Barajo berjumlah 23 orang Kualifikasi Pangkat dan Golongan terdiri dari :**
- (1) Pembina (IV/a) terdiri dari 1 Orang.
 - (2) Penata Tingkat I (III/d) terdiri dari 7 Orang.
 - (3) Penata (III/c) terdiri dari 6 Orang.
 - (4) Penata Muda Tingkat I (III/b) terdiri dari 3 Orang.
 - (5) Penata Muda (III/a) terdiri dari 1 Orang.
 - (6) Pengatur Tingkat I (II/d) terdiri dari 1 Orang.
 - (7) Pengatur (II/c) terdiri dari 2 Orang
 - (8) Pengatur Muda Tk. I (II/b) terdiri dari 2 Orang
- c) **Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Alam Barajo yang memangku Jabatan Struktural sebanyak 9 orang terdiri dari :**
- (1) Camat 1 Orang.
 - (2) Sekretaris Camat 1 Orang.
 - (3) Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian 1 Orang
 - (4) Kepala Sub Bagian perencanaan dan keuangan 1 Orang
 - (5) Kepala Seksi Pemerintahan Umum 1 Orang
 - (6) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 1 Orang
 - (7) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 1 Orang
 - (8) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 1 Orang
 - (9) Kepala Seksi pelayanan umum 1 Orang

NO	NAMA	PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1.	Drs. A M R A N	S-1	IV/a	CAMAT
2.	Drs. MOH. SEPRIANDY	S-1	III/d	SEKCAM
3.	ELVIRA, S.PKP	S-1	III/d	KASI PMK
4.	AHMAD IHSAN, SPT	S-1	III/d	KASI PEM
5.	ARNI YUNIARTI	STM	III/d	KASI KESOS
6.	Drs. MUHAMMAD SIDDIQ	S-1	III/d	KASI TRANTIB
7.	RITA ERIANI, ST	S-1	III/c	SUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN

8.	MAHMUDIN, SE	S-1	III/b	SUBBAG UMUM & KEPEG
9.	NURAINA, SE	S-1	III/d	FUNGSIONAL UMUM
10.	KHAIRUL ANWAR	SMEA	III/d	FUNGSIONAL UMUM
11.	SASRA WENDI	SMEA	III/d	FUNGSIONAL UMUM
12.	ARIO K. WIJAYA, SE	S-1	III/c	FUNGSIONAL UMUM
13.	WANHAR	SMA	III/c	FUNGSIONAL UMUM
14.	SYAHNELTY, SE	S-1	III/c	FUNGSIONAL UMUM
16.	ZUBAIDAH	SMEA	III/b	FUNGSIONAL UMUM
17.	RITA HARYANA, SE	S-1	III/b	FUNGSIONAL UMUM
18.	AYU AFRINA KARTINI, A.Md	D-III	III/a	FUNGSIONAL UMUM
19.	MISNIYATI	SLTA	II/d	FUNGSIONAL UMUM
20.	MAWARDI IRHAM	SLTA	II/c	FUNGSIONAL UMUM
21.	DIAN JULIANTORO	SMA	II/c	FUNGSIONAL UMUM
22.	DEWI FITRI YENI	STM	II/b	FUNGSIONAL UMUM
23	VIVI NOVIANTI	SMEA	II/b	FUNGSIONAL UMUM

d) **Jumlah Aparatur Sipil Negara Kantor Lurah se-Kecamatan Alam Barajo berjumlah 42 orang Kualifikasi Pangkat dan Golongan terdiri dari :**

- (1) S-2 terdiri dari 1 Orang.
- (2) S-1 terdiri dari 23 Orang
- (3) SLTA /Sederajat terdiri dari 18 Orang

e) **Jumlah Aparatur Sipil Negara Kantor Lurah se-Kecamatan Alam Barajo berjumlah 42 orang Kualifikasi Pangkat dan Golongan terdiri dari :**

- (1) Penata Tingkat I (III/d) terdiri dari 8 Orang.
- (2) Penata (III/c) terdiri dari 10 Orang.
- (3) Penata Muda Tingkat I (III/b) terdiri dari 8 Orang.
- (4) Penata Muda (III/a) terdiri dari 8 Orang.
- (5) Pengatur Tingkat I (II/d) terdiri dari - Orang.
- (6) Pengatur (II/c) terdiri dari 8 Orang
- (7) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) terdiri - Orang
- (8) Pengatur Muda (II/a) terdiri dari - Orang.

f) **Jumlah Aparatur Sipil Negara Kantor Lurah se-Kecamatan Alam Barajo yang memangku Jabatan Struktural sebanyak 21 orang terdiri dari :**

- (1) Lurah 5 Orang.
- (2) Sekretaris Lurah 4 Orang.

- (3) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 5 Orang
- (4) Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum 4 Orang
- (5) Kepala Seksi Pemasarakatan dan Kesos 3 Orang

3) Alokasi Dan Realisasi Anggaran

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran Rp. 3.600.000 dengan realisasi Rp.3.600.000 atau mencapai 100 %
- (2) Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran Rp. 58.000.000 dengan realisasi Rp. 42.819.914 atau mencapai 73,83%.
- (3) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dengan alokasi Anggaran Rp. 6.500.000 dengan realisasi 3.465.100 atau mencapai 53,31%.
- (4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan alokasi anggaran Rp. 132.260.000 dengan realisasi Rp. 132.260.000 atau mencapai 100 %.
- (5) Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan alokasi anggaran Rp. 24.000.000 dengan realisasi Rp. 24.000.000 atau mencapai 100 %.
- (6) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 70.000.000 dengan realisasi Rp. 70.000.000 atau mencapai 100 %.
- (7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran Rp. 38.000.000 dengan realisasi Rp. 38.000.000 atau mencapai 100 %.
- (8) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran Rp. 6.500.000 dengan realisasi Rp. 6.500.000 atau mencapai 100 %.
- (9) Penyediaan makanan dan Minuman dengan alokasi anggaran Rp. 33.500.000 dengan realisasi Rp. 33.489.000 atau mencapai 99,97 %.
- (10) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam dengan alokasi anggaran Rp. 90.600.000 dengan realisasi Rp. 90.600.000 atau mencapai 100 %.

(11) Perjalanan Dinas realisasi dengan anggaran Rp. 100.000.000 dengan realisasi Rp. 99.959.644 atau mencapai 99,96 %.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dengan alokasi anggaran Rp. 226.000.000 dengan realisasi Rp. 212.302.200 atau mencapai 93,94 %.

(2) Pengadaan Perlengkapan gedung kantor dengan alokasi anggara Rp. 40.300.000 dengan realisasi Rp. 54.700.000 atau mencapai 99,75 %..

(3) Pengadaan Meubeleurn dengan alokasi anggaran Rp. 54.700.000 dengan realisasi Rp. 54.700.000 atau mencapai 100 %.

(4) Pengadaan perlengkapan perkantoran dengan alokasi anggaran Rp. 77.400.000 dengan realisasi Rp. 77.000.000 atau mencapai 99,48 %.

(5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi anggaran Rp. 97.000.000 dengan realisasi Rp. 79.358.295 mencapai 81,81 %.

(6) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan alokasi anggaran Rp. 8.000.000 dengan realisasi rp. 8.000.000 atau mencapai 100%.

(7) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor dengan alokasi anggaran Rp. 20.000.000 dengan realisasi Rp. 20.000.000 atau mencapai 100 %.

4) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan meliputi empat kegiatan yaitu perumusan masalah, perumusan agenda (agenda setting), perumusan usulan dan pengesahan usulan. Proses tersebut dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan. Dalam hal ini masyarakat dapat berpartisipasi langsung dengan memberikan masukan tentang berbagai masalah yang yang dihadapi mereka. Permasalahan tersebut juga harus disertai alternatif pemecahannya sehingga dapat dilakukan perbaikan. Ditingkat kelurahan permasalahan dan solusi

dibahas dan didiskusikan bersama-sama. Adapun proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

Proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

- a) Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat sebagaimana hasil pada review Rancangan Awal RKPD tahun 2016, Kecamatan Alam Barajo untuk menentukan dan menetapkan Usulan prioritas dari Hasil Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kelurahan se Kecamatan Alam Barajo Tahun 2016. Musrenbang Kecamatan menghasilkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) diantaranya;
- b) Kesepakatan tentang rumusan yang akan digunakan sebagai masukan utama untuk penyempurnaan rancangan RKPD dan Renja SKPD, sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- c) RKPD ditetapkan dengan Keputusan Camat , yang antara lain ditetapkannya KUA (Kebijakan Umum APBD)
- d) KUA dilaksanakan pada Desember 2016 yang menghasilkan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara)
- e) KUA dan PPAS dibahas bersama-sama dengan pihak terkait pada Bulan Desember 2016.
- f) Nota Kesepakatan antara Walikota dan Pimpinan DPRD tentang KUA dan PPAS.
- g) Berdasarkan KUA dan PPAS selanjutnya dilakukan penelitian RKA oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Jambi.
- h) Kompilasi RKA yang telah dibahas oleh Tim Anggaran menjadi Rancangan APBD diajukan dan dibahas dengan DPRD pada Bulan Desember 2016 dan selanjutnya diverifikasi oleh Gubernur Jambi
- i) Penetapan APBD dengan PERDA dilaksanakan setelah turunnya hasil verifikasi dari Gubernur Jambi
- j) Setelah APBD ditetapkan disusun DPA dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kecamatan Alam Barajo dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya serta pelayanan kepada masyarakat ditunjang oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

NO	JENIS SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kantor Kecamatan	1 unit	Kontrak
2	Ruang Camat	1 buah	Baik
3	Ruang Sekretaris Kecamatan	1 buah	Tidak representatif
4	Ruang Subbag Umum Kepegawaian		
5	Ruang PATEN (Seksi Pelayanan Umum)	1 buah	
6	Ruang Seksi PMK	1 buah	Tidak representatif
7	Ruang Seksi Trantib		
8	Ruang Seksi Tata Pemerintahan		
9	Ruang Seksi Kesejahteraan Sosial		
10	Ruang Rapat	1 buah	Garasi
11	Ruang Subbag Keuangan dan Perencanaan	1 buah	sempit
12	Kursi Rapat	50 buah	3 (tiga) Rusak
13	Kursi Tamu (Sofa)	1 set	Baik
14	Meja Rapat	1 set	Baik
15	AC Split	2 unit	Baik
16	Meja Kerja untuk Camat dan Sekcam	2	Baik
17	Meja Kerja untuk 5 Kasi dan 3 Kasubbag	8	Baik
18	Meja Komputer	2	Baik
19	Lemari Arsip besi (lion)	2	Baik
20	Lemari Arsip kayu	4	baik
21	Kursi Kerja untuk Camat dan Sekcam	2	Baik
22	Kursi Kerja untuk 5 Kasi dan 3 Kasubbag	8	Baik
23	Kursi Komputer	2	Rusak
24	Kamera	1	Baik
25	Printer Epson L565	2	Baik
26	Speaker Aktive + Speaker Stand	1	Baik
27	Brandkas	1	Baik
28	Mobil Dinas/Mini Bus	1 unit	Baik
29	Mobil Dinas Pick up	1 unit	Baik

30	Kendaraan Roda 2	16 unit	1 rusak 1 belum dikembalikan
31	Proyektor/Infokus	1	Baik
32	Televisi	1	Baik (Parabola Rusak)
33	Komputer rakitan	1	Baik
34	AI in One PC	4	Baik
35	Pengeras Suara/Megapon	5	Baik
36	Printer Multifungsi Brother	3 unit	Baik
37	Printer A3 Multifungsi Brother	1 unit	Baik
38	Papan Merek Ktr Camat Alam Barajo	1	Baik
39	Kipas Angin Merk Miyako	4	Baik
40	Mesin Absen	1	Baik
41	Laptop Absen	1	Baik
42	Kendaraan Roda Tiga	1	Baik
43	Mobil Pick Up	1	Baik
44	Papan Pengumuman	2	Baik
43	Lemari Arsip Krisbow	4	Baik
44	Gerobak Sampah	1	Baik
45	Kamera CCTV	4 titik	Baik
46	Meteran	1	Baik
47	Speaker Mini + Mikrofon	1	Baik
48	Mesin Penghancur Kertas	1	Baik

6) Permasalahan dan Solusi

Dalam rancangan awal RPJM Kota Jambi tahun 2013-2018 Bab 4 mengenai isu-isu strategis, dirangkum

- a) Banyaknya penduduk Kecamatan Alam Barajo yang belum memiliki KTP-el, hal ini dapat dikurangi antara lain dengan membuat selebaran dan pengumuman tentang arti pentingnya kepemilikan KTP-el, sosialisasi kepada masyarakat melalui forum RT di kelurahan.
- b) Adanya salah satu pegawai yang tidak masuk kantor selama 3 tahun dikarenakan sakit telah diupayakan koordinasi dengan Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi untuk proses pensiun.

- c) Rendahnya tingkat kehadiran pegawai dapat diminimalisir dengan adanya mesin absensi biometric

28) KECAMATAN PAAL MERAH

1) Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dalam **RPJMD 2019-2023** yaitu indeks kepuasan masyarakat dan tingkat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- (2) Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- (5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- (6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- (7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- (8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- (9) Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi Perkantoran / Teknis Perkantoran
- (10) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam;
- (11) Kegiatan perjalanan dinas

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- (1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
- (2) Kegiatan Pengadaan Mebeleur
- (3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran
- (4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas Operasional
- (5) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor

- 2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - a) Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.**
 - a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD;
- 5) Program Perencanaan SKPD**
 - a) Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD
 - b) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD.
- 6) Program Pengembangan data/informasi**
 - a) Kegiatan Pengembangan data/informasi
- 7) Program Pemberdayaan Masyarakat**
 - a) Kegiatan Bangkit Berdaya
 - b) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
 - c) Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan
 - d) Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

8) Sumber Daya Manusia

a) Jumlah Pegawai

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Paal Merah didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut seksi dan kesekretariatan. Pada akhir tahun 2018, jumlah pegawai kecamatan Paal Merah adalah sebanyak 26 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut 46.15 % atau 12 orang diantaranya berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sedangkan 53.85 % atau 14 orang berstatus tenaga kerja kontrak (TKK). Sementara itu jumlah total pegawai yang bertugas pada kelurahan di Kecamatan Paal Merah mencapai 38 orang, yang didominasi oleh pegawai berstatus PNS yang jumlahnya mencapai 31 orang (81,57 %) dan 7 orang (18,42 %) berstatus Tenaga kerja Kontrak (TKK). Untuk lebih jelasnya, jumlah dan komposisi pegawai menurut status dan golongan dapat dilihat pada table berikut ini :

NO.	UNIT PENEMPATAN	STATUS PEGAWAI				JUMLAH (ORANG)
		PNS DAN CPNS		NON PNS		
		PNS	CPNS	TKK	TKS	
A.	KECAMATAN					
1.	Camat	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	1
3.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	-	1	-	2
4.	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	1	-	3	-	4
5.	Seksi Tata Pemerintahan	1	-	1	-	2
6.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1	-	2
7.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	-	-	1
8.	Seksi Kesejahteraan Sosial	1	-	1	-	2
9.	Seksi Pelayanan Umum	1	-	1	-	2
10.	Staf Pelaksana	3	-	6	-	9
JUMLAH (ORANG) A		12	-	14	-	26
		12		14		
PERSENTASE (%) A		46,15	-	53,85	-	
		46,15		53,85		
B..	KELURAHAN					
1.	Lurah	4	-	-	-	
2.	Sekretaris Kelurahan	4	-	-	-	4
3.	Seksi Tata Pemerintahan dan Pelum	2	-	-	-	2
4.	Seksi PMK dan KESOS	5	-	-	-	5
5.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	4	-	-	-	4
6.	Staf Pelaksana	13	-	-	7	19
JUMLAH (ORANG) B		31	-	-	7	38
		31		7		

PERSENTASE (%) B	81,57	-	-	18,42	
	81,54		18,46		
Jumlah Total	69		23		92

9) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, pada tahun 2019 aparat Kecamatan Paal Merah berstatus PNS yang memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1, S2, dan S3) yaitu 9 orang atau sekitar 75,00 %. Sedangkan sisanya atau sebesar 3 orang (25,00 %) merupakan aparat dengan tingkat pendidikan D3 atau SLTA. Untuk pegawai berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang memiliki pendidikan terakhir (S1) yaitu 4 orang atau sekitar 28,57 % sedangkan sisanya sebesar 10 orang (71,43 %) memiliki tingkat pendidikan terakhir SLTA.

Demikian halnya dengan kondisi tingkat pendidikan aparat pada kelurahan di Kecamatan Paal Merah. Komposisinya dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 15 orang (45,45) sedangkan sisanya sebesar 18 (54,54) berpendidikan setingkat SLTA. Hal tersebut menunjukkan relatif belum memadainya kualitas sumber daya manusia aparat pada Kecamatan Paal Merah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

NO.	UNIT PENEMPATAN	TINGKAJ PENDIDIKAN TERAKHIR				JUMLAH (ORANG)
		SARJANA		NON SARJANA		
		S3/S2	S1	D4/D3	D1/SLT A	
1	2	3	4	5	6	7
A. KECAMATAN						
1.	Camat	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	1	-	-	1
3.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-		1	1
4.	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	-	1	-		1
5.	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	-		1
6.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	-	-	1
7.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	-	-	1
8.	Seksi Kesejahteraan Sosial	1	-	-	-	1
9.	Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	-	1
10.	Staf Pelaksana	-	-	-	2	2
JUMLAH (ORANG) A		2	6	-	3	11
		8		3		
PERSENTASE (%) A		72,72		27,27		
1	2	3	4	5	6	7
B.. KELURAHAN						
1.	Lurah	-	4	-	1	5
2.	Sekretaris Kelurahan	-	5	-	-	5
3.	Seksi Tata Pemerintahan dan	-	3	-	2	5

	Pelum					
4.	Seksi PMK dan KESOS	-	2	1	2	5
5.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	3	-	2	5
6.	Staf Pelaksana	-	4	-	10	13
JUMLAH (ORANG) B		-	21	1	17	32
			21		18	39
PERSENTASE (%) B			65,62		59,37	
JUMLAH TOTAL			29		21	50
NO.	UNIT PENEMPATAN	TINGKAJ3 PENDIDIKAN TERAKHIR				JUMLAH (ORANG)
		SARJANA		NON SARJANA		
		S3/S2	S1	D4/D3	D1/SLT A	
A. KECAMATAN						
1.	Camat	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	1	-	-	1
3.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-		1	1
4.	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	-	1	-		1
5.	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	1	1
6.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	-	-	1
7.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	-	-	1
8.	Seksi Kesejahteraan Sosial	1	-	-	-	1
9.	Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	-	1
10.	Staf Pelaksana	-	1	-	2	3
JUMLAH (ORANG) A		1	7	-	4	12
			8		4	
PERSENTASE (%) A		-	66,66	-	33,34	
			66,66		33,34	
B.. KELURAHAN						
1.	Lurah	-	2	-	2	4
2.	Sekretaris Kelurahan	-	4	-	-	4
3.	Seksi Tata Pemerintahan dan Pelum	-		-	2	2
4.	Seksi PMK dan KESOS	-	1	1	3	5
5.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	2	-	2	4
6.	Staf Pelaksana	-	4	-	9	13
JUMLAH (ORANG) B		-	13	1	18	32
			13		19	32
PERSENTASE (%) B		-	40,62	3,12	56,25	
			40,62		59,37	
JUMLAH TOTAL			21		23	44

Sumber: Kecamatan Paal Merah, 2018

NO	PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH
1	Non Pangkat (PTT)	--
2	Pelaksana TK I/d	-
3	Pengatur Muda / IIa	2
4	Pengatur Muda TK I/ IIb	2
5	Pengatur / IIc	6
6	Pengatur TK di / IId	2
7	Penata Muda / III a	4
8	Penata Muda TK I/ IIIb	7
9	Penata / III C	19
10	Penata TK I / III d	7
11	Pembina /IV a	1
JUMLAH		50
NO	PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	1
3	Eselon IV/a	10
4	Eselon IV/b	22
5	Pegawai Non Eselon	16
JUMLAH		50

ALOKASI ANGGARAN

No	Indikator Target	Tolak Ukur	Kinerja		
			Target	Realisasi	%
1	Bangkit Berdaya	Pembangunan Jalan Lingkungan/parit di Wilayah Kecamatan	Rp. 539.400.000	Rp. 490.160.320	90,87
2	Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat, Posyandu, PKK, MTQ	Rp. 593.385.000	Rp 549.475.000	92,60
3	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Penertiban Kawasan Lingkungan Bersih di Wilayah Kecamatan	Rp. 86.235.000	Rp. 81.960.000	95.04
4	Pembinaan administrasi	Terwujudnya Pelayanan	Rp. 2.596.750.000	Rp. 2.551.685.000	98,26

	Pemerintahan Kelurahan	administrasi yang baik serta menjadikan masyarakat yang berkualitas			
	JUMLAH		Rp. 3.815.770.000	Rp.3.673.280.320	96,27

Penyelenggraan Pemerintahan untuk urusan pilihan dilaksanakan pada program pemberdayaan Kecamatan yang terbagi atas 4 kegiatan yang terdiri dari Kegiatan Bangkit Berdaya, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan. Dan Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Alokasi dana sebesar Rp. 3.815.770.000 dengan realisasi Rp.. 3.673.280.320 Persentase pelaksanaa kegiatan ini sebesar 96,27 %.

10) Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat 3 meliputi :

a) Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk Jangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

c) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk Jangka waktu satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

11) Sarana dan Prasarana yang digunakan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Paal Merah dapat berjalan dengan baik tidak hanya apabila didukung oleh SDM yang terampil, tetapi juga apabila didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun kondisi aset sarana dan prasarana di Kecamatan Paal Merah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	01		TANAH		-	
2	02		Peralatan dan Mesin		709.390.000	
		01	ALAT BESAR			
		02	ALAT ANGKUTAN		-	
		03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		-	
		04	ALAT PERTANIAN		-	
		05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		531.890.000	
		06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		-	
		07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
		08	ALAT LABORATORIUM		-	
		09	ALAT PERSENJATAAN		171.500.000	
		10	KOMPUTER			
		11	ALAT EKSPLORASI			
		12	ALAT PENGEBORAN			
		13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN			
		14	ALAT BANTU EKSPLORASI		6.000.000	
		15	ALAT KESELAMATAN KERJA			
		16	ALAT PERAGA			
		17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI			
		18	RAMBU - RAMBU			
		19	PERALATAN OLAH RAGA			
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN		3.870.880.310,80	
		01	Bangunan Gedung			
		02	Bangunan Monumen			
		03	BANGUNAN MENARA			
		04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI			
3	03		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI			
		01	JALAN DAN JEMBATAN			
		02	BANGUNAN AIR			
		03	INSTALASI			
4	04	04	JARINGAN			
			ASET TETAP LAINNYA			
		01	BAHAN PERPUSTAKAAN			
		02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA			
		03	HEWAN			

5	05	04	BIOTA PERAIRAN			
		05	TANAMAN			
		06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA			
		07	ASET TETAP DALAM RENOVASI			
6	06		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN			
		01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN			
7	07		ASET LAINNYA			
			KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA			
			KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA			
			ASET TIDAK BERWUJUD			
8	08		ASET TIDAK BERWUJUD			
			ASET LAIN-LAIN			
9	09		ASET LAIN-LAIN			
			Jumlah			4.580.270.310,80

C. RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

1) Program dan Kegiatan

Prioritas Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun Anggaran 2019

No	Program Kegiatan	Indikator	Target
1	Program Peningkatan, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%
1.1	Fasilitasi Pemantauan dan Pengendalian Keamanan	Jumlah rapat dan rekomendasi FKDM	5 kali rapat
		Jumlah survey lokasi kegiatan FKDM	6 kali survey
		Jumlah rapat dan rekomendasi tim pemantauan orang asing	4 kali rapat
		Jumlah survey orang asing	7 kali survey
		Jumlah rapat dan rekomendasi tim PKS	3 kali rapat
		Jumlah rapat Kominda	-
		Jumlah sosialisasi terorisme dan radikalisme	1 kali sosialisasi
		Jumlah laporan yang dihimpun	3 laporan
1.2	Peningkatan Ketahanan Seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	Jumlah rapat dan rekomendasi FKUB	9 kali rapat
		Jumlah dialog pembinaan umat beragama di Kota Jambi	-
		Jumlah pemantauan rumah ibadah, lapo tuak dan rekomendasi IMB Rumah Ibadah	20 kali pemantauan
		Jumlah rapat dan rekomendasi tim PAKEM	3 kali rapat
		Jumlah rapat fasilitasi peran Pemda dan Masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan serta komunikasi Pegiat Kesenian Daerah	-
		Jumlah rapat dan rekomendasi pegiat seni	2 kali rapat
		Jumlah dialog seni dan budaya	-
		Jumlah rapat koordinasi ketahanan ekonomi masyarakat	-

1.3	Pembinaan dan Pengembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah rapat Dewan dan Pengurus FPK	-
		Jumlah Rapat tim Pendidikan Wasbang	-
		Jumlah Rapat Tim Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba	-
		Jumlah peserta Silaturahmi Kebangsaan	150 orang
		Jumlah peserta Pendidikan Kebangsaan	100 orang
		Jumlah siswa/orang yang di tes urine	200 orang
		Jumlah peserta Sosialisasi Narkoba	-
1.4	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Jumlah rapat dan rekomendasi kebijakan	3 kali rapat
2	Program Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol	Terlaksananya pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi bagi orkemas dan parpol	100%
2.1	Koordinasi dan Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rapat tim pemantauan situasi politik	4 kali rapat
		Jumlah peserta pendidikan politik	80 orang
		Jumlah peserta sosialisasi UU Pemilu	120 orang
		Laporan Pelaksanaan Pemilu	1 laporan
2.2	Pembinaan Pertanggungjawaban bantuan keuangan	Jumlah bantuan keuangan Parpol	-
		Jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan	14 parpol
		Jumlah peserta sosialisasi Permendagri No. 36 Tahun 2018	24 orang
2.3	Pemantauan Orkemas	Jumlah rapat Orkemas	-
		Jumlah rapat koordinasi dan rekomendasi	2 kali rapat
		Jumlah pengawasan dan pemantauan Orkemas	10 kali pemantauan
3	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang tertib dilingkungan badan kesbangpol Kota Jambi	100%
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	-
3.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian telepon, internet, air dan listrik	Telepon lokal, internet 20 Mbps, air 360 m3, listrik 13.200 kwh

3.3	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pembayaran pajak	6 unit kendaraan roda 4 (empat) dan 10 unit kendaraan roda 2 (dua)
3.4	penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah aparatur internal OPD yang dilayani	41 orang
3.5	penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah peralatan kebersihan yang dibutuhkan	28 item
3.6	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah jenis peralatan yang diservice	11 unit komputer, 11 unit laptop dan 13 unit printer
3.7	penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor dan materai yang disediakan	60 item, dan 375 lembar materai
3.8	penyediaan barang cetakan dan pengadaan	jumlah bahan yang dicetak/digandakan	11 item cetak kebutuhan
3.9	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	9 item
3.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	-
3.11	penyediaan makanan dan minuman	jumlah bungkus/kotak makanan dan minuman yang disediakan	320 kotak scack, 240 nasi kotak, 240 nasi bungkus, 125 gallon dan 10 dus air mineral gelas
3.12	Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam	jumlah penjaga keamanan kantor	1 orang
3.13	Perjalanan Dinas	jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	43 kali perjalanan dinas luar daerah dan 160 kali perjalanan dalam daerah
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja aparatur	100%
4.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	10 buah umbul umbul
4.2	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	3 unit printer, 3 unit baterai laptop, 1 unit hardisk eksternal, 5 buah flash disk, 1 unit mesin absen, 1 unit laptop, 1 paket jaring FO, 1 paket jaring internet

4.3	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	1 unit kursi kerjaputar, 3 unit meja kerja
4.4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bagian gedung yang dilakukan perbaikan	Pengecatan pagar dan gedung
4.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	6 unit mobil dan 10 unit motor
4.6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	14 unit AC
4.7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Bagian yang dilakukan rehab	Rehab 2 WC, rehab 1 dapur, dan rehab 1 ruang pegawai, rehab parkir dan perluasan kendaraan
5	Program Peningkatan Disiplin dan Kierja Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	100 %
5.1	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Jumlah pengadaan pakaian dinas	40 stell PDH warna khaki
5.2	Pengadaan Pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari tertentu	-
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	100 %
6.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan tekhnis	2 orang

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam menetapkan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi di Tahun 2019 belum mengacu kepada peraturan standar pelayanan minimal sehingga tingkat capaian standar pelayanan minimal tidak terukur sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah pusat, disarankan kepada pemetintahkota untuk dapat mengadakan diklat khusus untuk setiap SKPD.

3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dibentuk atas dasar Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Derah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi tahun 2017 merupakan :

- a) Salah satu Badan dalam Kota Jambi yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- b) Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dan Tugas Pembantuan .
- c) Susunan organisasi terdiri dari :
- (1) Kepala ,
 - (2) Sekretariat,
 - (3) Bidang bina Ideologi dan wawasan kebangsaan,,
 - (4) Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah,
 - (5) Bidang Ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari :

Pegawai	Posisi per 1/1/2017	Tambah	Kurang	Posisi per 31/12/2017
Pejabat Struktural	14	0	0	14
Pelaksana	14	0	5	9
Honoror	9	5	5	14
Jumlah	37	5	5	37

Bisa juga dijelaskan mengenai Daftar Urut Kepangkatan

Data pegawai pada lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2019 sebagai berikut:

- a) Pegawai Negeri Sipil sebanyak : 23 orang
- b) Pegawai menurut tingkat pendidikan : Sarjana (S2) : 2 orang
Sarjana (S1) : 19 orang
SLTA : 2 orang
- c) Pegawai menurut pangkat/golongan :
- | | | | |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| Gol. IV/c | : 1 orang | Gol. III/c | : 2 orang |
| Gol. IV/b | : 2 orang | Gol. III/b | : 5 orang |
| Gol. IV/a | : 3 orang | Gol. III/a | : - orang |

d) Jumlah Pejabat Struktural:

Eselon II.a: 1 orang

Eselon III.a: 1 orang

Eselon III.b : 3 orang

Eselon IV.a : 9 orang

4) Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesbangpol

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(1) Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.550.000,-

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar Rp.2.550.000,- (100 %).

Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah dana sebesar Rp.66.600.000,-

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan sebesar Rp. 56.994.150,- (67,47%).

(2) Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional jumlah anggaran Rp.9.500.000,-

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan sebesar Rp.6.554.500,- (68,99%)

(3) Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan Jumlah Dana sebesar Rp.375.080.000,-

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan sebesar Rp. 366.360.000,- (77,29%).

(4) Kegiatan : Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Dengan alokasi dana Rp.20.520.000,-

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar Rp. 20.520.000,- (100%)

(5) Kegiatan : Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja dengan alokasi dana sebesar Rp.11.000.000,-

Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar Rp. 11.000.000,- (100 %)

- (6) Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.29.000.000,-
Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan sebesar Rp. 29.000.000,- (100 %)
- (7) Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan alokasi dana Rp. 12.030.000,-
Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar Rp. 12.030.000 (100 %)
- (8) Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.900.000,-
Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan sebesar Rp. 2.900.000,- (100 %)
- (9) Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi dana Rp. 1.000.000,-
Realisasi : Fisik 100 % dan keuangan sebesar Rp.0,- (0 %)
- (10) Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman dengan alokasi dana Rp.13.744.000,-
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan sebesar Rp.13.744.000,- (100%)
- (11) Kegiatan : Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam dengan alokasi dana Rp.26.400.000,-
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan sebesar Rp.26.400.000,- (100%)
- (12) Kegiatan : Perjalanan Dinas dengan alokasi dana Rp.233.625.000,-
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan Rp.232.620.837,- (99,57%)

b) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- (1) Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 35.890.000,-
Realisasi : Fisik % dan keuangan Rp. 35.800.000 (99.87%)

- Kegiatan : Pengadaan Mebeleur dengan alokasi anggaran Rp. 5.250.000,-
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan Rp. 5.250.000,- (100%)
- (2) Kegiatan : Pengadaan peralatan perkantoran dengan alokasi dana sebesar Rp. 31.180.000,-
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan Rp. 28.623.360,- (94.81%)
- (3) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan alokasi anggaran Rp.11.000.000,-
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan Rp.10.955.000,- (99.59%).
- (4) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi anggaran Rp.158.700.000,-
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan Rp.157.072.628,- (98.97%)
- (5) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan alokasi anggaran Rp.5.400.000,-
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan Rp.5.400.000,-(100%).
- (6) Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan alokasi anggaran Rp. 50.350.000,-
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan Rp. 50.350.000,-(100%).

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu beserta perlengkapannya, dengan alokasi anggaran Rp.14.000.000,-
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan Rp.14.000.000 (100%)

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran Rp.5.000.000,-
Realisasi : Fisik 0% dan keuangan Rp. 0,- (0%)

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- (1) Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan alokasi dana Rp.1.850.000,-.
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan Rp.1.730.000,- (90%).

(2) Kegiatan : Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan alokasi dana Rp. 1.788.000,-.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan Rp.1.788.000,- (90%).

f) Program Perencanaan SKPD

(1) Kegiatan : Penyusunan Rencana Strategis SKPD, dengan alokasi dana Rp. 3.825.000,-.

Realisasi : Fisik 25% dan keuangan Rp. 260.000,- (25%)

(2) Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja SKPD, dengan alokasi dana Rp.530.000,-.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan Rp.530.000,- (100%)

g) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

(1) Kegiatan : Fasilitas, Pemantauan dan Pengendalian Keamanan dengan alokasi anggaran Rp.274.228.000,-

Realisasi : Fisik 70% dan keuangan Rp.136.708.000,- (56.37%)

(2) Kegiatan : Peningkatan Ketahanan Seni, budaya, agama, masyarakat dan Ekonomi dengan alokasi dana Rp.270.800.000,-

Realisasi : Fisik 94% dan keuangan Rp. 167.990.000,- (81.97%)

(3) Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan alokasi dana sebesar Rp.508.050.000,-

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan Rp.393.495.700,- (84.07%)

(4) Kegiatan : Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMFINDA) dengan alokasi dana Rp.99.300.000,-

Realisasi : Fisik 100 % dan keuangan Rp.55.925.000,- (84.41%).

h) Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitas bagi Orkemas dan Parpol

(1) Kegiatan : Koordinasi dan Pemantauan Situasi Politik dengan alokasi dana Rp. 434.365.000,-

- Realisasi : Fisik 74% dan keuangan sebesar Rp.320.783.500,- (58.47%)
- (2) Kegiatan : Pembinaan pertanggung-jawaban bantuan keuangan bagii parpol dengan alokasi dana Rp. 25.425.000,-
- Realisasi : Fisik 78.57% dan Keuangan Rp.20.480.000,- (75.32%).
- (3) Kegiatan : Pemantauan Orkemas dengan alokasi dana Rp.50.000.000,-
- Realisasi : Fisik 100% dan keuangan Rp.32.450.000,- (92.57%)

5) Kesesuaian Proses Perencanaan Pembangunan

Setiap Sekretariat dan Bidang menyusun kegiatan dengan menetapkan skala prioritas dengan mempedomani Renstra SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, selanjutnya dilakukan pembahasan untuk memperbaiki usulan rencana kegiatan lalu disampaikan ke Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, kemudian diteruskan ke Bappeda Kota Jambi untuk dibahas dalam forum SKPD dan selanjutnya dibahas kembali dengan DPRD Kota Jambi untuk disetujui.

6) Kondisi Sarana dan Prasarana

a) Sarana dan Prasarana Kantor sebagai berikut:

Kode Akun					AKUN	Jumlah Barang
1	3	1			TANAH	
1	3	1	11	01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	-
1	3	1	11	04	Tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa	1 bidang
1	3	2			PERALATAN DAN MESIN	
1	3	2	02	01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6 unit
1	3	2	04	05	Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua	11 unit
1	3	2	03	04	Mesin Tik	6 unit
1	3	2	04	01	Mesin hitung/jumlah	1 unit
1	3	2	09	04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	57 unit
1	3	2	14	03	Alat kantor lainnya	5 unit
1	3	2	16	01	Mebeleur	52 unit
1	3	2	02	02	Alat pengukur waktu	7 unit
1	3	2	02	05	Alat dapur	11 unit
1	3	2	02	06	Alat rumah tangga lainnya (Home use)	11 unit
1	3	2	01	02	Personal Komputer	25 unit
1	3	2	02	03	Peralatan Personal Komputer	4 unit
1	3	2	16	06	Peralatan Jaringan	18 unit
1	3	2	03	01	Meja kerja pejabat	27 unit
1	3	2	03	03	Kursi kerja pejabat	25 unit

1	3	2	03	07	Lemari arsip	15 unit
1	3	2	01	01	Peralatan studio visual	3 unit
1	3	2	06	01	Peralatan studio lainnya	5 unit
1	3	2	02	01	Alat komunikasi telephone	7 unit
1	3	2	02	03	Alat komunikasi Radio HF/FM	5 unit
1	3	2	02	06	Alat komunikasi lainnya	2 unit
1	3	2	02	01	Alat bantu keamanan	10 unit
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	01	01	Bangunan gedung kantor	1 buah
1	3	3	02	01	Bangunan gedung tempat kerja lainnya	
1	3	4			JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	02	02	Jaringan distribusi	1 paket
1	3	4	02	01	Instalasi telepon	1 paket
1	3	5			ASSET TETAP LAINNYA	
1	3	5	01	04	Ilmu Sosial	
1	3	5	03	01	Peta	1 buah
1	3	5	04	03	Alat Kesenian	
1	3	5	06	01	Binatang ternak	
1	3	5	07	02	Tanaman Holtikultura	
1	3	5	08	01	Aset Tetap Renovasi	

7) Permasalahan dan Solusi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi selama Pelaksanaan Kegiatan di Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan sepenuhnya menggunakan sumberdaya yang dimiliki, namun masih mempunyai kendala/permasalahan secara keseluruhan, antara lain:

- a) Permasalahan anak punk dan SAD (Suku Anak Dalam) yang memintaminta ke masyarakat dalam Kota Jambi, sudah meresahkan masyarakat sehingga perlu untuk ditertibkan dengan mengacu kepada regulasi yang ada Perda/Perwako Jambi.
- b) Menjelang relokasi para pedagang Angso Duo Kota Jambi dari pasar lama ke lokasi baru sangat potensi memunculkan permasalahan karena tidak semua pedagang terakomodir mendapatkan kios-kios, sehingga bias memunculkan penolakan-penolakan dari para pedagang dan atau tetap berjualan ditempat yang dilarang. Sementara permasalahan pedagang pasar di Talang Gulo sebelumnya juga masih mengandung masalah, bahkan para pedagang pernah mengancam akan membakar pasar.
- c) Eksistensi kelompok ahmadiyah
- d) Antisipasi anomaly cuaca memasuki musim hujan

e) Perkembangan tahapan Pemilu 2019

- f) Penolakan pembangunan 3 gereja di Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo Kota Jambi
- g) Permasalahan aktivitas orang asing illegal di Kota Jambi pada perayaan natal dan tahun baru pada pusat hiburan.
- h) Banyak rumah ibadah yang berdiri sebelum tahun 2006 memiliki masalah perizinan IMB rumah ibadah terkait kelengkapan dokumennya.
- i) Belum terpantau secara keseluruhan baik itu masalah politik maupun masalah lainnya di Kota Jambi.
- j) Masih banyak partai politik yang membuat surat pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018.
- k) Saat pelaksanaan tes urine terdapat beberapa kendala :
 - (1) Siswa yang ditunjuk untuk dilakukan tes urin sesuai dengan yang ditetapkan oleh sekolah terkadang tidak yang diindikasikan untuk perlu dilakukan
 - (2) Belum adanya tempat / ruang yang layak/nyaman saat menunggu untuk dilaksanakannya tes urine.
- l) Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan narkoba :
 - (1) Peserta yang diminta untuk menghadiri acara tersebut sebagian tidak sesuai dengan yang telah direncanakan adanya asal tunjuk orang untuk menghadiri sosialisasi tersebut.
 - (2) Karena peserta yang diharapkan tidak/kurang tepat sebagai banyak yang tidak dapat meneruskannya ke lingkungan mereka apa yang telah didapat selama ikut sosialisasi
- m) Kegiatan sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan ke sekolah – sekolah dilaksanakan pada saat upacara bendera dengan waktu hanya 15 hingga 20 menit saja, karena singkatnya waktu yang tersedia sehingga narasumber tidak optimal dalam memberikan materi materi pendidikan wawasan kebangsaan.
- n) Ormas memerlukan bantuan untuk sanggar-sanggar seni di Kota Jambi
- o) Kurangnya koordinasi Ormas dengan Pemerintah atau Instansi terkait lain di Kota Jambi.

1) Program dan Kegiatan

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Penyediaan jasa surat menyurat
- (2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- (3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- (4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- (5) Penyediaan alat tulis kantor
- (6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- (7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- (8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- (9) Penyediaan makanan dan minum
- (10) Perjalanan Dinas

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pengadaan kendaraan dinas / operasional
- (2) Pengadaan peralatan perkantoran
- (3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- (4) Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas / operasional
- (5) Pemeliharaan Rutin / berkala alat – alat kantor
- (6) Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
- (7) Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan Dinas/Operasional

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

d) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD

e) Program Perencanaan PD dengan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Penyusunan Rencana Kerja PD

f) Program penyelenggaraan Trantibum, serta penegakan Regulasi Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi, Pengawasan, Penyidikan dan Penegakan Regulasi Daerah
 - (2) Pengamanan dan Pengawasan dan penertiban serta penyusunan, pendataan dan pemetaan rawan trantibum dan tranmas
- g) Program Pembinaan dan Pemeliharaan Perlindungan Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut:**
- (1) Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja
 - (2) Pendataan, pembentukan dan pembinaan Satuan keamanan Lingkungan Masyarakat

2) Sumber Daya Manusia

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada Akhir tahun 2018 mempunyai Anggota sebanyak 261 orang, yang terdiri dari :

- a) Pegawai Negeri berjumlah 65 orang, dengan rincian :
 - Menurut Golongan :
 - Golongan IV : 3 orang
 - Golongan III : 34 orang
 - Golongan II: 28 orang
 - PTT/Honda: 196 Orang
 - Menurut Pendidikan :
 - S.2 / Strata 2 : 5 orang
 - S.1 / Strata 1 : 27 orang
 - D.3 : 2 orang
 - SLTA : 31 orang
 - Menurut Eselonering :
 - Eselon II/a : 1 orang
 - Eselon III/a : 1 orang
 - Eselon III/b : 4 orang
 - Eselon IV/a : 14 orang
- b) Pegawai Tidak Tetap/Honor Daerah berjumlah 196 orang dengan rincian :
 - PTT : 196 orang
 - Pegawai Honorer : - orang
 - Petugas kebersihan : 2 orang

3) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	<u>Belanja Tidak Langsung</u>	5.724.662.449	5.004.773.326	87,42
	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)			
	<u>Belanja Langsung</u>			
	<u>Program dan Kegiatan :</u>	7.915.190.000	7.252.421.001	91,62
01.	Program Pelayanan			
	Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.600.000	14.400.000	40,44
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.000.000	84.999.835	57,82
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	261.840.000	196.440.000	75,02
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	41.949.000	38.196.000	91,05
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	49.561.000	47.338.500	95,51
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.175.000	25.287.500	89,75
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.137.500	16.823.000	92,75
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	-	-
9	Penyediaan Makanan dan	21.987.000	18.760.000	85,32

	Minuman			
10	Perjalanan Dinas	248.805.000	247.459.340	99,45
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	745.800.000	708.184.800	94,95
12	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	27.044.500	25.950.000	95,95
13	Pengadaan mebeuler	3.000.000	3.000.000	100,00
	Pengadaan peralatan perkantoran	45.400.000	42.500.000	93,61
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	50.000.000	50.000.000	100,00
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	477.400.000	462.189.800	96,81
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala alat- alat kantor	50.000.000	32.890.000	65,78
4	Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas/operasional	120.000.000	117.605.000	98
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	397.195.000	395.795.000	99,65
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	5.000.000	-	-

	Program Perencanaan PD			
	Penyusunan Rencana Kerja PD.	19.305.000	-	-
1	PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANTIBUM SERTA PENEGAKAN REGULASI DAERAH			
	Sosialisasi, Pengawasan, Penyidikan dan Penegakan Regulasi Daerah	4.360.100.000	4.274.921.926	998.05
1	Pengamanan, Pengawasan dan Penertiban serta Penyusunan, Pendataan dan Pemetaan rawan Trantibum dan Tranmas	534.835.000	338.582.600	63.31
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMELIHARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja	551.819.000	435.555.000	78,93
2	Pendataan, Pembentukan dan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan dimasyarakat	436.081.500	409.677.500	93.95

4) Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi didasarkan pada visi dan misi yang tertuang dalam RENSTRA SatPol PP Kota Jambi 2013 – 2018.

Pelaksanaan proses tahapan perencanaannya adalah sebagai berikut :

- a) Rapat yang dipimpin oleh Kepala Satuan, dimana Kepala Satuan menjelaskan perencanaan pembangunan harus berpedoman pada RENSTRA yang telah disusun.
- b) Masing-masing Kepala Bidang menyusun program dan kegiatan dengan menetapkan skala prioritas, yang selanjutnya dibahas dalam rapat lingkup yang dipimpin oleh Kepala Satuan.
- c) Setelah pembahasan dalam rapat pimpinan selesai, usulan-usulan yang telah diperbaiki dan disetujui oleh Kepala Satuan dari masing-masing Kepala Bidang disatukan oleh Sekretariat dalam hal ini Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Keuangan menjadi program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
- d) Selanjutnya perencanaan dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang telah disusun tersebut disampaikan kepada Bappeda untuk dibahas dalam forum PD dan Musrenbang Kota Jambi.

5) Kondisi Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sebagai pemelihara dan penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Perda dan keputusan walikota melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan, maka mutlak untuk memiliki sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas tersebut.

Sat Pol PP Kota Jambi sejak dibentuk pada tahun 2002 sebagai satuan kerja sampai tahun 2018 telah memiliki beberapa sarana-prasarana penunjang, diantaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	Nama Barang	Jenis/Merk	Kapasitas / Ukuran	Jumlah Barang
				Banyaknya
1	2	3	4	5
1.	Mobil Truk	Mitsubishi	Roda 6	3 Unit
2.	Mobil Pick Up	Toyota	Roda 4	4 Unit
3.	Senjata Api	CN. 83, Hunter, Melcher	9 mm	10 Buah
4.	Mobil Dinas /Mini Bus	Mitsubishi Kuda GLX/L200	Roda 4	6 Unit
5.	Sepeda Motor	Honda, Suzuki, Star Way	Roda 2	17 Unit
6.	Band Kas/Brankas	Ichiban	-	1 buah
7.	Rak	Solid	4 Tingkat	2 buah

8.	Rak Televisi	Local	2 tingkat	1 buah
9.	Meja Telepon	Local	Kecil	1 buah
10.	Kursi Tamu	Koblen	-	1 set
11.	Kursi Putar (Pakai Tangan + Sandaran)	Local	-	4 buah
12.	Kursi biasa berelengan	Local	Kecil	25 Buah
13.	Kursi Lipat	Futura, Chitose	-	46 Buah
15	Kursi Komputer (putar) Tanpa Berelengan	Local	Kecil	4 Buah
17	Bangku Tunggu	Local	Panjang	3 buah
18	Kulkas (Lemari Es)	Sanyo/LG	1 pintu	3 unit
19	Televisi	Panasonic	14 Inch	2 buah
20	Televisi	LG	32 inch	2 buah
21	AC	Nasional/LG	1/2, 1 PK	14 unit
22	Pesawat Telephone	Panaphone, Mikita	-	2 buah
23	Meja 1 Biro	Koblen, Olympic	1 orang	8 Buah
24	Meja 1/2 Biro	Lokal, Solid	1 orang	22 Buah
25	Lemari Arsip	Lokal, Solid	-	7 Buah
26	Mesin Tik Besar	Lion	-	1 buah
27	Filing Cabinet	Lion	4 Laci	4 buah
28	White Board	Lokal	-	8 buah
29	Komputer	Pentium IV	-	8 unit
30	Printer Inkjet	Canon Pixma	-	2 Unit
31	Printer A3 Dot Matrik	Epson	-	1 Unit
32	Kipas Angin Gantung/	-	-	1 Unit
33	Kipas Angin Tegak dan Tempel	Okayama, CMC, Regency	-	4 Buah
34	Speaker Komputer	Simbadda	-	2 Unit
35	Meja Komputer	Lokal	-	4 Buah
36	Stabilizer/UPS	IKI, MATSUNAGA	-	7 buah
37	Dispencer	Sanyo/LG	-	6 buah
38	Wireless/ Toa	Sunway	-	1 Buah
39	Jam Dinding	Quartz	-	1 Buah
40	Alat Pemadam/Portable	Eversave	-	1 Buah
41	Tameng PHH	-	-	60 Buah
42	Helm Dalmas	-	-	60 Buah
43	Baju PHH	-	-	60 Buah
44	Perlengkapan Dalmas Lengkap	-	-	22 buah
45	Pentungan Karet/Tongkat T	-	-	164 Buah
46	Sangkur	-	-	53 buah
47	Handy Talky	Kenwood THK2 AT, HYT	-	15 Unit
48	Almari Katalog	-	-	2 Buah
49	Stasiun Repeater UHF	-	-	1 Unit
50	Korsik (Korps Musik)	-	-	51 Unit
51	Komputer Laptop	TOSHIBA	Pentium4	2 Unit
52	Printer Officejet	HP K7100	-	1 Unit

53	Printer Officejet	HP D2500	-	2 Unit
54	Camera Digital	Olympus E-410	10 Mp	1 Unit
55	Handycam	Sony	Hd 30 Gb	1 Unit
56	Infokus 2000-2400	EPSON	-	1 Unit
57	DVD Player	Mitochiba	-	1 Unit
58	Borgol Tangan	-	-	141 Buah
59	Detektor Logam	Metal Garret	-	3 Buah
60	Lampu Lantas	-	-	10 Buah
61	Jaringan Komputer	-	-	1 Unit
62	Perlengkapan Listrik	-	-	2 Unit
63	Tempat Parkir	-	-	1 Unit
64	Laptop	Axioo	-	6 Unit
65	Printer	Canon	-	3 Unit
66	Kamera Digital	Canon	-	1 Buah
67	Mesin Faximili	Canon	-	1 Buah
68	Pesawat HT	Motorolla	-	5 Unit
69	Sirene + TOA Mobil	-	-	1 Buah
70	Laptop	Advan	-	2 Unit
71	Air Conditioner (AC)	Eskimo	1 PK	1 Unit
72	Meja Kerja	Koblen	1 Biro	2 Unit
73	Meja Kerja	Koblen	½ Biro	8 Unit
74	Kursi Kerja	Ichiko	-	1 Buah
75	Bangku Kayu Panjang	-	-	5 Buah
76	Sound System	Targa	-	1 Set
77	Pentungan	Polri	-	60 Buah
78	Peta Kerja	-	-	1 Unit
79	Ruang Aula dan PPNS	-	-	1 Unit
80	Printer A3	-	-	1 Unit
81	Cartridge Printer	-	-	10 Buah
82	Infus Printer	-	-	6 Buah
83	DVD R/RW Eksternal	-	-	1 Buah
84	Memory Laptop	-	2 GB	6 Buah
85	Hard Disk Eksternal	-	500 GB	1 Buah
86	Keping DVD + Kotak	-	-	136 Keping
87	Meja Kerja	-	1 Biro	2 Buah
88	Kursi ½ Biro Pakai Tangan + Roda	-	-	10 Buah
89	Laptop Intel Core i3	Asus	320 GB	5 Buah
90	Laptop Inter Core i5	Dell	500 GB	1 Buah
91	Laptop Intel Core i5	Toshiba	500 GB	1 Buah
92	Battery Laptop	-	-	2 Buah
93	Kamera Digital	-	12 MP	1 Unit
94	Printer Inkjet Multifungsi	-	-	1 Unit
95	Hub/Switch	-	-	1 Unit
96	Router + Acces Point	-	-	1 Unit
97	Tenda Knokc Dowa	-	-	5 Unit
98	Umbul-umbul	-	-	20 Unit
99	Bendera	-	-	1 Buah
100	Mesin Absen	-	-	3 Unit

101	Tiang Pataka + Patung Garuda			2 Unit
102	Podium Pataka			1 Unit
103	Pesawat RIG			3 Unit

Sumber: Kantor Sat Pol PP Kota Jambi

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Masih belum seimbangnya jumlah personil Sat Pol PP Kota Jambi dengan pertambahan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum, tingkat pelanggaran Perda dan Keputusan Walikota yang terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga rasio penanganan dan penyelesaian kasus baik jumlah maupun kualitasnya tidak dapat dicapai secara optimal.
- (2) Kurangnya jumlah personil Sat Pol PP Kota Jambi yang diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan perda dan keputusan walikota yang telah direncanakan sehingga sulit untuk mewujudkan standar pelayanan minimal dan mengakomodir sistem penyelenggaraan trantibum dan penegakkan Perda yang baik.
- (3) Masih rendahnya dedikasi, loyalitas personil, dan kemampuan teknis (administrative, yuridis, dan operasional) SDM dalam penyelesaian dan penanganan kasus pelanggaran yang ditemui. Hal ini sebagai akibat karena kurangnya pemahaman terhadap Tupoksi Sat Pol PP, rendahnya pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan terhadap bidang tugas yang dihadapi, dan adanya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh sebagian oknum personil Sat Pol PP untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang kemudian dijadikan sebagai alasan untuk memenuhi rendahnya tingkat kesejahteraan yang diperoleh karena tidak seimbangnya volume pekerjaan dan resiko pekerjaan yang dihadapi.
- (4) Masih rendahnya tingkat kesadaran, kepatuhan, dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban umum, dan penegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan Walikota yang bermuara pada peningkatan jumlah gangguan ketentraman

dan ketertiban umum, pelanggaran peraturan daerah dan keputusan walikota seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

- (5) Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait baik lintas sektoral maupun lintas vertikal dalam upaya pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan keputusan walikota.

b) Solusi

- (1) Untuk permasalahan yang timbul dari faktor internal ke depan diupayakan seoptimal mungkin untuk peningkatan SDM personil, dedikasi, dan loyalitas personil serta peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas operasional di lapangan.
- (2) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya ketertiban, kebersihan, dan rasa aman.
- (3) Meningkatkan koordinasi antar dinas instansi terkait dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kota Jambi.
- (4) Peningkatan kesejahteraan anggota Sat Pol PP Kota Jambi.
- (5) Penambahan Anggota SatPol PP Kota Jambi sebanyak 100 (Seratus) orang.

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator kinerja kunci (IKK) LPPD terdiri dari beberapa tataran, aspek, fokus dan indikator kinerja kunci antara lain :

1. Tataran pengambil kebijakan

- a. Ketentraman dan ketertiban umum
 - 1) Peraturan tentang ketertiban Penataan Ruang
 - a) Keberadaan PERDA IMB
 - b) Rasio Rumah ber IMB
 - c) Keberadaan PERDA RTRW
 - 2) Peraturan tentang Kependudukan
 - a) Pengurusan KTP
 - b) Biaya KTP
 - 3) Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)
Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk
 - 4) Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS
Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS
 - 5) Peraturan tentang Kebersihan Kota
Peraturan Tentang Kebersihan Kota
- b. Keselarasan dan efektifitas hubunagn antara pemerintah daerah dan pemerintah, serta antara pemerintah daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah
 - 1) Penyampaian laporan kepada pemerintah
Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP No.3 Tahun 2007
 - 2) Penyampaian laporan keuangan dan kinerja
Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan laporan kinerja berdasarakan PP No.8 Tahun 2006
 - 3) Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yg diterbitkan oleh pemerintah
 - 4) Hubungan antar Daerah
Kerja Sama dengan daerah lain
- c. Keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah
 - 1) Sinkronisasi pelaksanaan Pembangunan nasional dan daerah
Kesesuaian prioritas pembangunan

- 2) Kewenangan
Urusan wajib yang diselenggarakan daerah
 - 3) Keuangan
 - a) Waktu penetapan PERDA APBD 2018
 - b) Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005
 - c) Belanja untuk pelayanan dasar
 - d) Belanja Urusan Pendidikan dan Kesehatan
 - 4) Pelayanan Publik
Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
 - 5) Kepegawaian
 - a) Ratio PNS terhadap penduduk
 - b) Sistem Informasi Kepegawaian
 - 6) Kelembagaan
Penataan SKPD
- d. Efektifitas hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD
- 1) Produk peraturan perundang-undangan
PERDA yang ditetapkan
 - 2) RAPERDA yang diajukan tahun berjalan
RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019
- e. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti
- f. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan
- 1) Tindak lanjut keputusan Walikota
Keputusan walikota yang ditindaklanjuti
 - 2) Tindak lanjut Peraturan Walikota
 - a) Peraturan walikota yang ditindaklanjuti
 - b) Jumlah Perda yang dibatalkan
- g. Intensitas dan efektifitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah

- 1) PERDA tentang konsultasi publik
Keberadaan PERDA/ Peraturan Walikota tentang konsultasi publik
- 2) Media Informasi pemda yang dapat diakses oleh public
Adanya media informasi yang dapat diakses oleh publik (website kota, pos, bag.humas , leaflet, brosur)
- h. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi pencairan dan penyerapan dana DAU, DAK, dan Bagi Hasil
 - 1) Serapan dana perimbangan
Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan
 - 2) Alokasi Belanja pada APBD dari DAU
Belanja Publik terhadap DAU
 - 3) Alokasi Belanja Langsung dari APBD
Belanja langsung terhadap total APBD
 - 4) Alokasi PAD dari total pendapatan dalam APBD
PAD terhadap total pendapatan APBD
- i. Intensitas, efektifitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD dan pinjaman/obligasi daerah
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- j. Efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD
 - 1) Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
 - 2) Besaran SILPA
Rasio SILPA terhadap total pendapatan
 - 3) Realisasi Belanja
Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja
 - 4) Pengawasan Inspektorat Kota
Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
- k. Pengelolaan potensi daerah
 - 1) Peta Potensi Daerah
Rasio realisasi PAD 2018 terhadap potensi PAD
 - 2) Peningkatan PAD
- l. Trobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - 1) Penghargaan

Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh pemerintah daerah tahun 2018.

- 2) Pengadaan barang dan jasa
Keberadaan E-procurement
- 3) Daya saing daerah
Jumlah persetujuan investasi

2. Tataran pelaksana kebijakan

1) Administrasi Umum

- a. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 - 1) Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
 - 2) Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/LPND
Keberadaan Standard Operating Procedur (SOP)
- b. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
- c. Penataan Kelembagaan Daerah
Pengisian Struktur Jabatan
 - 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
 - 2) Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
- d. Pengelolaan Kepegawaian Daerah
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
 - 1) Rasio PNS Kota
 - 2) Pejabat yang telah memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
 - 3) Pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan
- e. Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD

- a) RENSTRA SKPD
- b) RENJA SKPD
- c) RKA SKPD
- 2) Sinkronisasi program RENJA SKPD dengan program SKPD
Jumlah program RKPDP yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
- 3) Sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD
Jumlah program RENJA RKPDP yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD
- 4) Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran
Jumlah program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD
- f. Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1) Alokasi Anggaran
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
 - 2) Besar Belanja Modal
Belanja Modal Terhadap total belanja SKPD
 - 3) Besaran Belanja Pemeliharaan
 - a) Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
 - b) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
 - 4) Laporan Keuangan SKPD
Keberadaan laoran keuangan SKPD (Ira, Neraca, Calk)
- g. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1) Manajemen Aset SKPD
Keberadaan Inventarisasi barang atau aset SKPD
 - 2) Penggunaan Aset SKPD
Jumlah aset yang tidak digunakan oleh SKPD
 - 3) Responsifitas terhadap paertisipasi masyarakat
Keberadaan survey kepuasan masyarakat
- h. Pemberian Fasilitas Partisipasi Terhadap Partisipasi Masyarakat
 - 1) Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarkat
Jumlah fasilitas/prasarana informasi
 - 2) Responsifitas terhadap paertisipasi masyarakat
Keberadaan survey kepuasan masyarakat

2) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

- a) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
- b) Tersedianya dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
- c) Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA
- d) Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPDP
- e) Sistem Informasi Manajemen Pemda
- f) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

3) Urusan Pemerintahan Umum

- a) Kegiatan pembinaan politik di daerah
- b) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

4) Tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggara urusan wajib dan pilihan

- a. Urusan Wajib
 - 1) Pendidikan
 - a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b) Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
 - c) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
 - d) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
 - e) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
 - f) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
 - g) Angka Kelulusan (AL) SD/MI
 - h) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
 - i) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
 - j) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
 - 2) Kesehatan
 - a) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
 - b) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan
 - c) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

- d) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
 - e) Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA
 - f) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
 - g) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
 - h) Cakupan kunjungan bayi
- 3) Lingkungan Hidup
- a) Penanganan sampah
 - b) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
 - c) Tempat Pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
 - d) Penegakan hukum lingkungan
- 4) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a) Panjang jalan kota dalam kondisi baik
 - b) Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
 - c) Rumah Tangga per sanitasi
 - d) Kawasan Kumuh
 - e) Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
- 5) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- a) Rumah tangga pengguna air bersih
 - b) Lingkungan pemukiman kumuh
 - c) Rumah layak huni
- 6) Kepemudaan dan olah raga
- a) Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)
 - b) Lapangan Olah Raga
- 7) Penanaman modal
- Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyaran rupiah)
- 8) Koperasi & UKM
- a) Koperasi Aktif
 - b) Usaha Mikro Dan Kecil
- 9) Administrasi Kependudukan dan Capil
- a) Kepemilikan KTP
 - b) Kemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
 - c) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
- 10) Ketenagakerjaan
- a) Pelayanan kepersertaan jaminan social bagi pekerja/buruh

- b) Pencari kerja yang ditempatkan
- 11) Ketahanan Pangan
 - a) Regulasi ketahanan pangan
 - b) Ketersediaan pangan utama
- 12) Pemberdayaan Masyarakat dan PR PA
 - a) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
 - b) Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas
 - c) Partisipasi angkatan kerja perempuan
- 13) Pengendalian Penduduk dan KB
 - a) Prevalensi peserta KB aktif
 - b) Rasio Petugas Lapangan KB/penyuluh KB(PLKB/PKB) disetiap desa /kelurahan
- 14) Perhubungan
Angkutan darat
- 15) Komunikasi dan Informatika
 - a) Website milik pemerintah daerah
 - b) Pameran/expo
- 16) Pertanahan
 - a) Luas lahan bersertifikat
 - b) Penyelesaian kasus tanah negara
 - c) Penyelesaian izin lokasi
- 17) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a) PKK Aktif
 - b) Posyandu
- 18) Sosial
 - a) Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi
 - b) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social
 - c) PMKS yang memperoleh bantuan sosial
- 19) Kebudayaan
 - a) Penyelenggaraan festival seni dan budaya
 - b) Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya
 - c) Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
- 20) Statistik
 - a) Buku "Kota dalam angka"
 - b) Buku "PDRB Kota"
- 21) Kerasipan

- a) Penerapan pengelolaan arsip secara baku
- b) Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
- 22) Perpustakaan
 - a) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
 - b) Pengunjung perpustakaan
- b. Urusan Pilihan
 - 1) Kelautan dan Perikanan
 - a) Produksi perikanan
 - b) Konsumsi Ikan
 - 2) Pertanian
 - a) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
 - b) Kontribusi sektor pertanian terhadap PRDB tahun 2017
 - 3) Pariwisata
 - a) Kunjungan wisata
 - b) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2017
 - 4) Perindustrian
 - a) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Tahun 2017
 - b) Pertumbuhan industri
 - 5) Perdagangan
 - a) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2011
 - b) Ekspor bersih perdagangan.
 - 6) Transmigrasi
 - Transmigrasi swakarsa

C. Indikator kinerja kunci Pemerintah Kota Jambi lebih rinci dapat dilihat pada tabel lampiran II.1, II.2, dan II.3 format IKK Kota.

BAB IV
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH TAHUN 2019

Rencana Kerja Pemerintah di tahun 2019 di atur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Berbeda dengan RKP sebelumnya, penyusunan RKP 2018 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Rencana Kerja Pemerintah 2019 dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2019 dan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKP Daerah (RKPD). RKP 2019 juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2018, dan RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKP Tahun 2019 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah”.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 tersebut, maka sasaran pembangunan Tahun 2019 adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,66 persen;
2. Pengangguran sebesar 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen;
3. Angka Kemiskinan sebesar 8,12 persen
4. Gini ratio (Indeks) sebesar 0,33;
5. Indeks pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,26.

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

1. Cita 1
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Cita 2
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Cita 3
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Cita 4
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Cita 5
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Cita 6
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Cita 7
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Cita 8
Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Cita 9
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pokok pembangunan kabinet kerja; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu; serta (4) *quick wins* dan program lanjutan lainnya. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP tahun 2019.

Dalam kaitan itu, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 terdiri dari:

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi:
 - a. Revolusi Mental, dengan Program Prioritas
 - b. Kesehatan, dengan Program Prioritas
 - c. Pendidikan, dengan Program Prioritas
 - d. Perumahan dan Pemukiman, dengan Program Prioritas

2. Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi:
 - a. Kedaulatan Pangan, dengan Program Prioritas
 - b. Maritim dan Kelautan, dengan Program Prioritas
 - c. Kedaulatan Energi, dengan Program Prioritas
 - d. Pembangunan Pariwisata, dengan Program Prioritas
 - e. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK), dengan Program Prioritas
3. Pemerataan dan Kewilayahan, meliputi;
 - a. Antar Kelompok Pendapatan, dengan Program Prioritas
 - b. Reforma Agraria, dengan Program Prioritas
 - c. Daerah Perbatasan, dengan Program Prioritas
 - d. Daerah Tertinggal, dengan Program Prioritas
 - e. Desa dan Kawasan Perdesaan, dengan Program Prioritas
 - f. Perkotaan, dengan Program Prioritas
 - g. Konektivitas, dengan Program Prioritas
4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, meliputi;
 - a. Reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum
 - b. Stabilitas keamanan dan ketertiban, dengan program prioritas
 - c. Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi, dengan program prioritas
 - d. Reformasi Birokrasi, dengan program prioritas
5. Pembangunan Ekonomi, meliputi;
 - a. Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, dengan program prioritas
 - b. Peningkatan Ekspor Non Migas
 - c. Reformasi Fiskal

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Semenjak itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2019 mempedomani ketentuan mengenai pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Daerah Tahun 2019.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah

tentang APBD Tahun Anggaran 2019. KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKP Tahun 2019 dan RKPD provinsi Tahun 2019.

Prioritas pembangunan Kota Jambi untuk tahun 2019 dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Percepatan Pembangunan Infrastruktur
2	Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing
3	Pengembangan Ekonomi dan Investasi	Pengembangan Ekonomi dan Investasi
4	Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan
5	Kualitas Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan Hidup
6	Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD 2013–2019. Capaian tersebut ditargetkan selama kurun waktu 5 tahun ke depan yang ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan. Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi jangka menengah yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2013–2019, diklasifikasikan berdasarkan prioritas dalam pembangunan daerah Kota Jambi yaitu : (1) Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur, (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, (3) Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi dan Investasi, (4) Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, (5) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, (6) Peningkatan dan pemerataan Kesejahteraan Sosial

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Jambi menerima dana tugas pembantuan sebanyak 3 (dua) Kementerian/ Lembaga pusat sebagai pemberi Tugas Pembantuan yaitu :

A. KEMENTERIAN PERTANIAN

1. DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
2. DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
3. DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA.

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- 4) Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-018.08.4.109125/2018 tgl 05 Desember 2017.
- 5) Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-018.03.4.109119/2018 tgl 17 Desember 2017.
- 6) Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-018.04.4.10905/7 tgl 09 April 2018.

b. Instansi pemerintah pemberi tugas perbantuan

- 1) Kementrian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura.
- 2) Kementrian Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
- 3) Kementrian Pertanian, Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian.

c. Program dan Kegiatan serta realisasinya

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2019
TUGAS DANA PERBANTUAN**

Program / Kegiatan 1	Alokasi Anggaran 2	Realisasi Anggaran 3	Sumber Dana 4
URUSAN PERTANIAN	1.235.012.000	1.158.888.000	
Bidang PSP	913.812.000	839.248.000	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	913.812.000	839.248.000	APBN TP
Pengelolaan air dan irigasi	190.000.000	189.800.000	
- Belanja bahan, honor output dan belanja perjalanan	26.000.000	26.000.000	
- Belanja barang jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	156.000.000	156.000.000	
Monitoring dan pelaporan	8.000.000	7.800.000	
Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian	89.072.000	82.868.000	
- Belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	<u>54.072.000</u>	<u>53.968.000</u>	
- Cultivator, 4 unit	54.072.000	53.968.000	
- Operasional mendukung penyediaan alsintan	<u>35.000.000</u>	<u>28.900.000</u>	
- Belanja Bahan	1.900.000	1.900.000	
- Honor Output kegiatan	3.600.000	3.600.000	
- Belanja perjalanan Biasa	11.500.000	11.400.000	
- Belanja perjalanan Dinas paket meeting dalam kota	18.000.000	12.000.000	
Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	533.340.000	518.865.000	
- Operasional dan dukungan kegiatan lingkup PSP	<u>83.900.000</u>	<u>69.525.000</u>	
- Honor operasional	35.760.000	35.760.000	
- Belanja bahan	6.340.000	6.340.000	
- Honor Output kegiatan	2.800.000	1.000.000	
- Belanja perjalanan Biasa	11.000.000	5.100.000	
- Belanja perjalanan Dinas paket meeting dalam kota	18.000.000	11.325.000	
- Belanja perjalanan Dinas paket meeting luar kota	10.000.000	10.000.000	
Program / Kegiatan 1	Alokasi Anggaran 2	Realisasi Anggaran 3	Sumber Dana 4
Pembinaan dan pendampingan kegiatan mendukung UPSUS	449.440.000	449.340.000	
- Honor output kegiatan	349.440.000	349.440.000	
- Belanja perjalanan biasa	100.000.000	99.900.000	

Fasilitas pupuk dan pestisida			
	101.400.000	47.715.000	
- Belanja bahan	2.000.000	2.000.000	
- Honor Output kegiatan	73.400.000	20.400.000	
- Belanja Jasa profesi	2.400.000	2.400.000	
- Belanja perjalanan Biasa	5.400.000	5.400.000	
- Belanja perjalanan Dinas paket meeting dalam kota	18.200.000	17.515.000	
Bidang TPH	321.200.000	319.640.000	
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	54.020.000	52.460.000	APBN TP
- Pengelolaan Produksi Tanaman aneka kacang dan umbi	33.520.000	33.460.000	
- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	20.500.000	19.000.000	
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas produk sayur dan tanaman obat ramah lingkungan	267.180.000	267.180.000	
- Kawasan Aneka Cabai	225.930.000	225.930.000	
- Peningkatan Usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya	41.250.000	41.250.000	

d. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan

- 1) Sumber dana dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana pertanian dana yang diberikan Rp.913.812.000,-. Terealisasi sebesar Rp.839.248.000,- (91,84%) Realisasi Anggaran belum mencapai 100% karena kegiatan fasilitasi pupuk bersubsidi hanya ada 1 Kecamatan di Kota Jambi, sehingga anggaran tersedia.
- 2) Sumber dana dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura, tanaman pangan dana yang diberikan Rp. 54.020.000,- terealisasi sebesar Rp. 52.460.000,- (97,11%)..

e. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan adalah :

- 1) Gedung kantor.
- 2) Meja kerja.

- 3) Kursi Kerja.
- 4) Komputer.
- 5) Lap Top.
- 6) Printer.
- 7) Kendaraan roda 2.
- 8) Kendaraan roda 4.
- 9) Alsintan prapanen : Hand traktor, Traktor roda 4, pompa air dll.
- 10) Alsintas Pasca panen : Power thresher, RMU, Paddy Mower, terpal jemur dll.

f. Permasalahan dan solusi

Rasionalisasi Anggaran Tahun 2019.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan diatas antara lain, kondisi cuaca yang sulit diprediksi dan hama penyakit yang ada dilapangan menyebabkan produksi sulit mencapai optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini benih harus didukung kesiapan produsen benih dalam penyediaan benih varietas unggul bermutu agar sesuai dengan musim tanam, pengamatan terhadap perkembangan OPT dilapangan sehingga penyebaran hama dan penyakit dapat ditekan.

B. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tahun 2019 mendapatkan dana DAK sebesar Rp. 1.295.828.000,-, Dan silpa dana DAK DBH DR tahun 2016 yang telah dianggarkan kembali pada APBD perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 93.563.887 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia diperuntukan sub bidang Laboratorium, sub bidang penanganan sampah dan sub bidang RTH, dengan dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembar Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4778);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi;
7. Peraturan Menteri P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Penugasan LHK;

C. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pada Tahun 2019 Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan sumber dana melalui APBN. Besarnya anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK-TP) yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagaimana tabel berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1.	Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan	1.328.012.000.-	1.239.448.879,-	88.563.121

Dilihat dari tabel diatas bahwa pelaksanaan tugas pembantuan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dapat terlaksana **93 %** dapat dikatakan berhasil namun perlu peningkatan perencanaan yang matang dengan data yang akurat agar anggaran dapat terserap secara optimal. garis besar pelaksanaan kegiatan anggaran

tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta perlengkapan pendukung pencetakan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil termasuk pencetakan blanko-blanko , Pemeliharaan system serta kegiatan sosialisasi dengan adanya dana alokasi khusus ini sangat membantu dalam peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil seiring dengan terbatasnya sumber dana dari APBD Kota Jambi.

Rincian penggunaan anggaran tugas pembantuan pada kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
 - Tim pelayanan dan penerbitan Dokumen Kependudukan
 - Tim pelayanan dan penerbitan dokumen akta catatan sipil
 - Tim penyusunan buku agregat
 - Tim percepatan kepemilikan dokumen kependudukan dan sipil
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja cetak dan pengadaan blanko/formulir pencatatan sipil
4. Pemeliharaan perangkat system informasi administrasi kependudukan (SIAK)
5. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6. Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil

Dengan anggaran dana DAK tersebut mampu mendorong peningkatan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tahun 2019

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Kebijakan yang dilaksanakan pada kerjasama antar daerah adalah melalui program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dengan kegiatan Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dengan hasil capaian antara lain :

- 1) Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kota Jambi Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 32 Tahun 2018 yang mempunyai tugas :
 - Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - Menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
 - Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - Menyiapkan meteri kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
 - Memberikan rekomendasi kepada Walikota Jambi untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.

Dilaksanakannya Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kota Jambi Tahun 2019 diantaranya membahas draf naskah *Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman* dan Perjanjian Kerja Sama

- 2) Dibentuknya Tim Teknis Koordinasi Kerjasama Daerah Kota Jambi Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 33 Tahun 2017 yang mempunyai tugas :
 - Menyusun rencana kerjasama terhadap objek yang akan dikerjasamakan;
 - Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan;
 - Analisis mengenai manfaat dan biaya kerjasama;
 - Menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama;
 - Membantu tugas Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kota Jambi Tahun 2019.

Dilaksanakannya Rapat Tim Teknis Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kota Jambi Tahun 2019 diantaranya mempersiapkan bahan-bahan yang akan dibahas oleh Tim Koordinasi Kerjasama Daerah.

3) Kegiatan Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Luar Negeri

Keanggotaan di organisasi luar negeri, yaitu:

- 1) *Internasional Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)*,
- 2) *United Cities Local Government Asia Pacific (UCLG ASPAC)*,
- 3) *Democratic Local Governance in Southeast Asia (DELGOSEA)*.
- 4) *Green Mayor Council*.
- 5) *City Net*.

4) Kegiatan yang diikuti dalam dan luar negeri, yaitu:

- 1) Peresmian *the Global Covenant City of Mayors for Climate and Energy (GCoM)* yang dilaksanakan di Malaysia pada tanggal 21 Maret 2019.

Global Covenant City of Mayors for Climate and Energy (GCoM) adalah koalisi kerjasama internasional bagi kota-kota dan pemegang kewenangan lokal yang berbagi visi jangka panjang dalam mempromosikan dan menyokong partisipasi sukarela untuk memerangi perubahan iklim dan mewujudkan masyarakat rendah emisi dan ketahanan iklim di masa depan. Koalisi ini akan mendorong aksi iklim di tingkat lokal dan membantu membangun komunitas yang berkomitmen dalam pelaksanaan aksi tersebut.

Tujuan dari jaringan kerjasama ini adalah untuk mempromosikan kegiatan GCoM di kota-kota Malaysia ke audiens yang lebih luas baik yang berasal dari kalangan pemerintah kota, para praktisi, sektor swasta dan lainnya sekaligus meningkatkan kesadaran adanya kemungkinan kerjasama internasional baru yang bisa ditawarkan oleh GCoM yang didukung oleh Uni Eropa.

Walikota Jambi (Indonesia) sebagai anggota GCoM dalam even ini bersama dengan perwakilan dari Negara Vietnam, Singapura dan Uni Eropa diminta menjadi panelis dalam sesi "Praktek Terbaik dari Daerah/Lokal dan Uni Eropa".

- 2) Pelatihan Internasional tentang Dasar-dasar Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah (*Sewerage Treatment Plant*), ADB Program: *the Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP)*, yang dilaksanakan di Kuala Lumpur Malaysia, pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2019 untuk Group 1 (*Top Management*) dan tanggal 26 Mei s.d. 1 Juni 2019 untuk Group 2 (*Technical Management*).

Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) merupakan kegiatan dengan pendanaan kombinasi dari pinjaman *Asian Development Bank (ADB)*, Hibah Pemerintah Australia, Dana Pemerintah Pusat (APBN) serta Dana Pemerintah Kota dan Provinsi (APBD). Dana pinjaman melalui ADB sebesar USD 120 juta yang terdiri atas dana *Original Capital Resources (OCR)* sebesar USD 80 juta dan dana *ASEAN Infrastructure Fund (AIF)* sebesar USD 40 juta serta dana hibah dari Pemerintah Australia, melalui *Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)*, sebesar USD 48,83 juta. Pada mulanya, kegiatan ini akan diselenggarakan di lima kota, yaitu: Kota Cimahi, Jambi, Makassar, Palembang, dan Pekanbaru. Akan tetapi, diputuskan Kota Cimahi tidak diikutsertakan pada MSMIP karena belum siap sehingga menyisakan 4 kota yaitu Jambi, Makassar, Palembang dan Pekanbaru.

Program ini diharapkan dapat mereduksi pencemar yang dibuang secara langsung ke lingkungan di setiap kota tersebut. *Outcome* yang diharapkan adalah meningkatnya jumlah Sambungan Rumah (SR) yang tersambung ke dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat

(SPAL-T) skala kota di masing-masing kota tersebut. Program ini memiliki dua output antara lain (i) pengembangan infrastruktur untuk SPAL-T dan (ii) *Project Implementation Support*. Target jumlah Sambungan Rumah terbangun sejumlah 32.300 SR.

a) Maksud dan Tujuan

- ❖ memberikan pengetahuan dasar kepada peserta tentang operasionalisasi pengelolaan air limbah termasuk praktik pengelolaan air limbah Malaysia oleh Indah Water Konsortium (IWK) dan kebijakan publik yang dibutuhkan dalam pengelolaan air limbah;
- ❖ memberikan pemahaman akan teknik/praktek dasar kepada peserta tentang operasionalisasi pengelolaan air limbah;

b) Peserta/ Delegasi

- ❖ Group 1: *Top Management* (22 s.d. 25 Mei 2019)
 - Ir. H. BUDIDAYA, M.For.Sc (Sekretaris Daerah Kota Jambi)
 - FAHMI, SP. (Plt. Kepala Bappeda Kota Jambi)
- ❖ Group 2: *Technical Management* (26 Mei s.d. 1 Juni 2019)
 - Ir. GANDI SUBROTO (Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistim Pengolahan Air Limbah Domestik (UPTD SPALD) Dinas PUPR Kota Jambi)
 - H. ERMAN JURI, S.E. (Kasi Penyehatan Lingkungan Perumahan Pemukiman PUPR Kota Jambi)
 - MOHAMAD ANDRI AL VARABI, S.E., M.E. (Kasubbid. PUPR, Pertanahan Bappeda Kota Jambi).

Dengan mengikuti kegiatan ini diharapkan Pemerintah Kota Jambi dapat mendapatkan *best practice* sebagai masukan dalam pembangunan Sistem Pengolahan terpusat dan peningkatan pengelolaan septage berdasarkan rencana pembangunan sistem air limbah terpusat di Kota Jambi.

- 3) "Resilient Cities 2019 Congress: Delivering Local Resilience" yang dilaksanakan di Kota Bonn, Jerman. Pada tanggal 25 s.d. 29 Juni 2019

Kongres ICLEI 2019 ini juga sebagai momentum peringatan 10 tahun ICLEI dalam pengalaman dan membangun keahliannya dalam mendukung kota-kota di dunia untuk berkembang dalam menghadapi tantangan demi tantangan. Kongres ini akan menghadirkan pandangan 360° tentang ketahanan perkotaan, seperti: jalur-jalur yang mengarah pada pengimplementasian

ketahanan; Inovasi-inovasi di bidang ketahanan perkotaan, dan; membangun komunitas yang kohesif, sehat, dan tangguh.

Keterlibatan masyarakat dan peningkatan partisipasi sosial sangat penting untuk membangun ketahanan lokal dan mengurangi risiko dengan memberikan ikatan, menjembatani, dan mengaitkan praktik-praktik yang meningkatkan kelayakan lingkungan dan ekosistem. Komunitas yang terorganisir dan berpengetahuan dapat mengatasi bencana dengan lebih baik, belajar dari pengalaman sebelumnya, beradaptasi dengan lingkungan baru dan pada akhirnya menjadi lebih tangguh.

Melalui Transformative Actions Program (TAP), ICLEI bertindak sebagai organisasi perantara yang membantu pemerintah daerah menemukan mitra teknis dan keuangan yang cocok untuk menyusun proposal proyek iklim yang layak (bankability proyek).

a) Maksud dan tujuan mengikuti kegiatan

- ❖ Pemerintah Kota Jambi dapat menyampaikan *project Transformation Action Plan* (TAP) Kota Jambi;
- ❖ *sharing best practices* dan inovasi dalam program-program yang efektif untuk membangun ketahanan iklim dari kota-kota lainnya di dunia serta berpartisipasi pada workshop-workshop, site visit, dan sesi-sesi yang disediakan;
- ❖ mendorong semua pemangku kepentingan untuk mengambil aksi dengan meratifikasi *Paris Agreement* dan memenuhi target-target ketahanan/ketangguhan pada Agenda 2030 di tingkat lokal;

b) Peserta dari Kota Jambi terdiri dari:

- ❖ Dr. dr. H. MAULANA, M.K.M. (Wakil Wali Kota Jambi).
- ❖ YAFRUDDIN, S.K.M. (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi).
- ❖ MOMON SUKMANA FITRA, S.T., M.M. (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi).
- ❖ KURNIA ILAHI LUBIS, S.E. (Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi).

Dengan mengikuti kegiatan ini diharapkan Pemerintah Kota Jambi dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan di kancah internasional, dan juga mendapatkan *best practice* sebagai masukan dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Jambi sesuai SDG's dan

mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Pemerintah Kota Jambi TERKINI.

- 4) WORLD CITIES SUMMIT MAYORS FORUM (WCSMF) 2019 yang dilaksanakan di MEDELLIN, KOLOMBIA. Pada tanggal 9 s.d. 13 Juli 2019.

World Cities Summit (WCS) adalah konferensi tingkat tinggi dua tahunan untuk kota-kota di dunia sebagai sebuah platform eksklusif bagi para pemimpin pemerintah dan pakar industri untuk mengatasi tantangan-tantangan mewujudkan kota yang ramah (nyaman dan layak huni) serta berkelanjutan, berbagi solusi perkotaan terpadu dan menjalin kemitraan baru. KTT ini diselenggarakan atas kolaborasi bersama antara *Singapore's Centre for Liveable Cities* dan *Urban Redevelopment Authority*.

- a) Kegiatan/Acara utama dalam WCS ini adalah :

- ❖ *World Cities Summit Mayors Forum (WCSMF);*
- ❖ *Lee Kuan Yew World City Prize Lecture & Forum;*
- ❖ *World Cities Summit Young Leaders Symposium;*
- *Plenary Sessions and Thematic Tracks;*
- *Site visits.*

- b) Maksud dan tujuan mengikuti kegiatan

- ❖ Bergabung dengan jaringan kota-kota sedunia yang berkomitmen dalam penciptaan *Liveable & Sustainable Cities;*
- ❖ *Sharing best practices* dan inovasi-inovasi terbaru dibalik kesuksesan praktik, desain dan implementasi dari program dan kebijakan yang telah dijalankan dan dicapai dari kota-kota lainnya di dunia, terutama dari kota-kota peraih penghargaan *Lee Kuan Yew World City Prize*, yang merupakan bentuk pengakuan atas prestasi luar biasa dalam penciptaan sebuah kota yang ramah (nyaman dan layak huni), kompetitif dan berkelanjutan;
- ❖ Identifikasi peluang dan solusi baru untuk mengatasi tantangan tata kelola publik dan pembangunan perkotaan yang tengah dihadapi Kota Jambi saat ini.

- c) Peserta dari Kota Jambi terdiri dari:

- ❖ Dr. H. SYARIF FASHA, M.E. (Wali Kota Jambi);

- ❖ SUBHI, S.Sos, M.M. (Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi);
- ❖ Ir. MASRIZAL, M.M. (Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi);
- ❖ Dra. Hj. NOVERINTIWI D., M.E. (Sekretaris Bappeda Kota Jambi);
- ❖ MARIANI YANTI, Ph.D (Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi)

Dengan mengikuti kegiatan ini diharapkan Pemerintah Kota Jambi dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan di kancah internasional, dan juga mendapatkan *best practice* sebagai masukan dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Jambi sesuai SDG's dan mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Pemerintah Kota Jambi TERKINI.

- 5) Mengikuti " 4th IMT-GT Green Council Meeting, 2nd IMT-GT Green Cities Mayor Meeting dan Sustainable Urban Development Framework Seminar" di Penang Malaysia 22 s.d. 25 Agustus 2019

Pemerintah Kota Jambi berkomitmen dalam ikut mendukung gerakan perubahan iklim (*climate action change*), terwujudnya menuju *masyarakat rendah emisi (low-carbon society)* dan terwujudnya *Sustainable Development Goals (SDG's) No. 7 Affordable and Clean Energy* (Energi bersih dan terjangkau) dan No. 13 *Climate Action* (Penanganan perubahan iklim). Diantaranya masuk menjadi anggota *Green Mayor Council IMT* yang merupakan platform unggulan dalam *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth-Triangle (IMT-GT)* melalui *The Centre for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT)*.

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth-Triangle (IMT-GT) bertujuan untuk mendorong partisipasi provinsi dan negara bagian yang berada di ketiga negara dalam pembangunan ekonomi. Prakarsa Rencana Aksi Kota Hijau/ *Green Cities Action Plan (GCAP)* yang saat ini telah dijalankan di Melaka, Malaysia dan Songkhla (Thailand) dan menyusul akan diimplementasikan di Medan dan Batam, Indonesia direspon sangat antusias. Namun, para pemimpin menekankan perlunya tindakan individu dan kolektif yang berkelanjutan untuk memitigasi dampak lingkungan, termasuk meningkatnya risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Para Pemimpin telah mengarahkan IMT-GT untuk meningkatkan model-model GCAP yang berhasil, dan bekerja untuk mengembangkan Kerangka Pembangunan Urban Berkelanjutan (*Sustainable Urban Development - SUD*) untuk kota-kota IMT-GT. Implementasi rencana aksi di bawah kerangka sub-regional ini dapat membuka peluang investasi baru, dengan kota-kota IMT-GT hijau dan ramah lingkungan yang menyediakan sumber pertumbuhan yang kuat di sub-wilayah.

Mengikuti kegiatan ini bagi Pemerintah Kota Jambi adalah selain semakin menunjukkan peran serta Kota Jambi dalam turut serta mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG'S dan MDG's) di kancah internasional termasuk melalui *Localise SDG'S*, mendapatkan *sharing best practices* dalam mengimplementasikan prakarsa proyek pertumbuhan hijau di tingkat lokal, termasuk mendapatkan bantuan teknis dan non teknis dari ICLEI dan ADB dalam hal peningkatan kapasitas untuk menyusun dokumen/proposal yang dibutuhkan bagi kota – kota untuk mendapatkan bantuan pendanaan dan teknik dari lembaga internasional.

a) Maksud dan Tujuan

Keikutsertaan Pemerintah Kota Jambi dalam kegiatan ini adalah sebagai salah satu anggota *IMT-GT Green Cities Mayor Council* dan semakin menunjukkan peran serta Kota Jambi dalam turut serta mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG'S dan MDG's) di kancah internasional termasuk melalui *Localise SDG'S*, mendapatkan *sharing best practices* dalam mengimplementasikan prakarsa proyek pertumbuhan hijau di tingkat lokal.

b) Peserta/ Delegasi

- ❖ Ir. H. BUDIDAYA, M.For.Sc. (Sekretaris Daerah Kota Jambi)
- ❖ Drs. H.R. ERWANSYAH, M.M. (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Jambi)
- ❖ PAHLEWI, S.P. (Kabid. Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi)
- ❖ AHMAD NAZMI, S.S., M.M. (Kasubag. Kerjasama Dalam Negeri Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Jambi)

Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan masukan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kota Jambi kedepan dan mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Pemerintah Kota Jambi.

- 6) Konferensi *The Liga Ilmu Serantau* (LIS) dilaksanakan di Politeknik Mersing, Johor, Malaysia pada tanggal 25 s.d 27 September 2019

Sebagai wujud kerjasama yang telah diikat oleh Pemerintah Kota Jambi dengan Dunia Pendidikan, salah satunya dengan Politeknik Jambi, melalui Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Politeknik Jambi tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan,

Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor:11/Mou/Hku/2018 dan 271/MoU/D/POLJAM/C-02/IX/2018 tanggal 10 September 2018 maka Wali Kota Jambi diundang oleh Direktur Politeknik Mersing Malaysia, untuk berpartisipasi sebagai Pembicara Utama dalam Konferensi ini yang akan dilaksanakan di Politeknik Mersing, Johor, Malaysia tanggal 26 September 2019 Dengan tema "MEMPERKUAT KREATIVITAS PENELITIAN DAN INOVASI MENUJU REVOLUSI INDUSTRI 4.0".

Konferensi *The Liga Ilmu Serantau* (LIS) adalah konferensi internasional tahunan yang bertujuan untuk berbagi dan mempromosikan hasil kegiatan penelitian dan inovasi yang dilakukan oleh para pendidik dari Yayasan Ibnu Sina Batam, Politeknik Jambi, Politeknik *dan Community College* Malaysia dan mitra kolaboratif lainnya dari lembaga-lembaga tersebut.

a) Maksud dan Tujuan

Wali Kota Jambi untuk berpartisipasi sebagai Pembicara Utama dalam Konferensi *The Liga Ilmu Serantau* (LIS) dan semakin memperkenalkan Pemerintah Kota Jambi di tingkat Internasional dan konsep Smart City Kota Jambi yang mengarah ke revolusi teknologi 4.0 dan mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Pemerintah Kota Jambi.

b) Peserta/ Delegasi

Utusan delegasi Pemerintah Kota Jambi untuk menghadiri kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- ❖ Dr. H. SYARIF FASHA, M.E. (Wali Kota Jambi)
- ❖ SUHENDRI, S.H., M.Si. (Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Jambi)
- ❖ MARIANI YANTI, Ph.D. (Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi)
- ❖ Dra. NELLA ERVINA, M.M.Agr. (Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Jambi)
- ❖ ABU BAKAR, S.H. (Kepala Bagian Humas Setda Kota Jambi)

Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan dapat semakin mengharumkan Pemerintah Kota Jambi di tingkat Internasional khususnya memperkenalkan konsep Smart City Kota Jambi yang mengarah ke revolusi teknologi 4.0 dan mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Pemerintah Kota Jambi.

7) *2019 E-Commerce Training Workshop* dilaksanakan di Hangzhou, China pada tanggal 28 Oktober s.d. 1 November 2019

"*2019 E-Commerce Training Workshop*" diperuntukkan bagi 2 (dua) delegasi dari setiap kota yang akan berpartisipasi, yaitu: 1(satu) orang dari pemerintahan yang bertanggungjawab dalam

pengembangan *e-commerce* /pembuat kebijakan dan 1(satu) orang dari pelaku usaha *e-commerce* lokal.

a) Tujuan kegiatan *E-Commerce Training Workshop* adalah untuk berbagi pengetahuan kepada para peserta tentang pengalaman dan keberhasilan Hangzhou dalam membangun *e-commerce* untuk mendorong pertumbuhan dan kemakmuran secara bersama-sama.

b) Manfaat kegiatan *E-Commerce Training Workshop* bagi peserta, yaitu:

- ❖ Mengetahui model ritel baru platform Alibaba.
- ❖ mendapatkan pemahaman sepenuhnya tentang pengalaman Hangzhou dalam mengembangkan *E-Commerce*.
- ❖ Mendapat pengajaran dari para akedemisi, praktisi dan pembuat kebijakan dengan kurikulum yang dirancang dengan cermat, diantaranya berupa:
 - praktik dan inovasi kelembagaan pengembangan *E-commerce* lintas batas secara komprehensif.
 - analisis ekosistem *E-commerce* dari berbagai perspektif.
 - kisah sukses nyata *e-commerce* global.

Kunjungan lapangan/ studi tur yang mendalam dan memperoleh pengetahuan langsung tentang kenyamanan dan efisiensi tinggi yang dibawa oleh *e-commerce* lintas batas, mode ritel baru, pembayaran ponsel dan logistik yang cerdas..

c) Peserta dari Kota Jambi terdiri dari :

- ❖ NOVIARDI, S.Kom. (Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi).
- ❖ DONI SUMATRIADI, S.STP, M.H. (Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi).

Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan dapat menambah wawasan ASN Pemerintah Kota Jambi untuk menyusun kebijakan serta program dan kegiatan yang dapat mendukung pengembangan dan pertumbuhan *e-commerce* lokal di Kota Jambi untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran Kota Jambi secara bersama-sama.

8) Mengikuti "*the Thirty-Eight Session of the Executive Committee*" dan Seminar International "*Heritage and Sustainable Tourism*" dilaksanakan di Lalitpur Nepal pada tanggal 5 s,d 10 November 2019

CITYNET *The Regional Network of Local Authorities for the Management of Human Settlements* adalah asosiasi/organisasi jaringan pemerintah kota tingkat dunia yang berkomitmen untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik. CITYNET mempunyai misi menghubungkan para aktor perkotaan dan memberikan solusi nyata untuk kota-kota di seluruh kawasan Asia Pasifik. Saling bertukar pengetahuan dan membangun komitmen untuk membangun kota yang lebih berkelanjutan dan berketahanan melalui pengembangan kapasitas, kerjasama antar kota dan proyek-proyek nyata, membantu para anggota dalam menanggapi perubahan iklim, bencana, mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kebutuhan Infrastruktur.

CITYNET didirikan pada tahun 1987 dengan dukungan UNESCAP, UNDP dan UN-Habitat. Asosiasi jaringan antar kota ini telah berkembang dengan total anggota saat ini sebanyak 150, yang terdiri atas 99 *full members*, 55 *associate members*, dan 2 *corporate members* yang berasal dari Kota-kota, NGO - NGO, sektor swasta dan riset centre di kawasan Asia Pasifik.

Pemerintah Kota Jambi berkomitmen bergabung dalam keanggotaan CityNet sebagai tindak lanjut Komite Eksekutif CityNet--badan pengelola tertinggi CityNet yang mengadakan pertemuan tahunan untuk membahas arah dan strategi CityNet kedepan. Dalam pertemuan ini para anggota Komite Eksekutif CityNet akan merumuskan program kerja dua tahunan sesuai dengan Rencana Jangka Menengah, menyetujui masuknya keanggotaan baru, dan menetapkan pedoman kebijakan untuk Sekretariat--melalui surat dari Wali Kota Metropolitan Lalitpur Nepal (anggota Komite Eksekutif CityNet) dan Sekretaris Jenderal CityNet mengundang Wali Kota Jambi menghadiri Pertemuan Komite Eksekutif CityNet ke-38 dan Seminar Internasional: "Pusaka dan Pariwisata Berkelanjutan" tanggal 06 s.d 08 November 2019 di Lalitpur Nepal.

a) Maksud dan Tujuan

Dengan bergabung sebagai anggota CityNet diharapkan menjadi sarana bagi Pemerintah Kota Jambi untuk memperluas kesempatan membangun kemitraan regional Asia Pasifik, mengidentifikasi peluang untuk kolaborasi dan berbagi praktik pemerintahan terbaik dalam berbagai tujuan pembangunan perkotaan dan menyusun strategi untuk mendorong pemerintah daerah ke arah tujuan mengembangkan kota yang berkelanjutan, inovatif, dan tangguh.

b) Peserta/ Delegasi

Utusan delegasi Pemerintah Kota Jambi untuk menghadiri kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- ❖ Dr. H. SYARIF FASHA, M.E. (Wali Kota Jambi)
- ❖ Drs. NIRWAN, M.E. (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi)
- ❖ SUHENDRI, S.H., M.Si. (Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Jambi)
- ❖ MARIANI YANTI, Ph.D. (Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi)
- ❖ YUNITA INDRAWATI, A.P., M.P. (Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan Setda. Kota Jambi)

Dengan bergabung sebagai anggota CityNet diharapkan menjadi sarana bagi Pemerintah Kota Jambi untuk menjalin kerja sama internasional dengan kota-kota lainnya di dunia untuk pembangunan dan kemajuan Kota Jambi yang lebih berkelanjutan dan berketahanan.

9) *Workshop for Thought Leaders Urban Regeneration : The Way to Vibrant City* dilaksanakan di Guangzhou, China pada tanggal tanggal 1 s.d. 7 Desember 2019

Workshop for Thought Leaders yang disusun dan dirancang untuk membantu para pembuat kebijakan dan keputusan belajar dari inovasi-inovasi luar biasa dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan. Dipandu oleh Institut Inovasi Perkotaan Guangzhou, Sekretariat Daerah METROPOLIS Asia Pasifik, UCLG ASPAC, Komunitas Inovasi Perkotaan UCLG, Komite Tetap UCLG-ASPAC Perempuan dalam Pemerintah Daerah (SCWLG), dan diorganisir oleh Universitas Sun Yat-sen, seminar ini mencakup sesi pembelajaran, panel diskusi, studi kasus, kunjungan lapangan, dan perencanaan tindakan.

Dalam konteks kelompok kota yang baru muncul dan wilayah metropolitan yang lebih besar, pembaruan perkotaan saat ini juga diberdayakan oleh teknologi dan industri modern yang lebih baik, dan ditantang dengan kebutuhan untuk mengadopsi model pembangunan yang lebih inovatif dan kooperatif dengan negara kota tetangga. Dalam workshop tahun ini, kami akan menyediakan platform bagi para pemimpin kota, pakar dan praktisi untuk berbagi kebijakan, strategi, dan praktik inovatif untuk regenerasi perkotaan yang memperkuat kota-kota untuk masa depan yang lebih bersemangat. Dengan partisipasi SCWLG, diskusi ini juga akan dipandu oleh SDGs (*Sustainable Development Goals* – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) tentang kesejahteraan perempuan dan mencakup sub-topik penting tentang “Perencanaan Perkotaan yang Ramah Keluarga dan Regenerasi Perkotaan”.

Workshop berorientasi solusi ini akan sangat membantu Kepala Daerah dalam menemukan jawaban dari tantangan regenerasi perkotaan dan meningkatkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

a) Maksud dan Tujuan

Dengan hadirnya Kepala Daerah sebagai undangan *Guangzhou Award* diharapkan menjadi sarana bagi Pemerintah Kota Jambi untuk menemukan solusi tantangan regenerasi perkotaan dan meningkatkan kota yang berkelanjutan guna mendorong pemerintah daerah ke arah tujuan mengembangkan kota yang berkelanjutan, inovatif, dan tangguh.

b) Peserta/Delegasi

Utusan peserta/delegasi Pemerintah Kota Jambi yang menghadiri kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- ❖ Dr. dr. H. MAULANA, M.K.M. (Wakil Walikota Jambi).
- ❖ drg. IRAWATY SUKANDAR, M.Kes. (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi).
- ❖ LIANA ANDRIANI, S.T.P, ME. (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah Kota Jambi).
- ❖ MARIANI YANTI, Ph.D. (Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi).

Dengan menghadiri undangan *Workshop Guangzhou Award* diharapkan menjadi sarana bagi Pemerintah Kota Jambi untuk menjalin kerja sama internasional dengan kota-kota lainnya di dunia untuk pembangunan dan kemajuan Kota Jambi yang lebih berkelanjutan dan berketahanan serta membantu menemukan solusi dalam tantangan regenerasi perkotaan.

c. Kerjasama dengan Pemerintah Singapore

Pemerintah kota Jambi juga berkerjasama dengan pemerintah Singapore melalui Konsulat Jenderal Singapore di Medan dan Kementerian Dalam Negeri mengenai training peningkatan kapasitas ASN di Kota Jambi. Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Jambi mengirim 50 (lima puluh) orang untuk mengikuti *Singapore Cooperation Programme* (SCP) dalam bidang :

- 1) *Smart City and Cyber Security Course* tanggal 17 s/d 23 Februari 2019, bertempat di Rendezvous Hotel, Singapura

- a) Tujuan mengikuti kegiatan ini untuk mengatasi tantangan kompleks yang terkait dengan urbanisasi yang cepat dan populasi tingkat kepadatan tinggi dengan penggunaan teknologi. Ini diperoleh dari keahlian Singapura dalam mengadopsi pendekatan dan pengalaman sistem perkotaan terpadu dalam mengatasi tantangan perkotaan.
- b) Peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang ditunjuk berdasarkan:
- ❖ Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penetapan Peserta Pelatihan Kota Cerdas dan Keamanan Dunia Maya Program Kerjasama Singapura (*Singapore Cooperation Programme Smart City and Cyber Security*) Bagi Aparatur Kota Jambi Tahun 2019.
 - ❖ Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penetapan Peserta Pelatihan Kota Cerdas dan Keamanan Dunia Maya Program Kerjasama Singapura (*Singapore Cooperation Programme Smart City and Cyber Security*) Bagi Aparatur Kota Jambi Tahun 2019.
 - ❖ Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penetapan Peserta Pelatihan Kota Cerdas dan Keamanan Dunia Maya Program Kerjasama Singapura (*Singapore Cooperation Programme Smart City and Cyber Security*) Bagi Aparatur Kota Jambi Tahun 2019.
- 2) *Public Service Training* tanggal 7 s/d 14 Juli 2019
- a) Tujuan utama dari pelatihan ini adalah:
- ❖ meningkatkan pengetahuan teknis dan kapasitas karyawan Kota Jambi dalam pemerintahan dan administrasi publik, dan inovasi pelayanan publik.
 - ❖ untuk memperluas dan bertukar ide dan pengalaman pada pelayanan publik sebagai pelajaran yang dipelajari dari perspektif pemerintah Singapura.
 - ❖ untuk membiasakan aparat sipil negara dengan prinsip dan implementasi tata kelola yang baik
- b) Peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang terdiri dari pejabat eselon II, III dan IV yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 198 Tahun 2019 tentang Penetapan Peserta *Singapore Cooperation Programme Public Service training* Bagi Aparatur Kota Jambi Tahun 2019.

d. *Workshop English Training*

Kegiatan *Workshop English Training* diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Jambi khususnya dalam kemampuan berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris.

Pengajar *Workshop English Training* ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 13.a Tahun 2019 tentang Penunjukan Tenaga Pengajar Pelatihan Bahasa Inggris (*Workshop English Training*) Pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019.

- 1) Tenaga Pengajar, yaitu:
 - a) Movendra Karizal, S.Pd
 - b) Bagus Iman Satrio Wibowo, S.Pd
- 2) Tugas Tenaga Pengajar yaitu memberikan pengajaran dan pengetahuan berbahasa Inggris kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

Workshop English Training dilaksanakan sebanyak 18 (delapan belas) kali pertemuan.

e. “*Brainstorming*” Rapat Bulanan Tim Teknis dan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Jambi”

- 1) Rapat Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri
 - a) Rapat dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2019 bertempat di .Ruang Utama Kantor Walikota Jambi dengan jumlah peserta 40 (empat Puluh) orang.
 - b) Narasumber

Narasumber ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penunjukan Narasumber Rapat Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri Tahun Anggaran 2019.

Yang menjadi narasumber adalah Dr. Nelson Simanjuntak, SH. M.Si (Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) dengan materi Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri dalam Peningkatan Pembangunan Daerah.

Narasumber mempunyai tugas sebagai berikut:

 - ❖ Memberikan dan menyampaikan materi tentang kerjasama daerah khususnya kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri.

- ❖ Memberikan pemahaman tentang proses pelaksanaan kerjasama daerah khususnya kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri.

2) Rapat Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri (FGD penyusunan draf *Letter of Intent* antara Pemerintah Kota Jambi dengan Mersing Johor Malaysia)

a) Rapat dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2019, bertempat di ruang utama Kantor Walikota Jambi dengan jumlah peserta 55 (lima puluh lima) orang.

b) Narasumber

Narasumber ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 422 Tahun 2019 tentang Penunjukan Narasumber Rapat Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri Tahun Anggaran 2019.

Yang menjadi narasumber, yaitu:

- ❖ Dr. Nelson Simanjuntak, SH. M.Si (Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) dengan materi Penyusunan *Letter of Intent* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018.
- ❖ Rico Eric Estrada, SH. MH (Kasubbid Kerja Sama LSM dan Badan Swasta Asing Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) dengan materi Penyusunan *Letter of Intent* Kerja Sama Pemerintah Kota Jambi dengan Politeknik Mersing Malaysia.

Narasumber mempunyai tugas sebagai berikut:

- ❖ Memberikan materi tentang mekanisme kerjasama daerah dengan pemerintah daerah dan lembaga di luar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018.
- ❖ Memberikan pelaksanaan kerjasama daerah khususnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan Mersing Distric Council, Johor Malaysia.

2. Kegiatan Pemberian Informasi, Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama

- a. Pengembangan dan maintenance Website Bagian Kerjasama
- b. Kerjasama Satu Pintu

Mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Jambi Nomor : 193.1/645/KJS/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Satu Pintu di Lingkup Pemerintah Kota Jambi.

Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Jambi dikeluarkan untuk pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah yang akan menginisiasi kerjasama daerah, kerjasama daerah tersebut difasilitasi oleh Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Jambi.

Kerjasama daerah melalui beberapa tahapan, yaitu:

- Persiapan;
- Penawaran;
- Penyusunan Kesepakatan Bersama;
- Penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- Persetujuan DPRD (terhadap kerja sama yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan);
- Penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
- Pelaksanaan;
- Penatausahaan; dan
- Pelaporan.

c. Monitoring dan Evaluasi ke Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kerjasama, dengan tujuan untuk mengetahui tindak lanjut dari kerjasama, dari 32 (tiga puluh dua) Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani yang telah diimplementasikan sebanyak 20 (dua Puluh) Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja Sama yang belum terimplementasikan karena sistem yang belum konekting dan pergantian perangkat daerah.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

DAFTAR PERJANJIAN KERJA SAMA YANG DIIMPLEMENTASIKAN

NO	JENIS KERJA SAMA	KERJA SAMA DENGAN	PENANGGUNG JAWAB	IMPLEMENTASI
1	2	3	4	5
1	Kerja sama antar lembaga			
	Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kota Jambi Dalam Rangka Universal Health coverage	Pemerintah Kota Jambi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jambi	BPJS Kesehatan Cabang Jambi/Dinas Kesehatan Kota Jambi	✓
2	Kerja Sama Antar Daerah			
	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi	✓
3	Kerja Sama Antar Daerah			
	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi	✓
4	Kerja Sama Antar Daerah			
	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi	✓

C.

D.				
5	Kerja Sama Antar Daerah			
	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi	✓
6	Kerja Sama Antar Daerah			
	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi	✓
7	Kerja sama antar OPD			
	Tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	-
8	Kerja sama antar OPD			
	Tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	-
9	Kerja sama antar OPD			

E.

F. 10	Tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kota Jambi Kerja sama antar OPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	-
	Tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Kota Jambi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Sosial Kota Jambi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	-
11	Kerja sama antar OPD			
	Tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	-
12	Kerja sama antar OPD			
	Tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	-

	Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi			
13	Kerja sama antar OPD			
	Tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	-
14	Kerja sama antar OPD			
	Tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	-
15	Kerja sama antar OPD			
	Tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	-
16	Kerja sama antar OPD			
	Tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	-

	Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi			
17	Kerja sama antar OPD			
	Tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pendidikan Kota Jambi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Pendidikan Kota Jambi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	-
18	Kerja sama antar lembaga			
	Tentang Kerjasama Dalam Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Pendampingan, Pelatihan dan Penelitian	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dengan Stikom Dinamika Bangsa Jambi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	✓
19	Kerja sama antar lembaga			
	Tentang Koordinasi TP4D Kejaksaan Negeri Jambi Dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pemko Jambi Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyerapan Anggaran Pemko Jambi	Kejaksaan Negeri Jambi dengan Pemerintah Daerah Kota Jambi	Inspektorat Kota Jambi	✓
20	Kerja sama antar lembaga			
	Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi dengan Dinas Pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan	✓

	Seluruh Ketua Rukun Tetangga dan Kader Pos Yandu	Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi	Perlindungan Anak Kota Jambi	
21	Kerja sama antar lembaga			
	Tentang Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Jambi	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dengan Kantor Pertanahan Kota Jambi	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi	✓
22	Kerja sama antar lembaga			
	Tentang Pengumpulan Data Dalam Rangka Survei Penilaian Integritas Tahun 2019 di Kota Jambi	Inspektorat Kota Jambi dengan Badan Pusat Statistik Kota Jambi	Inspektorat Kota Jambi	
23.	Kerja sama antar lembaga			
	Tentang pemanfaatan layanan Bank Bukopin untuk penerimaan pembayaran pajak daerah di Kota Jambi	Antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan PT.Bank Bukopin Cabang Jambi	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi	✓
24.	Kerja sama antar lembaga			
	tentang pemanfaatan layanan Bank BTN untuk penerimaan pembayaran pajak daerah di Kota Jambi.	Antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan PT.Bank BTN Cabang Jambi	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi	✓
25.	Kerja sama antar lembaga			
	tentang pemanfaatan layanan Bank OCBC NISP untuk penerimaan pembayaran pajak daerah di Kota Jambi.	Antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan PT.Bank OCBC NISP Cabang Jambi	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi	✓
26.	Kerja sama antar lembaga			
	tentang penerimaan pembayaran pajak daerah Kota Jambi.	Antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan PT.POS INDONESIA (PERSERO)	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi	✓
27.	Kerja sama antar lembaga			

G

H.	tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Seluruh Pedagang Pasar dan Pelaku Usaha Daerah di Wilayah Kota Jambi	Antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi	✓
28.	Krja sama dengan Pihak ketiga			
	tentang Pemanfaatan dan Peningkatan Kapasitas Jalan Gunung Semeru dan Jalan Berdikari Kota Jambi	Antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari	Dinas Perhubungan Kota Jambi dan Dinas PUPR Kota Jambi	✓
29.	Kerja sama antar lembaga			
	tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Melalui Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Antara Dinas Pendidikan Kota Jambi dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi	Dinas Pendidikan Kota Jambi	✓
30.	Kerja sama antar lembaga			
	tentang Kajian dan Penyusunan Alur Cerita (Storyline) Sejarah Kota Jambi	Antara Dinas Kearsipan dan Perustakaan Kota Jambi dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi	Dinas Kearsipan dan Perustakaan Kota Jambi	✓
31.	Kerjasama antar Daerah			
	tentang Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keluhan Masyarakat Online Kota Jambi di Kabupaten Bungo	Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	-
32.	Kerja sama antar lembaga			
	tentang pengawasan, penertiban, pelayanan penerangan jalan umum, pemungutan dan penyeteroran pajak penerangan jalan, sosialisasi serta pembayaran rekening listrik pemerintah Kota Jambi	antara pemerintah Kota Jambi dengan PT.PLN (PERSERO) UIW Sumatera Selatan Jambi Bengkulu UP3 Jambi	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi	✓

I.

DATA KERJASAMA DAERAH KOTA JAMBI

NO	TANGGAL MoU/PKS	NAMA MoU/PKS	MASA KERJASAMA	PARA PIHAK
1.	1 Januari 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jambi tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kota Jambi Dalam Rangka Universal Health overage	1 (satu) tahun	Dr. H. Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) Elshe Theresia, S.Si,Apt (Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi)
2.	4 Maret 2019	Antar Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Batanghari dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Kabupaten Merangin dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Pemerintah Kabupaten Tebo dengan Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh tentang Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi	12 (dua belas) bulan	Hj. Masnah Busro (Bupati Muaro Jambi) H. Syahirsyah. Sy (Bupati Batanghari) H. Romi Hariyanto (Bupati Tanjung Jabung Timur) H. Syafrial (Bupati Tanjung Jabung Barat) Rusdian, SKM (Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Jambi). Al Haris (Bupati Merangin) H. Cek Endra (Bupati Sarolangun) H. Sukandar (Bupati Tebo)

				<p>H. Mashuri (Bupati Bungo)</p> <p>H. Adirozal (Bupati Kerinci)</p> <p>H. Syarif Fasha (Walikota Jambi)</p> <p>H. Asafri Jaya Bakri (Walikota Sungai Penuh)</p>
3.	13 Maret 2019	Nota Kesepahaman Antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Kota Jambi Provinsi Jambi tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Wilayah Kota Jambi Provinsi Jambi	1 (satu) Tahun	<p>Djoko Siswanto (Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)</p> <p>Dr. H. Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi)</p>
4.	27 Maret 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	9 (sembilan) bulan, 5 (lima) hari	<p>Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi)</p> <p>Drs. H. Syafe'i, MM (Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari)</p>
5.	27 Maret 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota	9 (sembilan) bulan, 5 (lima) hari	Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan

		Jambi dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal		Perindustrian Kota Jambi) Nur Subiyantoro, SE (Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi)
6.	27 Maret 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	9 (sembilan) bulan, 5 (lima) hari	Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi) Syafriwan, SE (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
7.	27 Maret 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	9 (sembilan) bulan, 5 (lima) hari	Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi) Drs. Hero Suratman (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur)
8.	27 Maret 2019	Pejanjian Kerja Sama Antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai	9 (sembilan) bulan, 5 (lima) hari	Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi)

		Penuh tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal		Hariato, S.Sos (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh)
9.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi	5 (lima) Tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) Subhi, S.Sos, MM (Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi)
10.	8 April 2019	Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi	5 (lima) Tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) Fahmi, SP (Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi)
11.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu	5 (lima) Tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) dr. Hj. Ida Yulianti, MH.Kes (Kepala

		Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kota Jambi		Dinas Kesehatan Kota Jambi)
12.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Sosial Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Kota Jambi	5 (lima) Tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) Kaspul (Kepala Dinas Sosial Kota Jambi)
13.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi	5 (lima) Tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) Fahmi, SP (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi)
14.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pengendalian	5 (lima) Tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) H. M. Rasyid Rido Siregar, SH. M.Kes (Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi)

		Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi		
15.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	5 (lima) Tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) Arzi Efendi, SH (Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi)
16.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	5 (lima) tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) Drs. Nirwan, MM (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi)
17.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat,	5 (lima) tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi)

		Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi		drg. Irawati Sukandar, M.Kes (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi)
18.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi	5 (lima) tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) dr. Rudi Maruli H. Pardede (Direktur RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi)
19.	8 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pendidikan Kota Jambi	5 (lima) tahun	H. Mulyadi Yatub, SH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi) Arman, SE, ME (Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi)
20.	15 April 2019	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Stikom Dinamika Bangsa tentang Kerjasama Dalam Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Pendidikan dan	12 (dua belas) bulan	DR. Syarif Fasha, SE, ME (Walikota Jambi) Setiawan Assegaff, ST, MMSI, Ph.D (Ketua Stikom)

		Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat		Dinamika Bangsa Jambi)
21.	15 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dengan Stikom Dinamika Bangsa Jambi tentang Kerjasama Dalam Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Pendampingan, Pelatihan dan Penelitian	5 (lima) tahun	Drs. Nirwan, MM (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi) Setiawan Assegaff, ST, MMSI, Ph.D (Ketua Stikom Dinamika Bangsa Jambi)
22.	29 April 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Kejaksaan Negeri Jambi dengan Pemerintah Daerah Kota Jambi tentang Koordinasi TP4D Kejaksaan Negeri Jambi Dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pemko Jambi Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyerapan Anggaran Pemko Jambi	2 (dua) Tahun	Fredy Azhari, SH, MH (Kepala Kejaksaan Negeri Jambi) Dr. H. Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi)
23.	23 Mei 2019	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi tentang Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Jambi	1 (satu) tahun	DR. Syarif Fasha, SE. ME (Walikota Jambi) Mayriwan Eka Putra SH (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi)
24.	23 Mei 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Seluruh Ketua Rukun	1 (satu) tahun	Mayriwan Eka Putra SH (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi) drg. Irawati Sukandar, M.Kes (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

		Tetangga dan Kader Pos Yandu		Perlindungan Anak Kota Jambi)
25.	12 Juni 2019	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Kejaksaan Negeri Jambi tentang Koordinasi dan Kerjasama Dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 (dua) Tahun	DR. H. Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) Fredy Azhari, SH, MH (Kepala Kejaksaan Negeri Jambi)
26.	20 Juni 2019	Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tentang Kerjasama di Bidang Pertanahan	5 (lima) tahun	H. Syarif Fasha (Walikota Jambi) Beni Hermawan (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi)
27.	20 Juni 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dengan Kantor Pertanahan Kota Jambi tentang Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Jambi	5 (lima) Tahun	Subhi, S.Sos, MM (Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi) Akmal, A.Ptnh (Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi)
28.	21 Juni 2019	Nota Kesepahaman Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dengan Pemerintah Kota Jambi tentang Pembentukan, Pembinaan, Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	12 (dua belas) bulan	Drs. Agus Nugroho Yusuf, M.Si (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi) DR. H. Syarif Fasha, M.E. (Walikota Jambi)
29.	7 Agustus 2019	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Universitas Brawijaya tentang Pendidikan, Penelitian,	12 (dua belas) bulan	DR. H. Syarif Fasha, M.E. (Walikota Jambi)

		Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS (Rektor Universitas Brawijaya)
30.	22 Agustus 2019	Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Pertamina Marketing Operation Region II Sumbagsel tentang Pengawasan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi di Kota Jambi	6 (enam) bulan	DR. H. Syarif Fasha, M.E. (Walikota Jambi) Primarini (General Manager Pertamina Marketing Operation Region II Sumbagsel)
31.	26 Agustus 2019	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi tentang Koordinasi dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah	5 (lima) tahun	DR. H. Syarif Fasha, M.E. (Walikota Jambi) Lindawaty (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)
32.	26 Agustus 2019	Dokumen Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Badan Pusat Statistik Kota Jambi tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Guna Penyediaan, Pemanfaatan, Serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik	5 (lima) tahun	DR. H. Syarif Fasha, M.E. (Walikota Jambi) Pangorian Marpaung, SE (Kepala Badan Pusat Statistik Kota Jambi)
33.	26 Agustus 2019	Rencana Kerja Antara Inspektorat Kota Jambi dengan Badan Pusat Statistik Kota Jambi tentang Pengumpulan Data Dalam Rangka Survei Penilaian Integritas Tahun 2019 di Kota Jambi	18 (delapan belas) minggu	Drs. H. Hafni Ilyas (Inspektur Kota Jambi) Pangorian Marpaung, SE, (Kepala Badan Pusat Statistik Kota Jambi)

34.	3 Oktober 2019	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari tentang Pemanfaatan dan Peningkatan Kapasitas Jalan Gunung Semeru dan Jalan Berdikari Kota Jambi	1 (satu) Tahun	Dr. H. Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) Pak Lam Brian Chan (Direktur PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari)
35.	17 Oktober 2019	Nota Kesepakatan Antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan PT.Bank OCBC NISP Cabang Jambi tentang pemanfaatan layanan Bank OCBC NISP untuk penerimaan pembayaran pajak daerah di Kota Jambi	3 (tiga) Tahun	Dr.H.Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) Ka Jit, MBA (Head Of Strategy and Innovation)
36.	17 Oktober 2019	Nota Kesepakatan Antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan PT.Bank Bukopin Cabang Jambi tentang pemanfaatan layanan Bank Bukopin untuk penerimaan pembayaran pajak daerah di Kota Jambi	3 (tiga) Tahun	Dr.H.Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) Waskito Utomo, ST,MM (Branc Manager PT.Bank Bukopin TBK Cabang Jambi)
37.	17 Oktober 2019	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT.Bank BTN Cabang Jambi tentang pemanfaatan layanan Bank BTN untuk penerimaan pembayaran pajak daerah di Kota Jambi.	3 (tiga) Tahun	Dr.H.Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) Arias Rachman, SE, MM (Branc Manager PT.Bank BTN TBK Cabang Jambi)
38.	17 Oktober 2019	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT.POS INDONESIA (PERSERO) Cabang Jambi tentang pemanfaatan layanan jasa keuangan POS INDONESIA di Kota Jambi	3 (tiga) Tahun	Dr.H.Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) M.Rakhmat Sidik, SE (Kepala Regional 3 Palembang)

39.	17 Oktober 2019	Perjajian Kerja Sama Antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan PT.Bank Bukopin Cabang Jambi tentang pemanfaatan layanan Bank Bukopin untuk penerimaan pembayaran pajak daerah di Kota Jambi.	5 (lima) Tahun	Subhi,S.Sos. MM (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi) Waskito Utomo, ST,MM (Branc Manager PT.Bank Bukopin TBK Cabang Jambi)
40.	17 Oktober 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan PT.Bank BTN Cabang Jambi tentang pemanfaatan layanan Bank BTN untuk penerimaan pembayaran pajak daerah di Kota Jambi.	5 (lima) Tahun	Subhi,S.Sos. MM (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi) Arias Rachman, SE, MM (Branc Manager PT.Bank BTN TBK Cabang Jambi)
41.	17 Oktober 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan PT.Bank OCBC NISP Cabang Jambi tentang pemanfaatan layanan Bank OCBC NISP untuk penerimaan pembayaran pajak daerah di Kota Jambi.	5 (lima) Tahun	Subhi,S.Sos. MM (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi) Ka Jit, MBA (Head Of Strategy and Innovation)
42.	17 Oktober 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan PT.POS INDONESIA (PERSERO) tentang penerimaan pembayaran pajak daerah Kota Jambi.	5 (lima) Tahun	Subhi,S.Sos. MM (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi) Muhamad Rakhmat Sidik, SE (Kepala Regional 3 Palembang)
43.	21 Oktober 2019	Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Multi Inti Digital Transportasi tentang Transportasi Capsule Bus	6 (enam) bulan	Dr. H. Syarif fasha, ME (Walikota Jambi) Subhan Novianda Mani (Direktur PT.

				Multi Inti Digital Transportasi)
44.	26 Oktober 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Seluruh Pedagang Pasar dan Pelaku Usaha Daerah di Wilayah Kota Jambi	3 (tiga) Tahun	Supriyatno, SE (Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi) Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi)
45.	4 November 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari tentang Pemanfaatan dan Peningkatan Kapasitas Jalan Gunung Semeru dan Jalan Berdikari Kota Jambi	12 (dua belas) bulan	Ir. H. Budidaya, M.For,Sc (Sekretaris Daerah Kota Jambi) Pak Lam Brian Chan (Direktur PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari)
46.	15 November 2019	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Universitas Jambi tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5 (lima) Tahun	DR. H. Syarif Fasha, M.E. (Walikota Jambi) Prof. H. Johni Najwan, SH., MH., Ph.D (Rektor Universitas Jambi)

47.	15 November 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Pendidikan Kota Jambi dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Melalui Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	5 (lima) Tahun	Prof. Dr. Rer.nat. Asrial, M.Si (Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi) H. Arman, SE., ME (Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi)
48.	26 November 2019	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Universitas batanghari tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4 (empat) Tahun	DR. H. Syarif Fasha, M.E. (Walikota Jambi) H. Fachruddin Razi, SH, MH (Rektor Universitas Batanghari)
49.	26 November 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kearsipan dan Perustakaan Kota Jambi dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi tentang Kajian dan Penyusunan Alur Cerita (Storyline) Sejarah Kota Jambi	4 (empat) Tahun	Arzi Efendi, SH (Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi) DR. H. Abdoel Gafar, S.Pd, M.Pd (Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi)
50.	3 Desember 2019	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo tentang Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keluhan Masyarakat Online Kota Jambi di Kabupaten Bungo	3 (tiga) Tahun	Drs. Nirwan, ME (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi) Drs. H. Ridwan IS, MM (Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo)

51.	30 Desember 2019	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Jambi Dengan PT.PLN (PERSERO) UIW Sumatera Selatan Jambi Bengkulu UP3 Jambi Tentang Pengawasan, Penertiban, Pelayanan Penerangan Jalan Umum, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Sosialisasi Sertapembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kota Jambi	2 (dua) Tahun	H. Syarif Fasha (Walikota Jambi) Hanif Andrhean Abidin (Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Jambi PT.PLN (Persero) Unit Induk Wilayah S2JB)
52.	30 Desember 2019	Perjanjian Kerjasama antara pemerintah Kota Jambi dengan PT.PLN (PERSERO) UIW Sumatera Selatan Jambi Bengkulu UP3 Jambi tentang pengawasan, penertiban, pelayanan penerangan jalan umum, pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan, sosialisasi serta pembayaran rekening listrik pemerintah Kota Jambi	5 (lima) Tahun	Budidaya (Sekretaris Daerah Kota Jambi) Hanif Andrhean Abidin (Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Jambi PT.PLN (Persero) Unit Induk Wilayah S2JB)

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan / atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan di implementasikan melalui kegiatan koordinasi pemerintahan daerah dengan instansi vertikal di daerah yang diarahkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan di daerah sebagai proses komunikasi dan interaksi antar penyelenggara pemerintahan dan instansi vertikal di daerah melalui rapat-rapat yang berbentuk forum, yaitu :

1. Forum Koordinasi Keamanan Ketentraman dan Ketertiban
2. Forum Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
4. Forum Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
5. Forum Pembinaan dan Pengembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)
7. Forum Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitas bagi ORKEMAS dan PARPOL
8. Forum Pembinaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Pada tahun 2019 pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan pembinaan batas wilayah untuk memperjelas batas-batas wilayah administrasi, sehingga didapatkan tanda batas wilayah yang memiliki titik koordinat sebagai tanda batas yang memiliki kepastian hukum yang tegas.

Batas wilayah administrasi Kota Jambi tidak mengalami perubahan maupun sengketa batas, akan tetapi banyak timbul sengketa antara warga sebagai akibat dari penyerahan sebagian kecil wilayah wilayah Kabupaten Batang Hari yang pada waktu

sekarang sudah menjadi Kabupaten Muaro Jambi kedalam wilayah administrasi Kota Jambi sebagaimana yang ditetapkan dalam PP No.88 Tahun 2017. Namun kesemua permasalahan tersebut telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah Kota Jambi dengan melibatkan Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi dan pihak Kantor Pertanahan Kota Jambi.

Disamping batas kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Muaro Jambi perlu juga diadakan penegasan batas kecamatan yang ada didalam wilayah Kota Jambi sendiri, karena masih banyak batas kecamatan yang ada di Kota Jambi masih belum jelas, maka dari itu perlu adanya penegasan batas wilayah kecamatan dalam wilayah Kota Jambi.

Kedua kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

a) Bencana Alam

TANAH LONGSOR

Konsep Tanah Longsor

Tanah longsor dapat didefinisikan sebagai pergerakan massa tanah/batuan ke arah bawah (downward) yang disebabkan dan dipicu oleh faktor – faktor alam seperti jenis batuan, bentuk lahan, struktur dan perlapisan batuan, kemiringan lereng, tebal tanah/bahan lapuk, curah hujan dan tutupan vegetasi. Proses pergerakan ini dapat secara bergeser (sliding), menggelinding (rolling), jatuh (falling), atau mengalir (flowing). Longsor biasanya terjadi pada lahan berbukit, lahan hasil pemotongan lereng untuk jalan atau permukiman, dan juga lahan – lahan galian tambang. Longsor terjadi karena lereng tidak stabil, sehingga material/batuan di atas lereng kemudian bergerak turun. Ketidakstabilan lereng dapat dikarenakan beberapa sebab, yang utama adalah penjeuhan material oleh air (hujan). Penjeuhan material menyebabkan beban material semakin bertambah. Kemudian karena pengaruh gravitasi, aliran air yang tidak tertampung dan juga adanya batas kontak antara material stabil dan tidak stabil yang berfungsi sebagai bidang gelincir, material tidak stabil ini bergerak menuruni lereng sampai pada area dimana gravitas tidak berpengaruh lagi.

Dilihat dari mekanisme longsorannya, tanahlongsor dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu luncuran (*slide*), jatuhan (*fall*), runtuh (*topple*), dan aliran (*flow*). Luncuran biasanya terjadi pada material tanah atau bahan induk tanah hasil lapukan batuan yang terdapat zona lemah (*weak zone*) antara strata stabil dan strata tidak stabilnya. Material yang longsor meluncur di sepanjang bidang batas *weak zone* ini atau di sebut *surface of rupture*.

Slide dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu longsor terputar (*rotational landslide*) dan longsor planar (*translation landslide*). Perbedaan keduanya adalah pada bentuk bidang gelincirnya. *Fall* biasanya terjadi pada batuan atau material yang relatif kompak/resisten. *Fall* adalah terlepasnya fragmen batu atau boulder dari agregat batuan secara menggelinding, terpelantai atau jatuh bebas ke lereng bawah. *Fall* biasa terjadi pada agregat batuan yang pelapukannya tidak merata, batuan yang mempunyai banyak kekar (*joint*) atau retakan (*fracture*), atau pada batas antara dua jenis batuan berbeda (zona kontak batuan). Runtuhan (*topples*) adalah runtuhnya sekelompok massa batuan yang diakibatkan gravitasi bumi. Aliran (*flow*) adalah longsor material menuruni lereng dengan ukuran yang bervariasi mulai dari fragmen tanah halus sampai bongkah yang bercampur dengan air. Longsor aliran dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu *debris flow*, *debris avalanche*, dan *earth flow* atau *mud*. *Debris flow* adalah longsor material dengan ukuran yang bervariasi (dari halus hingga kasar) yang bercampur dengan air. *Debris flow* biasanya terjadi pada waktu hujan deras pada lereng curam. *Debris flow* merupakan salah satu jenis longsor yang sering terjadi di Indonesia. *Debris avalanche* merupakan *debris flow* yang terjadi secara cepat dan dalam massa yang besar. *Earthflow/mudflow* hampir sama dengan *debris flow*, Cuma ukuran materialnya relatif halus dan seragam. *Earthflow/mudflow* biasanya terjadi pada lahan dengan kemiringan lereng yang tidak terlalu curam. *Soil creep* atau rayapan tanah adalah pergerakan massa tanah menuruni lereng dalam waktu yang lama dan kecepatan yang relative pelan (tidak seperti longsor yang sifat gerakannya cepat dan dalam waktu yang singkat).

Secara visual kenampakan soil creep tidak mudah dikenali dalam waktu yang singkat karena kenampakan morfologi permukaannya biasanya relatif tidak terlalu berubah. Namun ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi soil creep, antara lain adanya pohon, tiang listik yang miring, dan retak – retak pada permukaan tanah.

Kejadian – kejadian longsor di Kota Jambi

Sebagaimana telah diuraikan di muka adanya pengaruh iklim di Kota Jambi yang tropis basah menyebabkan proses pelapukan batuan pada dinding-dinding tanah di pinggir sungai ataupun lereng tebing tanah berlangsung intensif untuk batuan dekat permukaan. Kondisi ini dalam jangka waktu yang lama telah menyebabkan terbentuknya susunan peralapisan batuan berupa material lapuk bersifat lempungan yang menumpang di atas batuan.

Material lapuk ini mempunyai sifat cepat menyerap air namun sukar meloloskan air.

Sedangkan batuan masif di bawahnya sama sekali tidak dapat menyerap air. Jika terjadi hujan, material lapukan ini akan menyerap air dan dalam waktu singkat beratnya semakin bertambah. Ketika kondisi jenuh sudah tercapai, air hujan yang tidak tertampung akan mengalir pada bidang kontak antara material lapuk dan batuan induk sesuai dengan arah peralapisan, dan keluar dalam bentuk rembesan. Kondisi jenuh ini yang menyebabkan material lapukan kemudian mengalami longsor atau rayapan tanah. Karakteristik yang spesifik tersebut yang menyebabkan daerah pinggir sungai ataupun lereng tebing tanah yang ada di Kota Jambi menjadi rawan longsor.

KEKERINGAN

Konsep Kekeringan

Kekeringan merupakan suatu kondisi dimana terjadi kekurangan air. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Pengertian lain adalah kekurangan dari sejumlah air yang diperlukan dimana keperluan air ini ditentukan oleh kegiatan ekonomi masyarakat maupun tingkat sosial ekonominya. Dengan demikian, kekeringan merupakan interaksi antara dua fenomena yaitu kondisi alam dan kondisi sosial ekonomi. Untuk memudahkan dalam memahami masalah kekeringan, berikut diuraikan klasifikasi kekeringan baik secara alamiah ataupun karena ulah manusia (antropogenik), sebagai berikut:

1) Kekeringan Alamiah

- Kekeringan Meteorologis berkaitan dengan tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim. Pengukuran kekeringan meteorologis merupakan indikasi pertama adanya kekeringan.

- Kekeringan Hidrologis berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Kekeringan ini diukur berdasarkan elevasi muka air sungai, waduk, danau dan elevasi muka air tanah. Ada tenggang waktu mulai berkurangnya hujan sampai menurunnya elevasi muka air sungai, waduk, danau dan elevasi muka air tanah. Kekeringan hidrologis bukan merupakan indikasi awal adanya kekeringan.
- Kekeringan Pertanian berhubungan dengan kekurangan lengas tanah (kandungan air dalam tanah) sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas. Kekeringan pertanian ini terjadi setelah gejala kekeringan meteorologi.
- Kekeringan Sosial Ekonomi berkaitan dengan kondisi dimana pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal akibat terjadinya kekeringan meteorologi, hidrologi, dan pertanian.

2) Kekeringan Antropogenik.

Kekeringan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan terjadi karena :

- Kebutuhan air lebih besar dari pasokan yang direncanakan akibat ketidaktaatan pengguna terhadap pola tanam/penggunaan air.
- Kerusakan kawasan tangkapan air, sumber - sumber air akibat perbuatan manusia. Sebenarnya, ada tiga faktor yang memengaruhi pola musim di Indonesia yaitu monsun, ENSO, Dipole Mode. Monsun adalah perilaku angin musiman yang terbentuk setiap enam bulan sekali di Indonesia. ENSO atau *El Nino Souther Oscillation* merupakan perilaku suhu permukaan laut di Pasifik selatan, terjadi tiap 3-7 tahun. Dipole Mode adalah perilaku suhu permukaan laut di Samudra Hindia, berulang tiap 4-5 tahun. Penelitian menunjukkan bahwa ketiganya memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pola musim di berbagai wilayah di Indonesia.

Selain dari pengaruh iklim yang telah dijabarkan diatas, karakteristik batuan dan tanah sedikit banyak juga mempengaruhi tingkat kerawanan kekeringan. Daerah dataran dengan tanah pasiran hasil proses pengendapan sungai akan berbeda dengan daerah perbukitan berbatuan keras dalam kemampuannya menyimpan air. Daerah dataran biasanya merupakan daerah pengendapan material. Ciri khas pada daerah ini

adalah tanahnya relative dalam, sehingga mampu menyimpan air dalam volume yang besar (disebut aquifer).

Sedangkan daerah perbukitan berbatuan keras biasanya tanahnya tipis sebagai akibat erosi dan longsor yang intensif, karena itu kemampuan untuk menyimpan airnya juga relatif kecil. Selain itu, jika batuan pada lokasi yang bersangkutan termasuk dalam kategori batuan massif kedap air (gamping dan andesit), maka bisa dipastikan potensi kekeringannya akan lebih besar.

BANJIR

Konsep Banjir

Banjir adalah aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga meluap ke kanan kiri sungai dan menyebabkan adanya genangan di sempadan sungai tersebut. Aliran limpasan air tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan menggenangi daerah yang biasanya tidak dilewati aliran air. Sumber air banjir dapat dikategorikan kedalam empat kategori yaitu banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melabahi kapasitas tampungan sungai alamiah dan system drainase buatan manusia. Air banjir juga dapat berasal dari pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badai. Banjir juga dapat disebabkan karena air yang berasal dari kegagalan/bobolnya bangunan air buatan manusia ataupun bendungan alamiah/penyumbatan aliran sungai akibat runtuhnya/longsornya tebing sungai. Ketika sumbatan/bendungan tidak dapat menahan tekanan air maka bendungan akan hancur, air sungai yang terbandung akan mengalir deras sebagai banjir bandang. Pada umumnya banjir disebabkan karena curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga sistem pengaliran air seperti sungai, anak sungai, dan saluran alamiah lainnya serta bangunan buatan manusia seperti saluran drainase ataupun kanal, tidak dapat menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga air meluap menyebabkan banjir. Banjir tersebut selain disebabkan oleh faktor alam, juga disebabkan karena ulah manusia, diantaranya karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan ke dalam saluran air (selokan) dan sungai yang menyebabkan selokan dan sungai menjadi dangkal sehingga mengurangi volume tampungan sungai terhadap air. Kurangnya daya serap tanah terhadap air karena tanah telah tertutup oleh aspal jalan raya dan bangunan-bangunan padat yang tidak

tembus air menyebabkan kecilnya jumlah air yang meresap ke dalam tanah dan meningkatkan jumlah air limpasan permukaan sehingga dapat terjadi genangan dan juga dapat meningkatkan aliran air yang masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir. Berkurangnya daya serap tanah juga dapat disebabkan oleh ulah penebang-penebang pohon di hutan/daerah tangkapan hujan yang tidak menerapkan system reboisasi (penanaman pohon kembali) pada lahan yang gundul, sehingga daerah resapan air berkurang. Berkurangnya daya serap tanah dapat meningkatkan debit limpasan permukaan yang masuk ke dalam sistem aliran sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Secara umum, banjir bandang dan banjir genangan sama-sama bersifat merusak. Aliran arus banjir yang bergolak turbulen dan cepat, dapat merusak semua yang dilaluinya, baik itu manusia, hewan, maupun harta benda. Aliran air yang membawa material yang halus akan mampu menyeret material yang lebih besar sehingga daya rusaknya akan semakin tinggi. Air banjir ini dapat merusak pondasi bangunan, pondasi jembatan, dan lainnya yang dilewati sehingga menyebabkan kerusakan parah pada bangunan tersebut. Kuatnya arus banjir juga dapat membawa dan menghanyutkan semua yang dilaluinya seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan harta benda. Setelah banjir surut, bencana belum juga selesai. Material yang terbawa oleh air banjir, akan tersedimentasi dan mengakibatkan kerusakan pada tanaman, permukiman, serta dapat menimbulkan wabah penyakit seperti diare, penyakit kulit, dan sebagainya. Banjir bandang dapat menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak daripada banjir genangan atau luapan sungai. Hal itu disebabkan karena banjir bandang ini terjadi sangat cepat sehingga tidak ada kesempatan bagi warga untuk mengungsi.

PUTING BELIUNG

Pengertian Puting Beliung

Puting Beliung atau badai tropis merupakan angin kencang dengan kecepatan mencapai 120 km/jam atau lebih yang terjadi di daerah tropis. Puting Beliung ini disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan yang ekstrim dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan yang ekstrim pada sistem cuaca disebabkan antara lain oleh

fenomena *urban heat island* atau fenomena meningkatnya suhu permukaan di daerah perkotaan akibat aktivitas – aktivitas perkotaan yang melepaskan senyawa – senyawa karbon seperti emisi kendaraan bermotor, industri, pelepasan energi antropogenetik dari AC. Suhu yang lebih tinggi dari pada daerah di sekitarnya menyebabkan tekanan udara yang lebih rendah daripada di pusat kota, sedangkan daerah di sekitarnya tekanan udaranya lebih tinggi. Perbedaan tekanan ini menyebabkan udara bergerak menuju pusat tekanan rendah. Semakin besar perbedaan tekanan udara, semakin cepat pergerakan udara (angin). Selain daerah perkotaan yang mudah mengalami *urban heat island*, angin ini juga dapat terjadi pada daerah cekungan yang luas atau daerah bertopografi datar yang dikelilingi perbukitan.

Kejadian Puting Beliung di Kota Jambi

Kejadian puting beliung di Kota Jambi dan sekitarnya terjadi terutama pada musim pancaroba. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan industri menyebabkan emisi gas rumah kaca semakin bertambah dari waktu ke waktu. Emisi gas karbon yang semakin besar ini menyebabkan potensi untuk menjadi *urban heat island* juga semakin besar. Selain itu, topografi kota Jambi yang datar berperan dalam menyebabkan terjadinya pusat udara bertekanan rendah di Kota Kota Jambi.

Beberapa kejadian puting beliung di Kota Jambi sekitarnya yang merusakkan sejumlah infrastruktur, beberapa pusat pertokoan. Kejadian ini juga menyebabkan rusaknya ratusan rumah dan pertokoan, baik akibat sapuan angin maupun tertimpa pohon yang roboh.

BENCANA NON ALAM

Bencana Kebakaran

Konsep Kebakaran

Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan. Tiga unsur penting dalam kebakaran antara lain : Bahan bakar dalam jumlah yang cukup Bahan bakar dengan bahan padat, cair atau uap /gas

- Zat pengoksidasi/oksigen dalam jumlah yang cukup

- Sumber nyala yang cukup untuk menyebabkan kebakaran

Hal-hal yang perlu diketahui untuk mencegah kebakaran/ peledakan :

- Sifat-sifat dan bahan-bahan yang dapat terbakar dan meledak
- Proses terjadinya kebakaran dan peledakan
- Tata cara penanganan dalam upaya mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran dan peledakanb

b) Status Bencana

Kesiagaan Tim Sailak PB Kota Jambi dalam penanggulangan Banjir pada Sungai Batanghari dibagi dalam 5 tingkatan yaitu:

Siaga 4	:jika ketinggian air Sungai Batanghari dibawah 13.50 meter
Siaga 3	:jika ketinggian air Sungai Batanghari mencapai 14.00 meter
Siaga 2	:jika ketinggian air Sungai Batanghari mencapai 14.50 meter
Siaga 1	:jika ketinggian air Sungai Batanghari mencapai 15.00 meter
Bahaya Banjir	:jika ketinggian air Sungai Batanghari mencapai diatas 15.50 meter

Tahap Siaga 4 dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Jika air sungai Batanghari mulai naik dari kondisi normal hingga mencapai ketinggian 13,50 m.
- Pada Posisi ketinggian air 13.50 m titik di pertigaan sungai Batang Hari setelah jembatan di Kelurahan Legok tepatnya di Seberang bawah Pelayangan ketinggian air sejajar dengan badan aspal jalan begitu juga di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan.
- Rata-rata air sudah memasuki halaman rumah penduduk diwilayah seberang dan Pulau Pandan, namun belum ada evakuasi terhadap penduduk karena

rumah penduduk merupakan rumah panggung tinggi menyebabkan air tidak langsung masuk kedalam rumah.

- Pada ketinggian tersebut air juga telah memasuki halaman rumah penduduk yang berada di beberapa tempat di Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur.
- oleh karena itu secara umum pada ketinggian 13.50 tersebut adalah titik awal pemantauan secara intensif dari Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Jambi yang merupakan Pusat Komando Bencana Alam di Kota Jambi

Pada Posisi Tahap Siaga 4 ini Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Jambi melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam menghadapi bencana banjir
- Tim Reaksi Cepat (TRC) Melakukan patroli ke daerah yang rawan kena bencana banjir

Tahap Siaga 3 dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Ketinggian debit air pada pos pemantauan 14.00 m yang dilihat dari Titik pemantauan yaitu Tanggo Rajo (Ancol), Danau Teluk, Pelayangan.
- pada Tahap siaga 3 ini kenaikan muka air sungai Batanghari pada ketinggian tersebut, air yang menggenangi dataran sekitar sebagian perumahan penduduk di Kecamatan Pelayangan, Danau Teluk, Telanaipura .
- Penduduk yang terkena bencana banjir tidak dapat melakukan aktivitas diluar rumah secara baik guna memenuhi kebutuhan hidupnya .
- Pada Tahap ini tinggi bebas air sungai berada pada level 1,50 - 1,25m' dari muka air maksimal daya tampung palung Sungai Batanghari.
- Penduduk mulai mengungsi dan di evakuasi ketempat penampungan jika ketinggian air rata-rata sudah mencapai 14.00 m.

Tahap Siaga 2 dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Tahap siaga 2 ini ditentukan setelah dipantau pada pos pemantauan ketinggian air 14,50 m

- Pada ketinggian tersebut warga yang terkena bencana banjir sudah tidak dimungkinkan keluar rumah dengan peralatan seadanya dan perlu dilakukan evakuasi oleh Tim Gabungan yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
- Pemukiman dan perumahan penduduk terutama di Kecamatan Pelayangan, Danau Teluk, Telanaipura dan Jambi Timur sudah perlu dievakuasi.
- Pada Tahap ini tinggi bebas air sungai berada pada level 1,25 - 0,75m' dari muka air maksimum daya tampung palung Sungai Batanghari.
- Dan masyarakat yang terkena bencana kebanjiran perlu dibantu baik itu bahan makanan, pakaian dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahap ini Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Jambi melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Jambi melakukan evakuasi dan membantu korban bencana menyelamatkan diri dengan perahu karet dibantu dengan instansi lainnya termasuk unsur TNI dan Polri.
- Meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana banjir yang akan datang secara tiba-tiba.
- Menempatkan petugas baik dari BPB dan Damkar, Kesehatan, Sosnaker, dan Petugas lainnya yang membantu korban bencana banjir.
- Membuat dapur umum untuk logistik makanan pengungsi sehingga pengungsi dapat merasa aman di tempat penampungan.
- Menambah petugas yang dibutuhkan untuk penanganan bencana.
- Mengaktifkan Posko Bencana di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Jambi, yang gunanya untuk mengamankan asset dari pengungsi yang ditinggalkan.
- Mendirikan juga posko untuk kesehatan, yang gunanya untuk melayani masyarakat yang terkena dampak penyakit akibat dari bencana banjir.
- Menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC) disetiap lokasi bencana.

Tahap Siaga 1 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Tahap siaga 1 ditentukan apabila pada pos pemantauan ketinggian air 15.00 m.
- Pada ketinggian tersebut warga masyarakat yang tinggal disepanjang bantaran sungai Batanghari terutama di Kecamatan Pelayangan dan Danau Teluk,

sebagian Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan Jambi Timur sudah tidak dimungkinkan tinggal di rumah dan harus, dievakuasi. Pada Tahap ini tinggi bebas air sungai berada pada level 0,75 - 0,50 m' dari muka air maksimum daya tampung palung sungai Batanghari.

Bahaya Banjir adalah keadaan Sungai Batanghari dimana aliran air tidak tertampung oleh. palung sungai / aliran melebihi daya tampung palung sungai. Hal Ini terjadi jika air berada pada ketinggian melebihi 15,50 m.

Selain itu Penetapan Status Bencana juga terdapat pada Peraturan Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Serta Pemberian Bantuan Korban Kebakaran Dan Bencana Lainnya di Kota Jambi sebagaimana berikut ini :

Besaran Bantuan / Santunan Bagi Korban Kebakaran Dan Bencana lainnya di Kota Jambi

No	Jenis Santunan	Kategori	Besaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	a. Rumah tempat tinggal rusak (Pemilik)	Rusak Ringan	1.000.000 s/d 2.000.000	1 (satu) unit
		Rusak Sedang	2.000.000 s/d 5.000.000	1 (satu) unit
		Rusak Berat	5.000.000 s/d 7.500.000	1 (satu) unit
		Rusak Sangat Berat/Roboh	10.000.000 s/d 15.000.000	1 (satu) unit
		Rusak ringan s/d berat		
	b. Rumah tempat tinggal rusak (Penyewa)		1.000.000 s/d 10.000.000	1(satu) unit
2	a. Orang (karena banjir luapan sungai Batang Hari, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor dan Kebakaran)	Meninggal	2.500.000	1 (satu) orang
		Luka Bakar Serious	2.500.000	

	b. Orang mengalami luka bakar serius akibat kebakaran	Meninggal	2.500.000	1 (satu) orang
	c. Orang Tenggelam (hanyut)	Meninggal	2.500.000	1 (satu) orang
	d. Orang Tersambar Petir (akibat hujan deras)	Meninggal	2.500.000	1 (satu) orang
	e. Orang Tersengat Listrik (akibat bencana setrum)	Tambahan biaya penguburan diluar santunan	2.500.000	1 (satu) orang 1 (satu) orang
	f. Biaya penguburan untuk korban meninggal	Meninggal	2.500.000	1 (satu) orang
3.	g. Orang meninggal akibat bencana kabut Asap (ISPA) Bantuan korban banjir akibat aliran sungai di Kota Jambi	Ketinggian genangan air di dalam rumah minimal 10 cm dan berlangsung lebih dari 24 Jam	Menyesuaikan	
4.	Ganti Rugi/ Biaya Penanganan (akibat bencana) Korban Bencana dan Pengungsi	Pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, dapur umum, tempat hunian sementara dll	Menyesuaikan	
5.	Pengadaan bahan banjir dan bahan lain untuk penanganan dan perbaikan darurat	Rusak/ Tergerus/ Longsor/ Roboh	Menyesuaikan	Untuk fasilitas umum (jalan, jembatan, longsor, tempat ibadah)

No	Kategori Kerusakan	Uraian	Taksir Kerugian (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5

1.	Rusak Ringan	Yang dimaksud dengan rusak ringan adalah 25 % dari bangunan/ rumah rusak	1.000.000 s/d 5000.000	Genting/atap rumah hilang (untuk bencana angin puyuh) Dinding rusak sebagian kecil (untuk banjir dan Kebakaran)
2.	Rusak Sedang	Yang dimaksud rusak sedang adalah 50% dari bangunan/rumah rusak	10.000.000 s/d 20.000.000	Terjadi kerusakan bangunan yang diakibatkan kebakaran maupun bencana lainnya hingga mencapai 50% dari bangunan dimaksud rusak
3.	Rusak Berat	Yang dimaksud rusak berat adalah 75 % dari bangunan/rumah rusak	20.000.000 s/d 30.000.000	Kerusakan bangunan yang diakibatkan kebakaran maupun bencana lainnya hingga mencapai 75% dari bangunan dimaksud rusak dan tidak layak untuk ditempati
4.	Rusak sangat berat/robok	yang dimaksud dengan rusak sangat berat adalah 100% bangunan/rumah rusak atau robok	Lebih dari 30.000.000	Kerusakan bangunan yang diakibatkan kebakaran maupun bencana lainnya hingga seluruh bangunan rusak

Sumber Dan Jumlah Anggaran

Sumber dan jumlah anggaran untuk kebencanaan di Kota Jambi berasal dari APBD Kota Jambi pada kegiatan Dana Taktis Walikota Jambi dengan umlah anggaran Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bencana

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bencana adalah Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Jambi yang berkoordinasi dengan instansi-instansi lain seperti Dinas Sosial, BNPB, Basaranas, TNI/ Polri, dsb.

F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang Terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)

Ada beberapagangguan yang dihadapiberupa :

- a. Demonstrasi / Unjuk Rasa

Merupakan Suatu Upaya yang dilakukan sekelompok orang untuk mengajukan usulan, Saran dan Kritikan terhadap suatu hal yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat atau kelompok tersebut dapat berupa lembaga swadaya masyarakat ataupun kelompok- kelompok lainnya.

- b. Penyakit Masyarakat

Merupakan suatu gejala terus menerus timbul dimasyarakat karena ketidak sesuaian tingkah laku, norma dan kebiasaan yang berakibat berujung pada pelanggaran norma adat, kebiasaan dan peraturan yang berlaku dapat berupa : Gelandangan, Pengemis, Anak Punk dan perilaku asusila lainnya.

2. Perangkat Daerah yang Menangani

- a. Satpol PP Kota jambi
- b. Perwakilan Dewan Kota Jambi
- c. Kantor Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja
- d. Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kota Jambi
- e. Instansi tujuan Atau Leading sector dari permasalahan
- f. Kejaksaan
- g. Pengadilan Negeri
- h. BNN

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

JENIS KELAMIN (Orang)	STATUS KEPEGAWAIAN (Orang)	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN (Orang)	PANGKAT & GOLONGAN RUANG (Orang)	Pejabat Struktural (Orang)
1	2	3	4	5
PNS Laki – Laki 55 Perempuan 10 <u>Jumlah 65</u> PTT/Banpol PP Laki – Laki 153 Perempuan 43 <u>Jumlah 196</u> Total : 261 Org	PNS 65 Ban Pol PP 196 <u>Jumlah 258</u> Total : 261 Org	PNS S2 5 S1 30 <u>SMA 28</u> D III/D II/D I 2 <u>Jumlah 65</u> PTT/Banpol PP SMA 144 S1 52 <u>Jumlah 196</u> Total : 261 Org	PNS IV/c 1 IV/b 1 IV/a 1 III/d 6 III/c 10 III/b 7 III/a 11 II/d 3 II/c 24 II/b - II/a - <u>Jumlah 65</u> PTT/BanpolPP= 196 Total : 261 Org	Eselon IIa 1 Eselon IIIa 1 5 <u>Eselon III b 4</u> <u>Eselon IV a 14</u> 10 <u>Jumlah 20</u> Total : 20 org

4. Penanggulangan dan Kendalanya

a. Demonstrasi

- a. Penanggulangan demonstrasi dilakukan pola Pengamanan luar dan dalam terhadap pejabat daerah dan asset daerah oleh anggota Satpol PP dengan tujuan pencegahan tindakan anarkis atau tindakan lain yang merugikan.
- b. Kendala yang dihadapi saat penanganan demonstrasi adalah lamanya proses negosiasi yang dilakukan sehingga terjadi kebosanan dari pihak pendemo yang berujung pada munculnya tindakan anarkhis.

b. Penyakit Masyarakat

1. Penanggulangan penyakit masyarakat dilakukan pola pendekatan, pengawasan dan penindakan persuasive terhadap pelaku pelanggaran.

2. Kendala yang dihadapi adalah upaya yang dilakukan oleh semua pihak masih terkesan tidak berhasil dikarenakan masih banyaknya penyakit masyarakat yang berkembang padahal terdapat factor migrasinya beberapa jenis penyakit masyarakat dari daerah tetangga sehingga Kota Jambi dijadikan tempat untuk mencari uang dengan jalan yang kurang tepat.

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dan Kendalanya

Aparat Keamanan yang ikut serta dalam penegakan Peraturan Daerah:

- a. Polisi Militer
- b. TNI
- c. POLRI
- d. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi yang baik khususnya kegiatan Yang mendadak

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD Kota Jambi

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. STANDAR PALAYANAN MINIMAL

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1) Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar SPM bidang pekerjaan umum daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

- a) Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

2) Target Pencapaian SPM

Adapun target pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dari masing-masing jenis pelayanan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Jambi Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Target	Target Pencapaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	67,39	100
			SR	79.273	
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	0,97	100
			SR	1.136	

3) Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Adapun realisasi pelaksanaan SPM di bidang Pekerjaan Umum tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Jambi Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi	Pencapaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	% SR	68,57 82.024	103,47
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	% SR	1,12 1.344	118,31

4) Alokasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi memiliki anggaran sebesar Rp 17.632.544.000 (tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk penerapan SPM. Pelayanan dasar penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari tertera dalam kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Jaringan Air Bersih/Air Minum sedangkan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik tertera dalam kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Permukiman Penduduk. Berikut ini rincian dana untuk masing-masing kegiatan pelayanan dasar:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar Rp 6.021.544.000
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebesar Rp 11.611.000.000

Alokasi anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Hibah APBN, APBD Kota Jambi dan Sanimas IDB.

5) Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum oleh Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi dengan personil sebagai berikut:

- a. PNS = 22 orang
- b. Non PNS = 14 orang

6) Permasalahan dan Solusi

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan dana APBD - Tingkat kebocoran yang tergolong tinggi - Pipa JDU yang relatif berumur tua - Kurangnya tekanan pada jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggantian pipa JDU yang relatif berumur tua - Pembangunan booster pump
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan dana APBD - Belum adanya IPAL perkotaan 	Pembangunan IPAL perkotaan

b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1) Jenis Pelayanan Dasar

Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah. Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana. Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangunkan rumah baru yang berada pada lokasi yang sama. Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.

a) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan ketentuan:

- 1) Pada saat masa pasca bencana;
- 2) Surat penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
- 3) Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota.

b) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- 1) Pada saat masa pasca bencana;
- 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

1) Perhitungan Capaian

Keterangan:

(a) Pembilang Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n

(b) Penyebut Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n

(c) Ukuran/ Konstanta Persen (%)

b) Kualitas Barang/Jasa Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

3) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².

4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa

selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat. Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
- (b) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
- (c) Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m²/orang.

Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
- b) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
- c) Tidak memiliki asset bangunan lain;
- d) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

2) Alokasi Anggaran

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2019			
		INDIKATOR KINERJA		PAGU ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	Rp	REALISASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	92,62%	Rp1.399.244.000	Rp1.296.006.787
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Pengiriman dan Pencatatan Surat Menyurat Kantor	1.333 Lembar	700 Lembar	Rp4.000.000	Rp3.998.100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Pembayaran Rekening Telepon,Rekening Air,Rekening Listrik, Dan Rekening Internet	1 Rekening Telepon, 1 Rekening Air, 2 Rekening Listrik, dan 4 Rekening Internet	1 Rekening Telepon, 1 Rekening Air, 2 Rekening Listrik, dan 4 Rekening Internet	Rp204.145.000	Rp124.189.280

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2019			
		INDIKATOR KINERJA		PAGU ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	Rp	REALISASI
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit Kendaraan Roda 4 dan 21 Unit Kendaraan Roda 2	10 Unit Kendaraan Roda 4 dan 21 Unit Kendaraan Roda 2	Rp15.000.000	Rp13.140.600
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan	8 Orang Tim Pengadaan Barang/Jasa, 24 Orang Tim Pengelola Keuangan, 2 Orang Tim Pengelola Barang Dan Jasa Miliki Daerah, 5 Orang Operator SIKPD Non PNS dan 1 Orang Admin Pembangunan.	8 Orang Tim Pengadaan Barang/Jasa, 24 Orang Tim Pengelola Keuangan, 2 Orang Tim Pengelola Barang Dan Jasa Miliki Daerah, 5 Orang Operator SIKPD Non PNS dan 1 Orang Admin Pembangunan.	Rp317.244.000	Rp314.371.841
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor	4 Orang Cleaning Service Dan 1 Orang Pemotong Rumput Beserta Peralatannya.	4 Orang Cleaning Service Dan 1 Orang Pemotong Rumput Beserta Peralatannya.	Rp70.820.000	Rp70.668.442

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2019			
		INDIKATOR KINERJA		PAGU ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	Rp	REALISASI
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kelancaran Administrasi Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Rp27.000.000	Rp26.999.830
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	Rp20.000.000	Rp19.991.383
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya Penerangan Ruangan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Rp5.000.000	Rp4.997.025
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman di kantor	1 Tahun	1 Tahun	Rp25.000.000	Rp21.951.000
Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran kantor	7 Orang SLTA, 1 Orang D III Dan 1 Orang Sarjana.	7 Orang SLTA, 1 Orang D III Dan 1 Orang Sarjana.	Rp229.080.000	Rp229.080.000
Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	Tersedianya pengaman dan Pengemudi kantor	3 Orang Tenaga Pengaman/Penjaga Malam Kantor Dan 1 Orang Tenaga Sopir	3 Orang Tenaga Pengaman/Penjaga Malam Kantor Dan 1 Orang Tenaga Sopir	Rp60.264.000	Rp48.964.500
Perjalanan Dinas	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	1 Tahun	Rp421.691.000	Rp417.654.786

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2019			
		INDIKATOR KINERJA		PAGU ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	Rp	REALISASI
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	96,46 %	Rp886.740.000	Rp855.316.550
Pengadaan peralatan perkantoran	Tersedianya Pengadaan Peralatan Perkantoran Spanduk, Umbul-umbul dan Tiang	36 Spanduk, 8 Umbul-Umbul, 8 Tiang, 3 AC, 2 Komputer/PC, 5 Tablet, 2 Printer dan 1 Paket Sound System Kantor.	36 Spanduk, 8 Umbul-Umbul, 8 Tiang, 3 AC, 2 Komputer/PC, 5 Tablet, 2 Printer dan 1 Paket Sound System Kantor.	Rp192.050.000	Rp172.529.950
Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Brankas Kantor	1 Unit Brankas	1 Unit Brankas	Rp33.600.000	Rp32.967.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	10 Unit Kendaraan Roda 4 dan 21 Unit Kendaraan Roda 2	10 Unit Kendaraan Roda 4 dan 21 Unit Kendaraan Roda 2	Rp320.740.000	Rp317.070.000
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin Berkala Alat-alat Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Rp15.000.000	Rp14.999.200
Pembangunan/Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehab Gudang (APBD Murni), Rehab Toilet dan Rehab Ruang Kadis serta Pembangunan Toilet DPRKP	3 Paket	3 Paket	Rp325.350.000	Rp317.750.400
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	99,73 %	Rp40.500.000	Rp40.392.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas	54 Stel	54 Stel	Rp40.500.000	Rp40.392.000

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2019			
		INDIKATOR KINERJA		PAGU ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	Rp	REALISASI
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Pengiriman Aparatur untuk Bimbingan Teknis	100 %	99,41 %	Rp85.000.000	Rp84.500.120
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terwujudnya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur	1 Tahun	1 Tahun	Rp85.000.000	Rp84.500.120
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	99,73 %	Rp7.000.000	Rp6.981.257
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya Rumusan Lakip, RKT, Tapkin dan IKU	4 Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen	Rp7.000.000	Rp6.981.257
Program Perencanaan SKPD	Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan SKPD	100 %	99,92 %	Rp25.000.000	Rp24.978.892
Penyusunan Renstra SKPD	Terwujudnya Rencana Strategis Dinas	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp15.000.000	Rp14.986.737
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terwujudnya Rumusan Renja, RKA, DPA dan Laporan Tahunan	Dokumen Renja, Dokumen RKA Murni Dan Perubahan, Dokumen DPA Murni dan Perubahan dan Laporan Tahunan SKPD	Dokumen Renja, Dokumen RKA Murni Dan Perubahan, Dokumen DPA Murni dan Perubahan dan Laporan Tahunan SKPD	Rp10.000.000	Rp9.992.155

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2019			
		INDIKATOR KINERJA		PAGU ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	Rp	REALISASI
Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Penyusunan Arsip Keuangan dan Aset Kantor	100 %	99,63 %	Rp15.000.000	Rp14.944.732
Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya Penyusunan Arsip Keuangan Dan Aset Kantor	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp15.000.000	Rp14.944.732
Program peningkatan kualitas lingkungan permukiman berbasis kawasan	Persentase kawasan permukiman yang ditangani	100 %	92,43 %	Rp4.250.501.000	Rp3.928.816.915
Penyelenggaraan perumahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Pengawasan Perumahan Melalui Monitoring dan Evaluasi : Dokumen Laporan	Terlaksananya Pengawasan Perumahan Melalui Monitoring dan Evaluasi : 159 Perumahan Dokumen Laporan	Rp751.360.000	Rp734.944.605

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2019			
		INDIKATOR KINERJA		PAGU ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	Rp	REALISASI
		Terlaksananya Koordinasi dengan Lembaga, Instansi Teknis, Pengembang dan Stakeholder yang berkaitan dengan Pembangunan Perumahan : 10 Kali Pertemuan	Terlaksananya Koordinasi dengan Lembaga, Instansi Teknis, Pengembang dan Stakeholder yang berkaitan dengan Pembangunan Perumahan : 8 Kali Pertemuan		
		Tersedianya Dokumen/Data Informasi PSU Perumahan : 1 Dokumen	Tersedianya Dokumen/Data Informasi PSU Perumahan : 1 Dokumen		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Kualitas PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) Di Lingkungan Perumahan : 3 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Kualitas PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) Di Lingkungan Perumahan : 3 Dokumen		

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2019			
		INDIKATOR KINERJA		PAGU ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	Rp	REALISASI
Penyelenggaraan permukiman	Terwujudnya Permukiman yang layak huni	Terlaksananya Koordinasi Dengan KOTAKU: 6 Kali	Terlaksananya Koordinasi Dengan KOTAKU: 6 Kali	Rp3.236.046.000	Rp3.038.132.810
		Terlaksananya Koordinasi Dengan BSPS: 7 Kali	Terlaksananya Koordinasi Dengan BSPS: 7 Kali		
		Terlaksananya Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni: 202 Unit	Terlaksananya Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni: 201 Unit		
		Terlaksananya Perencanaan Permukiman Kumuh: 2 Kawasan	Terlaksananya Perencanaan Permukiman Kumuh: 7 Kawasan		
		Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan: 2 Kawasan	Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan: 2 Kawasan		

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2019			
		INDIKATOR KINERJA		PAGU ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	Rp	REALISASI
		Terlaksananya Pendataan Permukiman: 1 Kecamatan	Terlaksananya Pendataan Permukiman: 1 Kecamatan		
Pengawasan bangunan	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan IMB	200 Pendataan Bangunan, 30 Pembongkaran Reklame		Rp263.095.000	Rp155.739.500
Program pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan	Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum	100%	98,71%	Rp28.258.245.000	Rp27.893.672.017
Peningkatan dan pemeliharaan LPJU	Terpeliharanya LPJU dan Lampu Hias Taman Kota Jambi	16.652 Titik	16.652 Titik	Rp25.603.245.000	Rp25.266.225.537
Peningkatan dan pemeliharaan makam	Terawatnya dan Tertatanya TPU	15 Lokasi	15 Lokasi	Rp2.655.000.000	Rp2.627.446.480
TOTAL				Rp34.967.230.000	Rp34.145.609.270

c. Dinas Pemadam Kebakaran

1) Jenis Pelayanan Dasar

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

1. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Kuningan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena: Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknik Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran ;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :360/2903/SJ tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pendanaan Tanggap DaruratBencana yang Bersumber dari Belanja tidak Terduga;
7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 364/3791/SJ tanggal 23 Agustus 2017, Hal Langkah-Langkah Antisipatif Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364/1924/SJ tanggal 20 April 2017 dan Nomor 364/1968/SJ tanggal 25 April 2017 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1/1925/SJ tanggal 20 April 2017 dan Nomor 364.1/1967/SJ tanggal 25 April 2017 tentang Peningkatan Kesejahteraan Petugas Pemadam Kebakaran di Daerah; dan
10. Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 09-7053-2004 tentang Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran-Pompa

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. SPM yang diteloh ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kuningan menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

Sesuai dengan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan Arah Kebijakan adalah Meningkatkan Sistem Manajemen Penanggulangan Bencana dengan Program Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	<i>Meningkatkan Pelayanan Pada Saat Kondisi Pra, Tanggap dan PascaKebakaran dan Kebencanaan</i>	Persentase Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Prakebakaran dan Prakebencanaan	Peningkatan Manajemen Logistik dan Pelayanan Kebakaran Pra, Tanggap dan Pasca Kebakaran Dan Kebencanaan	Menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan Peningkatan Pelayanan Pemeriksaan APK dan Sarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/ gedung
				Peningkatan Wilayah Kota Jambi yang memperoleh pelayanan informasi rawan kebakaran dan kebencanaan, Pemberdayaan Masyarakat dan pembentukan relawan serta kegiatan Apel Gladi Dan Simulasi Kebakaran/ Kebencanaan
				Meningkatkan Kegiatan Penyuluhan Keliling Ke Sekolah, Kelurahan dan di Mako

			Dinas
			Peningkatan Kegiatan Penyuluhan Keliling Ke Sekolah, Kelurahan dan di Mako Dinas
			Peningkatan Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan dan Penampilan Koor Musik
			Peningkatan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Satuan Tugas serta Kegiatan Bimbingan Teknis Relawan Penanggulangan Bencana
		Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dan Pelayanan Operasi Pemadam Kebakaran	Peningkatan Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dan Pelayanan Operasi Pemadam Kebakaran Dan Kebencanaan, Penyediaan Premi Asuransi, Rekrutmen TKK, Latihan Gabungan, Pengelolaan Pusat Komando serta pemantauan kesiapan peralatan
		Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran,	Peningkatan Operasi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran, Operasi Penyelamatan

		Operasi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran/ Darurat Non Kebakaran/ Non Kebakaran		dan Evakuasi (Darurat Non Kebakaran) = Banjir, Puting Beliung, Tenggelam, Hanyut, Dsb, Operasi Penyelamatan dan Evakuasi (Non Kebakaran) = Evakuasi sarang tawon, penangkapan anjing liar, penangkapan ular, dsb
		Persentase Pelayanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran dan kebencanaan		Peningkatan Pelayanan Pendataan, Inspeksi dan investigasi pasca kebakaran dan kebencanaan dan warga Kota Jambi yang menerima dana bantuan korban kebakaran/ kebencanaan dan Evaluasi Kegiatan
		Persentase Standarisasi Sarana dan Prasarana Kebakaran Dan Kebencanaan		Peningkatan Perencanaan kebutuhan sarana pemadaman kebakaran, pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 3000-5000 liter serta standarisasi Sarana dan Prasarana Kebakaran dan Kebencanaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana lainnya,

				pencatatan, penataan dan pemeliharaan terhadap persediaan barang-barang dalam gudang, pengadaan/ proses pengadaan kebutuhan sarana pemadaman kebakaran
--	--	--	--	--

BAB VIII

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH 2019

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kerja

Dokumen perencanaan taktis strategis yang menjadi dasar tolok ukur pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2018-2023, disamping itu pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini dengan terus mendorong upaya pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KODE
1.	≥ 91	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Diolah.

B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

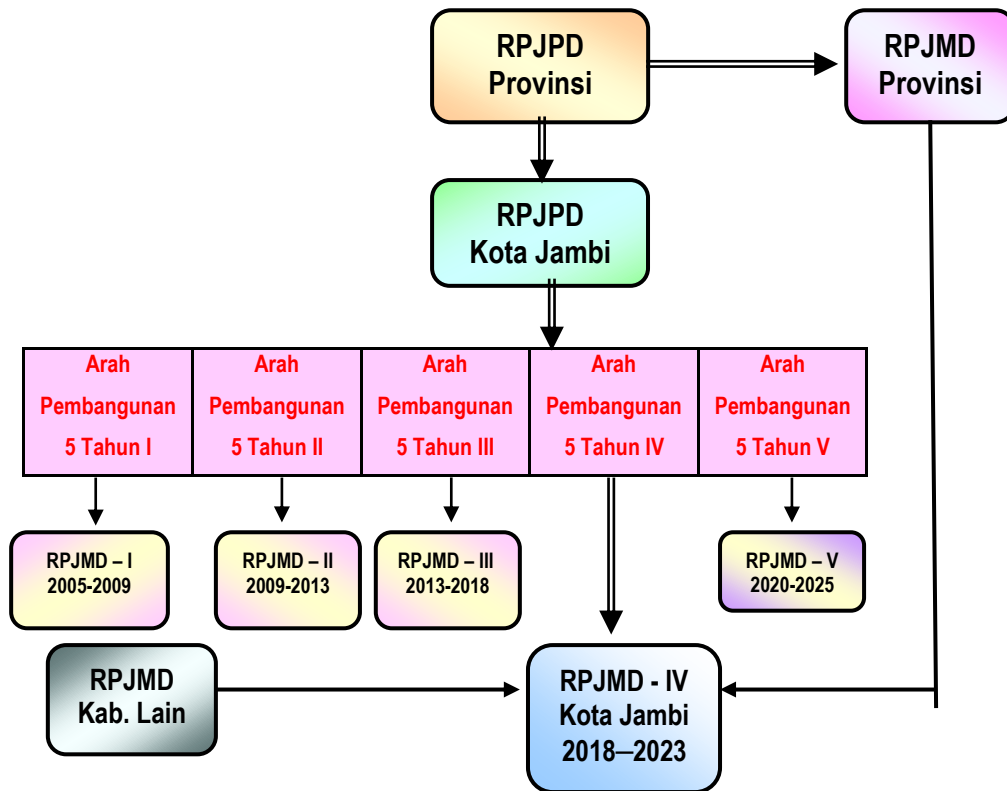
Tahun 2019 merupakan tahun kelima dari periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode Tahun 2018 – 2023. Dengan tetap memperhatikan sinkronisasi perencanaan pembangunan Kota Jambi dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi tahun 2005-2025, ditetapkan prioritas pembangunan sebagai panduan gerak langkah kemana pembangunan akan diarahkan.

Keempat prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi tahun 2018 -2023 ditujukan untuk memperkuat identitas pembangunan Kota Jambi yang konsisten menuju terwujudnya visi dan misi pembangunan Kota Jambi periode 2005 – 2025 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian tujuan tersebut membutuhkan gerakan dan kekuatan yang sinergis dengan daerah sekitarnya dan pemerintahan di atasnya.

Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD Kota Jambi periode 2018 -2023 disamping berpedoman pada dokumen RPJPD Kota Jambi, juga memperhatikan RPJMD kabupaten/kota tetangga,

RPJMD Provinsi Jambi dan RPJM Nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 tahun 2017 sebagai upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan seperti terlihat pada Gambar 3.1. berikut ini.

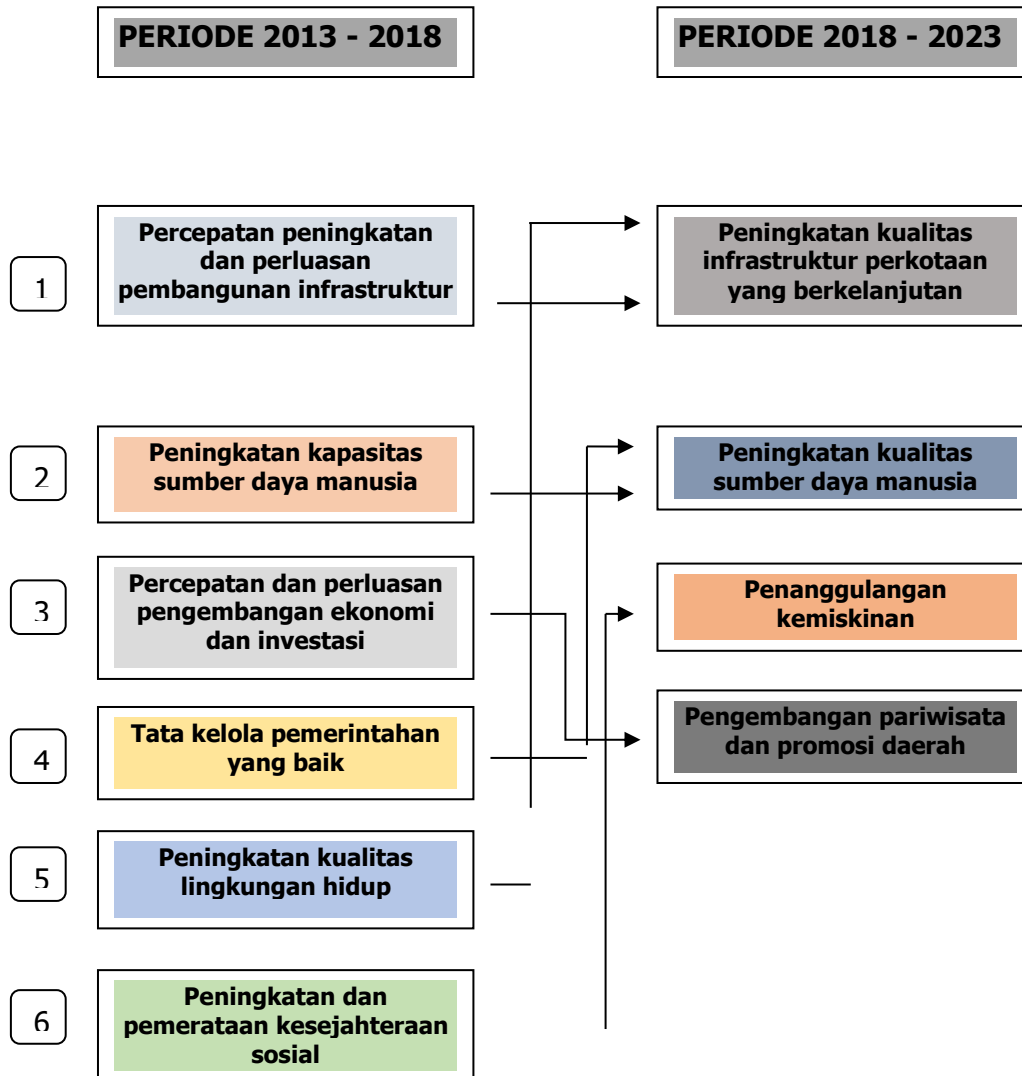
Gambar 3.2.
Skema Keterkaitan RPJMD Kota Jambi 2018 – 2023
dan RPJPD Kota Jambi 2005 – 2025



Sumber : RPJMD Kota Jambi Tahun 2018 -2023

Gambar 3.3.

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Periode Tahun 2013 – 2018
dengan Periode Tahun 2018 -2023



Selanjutnya sebagai panduan dalam pencapaian prioritas pembangunan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga dalam RPJMD telah ditetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang harus di jabarkan dan dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah. Sebagai perbandingan jumlah tujuan, sasaran dan IKU selama periode tahun 2008 -2013 dengan periode tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.25.

Perbandingan Jumlah Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Periode Tahun 2013 -2018
dengan Periode Tahun 2018 -2023

NO	URAIAN	PERIODE	
		2013-2018	2018-2023
1.	MISI	5	5
2.	TUJUAN	11	6
3.	SASARAN	22	22
4.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	38	34

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tujuan pada periode sebelumnya adalah sebanyak 11 buah dan pada periode 2018 – 2023 menjadi 6 tujuan. Namun untuk jumlah sasaran tetap yaitu 22 sasaran dan jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) terjadi penurunan, yaitu untuk sasaran di periode sebelumnya adalah sebanyak 38 indikator, periode saat ini adalah sebanyak 34 indikator.

Tabel 3.26.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019

SASARAN KE 1 (KESATU)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKAWAL RPJMD	2018			2019			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1.	Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis	Opini wajar tanpa pengecualian (WTP)	WDP	WTP	-	-	N/A	N/A	N/A	WTP
		Rasio jabatan terhadap pendidika	N/A	90,00	92,12	102,36	N/A	N/A	N/A	90,00

TIK	n dan keahlian								
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,33	N/A	N/A	N/A	2,44	2,85	116,80	2,44
	Indeks profesionalitas ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	68,00	54,71	91,18	88,00
	Nilai SAKIP	B	N/A	N/A	N/A	B	B	100,00	A
	Indeks survey persepsi korupsi	N/A	N/A	N/A	N/A	3,65	-	-	3,8

	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28	Baik Sekali	Baik Sekali	86,00	85,50	83,66	97,84	88,5
--	----------------------------	-------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	------

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat dari target, realisasi dan persentase capaian Indikator Kinerja Utama pertama yaitu indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dapat dilihat pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dimana angka awal RPJMD terealisasi sebesar 2,33 naik menjadi 2,44 di tahun 2019 dan terealisasi 2,85 atau dengan capaian 116,80 persen.

IKU kedua yaitu indeks profesionalitas ASN dapat dilihat pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. Tetapi IKU rasio jabatan terhadap pendidikan dan keahlian terkait dengan IKU indeks profesionalitas ASN di tahun 2018 tercapai sebesar 102,36%. selanjutnya angka awal RPJMD 2018-2023 tidak ada data (N/A) dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 68,00 terealisasi 54,71 atau dengan capaian 91,18 persen.

IKU ketiga yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dilihat pada periode RPJMD 2013-2018 tidak ada IKU nilai SAKIP tetapi terdapat data untuk tahun 2018 dari hasil nilai evaluasi yang dipublikasikan oleh KemenPAN RB RI dan capaiannya sama sebesar 100,00 persen pada tahun 2019 tetapi untuk nilai hasil evaluasi mengalami peningkatan sebesar 62,09 pada tahun 2018 menjadi 65,02 pada tahun 2019. Kota Jambi juga dalam hal ini sangat berkomitmen untuk meningkatkan nilai SAKIP.

IKU keempat yaitu indeks survey persepsi korupsi dapat dilihat pada tahun 2018 tidak ada data dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU yang terkait dengan IKU indeks survey persepsi korupsi adalah IKU opini wajar tanpa pengecualian (WTP) belum ada data dikarenakan penilaian yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Jambi belum mempublikasikan hasil penilaian. Pada RPJMD 2018-2023 Pemerintah Kota menetapkan angka awal RPJMD 3,65 tetapi tahun 2019 indeks tersebut belum di publikasikan oleh Kementerian PAN dan RB RI.

Lebih lanjut IKU kelima adalah indeks kepuasan masyarakat, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 97,84 persen tahun 2019 sedangkan di tahun 2018 sebesar 86,00%.

Tabel 3.27.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 2 (KEDUA)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2018			2019			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
2.	Menurunkan	Penyelesaian	82,00	N/A	N/A	N/A	82,00	82,00	100,00	60,00

tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU keenam yaitu penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL dapat dilihat pada tahun 2018 tidak ada data dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. Iku penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL, dimana angka awal RPJMD sebesar 82,00

persen dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 82,00 terealisasi 82,00 atau dengan capaian 100,00 persen.

Tabel 3.28.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 3 (KETIGA)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2018			2019			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
3.	Meningkatkan	Cakupan	100,00	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00

pelayanan pada kondisi pra tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	pelayanan pemadam kebakaran								
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : *Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)*

IKU ketujuh yaitu cakupan pelayanan pemadam kebakaran dapat dilihat pada tahun 2018 tidak ada data dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. Iku cakupan pelayanan pemadam kebakaran, dimana angka awal RPJMD sebesar 100,00 persen dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 100,00 terealisasi 100,00 atau dengan capaian 100,00 persen. Dikarenakan cakupan pelayanan pemadam kebakaran tercapai sesuai target yang meliputi respon time, pelayanan pra dan pasca kebakaran, pelayanan cepat tanggap penyelamatan dan sebagainya.

Tabel 3.29.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 4 (KEEMPAT)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2018			2019			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
4.	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi Pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial	Persentase penyelesaian permasalahan keagamaan	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	N/A	100,00
		Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20,00	N/A	N/A	N/A	20,00	20,00	100,00	100,00

masyarakat									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IKU ke delapan yaitu persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 yang merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018 mengenai IKU persentase penyelesaian permasalahan keagamaan dengan capaian sebesar 100,00 persen. IKU RPJMD 2013-2018 tidak berbeda jauh dengan IKU periode RPJMD 2018-2023. IKU persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 20,00 terealisasi 20,00 atau dengan capaian 100,00 persen dan ditetapkan angka awal RPJMD 2018-2023 sebesar 20,00.

Tabel 3.30.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 5 (KELIMA)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2018			2019			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
5.	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase Orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20,00	N/A	N/A	N/A	20,00	20,00	100,00	100,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kesembilan adalah persentase Orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat dapat dilihat pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018,

dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU persentase Orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat, dimana angka awal RPJMD sebesar 20,00 persen dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 20,00 terealisasi 20,00 atau dengan capaian 100,00 persen.

Tabel 3.31.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 6 (KEENAM)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2018			2019			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
6.	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	Rasio panjang jaringan jalan baik	65,44	100,00	92,50	92,50	N/A	N/A	N/A	100,00
		Rasio panjang drainase dalam kondisi baik	46,67	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	N/A	100,00
		Rasio luas kawasan kumuh per luas wilayah	0,97	0,35	0,29	82,85	N/A	N/A	N/A	0,35
		Cakupan pelayanan jaringan air minum per jumlah rumah	65,50	80,00	77,00	96,25	N/A	N/A	N/A	80,00
		Rasio kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman	51,34	98,00	97,00	98,98	N/A	N/A	N/A	98,98
		Peningkatan fasilitas terminal penumpang dan barang	31,00	95,00	91,00	95,79	N/A	N/A	N/A	95,00
		Peningkatan fasilitas keselamatan lain	50,00	88,00	100,00	113,64	N/A	N/A	N/A	88,00
		Cakupan layanan infrastruktur dan utilitas	50,50	N/A	N/A	N/A	53,07	49,50	93,27	85,79

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kesepuluh yaitu cakupan layanan infrastruktur dan utilitas dapat dijelaskan disini periode RPJMD 2013-2018, IKU yang terkait IKU cakupan layanan infrastruktur dan utilitas adalah IKU rasio panjang jaringan jalan yang baik dengan dengan capaian 92,50 persen, IKU rasio panjang drainase dalam kondisi baik dengan capaian 100,00 persen, IKU cakupan pelayanan jaringan air minum per jumlah rumah capaian 96,25 persen, IKU rasio luas kawasan kumuh per luas wilayah dengan capaian 82,85 persen, IKU rasio kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman dengan capaian 98,98 persen, IKU peningkatan fasilitas terminal penumpang dan barang dengan capain 95,79 persen dan IKU peningkatan fasilitas keselamatan lalin dengan capaian 113,64 persen. disamping itu ditambah juga dengan beberapa komponen yang termasuk dalam IKU cakupan layanan infrastruktur dan utilitas untuk tahun 2019 periode RPJMD 2018-2023 terdiri dari rasio jembatan dalam kondisi baik, rasio cakupan pelayanan air limbah, rasio bangunan dalam kondisi baik, rasio dokumen perencanaan yang diimplementasikan dan rasio kesesuaian ruang sehingga target yang ditetapkan untuk tahun 2019 adalah 53,07 persen terealisasi sebesar 49,50 persen dengan capaian 93,27 persen dan ditetapkan angka awal RPJMD 2018-2023 sebesar 50,50.

Tabel 3.32.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 7 (KETUJUJUH)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2018			2019			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
7.	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Rasio ketaatan terhadap RT/RW	N/A	100,00	97,50	97,50	N/A	N/A	N/A	100,00
		Rasio RTH terhadap luas wilayah	8,00	11,25	10,76	95,64	N/A	N/A	N/A	95,64
		Penurunan tingkat polusi air pada S. Tembuku dan S. Asam	26,2 mg/L	18-16 mg/L	20,60 mg/L	68,29	N/A	N/A	N/A	18-16 mg/L
		Cakupan penanganan sampah	61,67	80,00	78,70	98,38	N/A	N/A	N/A	80,00

	Indeks kualitas air	43,24	N/A	N/A	N/A	43,23	38,27	88,00	43,38
	Indeks kualitas udara	91,27	N/A	N/A	N/A	91,30	74,66	81,00	91,45
	Indeks kualitas tutupan lahan	60,77	N/A	N/A	N/A	61,00	39,33	64,00	61,37

Sumber : *Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)*

IKU kesebelas yaitu indeks kualitas air dapat dijelaskan disini periode RPJMD 2013-2018, IKU yang terkait IKU indeks kualitas air adalah IKU penurunan tingkat polusi air pada S. Tembuku dan S. Asam dengan dengan capaian 68,29 persen di tahun 2018 dan ditetapkan angka awal RPJMD 2018-2023 sebesar 43,24. mengalami kenaikan sebesar 88,00 persen di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini berkaitan dengan belum optimalnya pengawasan dan penegakkan hukum pada pelaku usaha industri yang masih membuang buangan limbah industri ke badan sungai. Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi terus secara optimal akan memantau dan mengendalikan kualitas lingkungan di Kota Jambi khususnya kualitas air.

IKU kedua belas yaitu indeks kualitas udara dapat dilihat pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU indeks kualitas udara, dimana angka awal RPJMD sebesar 91,27 dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 91,30 terealisasi 74,66 atau dengan capaian 81,00 persen.

IKU ketiga belas yaitu indeks kualitas tutupan lahan dapat dijelaskan disini periode RPJMD 2013-2018, IKU yang terkait IKU indeks kualitas tutupan lahan adalah IKU rasio RTH terhadap luas wilayah dengan dengan capaian 10,76 persen, IKU cakupan penanganan sampah dengan capaian sebesar 98,38 persen dan IKU rasio ketaatan terhadap RT/RW dengan capaian sebesar 97,50 persen di tahun 2018 dan ditetapkan angka awal RPJMD 2018-2023 sebesar 60,77. mengalami kenaikan sebesar 64,00 persen di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal ini instansi terkait pengadaan RTH pada awalnya identik dengan pembelian lahan. Namun dengan segala keterbatasan lahan di dalam kota dan juga keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota Jambi mengambil inisiatif dan inovasi untuk mengoptimalkan lahan tidur yang ada dan tersebar di seluruh eilayah Kota Jambi untuk di jadikan taman dan Ruang Terbuka Hijau yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu markah jalan di sepanjang jalan utama dan jalan protokol di Kota Jambi di tanami pohon penghijauan sehingga tetap dapat bermanfaat sebagai RTH dan paru-paru bumi.

Tabel 3.33.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 8 (KEDELAPAN)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2018			2019			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
8.	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	Cakupan bina perdagangan/ usaha informal	2.00	13.60	27.93	205.36	N/A	N/A	N/A	13,60
		Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	20,00	N/A	N/A	N/A	36,00	63,34	175,94	100,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU keempat belas yaitu persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan dapat dijelaskan disini periode RPJMD 2013-2018, IKU yang terkait IKU persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan adalah IKU cakupan bina perdagangan/usaha informal dengan capaian 205,36 persen di tahun 2018 dan ditetapkan angka awal RPJMD 2018-2023 sebesar 20,00 mengalami penurunan sebesar 175,94 persen di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.34.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 9 (KESEMBILAN)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2018			2019			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
9.	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	87,90	N/A	N/A	N/A	90,50	90,70	100,22	92,50

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kelima belas yaitu skor pola pangan harapan dapat dilihat pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU skor pola pangan harapan, dimana angka awal RPJMD sebesar 87,90 dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 90,50 terealisasi 90,70 atau dengan capaian 100,22 persen.

Tabel 3.35.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 10 (KESEPULUH)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2018			2019			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	

10.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Terselenggaranya event berskala nasional dan internasional	0	2 kali	2 kali	100,00	N/A	N/A	N/A	2 Kali
		Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	2,35	N/A	N/A	N/A	2,35	-	-	2,41

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU keenam belas yaitu kontribusi pariwisata terhadap PDRB dapat dijelaskan disini periode RPJMD 2013-2018, IKU yang terkait IKU kontribusi pariwisata terhadap PDRB adalah IKU terselenggaranya event berskala nasional dan internasional dengan capaian 100,00 persen di tahun 2018 dan ditetapkan angka awal RPJMD 2018-2023 sebesar 2,35 sedangkan untuk tahun 2019 belum ada data karena belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Jambi.

Tabel 3.36.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 11 (KESEBELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2018			2019			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
11.	Meningkatkan pendapatan asli	Persentase peningkatan	4,00	N/A	N/A	N/A	8,00	16,09	201,13	9,00

	daerah (PAD)	pendapa tan asli daerah (PAD)								
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU ketujuh belas yaitu persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilihat pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dimana angka awal RPJMD sebesar 4,00 persen dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 8,00 persen terealisasi 16,09 persen atau dengan capaian 201,13 persen. Hal ini disebabkan sumbangan terbesar diberikan dari sektor pajak daerah dan sektor lain-lain PAD yang sah.

Tabel 3.37.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 12 (KEDUA BELAS)

N O	SASARA N	INDIKA TOR KINERJ A	ANG KA AWA L RPJ MD	2018			2019			TARG ET AKHI R RPJM D
				TARG ET	REALIS ASI	% CAPAI AN	TARG ET	REALIS ASI	% CAPAI AN	
1 2.	Meningka tkan realisasi investasi	Realisas i investasi	410 M	100,0 0	76,80	76,80	430,5 M	1,055 T	245,12	523,3 7 M

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kedelapan belas yaitu realisasi investasi dapat dijelaskan disini periode RPJMD 2013-2018 dan periode RPJMD 2018-2023 adalah sama, dengan capaian yang mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 245,12 persen di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 76,80 persen tahun 2018. Hal ini disebabkan dampak dari perkembangan Kota Jambi yang semakin pesat sehingga banyak pelaku usaha yang berinvestasi di Kota Jambi.

Tabel 3.38.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 13 (KETIGA BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKAWA LRPJMD	2018			2019			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
13.	Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	Jumlah angkatan kerja terdaftar yang terserap	N/A	20,00	42,26	211,30	N/A	N/A	N/A	20,00
		Jumlah serapan tenaga kerja pada UMKM	N/A	3,75	2,55	68,00	N/A	N/A	N/A	3,75
		Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	64,96	N/A	N/A	N/A	65,00	65,79	101,21	66,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kesembilan belas yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. Tetapi terdapat IKU yang terkait dengan IKU periode RPJMD

2018-2023, yaitu IKU jumlah angkatan kerja terdaftar yang terserap dengan capaian 68,00 persen dan IKU jumlah serapan tenaga kerja pada UMKM dengan capaian 2,55 persen. Sedangkan untuk IKU RPJMD 2018-2023 ditetapkan angka awal sebesar 64,96 persen dengan capaian sebesar 101,21 persen di tahun 2019.

Tabel 3.39.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 14 (KEEMPAT BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2018			2019			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
14.	Meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil	Jumlah koperasi aktif	193 Unit	218 Unit	218 Unit	100,00	N/A	N/A	N/A	218 Unit
		Jumlah UMKM dan IKM mandiri	140 Unit	170 Unit	265 Unit	155,88	N/A	N/A	N/A	170 Unit
	Rasio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar pemerintah	50,00	85,00	87,50	102,94	N/A	N/A	N/A	85,00	
	Rasio PKL	N/A	90,00	277,28	308,08	N/A	N/A	N/A	90,00	

	yang tertata								
	Pertumbuhan industri	2,60	15,30	44,15	288,56	N/A	N/A	N/A	15,30
	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61	N/A	N/A	N/A	8,08	8,08	100,00	10,00
	Persentase daya saing produk IKM	4,30	N/A	N/A	N/A	4,30	19,30	448,8	8,3
	Persentase koperasi berkualitas	13,00	N/A	N/A	N/A	16,06	16,50	102,73	36,70

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kedua puluh yaitu persentase usaha mikro kecil yang berkualitas dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU persentase usaha mikro kecil yang berkualitas RPJMD 2018-2023 ditetapkan angka awal sebesar 7,61 persen dengan capaian sebesar 100,00 persen di tahun 2019.

IKU kedua puluh satu yaitu persentase daya saing produk IKM, dimana IKU RPJMD 2013-2018 yang terkait adalah IKU rasio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar pemerintah dengan capaian sebesar 102,94 persen di tahun 2018, IKU pertumbuhan industri dengan capaian 288,56 persen di tahun 2018, IKU rasio PKL yang tertata dengan capaian 277,28 persen dan IKU jumlah UMKM dan IKM mandiri dengan capaian

sebesar 15,88 persen. RPJMD 2018-2023 menetapkan angka awal RPJMD adalah sebesar 4,30 persen dan di tahun 2019 dengan target 4,30 persen teralisasi sebesar 19,30 persen atau dengan capaian 448,8 persen.

IKU kedua puluh dua yaitu persentase koperasi berkualitas dimana IKU RPJMD 2013-2018 yang terkait adalah IKU jumlah koperasi aktif dengan capaian 288,56 persen di tahun 2018. RPJMD 2018-2023 menetapkan angka awal RPJMD adalah sebesar 4,30 persen dan di tahun 2019 dengan target 4,30 persen teralisasi sebesar 19,30 persen atau dengan capaian 448,8 persen.

Tabel 3.40.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 15 (KELIMA BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2018			2019			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
15.	Meningkatkan derajat kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	40,00	90,00	92,00	102,22	N/A	N/A	N/A	90,00
		Jumlah puskesmas dengan pelayanan 24jam	3 Unit	10 Unit	20 Unit	200,00	N/A	N/A	N/A	10 Unit
		Angka Harapan	72,34	N/A	N/A	N/A	72,35	-	-	72,37

		Hdup (AHH)								
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kedua puluh tiga yaitu angka harapan hidup dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU angka harapan hidup terkait dengan IKU cakupan pelayanan kesehatan rujukan dengan capaian sebesar 102,22 persen dan IKU jumlah puskesmas dengan pelayanan 24 jam dengan capaian 200,00 persen tahun 2018. RPJMD 2018-2023 ditetapkan angka awal sebesar 72,34 persen dengan target sebesar 72,35 persen di tahun 2019 dan belum terealisasi dikarenakan belum dipublikasikan oleh Badan Statistik Pusat Kota Jambi.

Tabel 3.41.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 16 (KEENAM BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2018			2019			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
16.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Angka partisipasi sekolah pada usia sekolah	77,78	84,98	91,74	107,95	N/A	N/A	N/A	84,98
		Angka rata-rata lama sekolah	10,45	11,45	-	-	N/A	N/A	N/A	11,45

	(ARLS)								
	Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	82,57	97,50	92,65	95,03	N/A	N/A	N/A	97,50
	Jumlah sekolah sesuai SNP pada semua jenjang pendidikan	60,00	85,00	88,14	103,69	N/A	N/A	N/A	85,00
	Harapan lama sekolah (HLS)	14,25	N/A	N/A	N/A	14,60	14,62	100,14	14,64
	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan	21,32	N/A	N/A	N/A	21,32	21,30	99,91	4,32

		an pendidik an								
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

IKU kedua puluh empat yaitu harapan lama sekolah (HLS) dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU harapan lama sekolah (HLS) adalah IKU RPJMD 2018-2023 ditetapkan angka awal sebesar 72,34 persen dengan target sebesar 72,35 persen di tahun 2019 dan belum terealisasi dikarenakan belum dipublikasikan oleh Badan Statistik Pusat Kota Jambi.

IKU kedua puluh lima yaitu persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan layanan pendidikan dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. Adapun IKU yang terkait dengan IKU persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan layanan pendidikan adalah IKU angka partisipasi sekolah pada usia sekolah dengan capaian sebesar 107,95 persen. Periode RPJMD 2018-2023 IKU persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan layanan pendidikan ditetapkan angka awal sebesar 21,32 persen dengan target sebesar 21,30 persen di tahun 2019 dan terealisasi sebesar 21,30 persen dengan capaian sebesar 99,91 persen.

IKU kedua puluh enam yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. Adapun IKU yang terkait dengan IKU rata-rata lama sekolah (RLS) adalah IKU angka rata-rata lama sekolah (RLS) dengan capaian belum ada data karena belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Jambi. Periode RPJMD 2018-2023 IKU rata-rata lama sekolah (RLS) ditetapkan angka awal sebesar 10,68 persen dengan target sebesar 10,68 persen di tahun 2019 dan terealisasi sebesar 10,68 persen dengan capaian sebesar 100,00 persen.

Tabel 3.42.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 17 (KETUJUH BELAS)

N	SASARAN	INDIKAT	ANG	2018	2019	TARG
---	---------	---------	-----	------	------	------

O		OR KINERJ A	KA AWA L RPJ MD	TARG ET	REALIS ASI	% CAPAI AN	TARG ET	REALIS ASI	% CAPAI AN	ET AKHI R RPJM D
1 7.	Mengenda likan angka kelahiran penduduk	Cakupan PUS peserta KB yang berKB	77,0 0	87,00	84,00	96,55	N/A	N/A	N/A	87,00
		Laju pertumb uhan pendudu k	N/A	N/A	N/A	N/A	1,05	-	-	1,01
		Persenta se jumlah keluarga sejahtera	N/A	N/A	N/A	N/A	96,23	96,04	99,80	97,15

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kedua puluh tujuh yaitu laju pertumbuhan penduduk dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. Adapun IKU yang terkait dengan IKU laju pertumbuhan penduduk adalah IKU cakupan PUS peserta KB yang berKB dengan capaian dengan capaian sebesar 96,55 persen. Periode RPJMD 2018-2023 IKU laju pertumbuhan penduduk dengan target sebesar 1,05 persen di tahun 2019 dan belum ada data capaian karena belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Jambi.

IKU kedua puluh delapan yaitu persentase jumlah keluarga sejahtera dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama

berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. Periode RPJMD 2018-2023 IKU persentase jumlah keluarga sejahtera dengan target sebesar 96,23 persen terealisasi sebesar 96,04 persen dengan capaian sebesar 99,80 persen pada tahun 2019.

Tabel 3.43.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 18 (KEDELAPAN BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKAWAL RPJMD	2018			2019			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
18.	Meningkatkan kesetaraan gender	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan	47,00	70,00	84,00	120,00	N/A	N/A	N/A	70,00
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang	19,00	30,00	31,00	103,33	N/A	N/A	N/A	30,00

	mendapat pelayanan hukum								
	Indeks pembangunan gender	94,89	N/A	N/A	N/A	94,90	94,46	99,54	94,95
	Indeks pemberdayaan gender	68,07	N/A	N/A	N/A	68,10	69,83	102,54	68,50

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kedua puluh sembilan yaitu indeks pembangunan gender dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU yang terkait dengan IKU indeks pembangunan gender adalah IKU cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan dan pengaduan dengan capaian sebesar 120,00 persen dan IKU cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan hukum dengan capaian sebesar 103,33 persen. Periode RPJMD 2018-2023 IKU indeks pembangunan gender ditetapkan angka awal RPJMD sebesar 94,89 dan pada tahun 2019 dengan target sebesar 94,90 terealisasi sebesar 94,46 dengan capaian sebesar 99,54 persen.

IKU ketiga puluh yaitu indeks pemberdayaan gender dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. Periode RPJMD 2018-2023 IKU indeks pembangunan gender ditetapkan angka awal RPJMD sebesar 68,07 dan pada tahun 2019 dengan target sebesar 68,10 terealisasi sebesar 69,83 dengan capaian sebesar 102,54 persen.

Tabel 3.44.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 19 (KESEMBILAN BELAS)

N	SASARA	INDIKA	ANG	2018	2019	TARG
---	--------	--------	-----	------	------	------

O	N	TOR KINERJA	KA AWAL RPJ MD	TARG ET	REALIS ASI	% CAPAI AN	TARG ET	REALIS ASI	% CAPAI AN	ET AKHI R RPJM D
1	Meningka tkan pemenuh an hak anak	Kelurah an layak anak	2 Kel	17 Kel	12 Kel	70,59	N/A	N/A	N/A	17 Kel
		Persent ase hak anak yang terpenu hi	50,00	N/A	N/A	N/A	70,00	70,00	100,00	100,0 0

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU ketiga puluh satu yaitu persentase hak anak yang terpenuhi dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU yang terkait dengan IKU persentase hak anak yang terpenuhi adalah IKU kelurahan layak anak dengan capaian sebesar 70,59 persen. Periode RPJMD 2018-2023 IKU persentase hak anak yang terpenuhi ditetapkan angka awal RPJMD sebesar 50,00 persen dan pada tahun 2019 dengan target sebesar 70,00 persen terealisasi sebesar 70,00 persen dengan capaian sebesar 100,00 persen.

Tabel 3.45.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 20 (KEDUA PULUH)

N O	SASARA N	INDIKAT OR KINERJA	ANG KA AWAL RPJ	2018			2019			TARG ET AKHI R RPJM
				TARG ET	REALIS ASI	% CAPAI AN	TARG ET	REALIS ASI	% CAPAI AN	

			MD							D
20.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23	N/A	N/A	N/A	60,23	61,29	101,75	52,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU ketiga puluh dua yaitu persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. Periode RPJMD 2018-2023 IKU persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ditetapkan angka awal RPJMD sebesar 60,23 persen dan pada tahun 2019 dengan target sebesar 60,23 persen terealisasi sebesar 61,29 persen dengan capaian sebesar 101,75 persen.

Tabel 3.46.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 21 (KEDUA PULUH SATU)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	2018			2019			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
21.	Meningkatkan prestasi dan	Jumlah sarana dan prasarana	10,00	60,00	60,00	100,00	N/A	N/A	N/A	60,00

	keaktivitas kepemimpinan	, olah raga, seni dan budaya								
	Indeks pembangunan pemuda	50,00	N/A	N/A	N/A	50,00	-	-	52,00	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU ketiga puluh tiga yaitu indeks pembangunan pemuda dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU yang terkait dengan IKU indeks pembangunan pemuda adalah IKU jumlah sarana dan prasarana olah raga, seni dan budaya dengan capaian 100,00 persen. Periode RPJMD 2018-2023 IKU indeks pembangunan pemuda ditetapkan angka awal RPJMD sebesar 50,00 dan pada tahun 2019 dengan target sebesar 50,00 persen belum terealisasi dikarenakan belum dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Jambi.

Tabel 3.47.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 22 (KEDUA PULUH DUA)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKAWAL RPJMD	2018			2019			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
22.	Menurunkan angka PMKS	Rasio peningkatan jumlah PMKS	30,00	60,00	93,14	155,23	N/A	N/A	N/A	60,00

	yang dilayani pertahun								
	Persentase penduduk miskin	9,80	7,30	71,53	979,86	N/A	N/A	N/A	7,30
	Persentase PMKS yang tertangani	60,00	N/A	N/A	N/A	65,00	25,26	38,86	85,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU ketiga puluh empat yaitu persentase PMKS yang tertangani dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU yang terkait dengan IKU persentase PMKS yang tertangani adalah IKU rasio peningkatan jumlah PMKS yang dilayani pertahun dengan capaian sebesar 155,23 persen dan IKU persentase penduduk miskin dengan capaian sebesar 979,86 persen. Periode RPJMD 2018-2023 IKU indeks pembangunan pemuda ditetapkan angka awal RPJMD sebesar 60,00 persen dan pada tahun 2019 dengan target sebesar 65,00 persen terealisasi sebesar 25,26 persen dengan capaian 38,86 persen.

C. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Kinerja Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2019 disusun dalam bentuk laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Jambi untuk tahun 2019.

Pencapaian IKU Pemerintah Kota Jambi tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD 2023
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1.	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2,33	2,33	2,44	2,85	116,80	2,44
2.	Indeks profesionalitas ASN	N/A	N/A	68,00	54,71	91,18%	88,00
3.	Nilai SAKIP	B	B	B	B	100,00%	A
4.	Indeks survey persepsi korupsi	N/A	N/A	3,65	-	-	3,8
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28%	85,28%	85,50%	83,66%	97,84%	88,5%
6.	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	82,00%	82,00	82,00%	82,00	100,00%	60,00%
NO	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD 2023
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
7.	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	20,00%

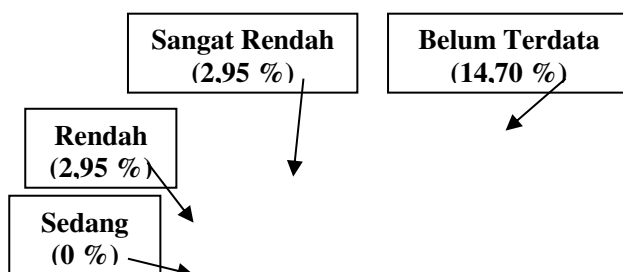
9.	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	20,00%
10.	Cakupan layanan infrastruktur dan utilitas	50,59%	50,59%	53,07%	49,50%	93,27%	85,79%
11.	Indeks kualitas air	43,24	43,24	43,32	38,27	88,00	43,38
12.	Indeks kualitas udara	91,27	91,27	91,30	74,66	81,00	91,45
13.	Indeks kualitas tutupan lahan	60,77	60,77	61,00	39,33	64,00	61,37
14.	Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	20,00%	20,00%	36,00%	63,34%	175,94%	100,00%
15.	Skor pola pangan harapan	87,90%	87,90%	90,50%	90,70%	100,22%	92,5%
16.	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	2,35%	2,35%	2,37%	-	-	2,41%
17.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,00%	4,00%	8,00%	16,09%	201,13%	9,00%
NO	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD 2023
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
18.	Realisasi investasi	410 M	410 M	430,5 M	1.055 T	245,12%	523,37 M
19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	64,96%	65,00%	65,79%	101,21	66,00%

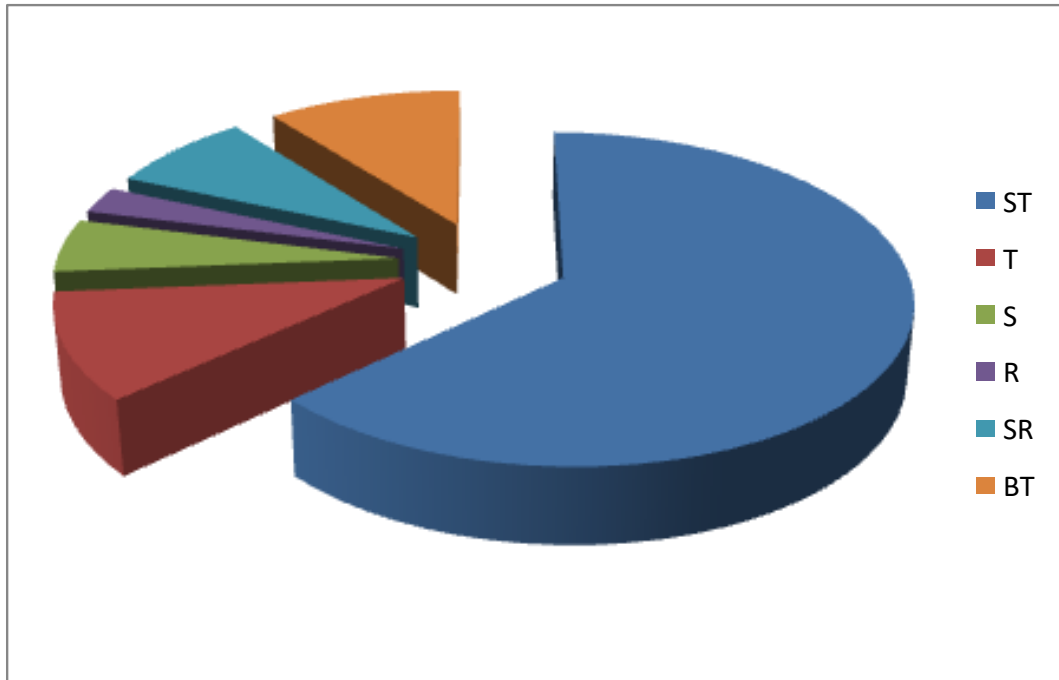
20.	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	7,61%	8,08%	8,08%	100,00%	10,00%
21.	Persentase daya saing produk IKM	4,30%	4,30%	4,30%	19,30%	448,8%	8,30%
22.	Persentase koperasi berkualitas	13,00%	13,00%	16,06%	16,50%	102,73%	36,70%
23.	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34%	72,34%	72,35%	-	-	72,37%
24.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25%	14,25%	14,60%	14,62%	100,13%	14,64%
25.	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan	21,32%	21,32%	21,32%	21,30%	99,90%	4,32%
26.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	10,68	10,68%	10,68%	100,00%	10,72%
27.	Laju pertumbuhan penduduk	N/A	N/A	1,05%	-	-	1,01%
28.	Persentase jumlah keluarga sejahtera	N/A	N/A	96,23%	96,04%	99,80%	97,15%
29.	Indeks pembangunan gender	94,89	94,89	94,90	94,46	99,53%	94,95
30.	Indeks pemberdayaan gender	68,07	68,07	68,10	69,83	102,54%	68,50
NO	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD 2023
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
31.	Persentase hak anak yang terpenuhi	50,00%	50,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%

32.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23%	60,23%	60,23%	61,29%	101,75%	66,00%
33.	Indeks pembangunan pemuda	50,00	50,00%	50,00	-	-	52,00
34.	Persentase PMKS yang tertangani	60,00%	60,00%	65,00%	25,26%	38,86%	85,00%

Dari 34 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Jambi pada tahun 2018, **25 indikator menunjukkan capaian $\geq 91\%$ atau lebih** masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Untuk sejumlah target IKU Pemerintah Kota Jambi yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2019, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 25 indikator menunjukkan capaian **SANGAT TINGGI**, 2 indikator masuk dalam kategori **TINGGI**, 1 indikator masuk dalam kategori **RENDAH**, 1 indikator masuk dalam kategori **SANGAT RENDAH** dan 5 Indikator **BELUM TERDATA**.





Gambar 3.1 Persentase Pencapaian IKU Tahun 2019

D. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah di capai

Bagian sub-bab ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per prioritas pembangunan.

Dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Jambi dalam kurun waktu 2018-2023 telah merencanakan / menetapkan 4 Prioritas dengan 22 sasaran pembangunan dan 34 Indikator Kinerja Utama.

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Upaya mengukur profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Tabel 3.3.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Untuk Sasaran ke 1 (kesatu) Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD 2023
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1.	Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,33	2,33	2,44	2,85	116,80	2,44
		2.	Indeks profesionalitas ASN	N/A	N/A	68,00	54,71	91,18%	88,00
		3.	Nilai SAKIP	B	B	B	B	100,00%	A
		4.	Indeks survey persepsi korupsi	N/A	N/A	3,65	-	-	3,8
		5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28%	85,28%	85,50%	83,66%	97,84%	88,5%
RATA-RATA % CAPAIAN					37,52%			81,16%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

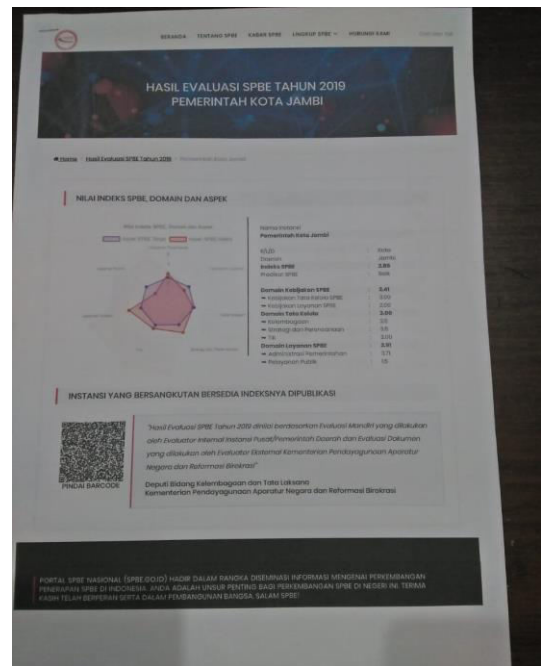
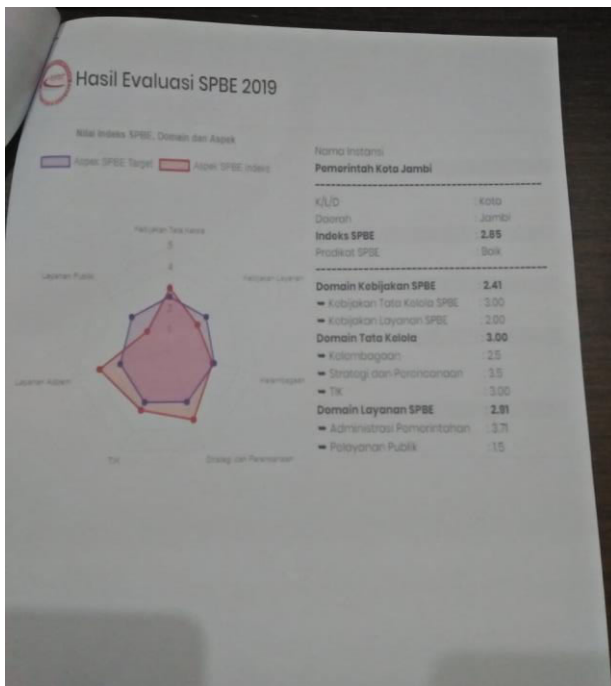
IP ASN ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi dalam rangka pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indikator pengukuran profesionalitas ASN meliputi 4 (empat) dimensi yaitu: a) Kualifikasi 25%, b) Kompetensi 40%, c) Kinerja 30% dan d) Disiplin 5%.

Untuk mencapai sasaran profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK ditetapkan 5 (lima) IKU dengan target yang berbeda. Dalam pelaksanaannya kelima IKU ini dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

IKU kesatu merupakan *leading sector* Dinas Komunikasi dan Informasi dan Sekretariat Daerah yaitu indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan target 2,44 terealisasi dengan indeks 2,85 (Baik) atau dengan capaian sebesar 116,80% masuk dalam kategori SANGAT TINGGI, dimana hasil evaluasi SPBE Tahun 2019 dinilai berdasarkan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh evaluator internal

instansi pusat/pemerintah daerah dan evaluasi dokumen yang dilakukan oleh evaluator eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputy bidang Kelembagaan dan Tata Laksana. Adapun penilaian yang dilakukan terdapat 3 domain, yaitu:

1. Domain kebijakan SPBE : 2,41
 - Kebijakan tata kelola SPBE : 3,00
 - Kebijakan layanan SPBE : 2,00
2. Domain Tata Kelola : 3,00
 - Kelembagaan : 2,5
 - Strategi dan Perencanaan : 3,5
 - TIK : 3,00
3. Domain layanan SPBE : 2,91
 - Administrasi pemerintahan : 3,71
 - Pelayanan publik : 1,5



IKU kedua merupakan *leading sector* Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kearsipan dan perpustakaan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yaitu indeks profesionalitas ASN dengan target sebesar 68 terealisasi sebesar 54,71 atau dengan capaian 91,18% masuk dalam kategori SANGAT TINGGI, dikarenakan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Adapun rumus pengukuran indeks profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator. Dimensi terdiri dari 1. Dimensi kualifikasi, 2. Dimensi kompetensi 3. Dimensi kinerja dan 4. Dimensi disiplin. Kategori tingkat profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

No.	Nilai	Tingkat Profesionalitas
1.	91 – 100	Sangat Tinggi
2.	81 – 90	Tinggi
3.	71 – 80	Sedang
4.	61 – 70	Rendah
5.	60 ke bawah	Sangat Rendah

Permasalahan

1. Masih rendahnya kualifikasi (pendidikan) ASN untuk dimensi kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan pengukuran itupun kalau pendidikan seluruh ASN berpendidikan Strata 3. Dari jumlah pegawai Kota Jambi sebanyak 6.213 yang berpendidikan S3 hanya 5 orang, S2 sebanyak 327 orang, S1 sebanyak 3.689 orang, DI sebanyak 135 orang, SLTA sebanyak 1.087, SLTP sebanyak 70 orang dan SD sebanyak 70 orang.
2. Masih ada pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan untuk dimensi kompetensi diperhitungkan sebesar 40%. Dari total jabatan struktural yang ada, yang sudah mengikuti diklat PIM sebesar 60,25% atau sebanyak 664 pegawai. Bobot 15% bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan pelatihan dan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki dan bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan pelatihan dan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.
3. Masih banyak jabatan fungsional (staff) yang tidak mengikuti diklat teknis 20 JP dalam setahun.

Solusi

1. Untuk meningkatkan kualifikasi diberi kesempatan pada ASN untuk melanjutkan pendidikan dengan penerbitan surat izin belajar bagi yang melanjutkan dengan biaya sendiri atau penerbitan surat tugas belajar bagi yang mendapatkan beasiswa dari Kementerian, lembaga atau swasta.
2. Diperlukan anggaran yang sangat besar untuk pemberian beasiswa Pemerintah Kota Jambi

3. Untuk diklat kepemimpinan dibutuhkan anggaran yang sangat besar karena masih 39,75% pejabat struktural belum mengikuti diklat tersebut
4. Untuk diklat teknis setiap tahun wajib 20 JP bagi setiap ASN dan untuk memenuhi diklat tersebut dibutuhkan anggaran yang besar
5. Agar OPD aktif mendaftarkan ASN untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan Kementerian, BPSD Kemendagri dan BPSDM Provinsi baik itu kontribusi atau tanpa kontribusi diklat.

BAB VI

PENUTUP

Dari seluruh kewenangan wajib dan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada daerah, Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, agar terpadu dan terarah Pemerintah Kota Jambi, menjabarkannya kedalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) dan kebijakan umum Pemerintah Kota Jambi dan selanjutnya dijabarkan lagi didalam Renstra dari masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing. Selanjutnya untuk implementasi dari Dokumen Perencanaan yang telah disepakati bersama, maka semua program yang ada di masing – masing SKPD dihimpun dan dibahas secara bersama – sama dan selanjutnya dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk merealisasi kegiatan yang telah disusun haruslah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menggambarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun sumber dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan lainnya yang sah.

Untuk menjaga agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, berbagai unsur tetap melakukan pengawasan dan memantau kegiatan dimaksud, baik dari lembaga pengawas intern maupun pengawas ekstern seperti BPK, Badan Pengawas Kota, DPRD, LSM, masyarakat maupun organisasi lainnya.